

FILSAFAT ETIKA POLITIK EKSISTENSIALISME SARTREAN

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan Metode Ilmu Politik**



Disusun Oleh:

NOVADA PURWADI

145120500111033

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
FILSAFAT ETIKA POLITIK EKSISTENSIALISME SARTREAN
SKRIPSI

Disusun Oleh :

Novada Purwadi

145120500111033

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik

Pada tanggal 6 Juli 2018

Ketua Majelis Penguji
 Sekertaris Majelis Penguji

H. B. Habibi Subandi S.Sos. M.A.
Anas, M.Phil

NIK. 20130408409051001
 2012018001161001

Dr. Mohamad

NIP.

Anggota Majelis Penguji I
 Anggota Majelis Penguji II

Wawan Sobari S.IP. M.IP. Ph.D
S R

NIP. 197408012008011009

Dr. Abdul Aziz

Malang, 06 Juli 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo SE., M.Si., Ak.

NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERSETUJUAN
MENYEDIAKAN *TEMPLATE* :
FILSAFAT ETIKA POLITIK EKSISTENSIALISME
SARTREAN

SKRIPSI

Disusun Oleh :
NOVADA PURWADI
NIM. 145120500111033

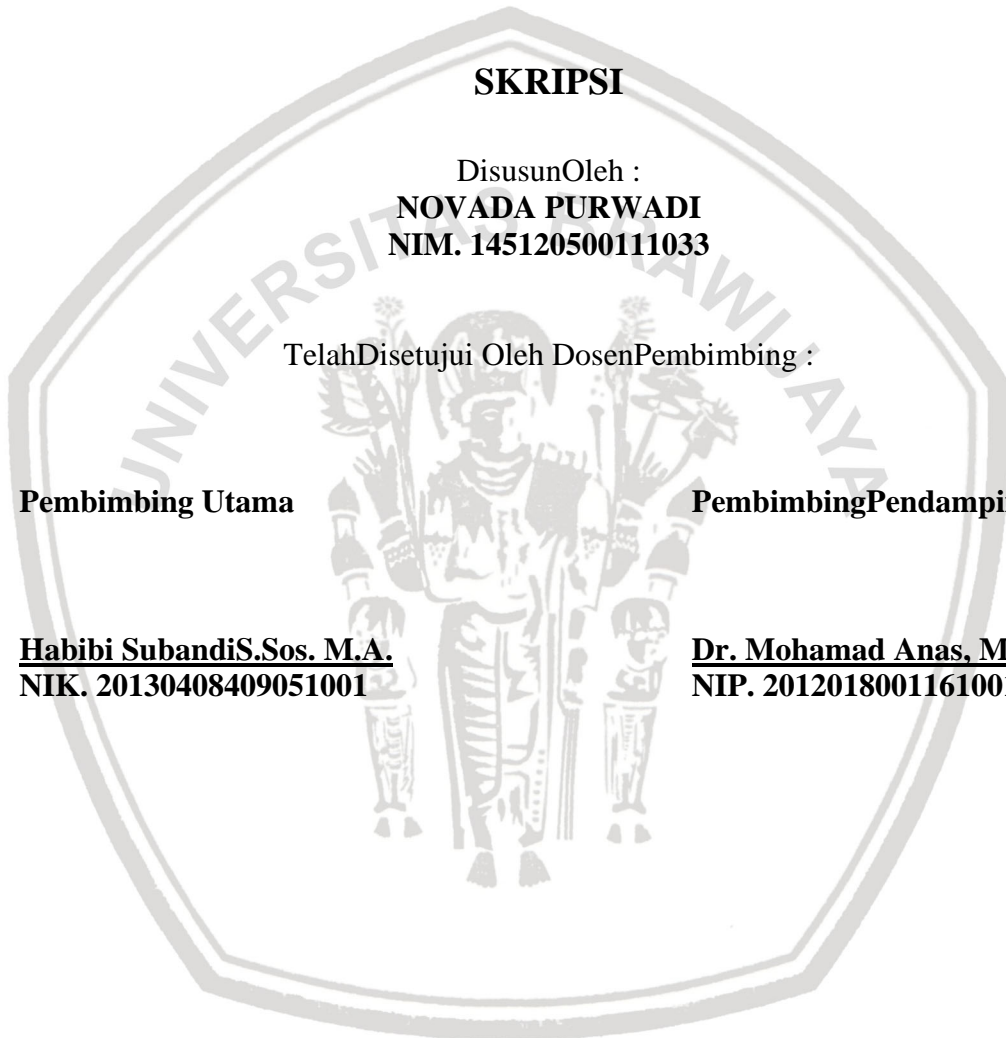
Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

Habibi Subandi S.Sos. M.A.
NIK. 20130408409051001

Pembimbing Pendamping

Dr. Mohamad Anas, M.Phil
NIP. 2012018001161001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Novada Purwadi

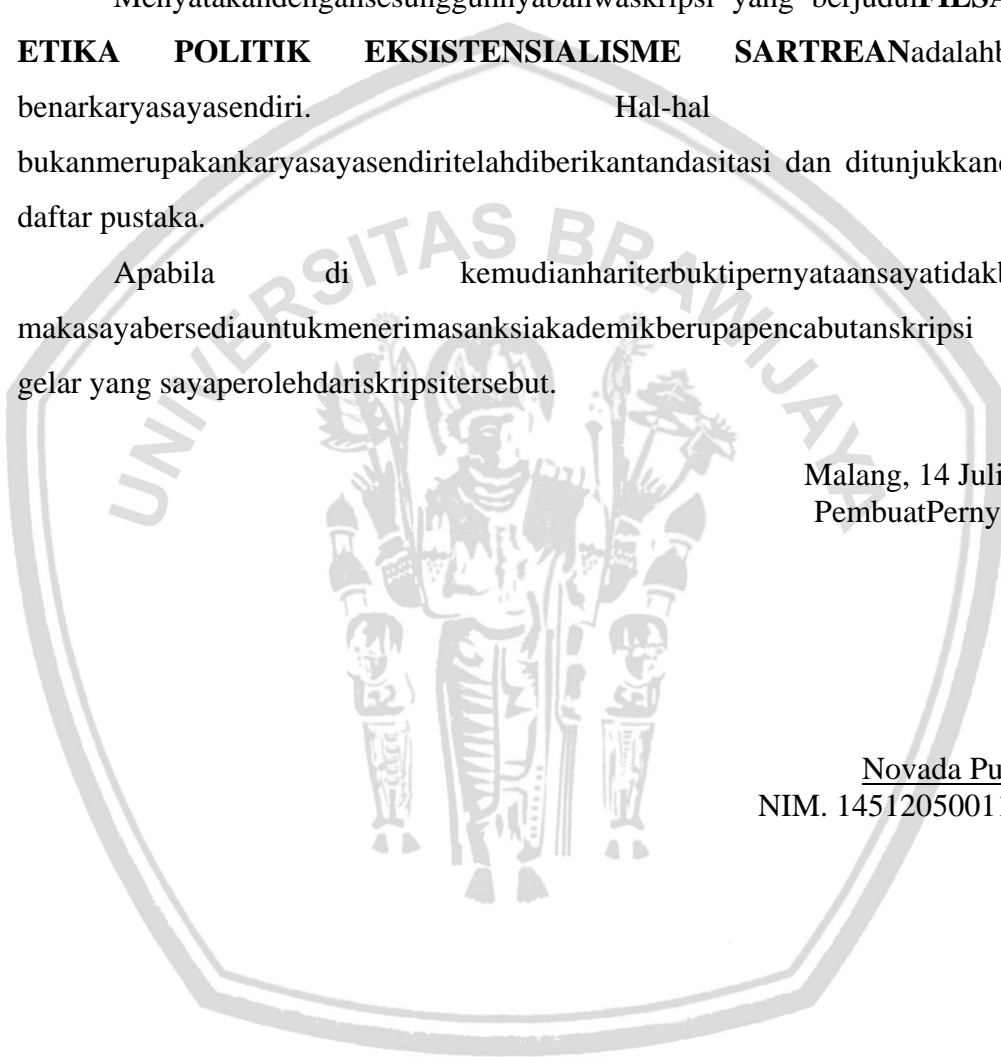
NIM : 145120500111033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **FILSAFAT ETIKA POLITIK EKSISTENSIALISME SARTRE** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya sendiri telah diberikan tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 14 Juli 2018
Pembuat Pernyataan,

Novada Purwadi
NIM. 145120500111033







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Veteran, Malang, 65145, Indonesia
Telp. : +62341 575755; Fax : +62-341-570038
Website: www.fisip.ub.ac.id Email: fisip@ub.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 520 /UN10.F11.15/PP/2018

Lampiran : 2 halaman

Perihal : Hasil *Scanning* Plagiasi

Berdasarkan hasil *scanning* terhadap karya ilmiah mahasiswa:

Nama : Novada Purwadi
NIM : 145120500111033
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Filsafat Etika Politik Eksistensialisme Sartrean

Kami selaku tim deteksi plagiasi menyatakan bahwa karya tersebut mempunyai tingkat plagiasi sebesar:

No.	Data Base	Hasil
1	Online	2%
2	Perpustakaan FISIP UB	0%
Rerata		1,0%

sehingga dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan Ujian Skripsi pada Jurusan/Prodi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 JUN 2018,

Ketua Lab. Komputer FISIP-UB



Indhar Wahyu Wira Harjo, S.Sos., MA.
NIK. 201201860915 1 001

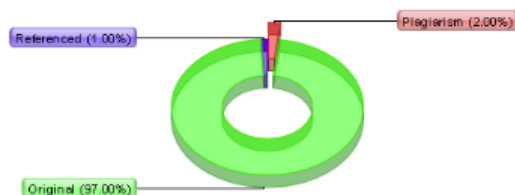
Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 22/06/2018 10.21.47

"Novada Purwadi 145120500111033.docx"

Licensed to: **Fitria Oktarina_License2**

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

→ % 2	wrds: 1654	https://www.kompasiana.com/premiermovada/untuk-akripel-fenomenologi-husserlian-dan-hukum_5...
→ % 0	wrds: 12	https://tiar73.wordpress.com/page/2/
→ % 0	wrds: 12	https://tiar73.wordpress.com/page/2/

[Show other Sources:]

Processed resources details:

154 - Ok / 46 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Google Books:</p> <p>GoogleBooks Detected!</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
---	---	---	---

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:

Act

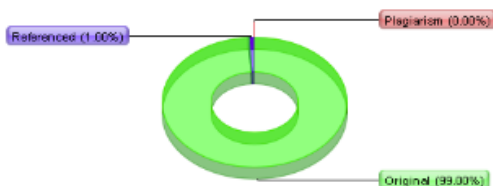
Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 22/06/2018 10.28.41

"Novada Purwadi 145120500111033.docx"

Licensed to: Fitria Oktarina_License2

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

→ % 0,3	wrds: 224	E:\2018\8kripel 2018\POLITIKA SEP NUR HIDAYATULLOH 136120600111017.pdf
→ % 0,2	wrds: 184	E:\2018\8kripel 2018\POLITIKIMETIN DYAH ARTHA 136120607111003, POLITIK KETAHANAN PANGAN NE...
→ % 0,2	wrds: 173	E:\2018\8kripel 2018\POLITIKI136120601111018 TITI8 VARENDA FA8KA.pdf





[Show other Sources:]

Processed resources details:

18 - Ok / 3 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

<p>Wikipedia:</p>  <p>[not detected]</p>	<p>Google Books:</p>  <p>[not detected]</p>	<p>Ghostwriting services:</p>  <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p>  <p>[not detected]</p>
---	--	---	---

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya skripsi ini mampu diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini merupakan sebagian dari ide penulis mengenai bagaimana melakukan reformasi terhadap pemikiran politik di Indonesia maupun pemikiran teoritik bidang keilmuan yang lain. Penulis merasa bahwa ada banyak pemikiran politik di Indonesia yang perlu dirombak ulang demi kemajuan keilmuan politik dan kemajuan peradaban manusia maupun Indonesia. Semoga skripsi ini mampu untuk memberikan sebuah nyala api untuk para ilmuwan politik agar melakukan reformasi ulang terhadap keilmuan politik di Indonesia mulai dari rekonseptualisasi istilah dalam ilmu politik di Indonesia, pembuka kajian-kajian interdisipliner mengenai politik maupun pembuka subdisiplin-subdisiplin baru dalam keilmuan politik di Indonesia. Penulis juga meyakini bahwa dalam skripsi ini perlu dikritik. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik-saran mengenai konten yang dihadirkan di dalam skripsi ini maupun adanya pendiskusan lebih mengenai konsep-konsep yang dikritik maupun yang disajikan di dalam skripsi ini. Atas perhatiannya, penulis memberikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dalam kata pengantar kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

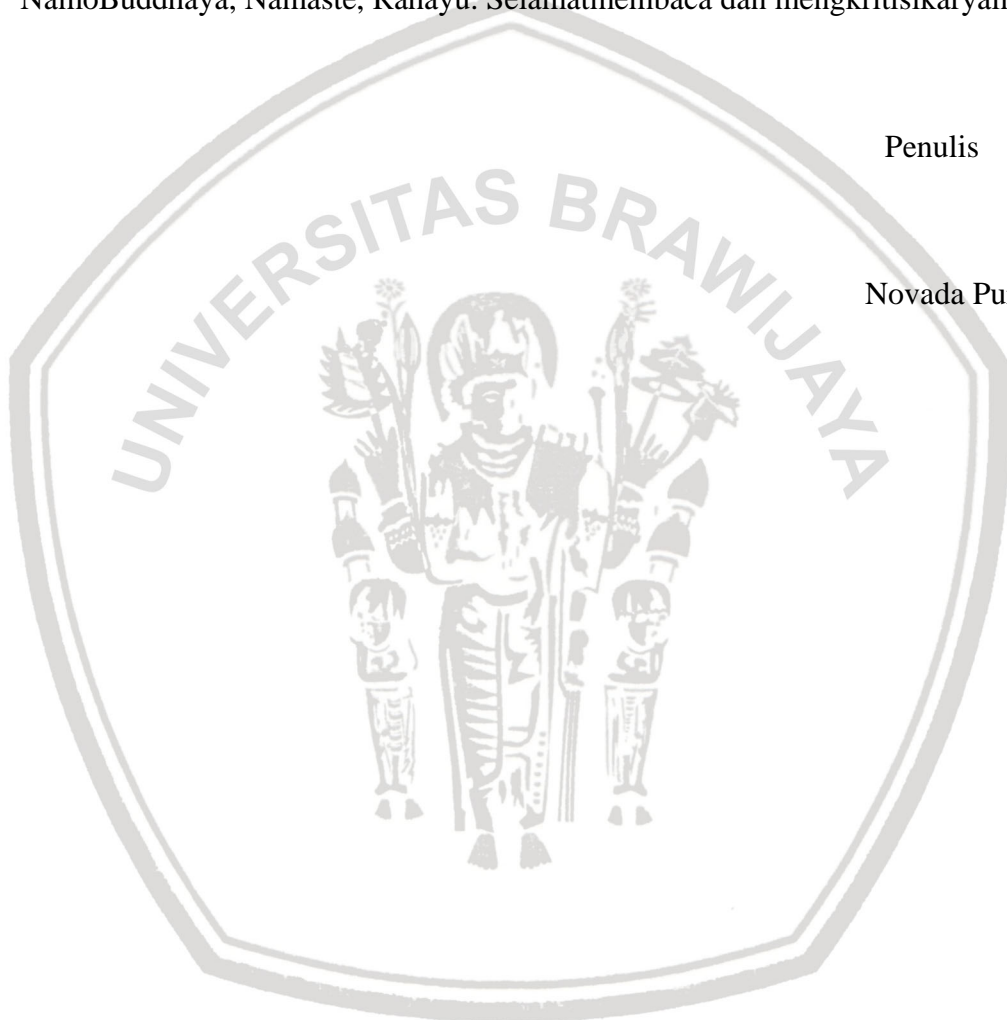
1. Allah SWT yang MahaPengasih dan MahaPenyayang, TuhanSemestaAlam dan Nabi MuhammadSAW sebagaijunjunganpenulisdalamberkehidupan, bermoral dan beragama.
2. Ibu dan Ayah PenulisyaituZulhaida dan Djoko Purwadisebagaiorangtua yang selalumemberikandukunganterhadapsegala yang dilakukan oleh penulisdalamranahpositif.
3. Keluargayaitu Diva RegitaDewi dan ChoironZakariyyasebagaiadikpenulis.
4. Nona N. Terimakasihatasmemori kebahagiaan yang mampuuntukmembuatsayaterusbertahandalamrealitasmenyedihkan dunia ini.
5. Karl Marx, Friedrich Engels, Jean Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Michael Foucault dan intelektual-intelektual lain yang memberikanpengaruhbesar terhadappemikiranpenulismengenaifilsafat, filsafatpolitik dan ilmupolitik.
6. Frans Magnis dan para intelektuaetikamaupunpolitik di Indonesia yang memberikanpemikirannyakedalamkajianilmupolitiksecaraumum dan etikapolitiksecarakhusus.
7. Semuakawan-kawansaya di FakultasIlmuSosial dan IlmuPolitikUniversitasBrawijaya.
8. Semuakawan-kawansaya di kedai kopi Tjangkir13 yang menghabiskanwaktunyauntukberfilsafatbersama dan berdiskusi.
9. Semuakawan-kawansaya di ASF, Komite Pendidikan dan SGMI yang bersama-samabergerakuntukkemaslahatanmasyarakat di Indonesia.

10. Dan segala yang belum bisa saya sebutkan di sini. Saya ucapkan terima kasih atas segala pemikiran, kritik maupun saran yang diberikan.

Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Shalom Aleichem, Namobuddhaya, Namaste, Rahayu. Selamat membaca dan mengkritik karya ini.

Penulis

Novada Purwadi



Abstrak

Novada Purwadi, 2018, Filsafat Etika Politik Eksistensialisme Sartrean, Tim Pembimbing : Habibi Subandi S.Sos. M.A. dan Dr. Mohamad Anas, M.Phil.

Filsafat Eksistensialisme Sartrean merupakan sebuah filsafat yang cukup dominan pada era 1940-1980an dalam pemikiran filsafat maupun filsafat politik. Namun mengenai Etika politik Sartrean, tidak banyak yang merumuskan tentang itu. Bahwasanya filsafat etika politik Sartrean didasarkan pada karya Sartre sendiri yang condong filosofis dalam Notebook for an Ethics yang dirumuskan konsep-konsep filosofisnya atas kondisi politik terkini oleh beberapa pemikir di masa lalu, yakni mengenai tindakan kekerasan, kebaikan dan tindakan etis. Namun masalahnya adalah jarang ada penulis yang menggambarkan kaidah nilai yang dapat dipraktikkan secara riil untuk menyelesaikan dilemma-dilemma moralitas dan etis pada ranah realitas politik (real politik) dan pada ranah tindakan politik. Urgensi dari skripsi ini adalah untuk menciptakan beberapa nilai-nilai demikian untuk dikaji ulang, dikritisi maupun dikembangkan oleh pemikir-pemikir lainnya.

Skripsi ini menuliskan mengenai kaidah-kaidah nilai yang muncul dari filsafat etis-politis Sartrean yang dapat digunakan sebagai pemecah dilemma moralitas dan aksiologi atas tindakan-tindakan politik. Ada beberapa nilai yang muncul yakni Otentisitas, Netralitas, Kebebasan, Kemuliaan, Konsekuensi, Keteraturan, dan Intersubjektifitas. Lalu dilanjutkan dengan aplikasi nilai-nilai ini pada praksis yang dicontohkan pada kasus-kasus kontemporer.

Kata Kunci : Filsafat Etika Politik, Eksistensialisme.

Abstract

Novada Purwadi, 2018, Sartrean Existentialist Political Ethics, Supervisors :Habibi SubandiS.Sos. M.A.dan Dr. Mohamad Anas, M.Phil.

Sartrean Existentialism is a prominent epistemology on the 1940-1980s regarding philosophy and political philosophy. Yet there is scarcity among philosophers and theorists who dabble inside the field of practical political ethics that used this epistemology to form some practical guidelines and values regarding practical politics. Only a few that we can find, such as ethics on violence, acts of goodness and ethical acts. Usually those philosophers still use the context of pure ethics to analyze those phenomenon.

There are an urgent need to formulate ethical principles and values from Sartrean Existentialism and articulate it into practical politics praxeology. Those practical politics praxeology are aimed to solve moral and ethical dilemmas regarding political actions and situations and also to assure that actions would carried out ethically. These urgencies are the primary reasons why this undergraduate theses are made.

This undergraduate theses tries to formulate practical principles and axiological values, and we also tries to articulate this into usable solutions for contemporary ethical dilemmas in contemporary political situations that occurred in this time. There are some values that we can form, that is Authenticity, Neutrality, Freedom, Consequentialism, Honor, Order and Intersubjectivity.

Keywords : Political Ethics, Existentialism, Jean-Paul Sartre.

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	xii
-----------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Alur Pemikiran.....	16
F. TinjauanPustaka.....	18
G. MetodePenelitian.....	23

BAB II GAMBARAN ETIKA POLITIK EKSISTENSIALISME DI LUAR SARTRE

A. Eksistensialisme	26
B. Etika.....	79

BAB III NILAI-NILAI AKSIOLOGIS EKSISTENSIALISME SARTREAN

A. KonsepFilsafat Sartrean.....	120
B. Nilai Aksiologis Eksistensialis.....	153

BAB IV ARTIKULASI NILAI-NILAI ETIS EKSISTENSIALIS SARTREAN PADA REALITAS KONTEMPORER

A. EtikaPolitikEksistensialisme dan PersoalanKebangsaan.....	202
B. KonsiderasiPraksiologis-Elektoral.....	205
C. PembacaanKondisiKontemporer.....	215
D. ContohKasuistik.....	261

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	266
B. Dampak.....	267

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini banyak permasalahan etis yang terjadi di masyarakat, baik itu etika personal, etika sosial maupun etika profesional dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat banyak menganggap bahwasanya krisis yang terjadi di ranah masyarakat merupakan krisis etika dan moral dimana dianggap masyarakat tidak mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang ada pada masyarakat itu sendiri sehingga tindakan serta sikap yang dilakukannya memberikan dampak yang negatif kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Seringkali kaidah-kaidah yang digunakan sebagai acuan adalah kaidah moral agama yang tingkat kebenarannya dianggap absolut oleh masyarakat. Mungkin memang benar kaidah moral agama memiliki tingkat kebenaran yang absolut dimana kaidah agama berasal dari wakil Tuhan di muka bumi yakni para nabi maupun tokoh-tokoh yang prominen di agama tersebut dan mampu mendapatkan kaidah ini langsung dari pengalamannya yang bertemu dengan Tuhan ataupun diberikan informasi oleh Tuhan melalui perantara lainnya (malaikat, wahyu dan sebagainya). Kaidah-kaidah agama ini memberikan hukuman yang ada pasca kehidupan dimana manusia akan dihukum sesuai apa yang ia lakukan di dunia seperti adanya neraka (Jahannam di Islam dan Yahudi, Purgatory di Katolik dan sebagainya). Namun apakah kaidah-kaidah ini cukup untuk mempengaruhi etika personal dan sosial di masyarakat? Bagi sebagian orang tentunya cukup¹, bagi sebagian orang lain tidak².

Bagi sebagian orang lain yang merasa kaidah agama tersebut cukup untuk mempengaruhi etika personal maupun sosial mereka, bisa jadi mereka memahami eksistensi mereka berkaitan dengan agama secara ontologis maupun secara ontikal. Pemahaman eksistensial mereka secara ontologis terhadap relasinya dengan kaidah agama tentu jarang dimiliki oleh sebagian besar orang, tetapi beruntunglah bagi yang memiliki pemahaman seperti itu dimana mereka sudah memiliki posisi yang jelas dalam ranah religiusitas. Mereka sudah mampu menentukan posisi mereka sebagai keberadaan manusia (*Dasein*³) dan relasinya atas kaidah materiil-formil agama, tindakan-tindakan religius maupun posisi mereka terhadap

¹ Proios. 2016. The Influence of Religiosity on Moral Judgment in Sport. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, hlm.1

² Marc, Hauser & Peter, Singer. 2005. Morality Without Religion. Project Syndicate, hlm.1

³ Dasein adalah konsep dari Heidegger dimana manusia manusia sebagai keberadaan yang harus mencoba memahami dirinya sendiri, keberadaannya dan kemanusiaannya sendiri. Lihat Heidegger, Martin. 1962. *Being and Time*. Malden, MA: Blackwell, hlm.10

Tuhan sehingga mampu untuk menjalankan kaidah agama secara hakiki dan relasinya terhadap etika sosial. Namun jika pemahamannya bersifat ontikal sekalipun, jika mereka memahami secara tekstual dan memiliki persamaan dan kesetujuan etikal terhadap etika yang ada di agama tersebut, beruntunglah juga karena mereka mampu untuk hidup dengan konformitas di dalam ideologi agama tersebut dan merasa bebas karena tidak perlu membohongi diri mereka dan melakukan tindakan etikal berdasarkan keyakinan yang buruk (*bad faith*⁴). Sehingga mereka sekalipun tidak otentik dalam beragama, mereka masih terkontrol sebagai konformis automaton dalam menjalankan etika religius.

Dalam ranah manusia-manusia yang tidak merasa etika religius mampu untuk mempengaruhi etika personal mereka maupun etika sosial mereka, tentu akan muncul disjungsi etikal dalam kehidupan mereka. Bagi manusia-manusia ini yang mampu untuk melakukan analisis secara ontologis dan memahami ontologi dirinya dan relasinya kepada ontologi agama maupun ontologi moral religius, bisa jadi mereka menentukan etika dan moralitasnya sendiri. Contohnya adalah orang-orang deis, agnostik dan ateis yang mampu untuk berlaku secara etis dalam kehidupan di masyarakat⁵. Apapun moralitas yang mereka anut, apapun etika yang mereka anut, seringkali tidak berdisjungsi dengan nilai-nilai etis universal yang ada di masyarakat, kecuali jika mereka menyatakan identitasnya secara gamblang kepada orang-orang yang belum bisa menerima identitas non-religius tersebut dan menjadi korban perilaku-perilaku ad-hominem di masyarakat tanpa mempedulikan etika personal maupun etika sosial dan tindakan serta pengalaman yang ia telah lakukan selama berkehidupan di masyarakat. Namun tidak semuanya masyarakat ireligius etikal, seperti ireligius radikal yang ingin memaksakan moralitas dan etikanya kepada masyarakat lain yang percaya terhadap religiusitas tertentu dan langsung melakukan penghakiman bahwa religiusitas memberikan kemunduran berpikir dan ketidakmampuan untuk melakukan analisis secara ontologis. Orang-orang yang melakukan hal ini bisa jadi mereka menganalisis secara ontologis berdasarkan pengalaman-pengalaman kolektif historis yang menyejarah dimana ada momen-momen tertentu yakni agama-agama yang memiliki momen masa gelapnya. Atau hanya sekedar orang-orang yang menganalisis secara ontikal berdasarkan pengalaman buruknya terhadap agama atau masyarakat religius tertentu yang mengekang dirinya melakukan suatu tindakan atau keinginan tertentu.

⁴ *Bad faith* adalah konsepsi Sartre mengenai sebuah keberadaan yang menyangkal keberadaannya sendiri berdasarkan negativitas dalam keberadaannya, *Bad faith* lahir dari kepercayaan atas suatu keberadaan tertentu yang tidak dilacak kebenarannya. Lihat Sartre, Jean-Paul. 2003. *Being and Nothingness*. Abingdon : Routledge, hlm.47-70

⁵ Kai, Nielsen. 1964. *Ethics Without Religion*. Ohio : Ohio University Review, hlm.7

Tipe lain dari orang-orang yang tidak mampu menganalisis secara ontologikal yakni hanya dengan ontikal, adalah dimana ia masih mengaku religius dan memiliki agama namun memilah konsiderasi etikal dan religiusitas yang pragmatis bagi dirinya. Bagi orang-orang seperti ini, kaidah agama hanya dipilah apa yang ia butuhkan sesuai dengan sudut pandangnya dalam melihat dunia. semisal ia merupakan orang yang hedonistik dan pragmatis, kaidah agama akan digunakan untuk memuluskan kesenangan hedonistiknya dan tujuan utamanya, baik di ranah dunia maupun akhirat adalah utopia eudaemonistik dalam bentuk keduniaan, yakni dengan menggunakan kaidah etik dan moralitas agama untuk mempermudah impian keduniawiannya, semisal dengan berpura-pura bermoral religius seperti anti terhadap kemesuman maupun isu-isu moral religius lainnya untuk mendapatkan pengaruh politis terhadap suatu faksi tertentu, atau orang-orang yang berpikiran eudaemonistik di akhirat seperti orang-orang yang mengharapkan surga dan segala kesenangan di dalamnya dengan mencari cara-cara tercepat untuk memasuki surga. Orang semacam ini biasanya akan mencari-cari kaidah ritualistik maupun moralitas yang dianggap cepat memasuki surga, seperti dalam melakukan ritual tertentu yang berpahala besar dan terkadang lupa ritual yang lain ataupun kaidah moralistik yang dianggap tidak penting, atau melakukan kaidah moral yang berpahala besar dan lupa kaidah moral lain yang seharusnya sama pentingnya namun tidak berpahala besar dan tidak dianggap mempercepat langkahnya memasuki utopia tersebut di akhirat.

Setelah beberapa orang menganggap bahwasanya kaidah-kaidah religiusistik tidak mampu untuk diterima oleh semua orang, ada yang menteorikan hukum-hukum sekulerlah jawabannya. Dengan adanya norma hukum yang hukumannya secara langsung, aparatusnya berbentuk nyata (yakni manusia dan segala teknologi kekuasaan yang digunakan oleh manusia tersebut untuk mengimplementasikan kekuasaannya) maupun konsekuensinya yang langsung dapat diterima dan pengawasannya yang tidak imajiner. Namun apakah memang benar efektif kaidah hukum sebagai kaidah etikal yang mampu mengawasi masyarakat? Dalam masyarakat sekarang ini, panoptisasi dan pendisiplinan yang dilakukan melalui hukum memang lebih efektif dibandingkan kaidah religiusitas yang menciptakan manusia-manusia hipokrit (walaupun kaidah religiusitas secara moral sempurna, namun banyak manusia yang lebih mudah melanggar karena kesempurnaan tersebut tidak memberikan celah untuk kontradiksi moralitas dalam praktek represinya, seperti tidak bolehnya manusia membunuh orang lain yang berbeda agama jika seseorang yang berbeda agama tersebut tidak melakukan hal apapun yang merugikan penganut agama yang lainnya, dibandingkan dengan hukum sekuler yang bisa diganti sesuai kehendak para perumusanya, tidak bolehnya membunuh orang yang berbeda

agama dan tidak bersalah apapun adalah kehendak Tuhan yang absolut dan memang maha-benar, tetapi justru kehendak manusia-manusia yang tidak sejalan dengan deontologi dan tautologi agama namun tidak berani untuk keluar dari ranah agama atau tidak berani menghadapi konsekuensinya baik di dunia (seperti diusir, dibenci dan sebagainya) maupun di akhirat (neraka, hukuman Tuhan dan sebagainya) memilih untuk menjadi manusia-manusia hipokrit) karena memang kaidah hukum memberikan efek jera yang nyata kepada para pelanggar-pelanggarnya maupun dirumuskan oleh manusia secara langsung sehingga memenuhi kehendak sebagian orang yang merumuskannya dibandingkan kaidah relijiusitas yang tidak nyata ancamannya maupun berasal dari kehendak Tuhan yang dimana manusia-manusia yang sudah diturunkan di bumi tidak ikut merumuskan kehendak tersebut.

Tetapi hukum juga memberikan pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah benar hukum yang dibuat oleh manusia mampu untuk menjadi landasan etis dari kehidupan manusia itu sendiri? Apakah orang-orang yang membuat hukum dilandasi atau tidak dilandasi oleh kaidah-kaidah etis lain yang membuatnya memiliki kehendak untuk membuat hukum tersebut? Ini merupakan pertanyaan yang diperdebatkan oleh ahli-ahli hukum, apakah memang hukum secara per se merupakan sebuah kaidah yang independen dan dilandasi oleh etika luhur yang metafisis ataukah memang hukum merupakan sebuah hasil dari kontestasi kehendak dari para pembuatnya dimana mereka juga memiliki landasan-landasan etis masing-masing baik secara personal maupun secara sosial. Etika merekapun juga dilandasi oleh budaya, masyarakat dan lokalitas dimana mereka tinggal sehingga landasan etika luas berbentuk hukum yang mereka ciptakan sekalipun merupakan hasil dari dialektika segala faktor yang mendasari kehendak para perumusny masing-masing.

Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang bersifat filosofis. Jika memang hukum terpisah dari kehendak pribadi dari pembuat-pembuatnya dan secara langsung memang hasil dari kehendak seluruh masyarakat yang digali oleh para perumusny, maka pertanyaannya secara deontologis mengapa terjadi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dari hukum itu sendiri? Padahal seharusnya jika memang itu merupakan kehendak rakyat yang secara metafisik entah dari mana mampu dihipunkan oleh para pembuatnya, maka seharusnya sudah sejalan dengan sempurna. Di satu sisi juga ada pertanyaan jika memang hukum merupakan kehendak dari perumus-perumusny, mengapa tidak seluruh masyarakat dilibatkan dalam perumusan tersebut dengan satu atau cara lainnya, namun justru ada elit-elit berprivilese yang memiliki kewenangan dan hak untuk membentuk hukum tersebut dimana tidak menyertakan masyarakat secara keseluruhan namun dianggap telah mewakili masyarakat

secara keseluruhan untuk menentukan etika, etiket dan moralitas yang harus dianut dan dipatuhi oleh masyarakat dalam yurisdiksinya.

Tetapi memang yang diperlukan bukan hanya demikian, jika memang etika personal mampu untuk mempengaruhi etika yang bersifat sosial secara deliberatif dan intersubjektif, maka etika personal apakah yang mampu untuk digunakan demi terjadinya sebuah etika sosial yang dapat menjadi landasan secara optimal bagi masyarakat. Telah banyak kajian tautologi yang berusaha untuk merumuskan, namun memang tidak ada yang sepenuhnya sempurna. Kajian tautologis hanya akan mampu untuk mengeksplorasi sudut pandang pemikiran yang bersifat filosofis untuk dibuat kaidah tautologinya, lalu aksiologinya dan akhirnya masuk menuju aksiologi. Sekalipun begitu, jarang sekali ada kajian tautologis yang dijadikan sebuah pedoman utuh dan sempurna, sekalipun dalam masyarakat yang bersifat totalitarian. Fasisme Jerman sekalipun harus berkompromi dengan adanya bangsa-bangsa lain yang menjadi sekutunya baik itu bangsa-bangsa non-Jermanik seperti Rumania yang campuran Latin dan Slavik, Italia yang Latin dan Jepang yang Asiatik, mereka harus berkompromi dengan Deutschland Uber Allesnya (Jerman diatas segalanya) dimana penerapan deontologis mereka terpaksa harus (antara sementara waktu atau selamanya) berkompromi bahwa ada bangsa-bangsa yang setara dengan bangsa Jerman walaupun Fasisme menyatakan bahwa tujuan mereka adalah menjadi bangsa terkuat di dunia dan memiliki ruang hidup (Lebensraum) yang luas. Hal ini membuktikan bahwa setotaliter apapun sebuah masyarakat, sedikitpun apapun sebuah pemimpin, ia tidak akan mungkin menggunakan sebuah kaidah teleologis tanpa kompromi sedikitpun.

Makadari itu perumusan teleologi tidak dan tidak akan pernah berhenti, konsep teleologi baik baru maupun lama tidak bisa dijadikan sebagai dogma sepenuhnya dan tidak bisa pula dihentikan dengan dinyatakan bahwa sudah ada sistem teleologis yang sempurna dalam mengatur etika, etiket dan moral baik pribadi maupun sosial. Bahkan sistem teleologis yang “sempurna” sekalipun pasti ada perbedaan penafsiran di dalam praksisnya pada setiap orang kecuali jika manusia dibuat menjadi sebuah Hive Mind dimana semua pemikiran manusia dikontrol menjadi 1 jenis dan dikontrol oleh sebuah sarang besar yang dimana manusia tidak bisa menolak perintah sarang tersebut.

Dalam skripsi ini penulis akan mencoba menawarkan salah satu konsep tautologis yang mungkin bisa dipakai menjadi salah satu acuan dari konsep tautologis yang akan dipakai oleh masyarakat Indonesia. Yakni konsep etika politik eksistensialis Sartrean. Mengapa demikian? Karena penulis rasa konsep filosofis yang demikian jarang sekali dibahas maupun dipakai sebagai acuan dari tautologi yang ada. Masyarakat Indonesia seringkali menggunakan konsep-

konsep religius sebagai etika personal (baik secara ontikal maupun ontologikal), etika hukum positivistik sebagai etika sosial, bahwasanya tertangkap melanggar hukum merupakan salah satu pelanggaran etika yang paling berat oleh anggapan masyarakat Indonesia serta konsep-konsep etika politik personal yang didasari oleh budaya, hukum maupun agama. Etika politik yang bersifat ideologis sekalipun tidak jauh-jauh dari etika politik liberalis atau bahkan etika politik yang didasari hanya oleh culture of Honour dan culture of Law⁶. Namun konsepsi Honour ini merupakan konsepsi yang cukup dapat diperdebatkan, apakah memang benar konsepsi Honour (kehormatan/kekesatriaannya) yang dipakai oleh politisi sekarang memang benar-benar konsepsi kekesatriaannya yang sesuai? Ataukah hanya pada ranah ucapan saja tanpa memang benar-benar ada prakteknya? Kenyataannya memang jarang sekali adanya seorang politisi yang benar-benar mampu menjalankan norma-norma kekesatriaannya dalam prakteknya sekalipun norma-norma kekesatriaannya seringkali diucapkan oleh politisi-politisi tersebut sebagai sebuah political spinning bagi masyarakat.

Dalam segi masyarakat yang sadar politik di Indonesia, biasanya etika tidak jauh-jauh dari dua ideologi dominan yakni Liberalisme dan Marxisme sebagai oposisi biner dari Liberalisme. Sebagian besar dari apa yang disakralkan oleh Liberalisme dicap sebagai hal yang profan oleh Marxisme dan sebaliknya. Jarang sekali adanya konsep yang bersifat filosofis selain dua itu dijadikan sebagai lahan perdebatan di ranah etikal oleh masyarakat yang sadar politik seakan di dunia ini hanya muncul dua ideologi beroposisi biner. Eksistensialisme itu sendiri, di ranah Sartrean memang berhutang besar pada Materialisme Dialektik Marx namun juga memiliki sudut pandangnya sendiri dalam konsepsi-konsepsi yang lain dimana eksistensialisme juga memiliki hutang kepada Liberalisme dengan adanya konsep kebebasan. Tetapi tunggu dulu, apakah konsepsi kebebasan yang dimaksud oleh eksistensialisme sama dengan kebebasan yang dimaksud dengan liberalisme? Pertanyaan itu juga akan dijawab dalam skripsi ini, bahwasanya konsiderasi etika dan moral pada kebebasan sekalipun, bisa jadi tidak sama dengan konsep kebebasan yang ditawarkan oleh Liberalisme dan Marxisme.

Kebuntuan pembahasan-pembahasan ini harus dipecah dengan adanya pembahasan-pembahasan hal baru di Indonesia mengenai tautologi dan etika. Etika politik eksistensialisme hanyalah sebuah tabrakan kepada masyarakat intelektual politik Indonesia yang kebetulan berminat mengkaji mengenai etika politik. Tentu banyak sekali etika politik lain yang jauh

⁶ Culture of honour/shame culture didasarkan kepada tindakan-tindakan yang meningkatkan atau menurunkan tingkat sosial seseorang dan biasanya didasarkan kepada penilaian orang lain atas tindakan seseorang atau balasan atas tindakan seseorang, ref : Halvor, Moxnes. 1993. Honor and Shame. Oslo : University of Oslo, hlm.1, sedangkan culture of law adalah dimana seseorang dinilai berdasarkan konformitasnya atas hukum.

lebih kompleks dan progresif dibandingkan eksistensialisme, katakanlah, environmentalisme, anarkisme dan berbagai lain hal. Selain itu juga konsep-konsep filsafat maupun teori politik posmodern juga memiliki kekuatan dan keleluasaan dalam dijadikan sebuah landasan etika politik, semisal foucauldian, rancieran dan sebagainya yang masih luput menjadi pembahasan tentang teori politik di Indonesia dimana pembahasan teori politik di Indonesia (terutama di Brawijaya) masih belum terlalu jauh dari dasar-dasar teori politik gaya lama dan dasar-dasar peristilahan dalam ilmu politik secara umum.

Bagi penulis, ini merupakan sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan dimana realitas akademis kita masih tertinggal sangat jauh dengan masyarakat di luar sana yang sudah membahas mengenai teori-teori terkini nan kompleks tentang politik itu sendiri. Bahkan etika politik sekalipun tidak menjadi sebuah pembahasan yang dominan di Indonesia dan disibukkan dengan permasalahan-permasalahan konflik dan intrik politik serta segala pembahasan tentangnya mulai dari hal yang mendasar seperti motif, relasinya dengan kekuatan politik dan diskursus utamanya dalam intrik tersebut. Namun jarang sekali yang mengkaji secara ontologikal, apakah konflik ini berasal dari sebuah deontologi yang tidak sesuai dengan tautologinya? Ataukah karena ketidakpatuhan terhadap sebuah sistem etikal yang dominan? Ataukah memang karena sistem etika tersebut dibentuk dengan diskursus yang dari awal tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan moralitas masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan demikian seharusnya yang lebih banyak dipertanyakan dibandingkan dengan keadaan kasus intrik dan konflik tersebut serta penelusuran mengenai motif-motif personalnya, sehingga muncul sistem-sistem baru yang mampu untuk mencegah dan menghentikan intrik-intrik demikian.

Namun lepas dari itu semua, pertanyaan-pertanyaan mengenai etika tentunya luas dan tidak hanya melulu tentang permasalahan etika politik saja. Tetapi dalam skripsi ini yang dibahas hanya mengenai etika politik yang didasarkan pada filsafat eksistensialisme Sartrean. Sebelum menuju kepada tinjauan teoritik maupun isi dari skripsi ini, penulis akan sedikit menerangkan mengenai eksistensialisme Sartrean terlebih dahulu.

Eksistensialisme merupakan sebuah epistemologi filsafat dimana adagium dasarnya adalah “eksistensi mendahului esensi”⁷. Tentu akan muncul pertanyaan apa itu eksistensi dan apa itu esensi. Dalam melihat apa itu eksistensi, tentu kita harus memahami terlebih dahulu mengenai penggunaan eksistensi dan esensi dalam ranah filosofis. Hal ini berkaitan dengan

⁷ Satre, Jean-Paul. 1946. *Man Makes Himself*. Public Lecture, hlm.3

kebendaan (*thing*) dan keberadaan (*being*). Yakni eksistensi dan esensi adalah pertanyaan mendasar mengenai sudut pandang dalam melihat keberadaan dan benda itu sendiri.

Dalam filsafat, seringkali muncul pertanyaan yang bersifat dialektis dan oposisi biner, yakni mana yang lebih dahulu muncul, materi ataukah ide? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Descartes bahwasanya yang nyata adalah ide dan rasio manusia, materi bisa jadi hanyalah penipuan setan belaka, yang nyata dari materi adalah apa yang bisa direfleksikan oleh rasio manusia. Namun ada jawaban yang berbeda dari Hume yakni materilah yang nyata dan pencatatan atas keadaan dan eksistensi materi adalah jawaban dari kenyataan itu sendiri bahwasanya memang benar ada eksistensi yang pernah berwujud sesuai dengan pencatatan tersebut serta rasio tidak akan pernah bisa menggambarkan eksistensi benda tersebut secara konkrit kecuali dengan pencatatan empirikal. Kedua jawaban ini dikawinkan oleh Ibn Tufail dari timur⁸ dan Immanuel Kant dari barat (dalam dua periode yang berbeda) dan menyatakan bahwa dua-duanya nyata dan benar-benar ada, namun pertanyaannya adalah apa yang terlebih dulu muncul? Kant dan kaum idealis menyatakan bahwa pusatnya tetap ide dan materi bergerak mengikuti ide secara dialektis. Lantas muncul jawaban berbeda dari kaum materialis yakni Feuerbach, Marx dan yang lainnya dengan menyatakan bahwa materilah yang muncul dan ide/kesadaran/akal bergerak mengikuti materi.

Pada masa selanjutnya, muncul kaum-kaum eksistensial fenomenologis yakni Husserl, Heidegger dan Sartre yang mempertanyakan mengenai apa yang terlebih dahulu, eksistensi dalam materi atau esensi dalam materi menyambung dari pernyataan Kant mengenai *Das Ding Fur Ich* (benda untuk saya/eksistensi) dan *Das Ding An Sich* (benda di dalam dirinya/esensi). Bahwasanya Sartre memiliki jawaban yang cukup brilian menurut penulis, yakni keberadaan dari benda (esensi) dikonstitusikan oleh segala bentuknya (segala macam cara manusia/keberadaan lain memandang benda tersebut, eksistensi) yakni eksistensi terlebih dahululah yang muncul baru esensi. Hal ini sejalan dengan sudut pandang materialisme Marxian Sartre yang tentu menyatakan bahwa ide muncul dari resepsi atas materi, yakni esensi (pandangan ontologikal-reflektif-eksistensial (*existential*)) muncul pasca adanya refleksi atas eksistensi (pandangan ontikal-eksistensiel (*exitentiell*)⁹).

Namun hal itu hanya berlaku atas benda belaka, karena eksistensi manusia bukanlah eksistensi yang bisa ditentukan begitu saja, bahwasanya manusia memiliki eksistensi yang berubah-ubah seiring waktu dan tidak memiliki esensi apapun kecuali ketika ia sudah

⁸ Ibn Tufail. 1999. *The History of Hayy Ibn Yaqzan*. New York : Frederick A. Stokes Company Publishers, hlm. 75

⁹ Heidegger. 1962. *Op.Cit., Being..*, hlm.11

meninggal dunia. contohnya adalah ketika manusia tersebut hidup, ia bisa menggunakan nama yang ditentukan oleh orang tuanya maupun merubah namanya sesuai dengan keinginannya sendiri, namun ketika ia sudah meninggal maka ia akan dikenal sebagai almarhum atau mayat. Sempelnya adalah esensi manusia tersebut sebagai mayat atau almarhum yang tidak bisa diubah-ubah adalah pasca ia meninggal, sebelum itu bisa diubah menjadi apapun sesuai keinginannya. Makadari itu Sartre menyimpulkan bahwa manusia memiliki kebebasan sepenuhnya. Manusia dikutuk untuk bebas menurut Sartre, namun tentunya ada batasan-batasan kebebasan yang dialami oleh manusia berdasarkan keadaan-keadaannya, lingkungannya, historisitasnya, maupun kebebasan orang lain dan segala kesepakatan yang dibuatnya dengan orang lain. Ontologi manusia maupun kebendaan yang dijelaskan oleh Sartre ini akan dijadikan sebuah landasan etikal yang mumpuni untuk dijadikan pertimbangan sebagai etika personal maupun etika sosial dalam berpolitik.

Sartre sendiri menuliskan buku tentang etika yakni *Notebook For An Ethics*, namun belum sampai selesai ia menulis, entah dengan alasan apapun. Penulis skripsi ini tentunya akan menjadikan buku tersebut sebagai bahan pertimbangan utama untuk menuliskan mengenai etika politik eksistensialis Sartrean beserta karya-karya Sartre lainnya. Selain itu jurnal-jurnal maupun karya orang lain mengenai etika secara umum maupun mengenai eksistensialisme secara umum dan eksistensialisme Sartrean juga akan digunakan sebagai landasan berpikir dari penulis dalam merefleksikan sebuah sistem etika politik eksistensialis yang kapabel untuk digunakan sebagai landasan etis kehidupan berpolitik.

Mengapa penulis memilih eksistensialisme sebagai sebuah landasan padahal banyak sekali epistemologi filsafat yang juga mumpuni dijadikan sebagai landasan etika politik? Karena penulis secara pribadi menggunakan analisis eksistensialis dalam memandang banalitas dunia beserta dengan analisis-analisis lainnya yang menurut penulis mumpuni untuk digunakan. Eksistensialisme menurut penulis berusaha untuk memahami relasi antar-keberadaan melalui sisi ontologis dan reflektifnya. Walaupun epistemologi lain juga mumpuni untuk melihat dari sisi ontologis namun menurut penulis belum ada epistemologi yang membasiskan dirinya dalam pengelihatian eidetik pada keberadaan manusia selain eksistensialisme.

Dalam eksistensialisme juga ada beberapa konsepsi dimana penulis cukup tertarik dan mengalami sendiri yakni mengenai penelusuran pribadi tentang *anguish* (penderitaan) dan

otentisitas (*authenticity*)¹⁰. Dalam politik, apakah memang benar-benar ada existential angst yang terjadi terhadap politisi-politisi tersebut ataukah memang politisi tersebut tidak memiliki keinginan untuk *be a politician for the sake of politics*? Atau bahkan mereka tidak memiliki pemahaman ontologis tentang politik dan politisi? Existential angst hanya terjadi kepada orang yang berpikir secara konsekuensial terhadap tanggung jawab identitasnya. Jika ia memilih menjadi seorang politisi maka pada seharusnya pilihan tersebut terletak pada tanggungjawabnya sebagai manusia-identitas pribadinya-politisi. Tanggungjawab pribadinya atas entitas dirinya sebagai politisilah yang seharusnya mampu untuk membuat existential angst.

Namun orang-orang yang menjadi politisi dengan satu dan lain hal yang tidak bertanggungjawab atas profesinya ini dengan adanya diskursus-diskursus non-identitas di pikiran mereka, semisal, dugaan mudahnya adalah menjadi politisi demi alasan ekonomi pribadi, atau perluasan bisnis. Bahwasanya mereka mungkin tidak menjadi politisi for the sake of politics per se, tetapi lebih kepada penunjang dari konsorsium usaha-kroni mereka sehingga tidak ada tanggungjawab par excellence dari identitas mereka sebagai politisi dan tidak mengalami existential angst. Tetapi bisa jadi tanggungjawab par excellence maupun moralitas mereka terletak dalam usaha-usaha mereka dan identitas-identitas mereka yang lainnya, seperti pebisnis maupun seorang kepala keluarga. Mungkin bisa jadi mereka lebih takut ketika bisnis mereka gagal, melakukan kesalahan fatal dalam perencanaan bisnis, kesalahan fatal dalam menggunakan kekuasaan mereka untuk menunjang bisnis pribadi maupun kroninya, sampai kepada ketakutan tidak menjadi anggota keluarga yang baik bagi keluarganya.

Jika memang benar mereka memiliki ketakutan terhadap demikian, maka pilihan identitas mereka bisa jadi jelas, bahwasanya politik dan politisi bukanlah sebagai *being-appearance* mereka dalam *being-for-itself* mereka, tidak memilih dengan kebebasan dan otentisitas mereka dalam identitas politikanya.

Jika mereka memang tidak memilih identitas tersebut maka bisa jadi mereka tidaklah otentik dalam menjalankan kehidupannya sebagai politisi, tidak ada tanggungjawab atas konsekuensi yang mereka lakukan atau mereka hadapi dalam ranah politik per se, kecuali apa yang mengganggu diskursus utama mereka, seperti intrik politik yang mengganggu posisi politik sehingga menjadi halangan bagi stabilitas bisnis dan keluarga mereka maupun hal-hal lainnya. Namun juga bisa jadi akan muncul keputusasaan (*despair*) atas identitas mereka. Bisa

¹⁰ Konsep-konsep ini lebih banyak dipakai oleh eksistensialisme lama, yakni Kierkegaard dan penerus-penerusnya. Sartre juga mengambil kedua konsep ini, namun yang lebih banyak mengambil konsep otentisitas selain Sartre adalah Kierkegaard dan Heidegger

jadi mereka merasakan keputusan ketika mereka menjadi politisi karena memang bukan keberadaan yang mereka pilih secara *per se*. sehingga keberadaan-bentuk (*being-appearance*) mereka tidaklah konsisten, keberadaan mereka sebagai suatu entitas bisnis dan keluarga dihadapkan kepada salah satu bentuk mereka yang inkoheren dengan keberadaan mereka yakni sebagai politisi. Namun mereka tidak bisa berbalik arah atau melepaskan diri mereka dari bentuk politisi ini karena merupakan sebuah penunjang atau tidak ada arah lain dari kehidupan mereka.

Bagi orang lain yang secara ontikal menentukan keberadaan “politisi-politisi” ini sebagai politisi, maka ini menjadikan *being-for-others* mereka sebagai politisi, tentu “politisi” ini tidak akan mampu menolak pandangan (*look/gaze*) dari yang Lain (*Others*, dengan kapital O) sebagai politisi dan akan semakin menambah keputusan mereka dalam menjalankan kehidupannya sebagai politisi. Seakan bahwa mereka tidak mau bertanggungjawab atas kepolitisiannya, namun mengambil untung dari profesi politisi untuk menunjang kehidupan dan keberadaan mereka, namun juga tidak bisa melarikan diri dari krisis eksistensial mereka. Bisa jadi ini merupakan sebuah penjelasan kecil mengenai kenapa banyak politisi merasa berat menjadi politisi berkaitan dengan pekerjaan mereka, bahkan banyak yang tidak berminat politik secara *per se*, namun hanya mengenai intrik politik dan segala keuntungan yang didapatkan oleh mereka berkaitan dengan diskursus utamanya dalam hidup.

Akhirnya kehidupan mereka menjadi absurd, hanya mengulang-ulang apa yang mereka lakukan yakni jika ada masalah politik intrik, diselesaikan dengan intrik dan muncul intrik lagi. Kebijakan tak lebih hanyalah sebuah alat untuk intrik dan kritik maupun formulasi dari kebijakan tak lebih dari sebuah serangan politis kepada lawannya, atau bahkan menjadi sarana *biopower*, biopolitik dan pendisiplinan kepada massa luas. Yakni mereka melupakan tautologi mendasar dari seorang formulator kebijakan publik, bahkan terkesan a-ideologis. Secara apriori bisa dihipotesakan bahwa ideologi tak lebih hanya sekedar sebuah diktum semantik untuk segala tindakan intrik politik maupun kebijakan yang mereka bentuk, walaupun tidak konsisten dengan ideologi yang mereka klaim anut.

Dengan cara pandang yang demikian, segala semantik mengenai politik dan governmentalitas (*governmentality*) tak lebih hanyalah sebuah penanda (*signifier*) dari pendisiplinan massa dan lawan politiknya dalam intrik, karena dari dasarnya diskursus utamanya bukan politik secara *per se*, dan muncul sebuah penyempitan bahwa politik tak lebih dari intrik kotor di ranah pemerintahan. Ini merupakan sebuah hipotesis yang menyedihkan bagi penulis jika memang secara aposteriori begitu adanya.

Namun hal ini tak lebih dari sekedar hipotesis, harus dibuktikan mengenai penelusuran yang lebih reflektif dan filosofis, bahkan jika perlu harus memahami secara langsung para politisi yang sedang mengalami keputusan eksistensial tersebut dengan pendekatan psikoanalisis eksistensial. Namun tentunya tidak mungkin dilakukan dalam skripsi ini karena skripsi ini begitu terbatas dan dibatasi hanya membahas mengenai etika politik eksistensial belaka.

Sedikit latar belakang yang diberikan serta penelusuran fenomenologis penulis mungkin bisa memberikan gambaran mengapa perlu ada etika politik eksistensial, bahwasanya dalam melihat keberadaan seorang politisi perlu ada penelusuran fenomenologis-eidetik untuk memahami secara ontologis pribadinya terlebih dahulu sehingga mampu untuk menjadi seorang politisi yang otentik dan tidak mengalami keputusan maupun penderitaan atas disjungsi keberadaan mereka sebagai politisi maupun keberadaan lainnya. Hipotesis sederhana pun sudah diberikan dalam bagian sebelumnya bahwasanya adanya disjungsi keberadaan inilah dan ketidakotentikan dalam mengambil identitas sebagai politisi merupakan penyebab dari adanya tindakan-tindakan tak bertanggungjawab dari politisi tersebut. Bahkan dengan adanya faktisitas dan pandangan dari keberadaan dan manusia lainnya bahwa ia merupakan seorang politisi semakin membentuk adanya keputusan dalam menjadi seorang politisi.

Etika politik eksistensial ini tentunya akan mengikuti epistemologi eksistensial dan fenomenologis yang lahir dari eksistensialisme serta dibantu dengan definisi-definisi etika baik dari kaum eksistensial (yang utama) dan kaum non-eksistensial yang relevan untuk dipakai serta sudah membahas mengenai ontologi dari sebuah keberadaan. Bahwasanya teori-teori pendukung mengenai disjungsi keberadaan dari manusia itu sendiri dan otentisitas juga diperlukan untuk merumuskan teori etika ini, serta teori-teori politik baik realpolitik maupun metapolitik juga diperlukan untuk memperkuat landasan berdirinya teori ini di ranah politik. Serta dibutuhkan untuk membuktikan adanya relevansi, maka perlu juga teori eksistensial mengenai kekuasaan dan teori turunan dari eksistensial mengenai kekuasaan yang relevan untuk dipakai. Sekian latar belakang dari skripsi ini, selamat menikmati tulisan yang akan disajikan.

1.2.RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana gambaran teori etika eksistensial menurut pemikir di luar Jean Paul Sartre?

2. Bagaimana nilai-nilai etika politik eksistensialis Sartrean yang dapat dipraktekkan dalam *level* aksiologis?
3. Apakah ada contoh kaitan nilai-nilai etika politik eksistensialis Sartrean dengan realpolitik dan metapolitik?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

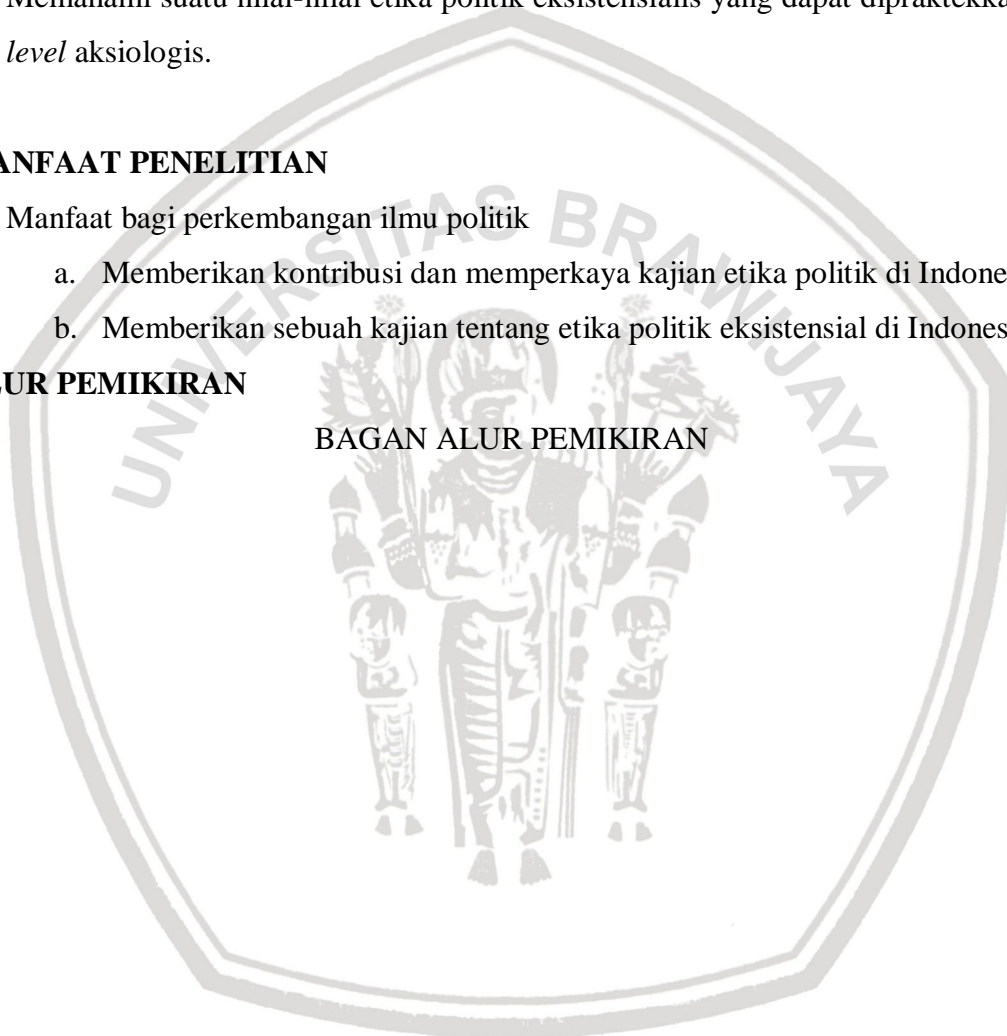
1. Memahami gambaran lengkap teori etika eksistensialis Jean Paul Sartre secara komprehensif dan holistik.
2. Memahami suatu nilai-nilai etika politik eksistensialis yang dapat dipraktekkan dalam *level* aksiologis.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat bagi perkembangan ilmu politik
 - a. Memberikan kontribusi dan memperkaya kajian etika politik di Indonesia
 - b. Memberikan sebuah kajian tentang etika politik eksistensial di Indonesia

1.5.ALUR PEMIKIRAN

BAGAN ALUR PEMIKIRAN





1.6. TINJAUAN PUSTAKA

Pemikiran Sartrean akan dipetakan sebagai berikut¹¹ :

¹¹ <https://plato.stanford.edu/entries/sartre/> Stanford Encyclopedia of Philosophy, diakses pada 10-7-2018 pukul 21:49

- a. Ontologi : membahas mengenai ontologi keberadaan, yakni Sartre memberikan konsepsi mengenai keberadaan (*being*), bentuk (*appearance*), *bad faith* (keyakinan yang buruk) serta konsep-konsep lainnya mengenai keberadaan. Dalam skripsi ini sebagian konsepsi ontologi Sartre diambil untuk memberikan sudut pandang ontologis atas lahirnya Etika Politik Sartrean. Karya-karya Sartre tentang ontologi adalah *Being and Nothingness*, *Critique of Dialectical Reason*, *Search for a Method*, *Truth and Existence* dan *Existentialism and Humanism*
- b. Psikologi : membahas mengenai psikoanalisis Freudian, ego, refleksi dan konsep-konsep psikoanalisis eksistensial lainnya. Contoh karya-karya Sartre tentang psikologi adalah *The Imaginary*, *Transcendence of the Ego*, *Existentialism and Human Emotions* dan *Existential Psychoanalysis*
- c. Seni : membahas tentang karya seni Sartre dan kritiknya atas karya seni orang lain. Contoh karya-karya Sartre tentang seni adalah : *The Words*, *Nausea*, *No Exit* dan karya-karya lainnya.
- d. Etika : membahas mengenai pemikiran etis Sartre dan konsep-konsepnya mengenai tindakan etis. Contoh karya Sartre tentang etika adalah *Notebook for an Ethics*.
- e. Sosial-Politik : membahas mengenai pemikiran politik Sartre (terutama Marxisme dan Komunisme) dan kritiknya atas kondisi kontemporer sosial-politik Perancis pada masanya. Contoh karya Sartre tentang politik adalah : *Situations I-X* (tidak hanya membahas politik, namun seni dan sastra), *Communists and Peace*, *Antisemite and Jew*, *Between Marxism and Existentialism* serta karya-karya politik lainnya yang tersebar dalam bentuk kuliah dan wawancara Sartre yang dimuat dalam berbagai artikel.

Skripsi ini meletakkan diri pada konkritisasi pemikiran Etika dan Sosial-Politik Sartre, bahwasanya pemikiran Ontologis hanya dipakai sebagian untuk menjadi dasar epistemologi dan ontologi Sartrean serta memahami dasar formulasi etika dan pemikiran sosial-politik Sartre. Pemikiran psikologis dan Seni dari Sartre tidak diargumentasikan dalam skripsi ini karena belum ada relevansinya atas etika politik eksistensialisme Sartrean.

Mengenai penelitian terdahulu dari orang lain atas pemikiran etis dan sosial-politik Sartrean akan dipetakan sebagai berikut¹² :

- a. Filsafat Etika Sartrean : beberapa pemikir menuliskan tentang filsafat etika Sartrean dan melakukan penelusuran atas kaidah-kaidah etisnya. Salah satu pemikir penting dari

¹² Banyak dari Jurnal yang penulis masukkan sebagai karya pemikir lain tidak bisa diakses secara penuh karena membutuhkan akun berbayar untuk membacanya, keterbatasan dana dari penulis tidak memungkinkan untuk melakukan registrasi pada situs-situs jurnal berbayar tersebut.

filsafat etika Sartrean adalah Simone de Beauvoir, pasangan dari Sartre sendiri yang berbicara mengenai konsekuensialisme sebagai nilai utama dari pemikiran etika Sartrean. Karyanya yang membahas mengenai ini adalah *Ethics of Ambiguity*. Selain itu juga ada pemikir-pemikir lain yang membahas secara mendalam mengenai beberapa aspek etika Sartrean yakni :

- I. Brad Hooker (2003)¹³ yang membahas mengenai konsekuensialisme aturan, dimana ia menyatakan bahwa etika konsekuensialisme tidak didasari atas tindakan namun faktisitas atau konsep aturan yang mengatur tindakan tersebut. Pemikiran mengenai konsekuensialisme aturan juga dibahas oleh beberapa pemikir lain yang mendasarkan dirinya pada Hooker yakni Jenkins (2014)¹⁴, serta Lorenzo (2017)¹⁵.
 - II. Teori atas tindakan etis yang didasarkan oleh pemikiran filsafat Etika Sartrean ditulis oleh Barata (2017)¹⁶ yang membahas mengenai komparasi tindakan etis dari Sartre dan filsuf lain (terutama Kant dan Aristoteles) dan memformulasikan sebuah teori mengenai tindakan etis.
 - III. Teori etika tertindas (*ethics of the oppressed*) yang mendasarkan dirinya pada konsepsi Sartre bahwa orang yang dapat membentuk etika adalah orang-orang yang tertindas ditulis oleh Anika (2005)¹⁷.
- b. Artikulasi Etis :
- Artikulasi etis membahas mengenai artikulasi pemikiran Sartrean dalam berbagai bidang dan narasi-narasi aksiologisnya. Ada beberapa pemikiran yang muncul dalam artikulasi etis yakni :
- I. Artikulasi etika Sartrean dalam berbisnis, ada beberapa pemikir yang melakukan artikulasi terhadap etika Sartrean dalam berbisnis yakni Agarwal

¹³ <https://philpapers.org/rec/HOOR> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

¹⁴ https://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=phil_gradetds diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

¹⁵ <https://www.wlu.edu/Documents/mudd-center/journal-vol-2/consequential-existentialism.pdf> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

¹⁶ <https://journals.openedition.org/philonsorbonne/1006> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

¹⁷ <https://www.questia.com/library/journal/1P3-999027591/sartre-s-ethics-of-the-oppressed> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

(2000)¹⁸, Ashman dan Winstanley (2006)¹⁹, West (2008)²⁰, Kadirov dan Varey (2011)²¹, Jackson (2011)²², Kleist (2013)²³ serta Sherwood (2017)²⁴.

II. Artikulasi etika Sartrean dalam perumusan tindakan, oleh d'Anjou (2011)²⁵

III. Artikulasi etika Sartrean dalam berpolitik, oleh beberapa pemikir yakni Sutherland (1995)²⁶, La Caze (2003)²⁷, Greenhouse (2008)²⁸, serta O Kara (2011)²⁹.

c. Pemikiran politik Sartrean :

Pemikiran politik Sartrean merupakan pemikiran-pemikiran politik maupun interpretasi atas langkah politik Sartre dalam kehidupannya. Bahwasanya ada beberapa pemikiran yang muncul dari pemikir-pemikir lain tentang Sartre yakni :

I. Anarkisme Sartrean, yakni pemikir-pemikir Anarkis yang menggunakan sebagian konsep Sartrean atau para pemikir politik yang menggolongkan Sartre sebagai seorang Anarkis, bukan lagi seorang Marxis. Ada beberapa pemikir Anarkis Sartrean yakni Cross (2001)³⁰, Betschart (2016)³¹ serta Remley (2018)³²

18

https://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/50307/Agarwal_The%20role%20of%20existentialism_postprint_2000.pdf?sequence=1 diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

¹⁹ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8608.2006.00445.x> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²⁰ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-007-9477-2> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²¹ https://www.anzam.org/wp-content/uploads/pdf-manager/603_ANZAM2011-392.PDF diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

22

<https://books.google.co.id/books?id=2D0Yg7VagnwC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=sartre+business+ethics&source=bl&ots=aK9SS5gKrP&sig=aQNTAVrdNh7FicIq0QFQDJ5SRx0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwic5LH1-pTcAhXLfH0KHaxWAL44ChDoAQhAMAQ> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²³ <https://www.jstor.org/stable/23327209> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²⁴ https://www.ibe.org.uk/UserAssets/OtherPDFs/PGWinner_2017.pdf diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²⁵ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X10000463> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²⁶ <https://www.jstor.org/stable/3232339> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²⁷ https://www.parrhesiajournal.org/parrhesia03/parrhesia03_lacaze.pdf diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²⁸ https://wescholar.wesleyan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=etd_hon_theses diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

²⁹ <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.634.3223&rep=rep1&type=pdf> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

³⁰ Cross (2001), *Communities of Individuals*, Routledge

³¹ <http://www.sartre.ch/Sartre-anarchy-NASS-16.pdf> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

32

<https://books.google.co.id/books?id=LPZLDwAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=sartrean+anarchism&source=bl&ots=CeZF6q2hzf&sig=eKDWjwbms8OgPWFEac4TLqNnHR8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi4xsfgJXcAhVSbysKHVL9A9U4ChDoAQg4MAM#v=onepage&q=sartrean%20anarchism&f=false> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

- II. Interpretasi langkah politik Sartre, yakni pemikir-pemikir yang menginterpretasikan langkah politik Sartre atas Komunisme, represifitas yang dilakukan oleh Uni Soviet maupun terorisme kiri terhadap negara-negara barat, Kapitalisme, Kolonialisme maupun peperangan pada masa Perang Dingin (terutama perang kemerdekaan Aljazair), yang condong berubah-ubah³³ sesuai konteks politik serta kehidupan Sartre di masa tersebut. Beberapa pemikir yang menginterpretasikan langkah politik Sartre adalah Scriven (1997)³⁴, Welten (2005)³⁵³⁶, Seidler (2013)³⁷, Baring (2010)³⁸, serta Gordon (2015)³⁹.

Posisi skripsi ini adalah pada artikulasi etis dalam ranah politik. Dimana penulis akan menggunakan teori-teori Sartrean untuk diartikulasikan dalam bentuk nilai-nilai serta diaplikasikan dalam kasus-kasus realitas kontemporer. Sehingga skripsi ini dapat digolongkan sebagai penelitian artikulatif etika eksistensialis Sartrean dalam ranah realpolitik maupun metapolitik.

Pada dasarnya, skripsi ini mengambil dasar dari pemikiran ontologis Sartrean yang akan digunakan sebagai dasar utama dari pemikiran Sartrean, lalu mengambil kaidah-kaidah etis Sartrean yang dipahami melalui kacamata ontologis Sartrean dan mengaplikasikannya dalam ranah politik kontemporer dengan juga melihat pengaplikasian pada masa Sartre dengan cara memandang konsep-konsep politik Sartre dan sikap-sikapnya atas situasi kontemporer pada masanya. Dengan memahami sikap-sikapnya, dapat diaplikasikan sebagai sikap di ranah realitas kontemporer pada masa sekarang.

1.7. METODE PENELITIAN

³³ Sartre banyak mengubah pandangannya dalam tempo cepat, seperti pada revolusi Hungaria dimana Sartre mendukung Uni Soviet, dan beberapa dekade kemudian Sartre mengutuk Soviet ketika melakukan intervensi ke Cekoslowakia sekalipun kedua negara tersebut sama-sama melakukan reformasi liberal yang pada akhirnya direpresi oleh angkatan bersenjata Soviet. Sartre dicap sebagai orang yang plin-plan antara ia harus setia terhadap Partai Komunis Perancis atau berani untuk mengutuk represifitas yang dilakukan Soviet. Pada era 1950-awal 1960an Sartre condong loyal dan taqlid buta terhadap Partai Komunis Perancis dan membela langkah-langkah kontroversial Soviet, namun pada pertengahan 1960an sampai akhir hayatnya condong mengkritik Uni Soviet dan mendekat kepada Kuba (terutama Che Guevara).

³⁴ <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095715589700802211?journalCode=frca> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

³⁵

https://www.academia.edu/1269987/The_philosopher_and_the_terrorist._Why_Sartre_visited_Andreas_Baader diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

³⁶ https://www.academia.edu/1269976/Sartre_against_Communism diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

³⁷ <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09546553.2013.814501> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

³⁸ <https://www.cambridge.org/core/journals/modern-intellectual-history/article/humanist-pretensions-catholics-communists-and-sartres-struggle-for-existentialism-in-postwar-france/E0087260A817F873C4DF9DFAD8F99739> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

³⁹ <https://lewisrgordon.com/selected-articles/biko-du-bois-fanon-sartre/l-gordon-on-sartre-encyclopd.pdf> diakses pada 10-7-2018 pukul 18:30

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian teori filsafat politik ini menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu:

- a. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yaitu pendekatan yang memakai teks-teks dan sudut pandang konsep dan filosofi untuk menyusun sebuah gambaran keilmuan tentang objek yang tengah dibahas yaitu etika politik eksistensialis dan merefleksikannya secara fundamental⁴⁰.
- b. Pendekatan kritis (*critical approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan perspektif kritik teori dan realitas guna memberikan pandangan penulis atas teori etika politik eksistensialis yang tepat⁴¹.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif mendasarkan dirinya pada penelusuran filosofis dan menariknya kepada realitas imanen dan menginterpretasikannya⁴². Penelitian ini mengkaji pemikiran etika politik eksistensialis. Melalui penelitian ini, penulis hendak mengkaji pemikiran etika politik eksistensialis dengan mendeskripsikan bagaimana gambaran teori etika politik eksistensialis tersebut bekerja dan menunjukkan dasar ontologis dan epistemologis yang lahir dari teori tersebut. Penelitian ini juga hendak memberikan gambaran etika politik eksistensial yang ideal yang dapat dipraktekkan dalam *level* aksiologis.

c. Jenis dan Sumber Referensi

Penelitian filsafat politik ini merupakan suatu penelitian teori yang menggunakan tiga jenis data yaitu:

- a. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah karya Jean Paul Sartre sebagai berikut :
 1. *Being and Nothingness*
 2. *Notebooks for an Ethics*
 3. *Existentialism is a Humanism*
 4. *Between Existentialism and Marxism*
 5. *Communists and Peace*

⁴⁰ Konsep ini dikutip secara tidak langsung dan dimodifikasi seperlunya dari de Stexhe, Guillaume. 1997. A Philosophical Approach to Professional Ethics. St. Louis : University of St. Louis, hlm.1

⁴¹ Disadur dan diartikulasikan dari Fuchs, Christian. 2002. Critical Theory. New Jersey : John Wiley and Sons, hlm. 1-3.

⁴² Mason, Jennifer. 2002. Qualitative Researching. London : SAGE, hlm.3

6. *The Ghost of Stalin*

7. *Antisemite and Jew*

8. *Colonialism and Neocolonialism*

b. Data sekunder berupa literatur penunjang teori etika politik

c. Data tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Teknik Memperoleh dan Analisis Data

Data yang dibutuhkan akan diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi. Penulis memperoleh data tersebut dengan menelusuri Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya Pusat, Perpustakaan Kota Malang, koleksi buku pribadi dan penelusuran melalui internet.

Penelitian Filsafat Politik ini menggunakan interpretasi hermeneutik dan interpretasi komparatif terhadap data yang telah diperoleh.

Interpretasi hermeneutik adalah interpretasi yang mencoba memahami secara holistik (*verstehen*) mengenai teks-teks pemikiran filsafat etika politik Eksistensialisme Sartrean dan konteks pada masanya dan masa depan teori tersebut. Hermeneutika ini menggunakan epistemologi Gadamerian untuk membentuk kontekstualisasi etika politik Eksistensialisme Sartrean⁴³.

Interpretasi komparatif adalah interpretasi yang memperbandingkan konsep-konsep etika yang ada sesuai dengan pandangan para filsuf tersebut. kedua interpretasi itu akan dielaborasi sedemikian rupa guna menjelaskan pokok permasalahan secara komprehensif, radikal dan holistik⁴⁴

⁴³ Subyek dari Hermeneutik adalah segala teks, menurut Gadamer. Gadamer mengkritisi pemikiran Schleiermacher yang terlalu tekstual sehingga harus juga mengembangkan konteks dari pemikiran tersebut. Lihat Gadamer, Hans-Georg. 1989. *Truth and method*. New York: Crossroad., hlm. 178, 186 dan 431. Kontekstualisasi juga dilegitimasi oleh Gadamer karena manusia tidak akan pernah menuliskan 100% sesuai keinginan dari penulisnya tersebut. Lihat Gadamer, Hans-Georg. 1977. *Philosophical hermeneutics*. Berkeley: University of California Press., hlm. 13

⁴⁴ Disadur dan dikontekstualisasikan kepada konsep Etika Politik dari Adiyia, Michael. 2017. *Comparative Research*. Brandon : Brandon University. hlm.2. penulis menggunakan metode “individualizing comparison” untuk memecah partikularitas pemikiran filsafat etika eksistensialisme dari beberapa pemikir dan memecah beberapa konsep pemikiran etis dari para pemikir tersebut dan Sartre untuk direformulasikan sebagai nilai-nilai aksiologis.

BAB II

GAMBARAN ETIKA POLITIK EKSISTENSIALISME DI LUAR SARTRE

Bagian ini akan menjelaskan sepenuhnya historisitas teori Eksistensialisme Sartrean dari para pendahulunya dimulai dari Soren Kierkegaard. Historisitas dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi atas teori-teori Eksistensialis dan memahami historisitas pemikirannya dan memberikan gambaran umum atas Eksistensialisme serta dasar-dasar pemikiran Eksistensialis yang mempengaruhi pemikiran etika dan politis Eksistensialisme Sartrean.

2.1.Eksistensialisme

Dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa konsepsi dasar eksistensialisme yang diwakili oleh tokoh-tokoh eksistensialis terkenal untuk memberikan landasan mengenai epistemologi eksistensialisme itu sendiri yaitu :

2.1.1.Kierkegaard

Soren Kierkegaard merupakan seorang filsuf dan teolog Denmark yang disebut sebagai bapak eksistensialisme. Kierkegaard merupakan seorang pemikir yang mendasarkan dirinya kepada pemikiran-pemikiran ontologis mengenai manusia. Beberapa konsepsi kierkegaard akan dijelaskan di bawah ini

a.*Dread/Anguish* (kekhawatiran/penderitaan)

Menurut Kierkegaard, penderitaan merupakan sebuah penghadapan manusia atas realitas dimana realitas kebebasan adalah kemungkinan-kemungkinan¹. Penderitaan ini muncul karena ketika manusia berhenti bermimpi dan memahami bahwa keberadaannya dan ke-Lain-annya (*Other*) tidak sinkron antara satu sama lainnya. Bahwasanya penderitaan merupakan antipati simpatetik dan simpati antipatetik. Asal dari penderitaan adalah kemurnian (*innocence*) dimana kemurnian hilang ketika dosa dilakukan, dan menginginkan kemurnian itu sendiri berarti melakukan sebuah dosa. Kemurnian bermakna ketidaktahuan (*ignorance*) bagi Kierkegaard.

Bahwasanya ketika manusia memahami bahwa ada kemurnian, dan merasa bahwa ia merupakan makhluk yang murni atau menginginkan kemurnian itu sendiri, dia sudah pada dalam keadaan berdosa akibat keinginannya untuk menjadi murni. Ada negativitas dimana ketika ia menginginkan sesuatu, berarti keberadaannya bukanlah pada keberadaan sesuatu tersebut. Ini menghasilkan adanya penderitaan itu sendiri dimana ia menginginkan adanya sebuah kualitas keberadaan yang lain bagi dirinya.

¹ Kierkegaard, Soren. 1944. *The Concept of Dread/Anxiety*. Princeton : Princeton University Press, hlm.38

Namun ketika manusia tersebut menyadari bahwa ia mampu mengubah keberadaannya menjadi sesuatu yang lain, di situ muncullah kebebasan. Bahwasanya manusia yang memiliki jiwa (*soul*) memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang mampu mengubah mode keberadaannya. Penderitaan itu sendiri bukanlah sebuah determinan dari keharusan maupun kebebasan, ia adalah konsekuensi dimana ketika kebebasan itu tidak mampu diartikulasikan dalam tindakan (*trammeled freedom*)².

Contohnya adalah ketika manusia sebagai jiwa pemimpi (*dreaming spirit*) bermimpi bahwa ia ingin menjadi seorang presiden, namun kenyataan tidak memungkinkannya untuk menjadi seorang presiden namun ia menjadi seorang pengusaha, maka ia akan mengalami sebuah penderitaan atas impiannya (keberadaannya) dan ke-Lain-annya (keberadaannya bagi yang lain). Kierkegaard memberikan analogi dimana ketika Adam tidak melakukan dosa, maka segala kemungkinan yang dipikirkan manusia tidak akan pernah terjadi karena Adam tidak memiliki kemungkinan kecuali diatur kehidupannya oleh Tuhan di surga. Dosa segala manusia diawali oleh dosa Adam.

Dosa manusia berbeda dari dosa Adam, namun membutuhkan sebuah awalan dimana dosa Adamlah yang mengawali segala dosa manusia sehingga muncul dosa-dosa manusia yang begitu beragam dan walau terkadang repetitif antara satu sama lainnya, berbeda dengan dosa Adam. Ada dua jenis dari penderitaan yaitu penderitaan obyektif dan subyektif. Penderitaan obyektif merupakan penderitaan dimana penderitaan tersebut menjadi diderita oleh setiap orang.

Kierkegaard menyebutkan dosa Adam merupakan penderitaan bagi setiap orang (pada masa sekarang, tentu kita memahami bahwa kisah Adam hanya berlaku pada penganut agama abrahamik seperti Islam, Kristen dan Yahudi serta agama-agama baru yang mendasarkan diri pada teologi abrahamik, namun tentunya bagi agama non-abrahamik tidak), karena dosa tersebut merupakan dosa yang menghasilkan penderitaan bagi setiap orang³. Adanya disjungsi antara keberadaan dan ke-Lain-an diawali dari Adam yang seharusnya merupakan makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan ternyata mampu untuk memiliki ketidaksempurnaan dalam kemurniannya. Penderitaan ini akhirnya menjalar ke satu spesies yakni spesies manusia.

Segala manusia (dari sudut pandang teologis Kierkegaard sebagai seorang teolog Kristen Protestan) menerima penderitaan Adam yakni adanya kebebasan sepenuhnya dalam hidup

² Ibid hlm.45

³ Cameron, Ed. 2007. The Ethical Paradox in Kierkegaard's Concept of Anxiety. Clayton : Monash University, hlm.4

di bumi. Tanpa adanya Adam yang melakukan dosa sehingga dibuang ke bumi, tentu tidak akan ada penderitaan bagi siapapun di dunia karena tidak adanya dosa. Penderitaan subyektif lahir dari perasaan bersalah (*guilt*) manusia. Kierkegaard memberikan sebuah penjelasan bahwa dalam kemurnian, ketidaktahuan (*ignorance*) adalah ketidaktahuan pada suatu yang tidak hadir (*ignorance of that which is not present*).

Yakni dalam sesuatu yang tidak ia ketahui dan tidak ia lakukan (seperti pada halnya ketika seseorang tidak memahami adanya kesalahan dalam tindakan dia atau tidak memahami sekaligus tidak pernah melakukan kesalahan dalam tindakan apapun, maka ia dianggap murni. Jika ia sudah memahami adanya suatu pengetahuan tentang dosa atau kesalahan, sekalipun ia tidak melakukannya, ia tidak bisa dianggap murni lagi).

Dalam aspek awal menuju memiliki pengetahuan, manusia melewati fase ketidaktahuan terlebih dahulu, lalu fase ke-malu-an (*bashfulness*, yang diartikan (*shame*) oleh translator karya Kierkegaard). Fase ke-malu-an ini relevan dikaji dalam urusan-urusan kesusilaan dan seksual. Kierkegaard memberikan sebuah penjelasan dimana dalam urusan seksual, muncul sebuah kontradiksi yang dihasilkan relasi antara tubuh dengan tubuh lain yang memiliki perbedaan generik (*generic difference*). Dalam ranah ini, jiwa tidak bisa menemukan poin ekstrim dari sintesis antara keduanya. Muncul sebuah impuls seksual yang dimana ia memiliki sifat *eo ipso a telos* (memiliki tujuan), namun ketika tujuan itu tercapai, jiwa akan merasakan seks sebagai sesuatu yang asing dan komikal karena sudah menguasainya. Pasca itu jiwa akan merasakan adanya ke-malu-an akibat tindakannya.

Penjelasan yang lebih simplistik dan mempolakan adalah ketika pasca manusia melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pemuasan hasrat, manusia dalam jiwanya akan merasa asing dan komikal (lucu) yakni merasa telah berhasil memuaskan hasrat jiwanya, namun di satu sisi ada pertanyaan bagi manusia tersebut, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Jika *telos* sudah tercapai, maka manusia dihadapkan lagi oleh kebebasan dan segala penderitaan atas kebebasan tersebut, adanya kemungkinan yang tidak terbatas atas *telos-telos* yang baru bagi manusia. Hal ini merupakan penderitaan subyektif, sebagaimana efeknya hanya pada seorang subyek tertentu atau subyek lain yang berkaitan, tidak pada seluruh manusia secara keseluruhan.

Dalam ranah penderitaan subyektif, Kierkegaard memberikan sebuah formula yakni ketika ada seorang individu menderita atau mengkhawatirkan bahwa ia akan melakukan sebuah kesalahan, walau ia tidak melakukan kesalahan, jika dianggap salah maka ia akan menjadi salah (*The individual in dread, not of becoming guilty, but of being regarded as guilty, becomes guilty*).

Hal ini terjadi karena ia memiliki pengetahuan tentang kesalahan tersebut dan mampu melakukannya. Kekhawatiran didasari oleh pengetahuan tentang suatu hal terlebih dahulu, jika ia tidak memiliki pengetahuan maka ia bisa menjadi seseorang yang murni, namun tentunya tidak mungkin kehidupan manusia didasari oleh kemurnian sepenuhnya. Menurut Kierkegaard, manusia merupakan sintesis antara yang temporal (tubuh) dan yang *immortal* (jiwa). Bahwasanya manusia yang memiliki sisi temporalitas, tentunya bergerak sesuai dengan temporalitas tersebut yakni dengan waktu.

Adanya kemungkinan-kemungkinan di masa depan merupakan konsekuensi dari temporalitas. Masa depan merupakan syarat memungkinkan kebebasan, dan bagi waktu, kemungkinan terletak pada masa depan (*The possible corresponds precisely to the future. For freedom the possible is the future; and for time the future is the possible.*). kekhawatiran merupakan korespondensi antara keduanya, kekhawatiran merupakan korespondensi atas segala kejadian yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak berlaku pada masa lalu. Jika seseorang merasa khawatir terhadap kejadian di masa lalu akan terulang di masa depan, bagi Kierkegaard maka dia tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahannya (*repentant*) namun memproyeksikan kesalahan tersebut sebagai sesuatu yang akan terjadi di masa depan.

b. Despair/keputusasaan

Kierkegaard membagi keputusasaan menjadi 3 yaitu keputusasaan karena manusia tidak sadar memiliki diri (*in Despair at Not Being Conscious of Having a Self*), putus asa karena tidak mau menjadi dirinya (*in Despair at Not Willing to Be Oneself*), putus asa karena ingin menjadi dirinya (*in Despair at Willing to Be Oneself*). Menurut Kierkegaard, manusia memiliki jiwa (*spirit*), jiwa adalah diri (*self*). Namun manusia adalah sintesis dari yang terbatas (*finite*) dan yang tidak terbatas (*infinite*), sehingga manusia adalah sintesis, manusia bukanlah diri⁴. Relasi keterbatasan dan ketidakterbatasan dari manusia bersifat negatif dan dialektis, kecuali jika manusia mampu merelasikan secara positif maka manusia telah menemukan dirinya. Dengan kata lain, jika jiwa dengan tubuh tidak bersifat kontradiktif satu sama lainnya, manusia telah memahami bahwa ia memiliki diri.

Ketika manusia masih tidak sadar memiliki diri, maka ia tidak lebih dari sekedar manusia yang temporer. Manusia ini akan mengikuti relasi dimana ia tidak otentik dan hanya mengikuti kondisi temporal-spasial yang ada di sekitarnya. Di satu sisi ketika manusia tidak mau menjadi diri, ia akan menegasikan antara jiwa dengan tubuhnya, ia menyangkal

⁴ Kierkegaard, Soren. 1983. *The Sickness Unto Death*. Princeton : Princeton University Press, hlm.9

dan mengalami keputusan atas ketidakkoherensian jiwa dan tubuhnya, semisal ketika seseorang yang merasa jiwanya adalah seorang pemikir, namun ia terpaksa menjadi pekerja kasar, bisa jadi ia menyangkal salah satunya walaupun tetap melakukan kedua hal tersebut atau bisa jadi ia melepaskan salah satunya, namun tetap merasakan adanya keputusan terhadap salah satunya⁵.

Ketika manusia ingin menjadi dirinya, terkadang manusia merasakan keputusan karena ia ingin menjadi dirinya akibat keinginan untuk menghapuskan keputusasaannya. Ia mengalami krisis eksistensial dan berusaha untuk mensinkronisasikan jiwa dan tubuhnya dengan mengalami kekhawatiran serta keputusan terhadap pencarian dan usahanya atas sinkronisasi tersebut. Biasanya hal ini terjadi pada orang-orang yang mencari jati diri, bahkan penulis sekalipun pernah mengalami keadaan demikian ketika penulis berusaha untuk mensinkronisasikan realitas dengan idealitas yang diinginkan agar menjadi manusia yang otentik.

Kierkegaard, dengan analisis relijiusnya, menyatakan bahwa krisis eksistensial yang lahir dari keputusan hanya bisa dilepaskan karena adanya penerimaan atas diri sekaligus penerimaan atas sebuah Kekuasaan (*Power*, dengan kapital P) yang menciptakan relasi dialektis tersebut, yakni mungkin Tuhan, karena yang menciptakan manusia dengan segala relasi di internal maupun eksternal manusia adalah Tuhan. Ketika manusia sudah mampu untuk menerima dirinya sekaligus merefleksikan dirinya atas Kekuasaan yang menciptakan relasi tersebut, maka manusia tidak akan merasa putus asa atas relasi negatif yang terjadi atas jiwa dan tubuhnya di lain waktu⁶.

Singkatnya adalah ketika manusia sudah memahami dan menginginkan adanya sinkronisasi antara tubuh dan jiwa, ketika terjadi disjungsi kembali maka kembali berefleksi atas Kekuasaan yang menciptakan relasi tersebut dan menerima secara kaffah dari keberadaan relasi tersebut dalam segala manusia, tetapi tetap berusaha melakukan sinkronisasi antara tubuh dan jiwa, maka tidak ada efek putus asa karena memahami mungkin bahwa krisis eksistensial tersebut sudah ditakdirkan dan dipolakan oleh Kekuasaan yang menciptakan pola tersebut namun tetap berusaha untuk melakukan sinkronisasi.

Menurut Kierkegaard, keputusan bisa berarti kemalangan maupun keberuntungan. Keputusan merupakan keuntungan manusia terhadap makhluk lainnya dimana manusia

⁵ Janko, Lozar. 2014. Kierkegaard, Heidegger And Us Moderns. Ljubljana : University of Ljubljana, hlm.5

⁶ Pojman, Louis. 1990. Kierkegaard On Faith and Freedom. International Journal for Philosophy of Religion, hlm.10

yang tidak sinkron antara jiwa dan tubuhnya berarti memiliki posibilitas yang tidak terbatas dalam ketidaksinkronan tersebut, bahwasanya manusia bisa menentukan eksistensinya yang terpisah dengan esensinya.

Dalam ranah hewan, semisal kucing, kucing tidak akan pernah mampu menjadi makhluk lain maupun menentukan identitasnya sendiri kecuali jika ia ditentukan identitasnya oleh manusia (diberi nama), itupun masih pada ranah penentuan eksistensinya oleh manusia. Sedangkan manusia mampu memisahkan antara jiwa dengan keberadaannya, pemisahan antara esensinya yang pada seharusnya namun melakukan kegiatan lain dalam kehidupannya yang tidak ada hubungannya dengan esensi tersebut. Konsekuensi dari ketidakberuntungannya adalah krisis eksistensial tersebut, bahwasanya manusia merasa kehidupannya tidak sinkron dan mengalami keputusasaan atas kehidupan yang tidak berarti. Jika ia menjatuhkan dirinya kepada kehidupan yang tidak berarti tersebut dan jatuh pada kebanalan hidup, maka ia kehilangan potensi ketidakterbatasannya dan kebebasannya.

Ada banyak manusia yang demikian, ketika kehidupannya tidak sinkron maka mereka memilih untuk mengikuti apa yang umum dilakukan oleh manusia lainnya dan berkehidupan bagaikan robot yang dikontrol oleh apa yang dilakukan oleh mayoritas. Dalam banyak hal, manusia mengikuti apa yang dilakukan oleh para “pemimpin” baik opinion leaders, political leaders dan sebagainya, hal ini karena mereka telah mengalami keputusasaan terutama karena tidak memahami bahwa mereka memiliki jiwa, atau menyerah akibat ketidakmampuan mereka menghadapi segala keputusasaan berkaitan dengan ketidaksinkronan jiwa dan tubuh mereka (baik dari penyangkalan maupun dari usaha untuk mensinkronkan namun tidak kuat menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran atas apa yang akan terjadi). Namun di satu sisi juga ada keberuntungan atas krisis eksistensial. Jika ada kepastian bahwa tubuh dan jiwa selalu sinkron, maka akan muncul ketiadaan (*nothingness*⁷) atau impotensi (*impotence*) dimana manusia tidak akan memiliki kebebasan untuk memiliki posibilitas, hanya memiliki aktualitas. Menurut Kierkegaard, keputusasaan merupakan sakit menuju kematian (*the sickness unto death*). Menurutnya dalam teologi Kristen tidak ada sakit tubuh yang berujung pada kematian karena jiwa adalah sesuatu yang immortal. Namun keputusasaan adalah sakit yang menuju kematian dari jiwa, bukan kematian dari tubuh itu sendiri.

⁷ Konsep *nothingness* dari Kierkegaard berbeda dengan Sartre, bagi Kierkegaard *nothingness* adalah ketiadaan potensi atas kebebasan manusia akibat tidak adanya disjungsi antara jiwa dan tubuh

Bahkan dalam beberapa kasus, jika manusia menghadapi bahaya yang begitu besar bagi dirinya, manusia akan merasa kematian dari tubuh merupakan sebuah harapan yang lebih besar dibandingkan kehidupan. Keputusan juga terletak pada harapan kematian yang tidak tercapai ini dimana ia tidak bisa mati dan menghapuskan derita atas tubuhnya, sebaliknya juga ketika ia menghadapi kematian namun jika ada harapan untuk hidup yang lebih besar, keputusan terletak pada ketidakmungkinan manusia ini untuk masih hidup secara ketubuhan. Makadari itu keputusan sangatlah menyiksa bagi manusia karena ia memberikan rasa sakit pada jiwa atas ketidaksinkronannya dengan tubuh. Jika ada seseorang menginginkan melakukan sesuatu, semisal seperti contoh Kierkegaard, seorang yang ambisius menginginkan menjadi Caesar (seperti Julius Caesar) ketika ia tidak bisa, maka ia akan mengalami ketidaksinkronan dari impian jiwanya dan dengan tubuhnya, maka ia juga akan mengalami rasa sakit di jiwanya yakni keputusan. Sehingga ia akan merasakan kematian sebagai sebuah jawaban untuk menghapuskan segala permasalahan ketidaksinkronan ini. Singkatnya, keputusan adalah rasa sakit di jiwa ketika manusia tidak mampu untuk melakukan sinkronisasi dan penerimaan atas apa yang seharusnya ia inginkan serta apa yang ia lakukan secara aktual, sekaligus juga penerimaan atas negativitas yang akan dia dapatkan ketika selama hidupnya.

c. Pemikiran Politik Kierkegaard

Kierkegaard tidak hanya menuliskan mengenai pemikiran filsafat dan teologi saja, namun ia juga menuliskan tentang pemikiran politiknya dalam “the present age”. Kierkegaard menyatakan pemikiran politiknya bahwa ada dua masa yang ia kaji, yakni masa revolusi (*the age of revolutions*, merujuk pada revolusi perancis dan amerika) dan masa sekarang (*the present age*, masa dia hidup)⁸. Kierkegaard menyatakan masa-masa revolusi merupakan masa tindakan dilakukan (*age of actions*) dimana segala tindakan dilakukan untuk menimbulkan efek tertentu. Sedangkan pada masa sekarang adalah masa pengiklanan/publisitas (*age of publicity*) dimana tidak ada sesuatu yang benar-benar terjadi namun banyak publisitas tentang sesuatu tersebut. Ketika pada masa revolusi, segalanya terjadi diluar kontrol, seperti revolusi perancis yang ujung-ujungnya menciptakan rezim teror borjuis Thermidor maupun rezim Napoleonik yang keduanya sama sekali bukanlah tujuan awal dari revolusi. Namun pada masa sekarang justru tidak ada perubahan yang terjadi. Menurutnya hal ini terjadi karena individual dan generasi saling menghentikan satu sama lain, seperti ketika ada seorang individual yang ingin melakukan perubahan akan

⁸ Kierkegaard, Soren. 1962. *The Present Age*. New York : Harperperennial Modern Thought, hlm.1

dihentikan oleh generasi yang menginginkan kenyamanan atas situasi yang pro generasinya. Di satu sisi ada generasi yang ingin melakukan perubahan, jika ada individu yang kuat dan mampu menghentikan perubahan tersebut maka tidak akan terjadi perubahan.

Menurut Kierkegaard, seorang individu tidak bisa lepas dari gulungan refleksi (*coils of reflection*). Anehnya pada masa itu, refleksi terlahir dari lingkungan dimana lingkungan memaksa seseorang untuk melakukan refleksi terus menerus hingga hasilnya pun ilusif dan mengkhianati dirinya sendiri. Pada masa ini memang pada masa Aufklarung dimana lebih banyak pemikiran baru yang muncul dibandingkan revolusi kebaruan itu sendiri. Akhirnya orang-orang ini jatuh pada nihilisme, yakni hal terbaik yang bisa ia lakukan adalah tidak melakukan apapun. Kierkegaard juga mengkritik pada masa ini dimana setiap orang melakukan penghindaran (*tergiversations*) karena hampir setiap orang terjankir *vis inertiae* (inaktivitas), dimana orang-orang ini sudah merasa puas dengan menyatakan dirinya menemukan hal baru dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ia juga mengkritik virtuoso-virtuoso politik yang menuliskan manifesto-manifesto, bahkan mereka ini terkadang banyak yang mampu untuk memasukkan manifestonya dan memanipulasi keadaan politik sampai pada tatanan *general assembly* (majelis umum) akan menerapkan idenya sebagai sebuah kebijakan, lalu mereka masuk ke dalam majelis dan menyatakan bahwa dirinyalah yang menjadi seorang pemberontak berhasil yang mampu untuk mewujudkan ide-idenya⁹. Bagi Kierkegaard ini tidak lebih dari pesta pora politik belaka dimana sebenarnya tidak ada tindakan maupun kegemaran (*passion*) untuk melakukan tindakan di ranah politik tersebut.

Kierkegaard juga menyatakan bahwa di masanya, adalah masa jaman antisipator ulung (*the great anticipators*). Kebijakan tidak dibuat untuk melakukan perubahan baru, namun hanya memitigasi dampak-dampak negatif yang muncul dari kebijakan sebelum-sebelumnya. Bahwasanya memang tidak ada pemikiran baru yang mengubah struktur masyarakat secara radikal, lebih kepada menyelamatkan orang-orang yang telah tenggelam (*saving those who had lost*). Pada masa lalu, masa revolusi, menurutnya segalanya dilakukan untuk melakukan perubahan, namun pada masa ia hidup, orang-orang hanya ingin membuktikan bahwa dirinya cerdas dan mampu untuk menunjukkan kepada orang lain atas kebodohan orang lain, atau bahkan mampu untuk menunjukkan bahwa ia mampu melakukan hal yang terlihat bodoh namun ia berhasil melakukannya dengan sukses dan cerdas, tidak seperti orang lain yang mencoba melakukan hal-hal yang sama namun gagal.

⁹ Ibid. hlm.2

Analogi Kierkegaard adalah orang-orang berlomba untuk membuktikan bahwa dirinya bisa bermain ski sampai tempat-tempat yang berbahaya namun tetap selamat, bahkan pemain ski ini akan semakin bahagia ketika orang lain ketakutan bahwa ia akan gagal dan celaka namun bisa membuktikan bahwa ia tidak celaka sedikitpun.

Menurut Kierkegaard, manusia pada masanya (sampai masa sekarang skripsi ini ditulis, mungkin) mencintai uang. Uang menurutnya adalah sebuah abstraksi dan refleksi. Manusia tidak peduli dengan cinta orang lain, mencintai orang lain, kemampuan orang lain, bahkan pasangan sahnya sendiri, jika dihadapkan dengan uang. Manusia merasa bahwa mereka hanya bisa hidup secara otentik jika memiliki uang. Mungkin memang kebebasan diukur dengan uang, jika seseorang tidak memiliki uang maka ia tidak bisa mendapatkan barang-barang tertentu yang ingin ia konsumsi, tidak bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu yang ingin ia lakukan kecuali ia mendapatkan konsekuensi yang cukup tidak menyenangkan. Kierkegaard juga menyatakan bahwa sistem kekuasaan juga tidak bisa dihancurkan sama sekali dalam masa ini, tidak ada orang yang mau menghancurkan kekuasaan otoriter, namun mengubahnya menjadi sebuah fiksi, jika sudah menjadi sebuah fiksi maka orang-orang akan bergembira menikmati perintah dari kekuasaan otoriter tersebut.

Tetapi di satu sisi, kekuasaan ini menemukan ambiguitas jika kita merefleksikannya, dimana orang-orang berharap kekuasaan ini tetap ada di satu sisi, namun juga kekuasaan ini semakin lama akan semakin bergerak menghilang, sehingga dibutuhkan cara-cara dan teknologi kekuasaan baru untuk tetap menjaga agar kekuasaan ini tetap berjalan seperti sediakalanya. Kierkegaard menerangkan bahwa ini merupakan hasil dari keirian (*envy*) yang lahir dari refleksi-refleksi dan memunculkan refleksi iri (*misundelse*). Refleksi atas diri mereka dan refleksi atas masyarakat di sekitar mereka memunculkan individualisme atas diri mereka. Dan jika individu berusaha untuk melepaskan diri dari refleksi ini, maka refleksi masyarakat akan berusaha menariknya kembali pada refleksi individual. Perasaan iri dan *misundelse* mengkonstitusikan prinsip ketiadaan karakter (*characterlessness*) dimana seseorang tidak memiliki karakter dan hanya iri terhadap karakter-karakter yang ada di masyarakat dan melakukan refleksi diri hanya untuk merefleksikan karakter tersebut.

Mereka juga menganggap adanya perbedaan bukanlah sebuah perbedaan, sehingga dengan mudah akan mencoba untuk menyamakan dirinya dengan sebuah kesamaan yang lebih besar dan mereka tidak menganggap dirinya berelasi negatif dengan perbedaan tersebut. Hal ini memang terjadi ketika orang-orang merasa dirinya ingin menjadi unik dan unik satu sama lain namun tidak berani jika benar-benar dianggap berbeda dan berusaha

untuk menyamakan dirinya dengan orang lain agar tidak diasingkan atas perbedaan tersebut.

Akhirnya dalam masyarakat muncul sebuah *pe-level-an (levelling)* dimana masyarakat diukur dari *level-level* tertentu, dan kategorisasinya dibuat oleh masyarakat. Kategori individual akan disubordinatkan oleh kategori dari masyarakat dan masyarakat akan menentukan standar-standar yang harus dilakukan oleh individu, sehingga keotentikan harus dihapuskan dari individu tersebut. Untuk membuat terjadinya *levelling*, harus dibuat sebuah hantu raksasa (*phantom*) publik. Bahwasanya hantu ini riil dan menghantui segala individu agar mengikuti segala keinginannya. Namun sebenarnya publik ini tidak ada (*nothing*) dan hanya kontrol dari para *levelling-master*. Menciptakan sebuah publik tentu dibutuhkan sebuah media. Ketika sebuah golongan masyarakat yang pintar/cerdas (*clever*) mampu untuk melakukan abstraksi atas realitas, maka ia akan menggunakan media untuk menciptakan publik yang mampu melakukan kontrol atas individu-individu tersebut sehingga masuk dalam proses *levelling*. Solusi dari Kierkegaard adalah pada masa lalu, masyarakat masih dalam ranah *en masse in corpora* dimana mereka masih berani untuk menyatakan pendapat dan tindakannya baik secara individu dan kolektif dalam ruang-ruang tertentu, mereka juga berani untuk mengambil tanggungjawab atas dirinya maupun tanggungjawab atas orang lain tanpa perlu adanya publik yang memberikan tanggungjawab kepadanya sesuai dengan abstraksi dari *levelling-master* tersebut.

d.Subyektivitas

Kierkegaard melakukan sebuah kritik terhadap positivisme dan saintifisme. Menurutnya cara pandang obyektif saintifisme sebenarnya pun juga berasal dari subyektifitas atau intersubyektifitas¹⁰. Bahwasanya segala keputusan dalam “cara pandang obyektif” sebenarnya kembali pada subyektifitas orang-orang yang ada di dalamnya juga. Menurutnya kristenitas merupakan sebuah pandang subyektif, dimana kristenitas memberikan sebuah sudut pandang teleologis yakni kebahagiaan abadi. Subyektifitas dalam kristen memberikan sebuah kemungkinan kepada penganutnya, yakni untuk menginginkan kebahagiaan abadi tersebut sehingga mampu untuk melakukan protes terhadap obyektifitas. Dengan cara seorang kristen yang memiliki tujuan tertentu tersebut kembali kepada subyektifitasnya untuk bagaimana cara meraihnya dan seperti apa kebahagiaan abadi yang diinginkannya. Manusia tidak akan pernah bisa menjadi

¹⁰ Kierkegaard, Soren. 1992. Concluding Unscientific Postscript. Princeton : Princeton University Press, hlm.107

sepenuhnya obyektif bagi Kierkegaard, ketika manusia ingin menjadi obyektif maka itulah letak kesubjektifitasnya manusia tersebut karena tidak semua orang memiliki tujuan untuk menjadi obyektif, bahkan memiliki tujuan itu sendiri letaknya pada subyektifitas.

Bagi Kierkegaard, kepercayaan (*faith*) adalah kegemaran (*passion*) tertinggi dari subyektifitas, atau titik tertinggi dari subyektifitas. Ketika seseorang mempercayai sesuatu (terutama konsep Tuhan), maka sudah jelas ia berada pada dalam titik subyektif, ia memiliki konsep kepercayaan terhadap sesuatu tersebut yang unik dan berbeda dari yang lainnya sekalipun masih dalam sebuah sistem kepercayaan yang sama. apalagi manusia yang memiliki sistem kepercayaan yang berbeda-beda, tentunya semakin menguatkan bahwa subyektifitas ada pada kepercayaan manusia.

Tendensi obyektif menurut Kierkegaard adalah memaksa orang-orang hanya untuk menjadi pengamat (*observer*). Tetapi orang hanya bisa menjadi pengamat secara obyektif ketika ia menjadi seorang hantu (*ghost*) dari masa lalu. Ini merupakan pemikiran yang masuk akal karena memang selama pengamat ini menjadi seorang manusia, ia masih memiliki setidaknya sebuah persepsi atas hasil pengamatannya atau interpretasinya yang subyektif. Menjadi sebuah hantu berarti mereka sudah mati dan tidak memiliki kesadaran apa-apa lagi (karena hantu selama ini belum bisa dibuktikan jika ia memiliki kesadaran atau rasio) dan tidak ada keinginan untuk menjadi subyek dalam fenomena yang ia amati baik pra, dalam maupun pasca pengamatan fenomena tersebut. Bagi Kierkegaard, jika seluruhnya menjadi obyektif maka yang ada hanyalah keputusan dimana semua harus mengikuti sebuah sistem yang ada dan manusia dapat kehilangan jiwa sesungguhnya dan keunikan seorang individual. Kierkegaard mendialektikakan antara etika (dimana etika mewakili subyektifitas dan pengalaman-pengalaman individu yang mengkonstitusikan individu) dengan idea/pengetahuan dunia-historis. Menurut etika dikonstruisikan oleh dialektika kualitatif dan idea dunia-historis dikonstruisikan oleh dialektika kuantitatif dimana idea dunia-historis berasal dari segala pengalaman individu namun dirangkum dalam kuantifikasi dan dimasukkan dalam sebuah susunan besar pengetahuan secara kuantitatif.

Bagi Kierkegaard jika seseorang terlalu terserap dalam sistem dunia-historis ini ia akan menjadi imoral karena terserap dalam dunia yang melanggar etikanya secara individu. Hal ini juga berkonsekuensi bahwa pada masa Kierkegaard, tiadanya tindakan adalah karena terlalu banyak kontemplasi atas pengalaman-pengalaman historis yang telah terjadi dan manusia akhirnya menginginkan adanya tindakan-tindakan kolektif bermassa besar dan berusaha meramalkan dan menghindari konsekuensi-konsekuensinya. Akhirnya

keterikatan atas sistem dunia-historis ini membuat seseorang inaktif dan tidak berani untuk antusias mengambil sebuah tindakan yang dapat mengubah sesuatu. Untuk menghindari hal seperti itu, menurut Kierkegaard manusia harus menekankan dirinya pada antusiasme etika individunya, maka seseorang akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih baik sesuai etikanya dan berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan atas dunia sesuai dengan etika pribadinya.

Bahkan orang inipun juga tidak memperdulikan atas apa yang terjadi di dunia akibat perjuangannya karena ia hanya memikirkan tentang etika dan apa yang harus dilakukan sesuai etika yang diyakininya. Bahkan menurut Kierkegaard, figur-figur yang tercatat dalam dunia-historis adalah figur-figur etis yang menjalankan etikanya sehebat mungkin, bahkan ia tidak memperdulikan apa hasil (*accomplishment*) yang telah ia lakukan kepada dunia dan ia hanya memikirkan perkembangan jiwanya saja. Jika seseorang yang etis tidak menjadi figur dunia-historis dengan sendirinya, maka dengan menginginkan sebuah kebaikan terjadi, sesuatu yang mustahil bisa jadi akan menjadi tidak mustahil karena usahanya yang keras untuk mewujudkan kebaikan sesuai etikanya ini. Tetapi jika seseorang yang bermindset dunia-historis menginginkan kebaikan terjadi, maka tidak lebih atas keinginannya untuk mencatatkan dirinya atau kebaikan yang dihasilkannya dalam pengetahuan dunia-historis. Menurut Kierkegaard orang ini tidak lebih dari seorang penipu ulung. Semakin panjang hidup manusia, semakin tidak bisa terlihatnya batasan yang etikal dan yang dunia-historis, bahkan bisa jadi suatu saat akan tercampur antara dunia-historis dengan etikal. Justru akan semakin sulit untuk menjadi etis karena menjadi etis sekalipun harus mewujudkan etis dalam ranah dunia-historis.

Kierkegaard meramalkan kondisi kekinian dimana dalam era kapitalisme ini, etika yang digunakan adalah etika yang didasarkan pada keuntungan material pribadi. Bahwasanya etika pribadi seseorang dan penghargaan kepada seseorang tak kurang dan tak lebih berasal dari pendapatan material yang ia dapat. Kierkegaard memberikan contoh dalam ranah ini adalah ketika seseorang tujuan etikalnya adalah mendapatkan kebenaran dan kebenaran itu juga sekaligus memiliki kepentingan dunia-historis. Bahwasanya intelektual maupun pengusaha bisnis memiliki teleologi etikal yang berkebalikan sekaligus sama. intelektual mencari pengetahuan dan kebenaran tidak lebih dari untuk mencari keuntungan, dan pengusaha bisnis mencari keuntungan tidak lebih dari untuk mewujudkan keinginan hidupnya seperti dalam ranah konsumsi maupun berkegiatan demi mewujudkan aspirasi hidupnya.

Sehingga pertanyaannya adalah etika seperti apa yang jauh dari konsiderasi dunia-historis dan terpisah dari konsiderasi dunia-historis itu sendiri. Formulasi etika yang menekankan kepada kemerdekaan individu sekaligus kemerdekaan ranah etis dari konsiderasi obyektifitas dan mampu mempertahankan subyektifitas dari ranah obyektifitas dan memisahkannya dengan baik diperlukan untuk menjaga tujuan luhur dari manusia itu sendiri.

2.1.2.Nietzsche

Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf eksistensialis Jerman. Ia merupakan pemikir tentang filsafat eksistensialis, filologi, serta teori psikologi, politik dan kekuasaan. Pemikirannya banyak mempengaruhi filsuf-filsuf di jaman-jaman sesudahnya. Beberapa pemikirannya akan dijelaskan di bawah ini.

a.Nihilisme

Nihilisme menurut Nietzsche adalah ketika nilai tertinggi mendevaluasi dirinya¹¹. Nietzsche menjelaskan bahwa ada moralitas agama yang mampu untuk memberikan sudut pandang kepada manusia sebuah nilai tertinggi tertentu, tetapi ia berantagonis dengan pencarian kebenaran (*truthfulness*) yang diciptakan oleh moralitas itu sendiri, seiring waktu manusia akan menemukan kebenaran-kebenaran yang kontradiktif dengan nilai tertinggi tersebut, akhirnya nilai tertinggi tersebut akan mengalami proses disolusi. Menurut Nietzsche, ketika kita mempercayai moralitas maka kita juga sekaligus menghukum eksistensi.

Ketika manusia menciptakan nilai-nilai dan norma-norma sosial, mereka menciptakan untuk menguatkan eksistensi manusia seakan bahwa norma dan nilai tersebut tercipta oleh perintah Tuhan dan memiliki harapan-harapan atas realitas dan masa depan yang lebih baik, tetapi seiring waktu semakin manusia menyadari bahwa itu merupakan ciptaan mereka sendiri dan membuat dunianya menjadi tidak berarti (*meaningless*), bahwasanya muncul devaluasi atas nilai-nilai yang manusia ciptakan sendiri¹². Konsekuensi nihilistik (kepercayaan atas ketiadaan arti nilai/*valuesness*) adalah konsekuensi dari valuasi moralitas. Manusia akhirnya menyadari bahwa ia merasa sia-sia karena ia tidak bisa membuktikan adanya *liberium arbitrium* (kebebasan yang tidak bisa dijelaskan atau dimengerti/*intelligible freedom*). Akhirnya manusia akan merasakan pesimisme karena tidak mampu untuk menemukan tujuan dan mewujudkannya.

¹¹ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1968. *The Will To Power*. New York: Vintage Books., hlm.9

¹² Tuusvori, Jarkko. 2000. *Nietzsche and Nihilism*. Helsinki : University of Helsinki, hlm.152

Menurut Nietzsche, awal dari nihilisme adalah pesimisme karena manusia pada awalnya berusaha untuk mencari arti dari hidupnya namun tidak menemukan sama sekali dalam kehidupannya. Awalnya ia akan menipu dirinya dan menyatakan bahwa ia telah menemukan arti dalam hidupnya, namun ia akan merasa capek atas kebohongan tersebut dan akhirnya menjadi pesimis atas hidupnya. Selanjutnya muncul nihilisme secara psikologis dimana ia menginginkan ia akan didominasi oleh sebuah sistem raksasa tertentu karena memang segalanya menjadi tidak berarti apa-apa. Akhirnya ketika ia memahami bahwa tidak mungkin ada segala sistem yang mampu menciptakan totalitas demikian, ia akan menjadi nihilis sepenuhnya dan memahami bahwa realitas satu-satunya adalah realitas yang riil dan tidak menipu dirinya lagi. Tetapi ia juga tidak bisa kuat menahan realitas ini sekaligus tidak menyangkalnya.

Akhirnya manusia menyadari bahwa eksistensi tidak berarti apa-apa. Eksistensi tidak bisa didefinisikan oleh tujuan (*aim*), kesatuan (*unity*) maupun kebenaran (*truth*). Kita hanya perlu untuk melepaskan ide-ide itu dan melihat dunia yang sebenarnya, dunia yang tidak berarti apa-apa. Menurut Nietzsche, manusia menggunakan ketiga kategori tersebut untuk membuat sebuah dunia fiksi yang menyenangkan dan menenangkan manusia. Selain itu juga manusia dengan mudah memberikan esensi terhadap dunia, esensi terhadap kenyataan karena manusia masih merasa bahwa dirinya adalah ukuran dari dunia, ukuran dari segalanya.

Menurut Nietzsche ada dua jenis nihilisme, nihilisme aktif dan nihilisme pasif. Nihilisme aktif akan berusaha untuk menyerang sistem-sistem dan berujung pada anarkisme dan kehidupan tanpa sistem dan nilai-nilai yang ditekankan kepada manusia, serta manusia mampu menentukan nilai-nilai yang mereka anut sendiri. Nihilisme pasif berujung pada Buddhisme (agama Buddha) dan menurut Nietzsche Buddhisme adalah kelemahan dimana orang-orang hanya menjadi nihilis dan inaktif serta mengurangi segala kekuatan yang mereka miliki dan hanya berujung pada *incommensurable*.

Nihilisme lahir dari beberapa hal yakni :

- a) Ketika spesies tinggi (manusia yang memiliki moralitas bangsawan, atau kekuasaan untuk menentukan moralnya sendiri dan moral orang lain) masih memiliki kepercayaan atas manusia.
- b) Ketika spesies rendahan (manusia yang menyerahkan dirinya kepada totalitas masyarakat atau disebut oleh Nietzsche sebagai ternak (*herd*)) tidak memiliki rasa tepa-sliira (*modesty*) dan memasukkan kebutuhannya atas hal-hal mistik. Mereka akhirnya menjadi nihilis juga. Dengan adanya kontradiksi dimana mereka seharusnya mampu untuk

menjalankan perannya masing-masing, yakni manusia yang menentukan moralitas ini tidak dipengaruhi oleh kepercayaannya atas manusia-manusia dalam jumlah besar yang mungkin bisa membawa ke masa depan lebih baik atau manusia yang mengikuti sistem menjalankan sesuai perannya yakni pasrah pada totalitas sistem yang dibangun oleh elit, atau tidak memistifikasi sistem dan para elit tersebut maka mereka tidak akan menjadi nihilis.

Nietzsche memberikan dua jalan menuju nihilisme, yakni masokisme (*predominance of suffering over pleasure*) dan hedonisme. Dalam masokisme, seseorang akan menjadi terlalu sedih dan melankolis atas kehidupannya, dan akhirnya merasa bahwa segala yang ia lakukan menjadi percuma. Dalam hedonisme, tujuan orang tersebut hanyalah mencari kebahagiaan, jika ternyata tidak ada kebahagiaan yang dapat ia raih pada akhirnya, ia akan jatuh pada nihilisme pula, tetapi selama ia masih mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan walau semu, ia akan terus mencari dan mencari walaupun segalanya tidak ada artinya.

Nihilisme yang filosofis memandang bahwa segalanya percuma dan nihil, tetapi segala hal yang berkaitan dengan tujuan, eksistensi dan esensi dari eksistensinya membuatnya terhibur. Tetapi di satu sisi ia merasa bahwa dirinya merupakan sebuah hal yang sia-sia dan tidak memiliki arti apa-apa. Akhirnya muncul valuasi yang cukup absurd.

Nihilisme dan pesimisme juga terlahir atas adanya konflik dimana ada 3 hal yang terjadi dari konflik tersebut:

- a) Yang lemah hancur
- b) Yang lebih kuat menghancurkan yang lemah
- c) Yang paling kuat menghancurkan tatanan nilai yang menentukan adanya konflik maupun menang-kalahnya partisipan konflik tersebut.

Nietzsche juga mengkritik sosialisme, dimana sosialisme salah membaca masyarakat menurutnya. Nietzsche menyatakan bahwa sosialisme salah membaca seakan masyarakat akan selalu muda dan tidak pernah tua, padahal masyarakat akan menciptakan sampah-sampahnya sendiri di saat tuanya. Semakin energetis sebuah masyarakat melaju ke depan, semakin cepat ia menciptakan sampah-sampah baru yang akan menghancurkannya sendiri. Penafsirannya adalah dimana masyarakat yang progresif harus meninggalkan hal-hal yang lama sekaligus juga mentalitas ternak yang dimiliki oleh sosialisme tetap tidak akan bisa menafikan adanya sampah yang harus ditinggalkan dalam masyarakat.

Nietzsche menyatakan bahwa lawan dari dekadensi hedonisme bukanlah sosialisme, namun militerisme seperti pada jaman Napoleonik. Kebencian terhadap hedonisme dan kerusakan moral adalah sebuah kenaifan, dan hanya bisa dihancurkan melalui disiplin ketat untuk membuat masyarakat yang masih waras tetap bertahan melawan hedonisme.

Hedonisme tidak bisa dilawan karena memang nyata ada di setiap lapisan masyarakat dan perkembangan masyarakat, kecuali dengan dihentikan perkembangannya dan tidak menjangkiti masyarakat yang belum hedon dengan disiplin militerisme.

Dekadensi moralitas lahir dari kesenangan, kriminalitas, sterilitas seks (*free sex* juga termasuk seks yang steril), histerisme dan kelemahan kehendak. Efeknyapun juga menghasilkan hal yang sama seperti konsekuensinya, semakin memperparah konsekuensi-konsekuensi tersebut. Nihilismepun juga hasil dari dekadensi moralitas, dan dekadensi moralitas tidak bisa dihentikan sepenuhnya, menurut Nietzsche. Tetapi juga muncul konsekuensi yakni kebebasan jiwa dan libertinisme.

Jenis-jenis dekadensi yang dijelaskan oleh Nietzsche adalah :

- I. Mempercayai bahwa ia memiliki obat bagi dekadensi, yakni menganut agama dan mempercayai bahwa agama tersebut mampu untuk menyembuhkan dekadensi secara utuh.
 - II. Seseorang kehilangan kekuatannya untuk melawan stimulus-stimulus dari dalam dirinya, ia tidak bisa mengendalikan diri atas stimulus apapun termasuk altruisme, akhirnya terdepersonalisasi dan kehilangan kehendaknya atas apapun.
 - III. Mencampuradukkan dan salah memahami konsekuensi dan sebab dari nihilisme, moralitas religius memiliki penyakit demikian dimana tidak sadar bahwa dekadensi merupakan kondisi psikologis dan sepenuhnya didasarkan kepada kondisi moralitas.
 - IV. Seseorang menginginkan sebuah kondisi tubuh yang tidak ia derita, seperti seseorang yang merasa bahwa dirinya sedih padahal sudah tidak ada alasan lagi untuk bermelankolia. Orang masokis seperti ini merasa bahwa hidupnya adalah kesedihan.
- Lemah dan kuatnya kehendak (*will*) ditentukan dari koordinasi manusia tersebut terhadap kehendaknya, jika manusia tersebut tidak mampu memfokuskan kehendaknya dalam satu jalur maka kehendaknya lemah, sebaliknya jika mampu memfokuskan kehendaknya dalam satu jalur yang tertata maka kehendaknya kuat.

Nietzsche menyatakan bahwa masyarakat yang tertindas dilindungi dari nihilisme oleh moralitas dengan memberikan nilai serta tugas-tugas untuk dijalankan bagi masyarakat tertindas tersebut. Namun jika masyarakat tertindas sudah memahami tentang nihilisme maka ia akan berjuang untuk menghancurkan segala tatanan yang ada, termasuk masyarakat penindasnya yang mampu untuk menciptakan moralitas serta menghancurkan dirinya sendiri agar tidak ada tatanan baru lagi yang mengekang mereka. Nihilisme akan menjadi sebuah kenyataan penuh di dunia dimana manusia tidak menciptakan mimpi-mimpi yang menutupi realitas mereka.

b. Apollonian, Dionisian dan Tragedi

Appolonian dan Dionisian diambil dari nama dewa Yunani yakni Appolo sang dewa musik dan kebahagiaan serta Dionisius sang dewa mabuk dan ekstasi religius-ritualistik. Menurut Nietzsche seni yang diciptakan kaum Appolonian adalah seni-seni visual dan plastik yang menggambarkan kebahagiaan sedangkan Dionisius seni-seni non visual dan musikal-dramatik yang memberikan sudut pandang kesedihan. Kedua pemikiran tersebut akan berdialektik dan dihubungkan dalam sebuah tragedi Attic¹³.

Dalam dunia Appolonian yang berupa dunia mimpi, segala arti (*meaning*) langsung dapat diterima oleh manusia (*immediate*). Manusia masuk ke dalam dunia Appolonian dengan bahagia, langsung menemukan kebahagiaannya dalam memahami arti-arti yang masuk ke dalam dirinya. Lalu manusia akan menginginkan mimpi tersebut berlanjut karena membahagiakan. Kesedihan yang muncul dalam mimpi tersebut tetap membahagiakan karena artinyapun dapat dipahami secara langsung. Di satu sisi Appolo juga terkenal sebagai dewa ramalan, sehingga mimpi-mimpi kesedihan maupun kebahagiaan juga dapat memberikan kesenangan kepada manusia yang mengalaminya, yakni pengetahuan atas sesuatu yang dianggapnya akan terjadi.

Di satu sisi ketika kita memahami sebuah horor raksasa yang menghantui kita, yakni ketika kita merasa tidak mampu lagi memahami ilusi-ilusi yang ada, muncullah dionisian. Ketika manusia menyerah untuk memahami ilusi dan berusaha menghilangkan dirinya dengan cara semisal meminum atau memakan barang-barang yang memabukkan agar dapat menghilangkan dirinya dan menyatu dengan segala yang ada di alam. Bagi sebagian orang yang merasa dirinya moralis dan waras, ini merupakan sebuah penyakit sosial, namun bagi Nietzsche orang yang demikian ini akan kehilangan kesempatannya untuk menyatu dengan alam dan membentuk sebuah kesatuan yang begitu besar atas dirinya dan manusia lainnya dengan melupakan segala hal berkaitan dengan individuasinya.

Tragedi lahir ketika manusia menabrakkan dunia riilnya dengan dunia Appolonian dan Dionisian sekaligus. Ketika seseorang masuk ke dalam dunia tragedi, hanya bisa diselamatkan melalui seni dan akhirnya ia tetap hidup. Melalui seni ia mampu untuk melakukan konsolasi terhadap dirinya sendiri, melakukan penghiburan-penghiburan dan katarsis terhadap dirinya sendiri sehingga tetap hidup melalui penderitaan-penderitaan tragedik yang ia alami.

c. Kematian Tuhan

¹³ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1995. *The Birth Of Tragedy*. New York :Dover Publications, hlm.1

Nietzsche menyatakan bahwa Tuhan sudah mati¹⁴. Ia menyatakan bahwa kita semua adalah pembunuhnya. Penjelasanannya adalah dimana pemikiran teodis sudah dibunuh oleh manusia sendiri dan ditukar dengan pemikiran antropodis di masa itu (sampai sekarang, mungkin). Pemikiran relijiusitas sudah dianggap usang dan ditaruh pada ranahnya belaka yakni pemikiran-pemikiran spiritual yang dipisahkan dari pemikiran saintifik dan kehidupan material manusia, sehingga Tuhan sebagai personifikasi pemikiran teodis sudah dibunuh¹⁵. Bahwa manusia sudah tidak menduga barang-barang langsung tercipta dari Tuhan, namun dari manusia itu sendiri (Nietzsche menuliskan dialog dari orang gila (*the madman*) yang mengatakan Tuhan sudah mati, “siapa lagi yang akan memberikan spon untuk mengelap seluruh dunia, bagaimana cara kita meminum lautan dan bagaimana cara kita melepaskan bumi dari matahari”). Nietzsche juga melakukan satir atas kehidupan manusia pasca kematian Tuhan, dimana manusia akan menciptakan ritual-ritual suci baru, menjadi sebuah Tuhan/dewa-dewa baru dalam kehidupan di dunia. ini merupakan sebuah kritik subtil atas pemikiran antropodis yang menyatakan bahwa pusat segala pemikiran dan teori haruslah mengenai manusia dan menunjang kehidupan manusia, seakan memang pusat dunia dan pusat segala-galanya adalah manusia dan kehidupannya.

d.Perspektivisme

Nietzsche meyakini bahwa tujuan manusia begitu beragam dan tidak bisa disatukan menjadi satu tujuan. Ada ribuan tujuan dan ribuan manusia, tetapi manusia tidak bisa disatukan menjadi satu tujuan saja¹⁶. Dengan kematian teodis, tentunya manusia bebas untuk menentukan tujuan mereka sendiri, karena tidak ada moral uniter dari Tuhan yang mampu untuk mengikat mereka. Bahkan moralitas uniter dari Tuhan sekalipun tidak dipercayai oleh semua manusia, ada beberapa moralitas uniter yang diakui diciptakan oleh Tuhan secara langsung, seperti banyaknya agama yang ada di dunia. di satu sisi ada kemiripan satu sama lainnya, namun di sisi lain ada perbedaan yang kontradiktif antara satu sama yang lainnya sehingga tidak mungkin menjadi moralitas uniter yang sepenuhnya dapat digunakan untuk tujuan luhur-ontologis manusia. Sehingga manusia bebas untuk menentukan tujuannya sendiri bagi dirinya sendiri atau bagi sebagian yang mengikutinya.

¹⁴ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1974. *The Gay Science*. New York :Vintage Books, hlm.119-120

¹⁵ Langford, Carol. ‘God is Dead’, *The Philosophy of Friedrich Nietzsche*.

<https://rsmatters.files.wordpress.com/2012/06/god-is-dead-nietzsche-dialogue-16.pdf>, hlm.1

¹⁶ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 2006. *Thus Spoke Zarathustra*. Cambridge :Cambridge University Press, hlm.52

Perspektivisme Nietzschean memberikan sudut pandang yang luas atas ilmu-ilmu sosial selanjutnya dimana tidak mungkin melakukan generalisasi dan penyatuan tujuan bagi seluruh umat manusia secara penuh, bahwasanya setiap manusia memiliki tujuan-tujuan yang berbeda satu sama lainnya dan bisa jadi berkontradiksi satu sama lainnya sehingga sejarah tidak bisa dikaji secara linier dan tidak ada pembacaan masa depan yang sepenuhnya didasarkan kepada universalitas nilai dan tujuan tertentu¹⁷. Memang terbukti dalam kehidupan manusia, ada manusia-manusia yang mempercayai suatu tatanan dunia baru yang menurutnya ideal, seperti masyarakat Komunis sedunia, Khilafah, masyarakat tatanan anarko-kolektivis dimana tanpa negara dan struktur kekuasaan serta semuanya setara, kediktatoran militer, atau dunia liberal bebas tanpa dibatasi negara dalam perdagangan dan kehidupan individual-sosietalnya. Namun tidak semuanya mempercayai hal yang sama, bisa jadi mereka berkontestasi satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan idealitas tersebut sehingga terjadi di dunia. makadari itu perspektivisme memberikan kita pemikiran untuk memahami bahwa tidak mungkin terjadi sebuah sistem uniter yang mengikat seluruh manusia, sekalipun uniter pasti ada perlawanan-perlawanan dari subyek sistem uniter yang tidak menyepakati sistem tersebut baik secara pasif, dalam hati maupun secara aktif.

e. Hasrat Kuasa

Menurut Nietzsche, manusia mengalami kebahagiaan ketika ia menunjukkan kekuasaannya¹⁸, contohnya adalah manusia menyiksa orang-orang yang tidak jatuh kepada kekuasaannya sekaligus memberlakukan dengan baik orang-orang yang telah terdependensi oleh manusia tersebut. Manusia melakukan hal tersebut demi kesenangannya, dan juga menciptakan kebenaran hanya untuk mewujudkan kekuasaannya dan memaksa orang lain untuk mengikuti kebenaran versinya (*our truth*). Orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran versinya akan ditendang demi mempertahankan posisinya dalam masyarakat. Nietzsche juga menyatakan kemurahan hati (*compassion*) adalah kehormatan ala prostitusi (*virtue of prostitutions*) karena kemurahan hati hanya akan membuat seseorang tersebut menjadi mangsa dari orang-orang yang lebih kuat.

Kebahagiaan hanyalah efek dari pertunjukan kuasa dan bukan tujuan dari pertunjukan kuasa¹⁹. Sehingga manusia menikmati kebahagiaan tersebut adalah sebagai efek bonus dari

¹⁷ Lacewing, Michael. Nietzsche's Perspectivism. Abingdon : Routledge, hlm. 1

¹⁸ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1974. Op.Cit. The Gay..., hlm.38

¹⁹ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1968. Op.Cit. Will..., hlm.366

pertunjukan kuasa yang menjadi tujuan utamanya dalam hidup. Perubahan serta *status quo* dalam situasi hidup merupakan sebuah cara yang dipakai oleh orang-orang untuk mempertahankan kekuasaannya, perubahan sistemik hanya dibuat agar situasi berubah dan seseorang bisa mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaannya atau *status quo* dibuat agar seseorang yang sedang berkuasa lebih mudah untuk mempertahankan kekuasaannya.

Menurutnya, kausa (*cause*) berasal dari tindakan-tindakan kuasa. Segala kausa yang terjadi di dunia ini merupakan hasil dari kekuasaan. Segala fenomena yang muncul di dunia ini tidak bisa muncul tanpa adanya kuasa tertentu, dan segalanya muncul sebagai perluasan dari kuasa maupun mempertahankan adanya kuasa. Nietzsche menjelaskan dengan analogi kekekalan energi, bahwasanya segala hal fisik yang terjadi tetap tidak mampu untuk mengurangi jumlah energi, hanya mengubahnya. Bahkan mampu untuk mengkonservasi dan memperluas jenis energi tertentu yang dianggap lebih berguna atau bermanfaat dibandingkan energi jenis lainnya.

Menurut Nietzsche, kebahagiaan tidak lahir dari keberhasilan menggapai sesuatu (*satisfaction*) tetapi lebih kepada perluasan hasrat kuasa yang mampu menguasai satu sama lain, dimana keberhasilan menggapai sesuatu hanyalah efek dari kekuasaan yang berhasil ditekan kepada manusia lain maupun benda-benda lainnya. Perasaan syukur hanya lahir dari mentalitas ternak (*herd mentality*) dimana ia akan menciptakan orang senang (*happy man*) yang tidak mampu untuk mewujudkan kehendak untuk berkuasanya.

Menurut Nietzsche, Tuhan adalah eksistensi tertinggi dari kekuasaan. Tuhan bukanlah eksistensi tertinggi dari nilai dan norma, namun kekuasaan yang mampu untuk menekankan norma dan nilai kepada makhluk-Nya. Nietzsche juga menyatakan bahwa dalam masyarakat hanya ada dua pertentangan kuasa yaitu penguasaan masyarakat atas segelintir orang dan masyarakat berusaha melepaskan dirinya dari segelintir orang yang berujung pada demokrasi dan pada akhirnya, anarkisme. Nilai (*value*) adalah tingkat kekuasaan tertinggi yang bisa diciptakan oleh manusia, bukan kemanusiaan. Kemanusiaan hanyalah alat untuk melakukan riset dan penundukan atas nilai yang diciptakan oleh seorang atau segelintir manusia. Bagi Nietzsche, nilai hanyalah sebuah perubahan dari sentralitas kekuasaan, berapa jumlah orang yang menguasai dan dimana letak sentralitas tersebut.

Nietzsche juga mengkaitkan hasrat kuasa kepada pemikiran politiknya, yakni hanya individu lah yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas konsekuensi tindakannya. Masyarakat dibentuk karena ada orang-orang pengecut yang tidak mau bertanggungjawab atas tindakannya sendiri. Masyarakat bukan dibentuk untuk urusan-

urusan altruistik dan mencintai sesama manusia, namun lebih kepada wahana untuk pertentangan dan perebutan kekuasaan. Negara mengorganisir imoralitas secara internal dengan membentuk polisi dan mengorganisir imoralitas secara eksternal dengan berperang dengan negara lainnya dan menaklukkan wilayah-wilayah lain. Caranya negara menunjukkan kekuasaannya kepada subyeknya adalah dengan memerintah (*command*), memberikan perasaan tanggungjawab (*responsibility*), loyalitas (*loyalty*) dan patriotisme (*patriotism*). Sebenarnya hal ini hanyalah bentuk lain dari harga diri (*pride*), kekuatan (*strength*), balas dendam (*revenge*) dan kekejaman (*severity*). Segala hal yang dilakukan oleh manusia individu terhadap negaranya adalah melawan kaidah alamiahnya sendiri, dia hanya orang pengecut yang tidak berani untuk mengambil tindakan kejam dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri sehingga tanggungjawab tersebut dilegitimasi oleh kolektivitas negara dan masyarakat.

Dalam sebuah negara atau masyarakat, hasrat kuasa individual diterjemahkan sebagai kebebasan (*freedom*), edukasi bertujuan untuk melakukan cek terhadap kebebasan individu dengan cara menahan hasrat kuasanya maupun memberikan sebuah pendidikan agar melawan orang yang menunjukkan hasrat kuasanya secara kolektif. Etikapun juga demikian, hanya digunakan untuk melakukan cek terhadap individu yang mencari kejayaan dan memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar masyarakat yang tergolong dalam mentalitas ternak tidak akan melakukan penunjukan hasrat kuasa.

Partai politik menurut Nietzsche hanyalah sekumpulan orang yang ingin berbahagia karena menunjukkan hasrat kuasanya, orang-orang ambisius adalah orang-orang yang rela untuk mengorbankan kebahagiaannya demi mendapatkan kekuasaan, non-partisan hanyalah sekelompok orang-orang yang ingin memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak jatuh kepada orang-orang yang salah menurut mereka. Perasaan cinta, kepatuhan, moralitas dan kehormatan tidak lebih dari jargon orang munafik yang tidak mampu mendapatkan kekuasaan bagi dirinya. Akhirnya orang-orang inipun juga akan mengagungkan dirinya menggunakan cara-cara tersebut untuk melakukan tindakan kuasa dengan cara lain, atau ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kekuasaan walau sebenarnya tidak punya.

Bagi Nietzsche, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang selalu ingin menguasai. Tanpa adanya hasrat ingin menguasai yang lain tersebut masyarakat hanya akan degenerasi menjadi demokrasi dan dipimpin oleh para penjaga toko (*shop-keepers*, kapitalisme-liberal-demokratik) dan kedamaian dalam masyarakat hanyalah narkotik untuk membuat senang-senang belaka. Masyarakat/negara militeristik adalah satu-satunya cara untuk

mempertahankan dan memperkuat masyarakat menuju masyarakat tertinggi dalam menuju manusia super (*supreme type of man*)²⁰.

Untuk membuat masyarakat mengakui keberadaan seorang individu, individu tersebut harus melakukan pekerjaan atau menciptakan sesuatu yang diakui dan diingat oleh masyarakat. Sebagai contohnya adalah para founding fathers yang menciptakan suatu hal dan diakui oleh masyarakat sebagai pencipta negara yang mengikat masyarakat tersebut. Tetapi hal itu harus diikat melalui moralitas dan cinta terhadap founding fathers tersebut. Sehingga moralitas dan cinta jika digunakan secara benar menurut Nietzsche adalah sebagai untuk membuat sebuah pekerjaan atau sesuatu yang diciptakan oleh individu tersebut selalu diingat oleh masyarakat.

Bagi Nietzsche, kejahatan (*crime*) hanyalah pemberontakan atas tatanan sosial. Kejahatan bukanlah ditangkap namun lebih kepada direpresi karena ia adalah bentuk pemberontakan kepada tatanan sosial. Menurut Nietzsche, orang tidak bisa menyalahkan kejahatan atas intelegensi atau pendidikannya, namun orang harus menakut-nakuti penjahat tersebut agar tidak mengulangi kejahatannya lagi karena keberaniannya untuk menunjukkan kuasa terhadap tatanan sosial yang sudah mapan.

f. Doktrin tatanan hirarki

Nietzsche memiliki pemikiran politik dimana pada masa demokrasi (*universal suffrage*) tatanan hirarki dalam masyarakat harus kembali dibangun. Nietzsche melihat bahwa hirarki dibangun atas dasar jumlah kekuasaan yang dimiliki seseorang (*quanta of power*). Prototip manusia pada seharusnya menurut Nietzsche adalah manusia mampu melakukan subjugasi kepada yang lebih lemah. Manusia yang tidak menentukan hirarki berdasarkan kekuasaan menurut Nietzsche adalah para pengecut. Hirarki kekuasaan akan memberikan jalan menuju munculnya spesies yang lebih tinggi dari manusia yaitu melampaui-manusia/manusia tinggi (*overman/ubermensch*).

Manusia harus mampu menghilangkan feminitas dalam masyarakat yakni demokrasi yang akan membuat masyarakat dipimpin oleh lelaki-lelaki banci²¹. Hal ini harus dihancurkan dengan menghancurkan nilai-nilai budak (*slavish values*). Dimana menurutnya, Eropa sedang mengalami menuju kematian dengan adanya nilai-nilai

²⁰ Cristi, Renato. 2010. Nietzsche on Authority and The State. Ontario : Wilfrid Laurier University, hlm.10

²¹ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1968. Op.Cit. Will..., hlm.458

demokrasi yang banci tersebut juga akan menghilangkan nilai-nilai banalitas dan mediokritas yang sedang menjangkiti masyarakat Eropa.

Menurutnya, mengapa sekarang justru orang-orang yang lemah yang berkuasa, karena orang-orang lemah ini lebih kejam (malice) sekaligus lebih manusiawi dan lebih memiliki semangat. Nietzsche mencontohkan ras-ras yang lebih muda seperti ras Cina, ras Yahudi dan Perancis dimana mereka memiliki semangat untuk memperjuangkan kekuasaannya lebih besar dibandingkan orang-orang yang membenci mereka. Orang-orang sakit ini memiliki sesuatu yang lebih menarik dibandingkan orang-orang yang sehat yakni para orang tolol dan para santo, yakni pahlawan-pahlawan mereka yang jenius dan berani mengambil resiko untuk bertindak melebihi orang-orang yang dianggap sehat.

Perempuan juga menurut Nietzsche adalah sumber kelemahan manusia dimana mereka selalu meminta adanya “agama” atau kondisi yang menguntungkan kelemahan mereka. Dimana kondisi ini harus dibuat mengglorifikasi kelemahan mereka dan melakukan glorifikasi atas orang-orang yang lemah. Perempuan dituduh oleh Nietzsche selalu berkonspirasi untuk menjatuhkan kaum-kaum yang kuat yakni laki-laki yang kuat. Para seniman juga merupakan orang-orang yang lemah karena tidak berani untuk melakukan kejahatan (crime) dengan seninya karena dibatasi oleh ketakutan dan kelemahan mentalnya serta takut untuk dimasukkan rumah sakit jiwa.

Revolusi-revolusi yang terjadi juga memberikan sebuah sudut pandang baru kepada masyarakat, pasca-revolusi para jenius yang ingin mendapatkan kekuasaan harus berusaha untuk mendapatkan hati masyarakat, berbeda dengan pada masa sebelumnya dimana kekuasaan didapatkan karena kemampuan para jenius tersebut atau berdasarkan kekuasaan yang inheren ada pada dirinya. Hal ini terjadi karena perubahan masyarakat menuju masyarakat yang feminin dan seakan altruistik, sehingga orang-orang yang berkuasa adalah orang-orang yang terlihat altruistik bagi orang lain. Akhirnya masyarakat akan semakin menjadi medioker dan semakin melambat perubahannya karena orang-orang justru akan menjadi semakin pemalas (*procrastinator*) untuk mendapatkan kekuasaan, karena pilihannya hanya menjadi pemalas atau mengikuti aliansi mob (massa) dan orang-orang eksentrik.

Pembacaan Nietzsche masih berlaku sampai pada masa sekarang dimana orang-orang eksentrik yang terlalu berbeda dengan standar modernitas masyarakat menengah-keatas akan dicap sebagai orang-orang aneh atau tidak memiliki kemampuan berpikir yang mumpuni, di satu sisi masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki kekuasaan

apapun justru mengakui orang-orang eksentrik ini dan menjadikannya sekutu untuk mendapatkan kebutuhannya.

Akhirnya kondisi di Eropa pada masa itu sampai sekarang adalah kekuasaan ada pada ranah uang. Budaya tinggi hanya bisa berdiri atas tatanan yang solid dan kuat, jika muncul budaya mediokritas dalam sebuah masyarakat, maka yang ada adalah muncul budaya uang dimana mereka membutuhkan suatu kondisi yang stabil dan stagnan untuk mempertahankan kondisinya karena budaya lain seperti revolusi sosialisme atau militerisme membuat sebuah destabilisasi dari kondisinya dalam masyarakat.

Menurut Nietzsche, secara historis manusia berhasil menjadi makhluk yang paling sempurna di bumi karena mampu untuk menghancurkan makhluk-makhluk lain yang lebih lemah darinya sehingga masuknya nilai-nilai dalam masyarakat selain nilai kekuasaan adalah anti-biologikal. Idealisme bagi Nietzsche harusnya tidak boleh memberikan ruang pada mediokritas maupun femininitas²².

Nietzsche memberikan pengertian mengenai manusia tinggi yakni *overman* dimana manusia tinggi adalah manusia yang mampu untuk melampaui manusia-manusia lainnya yang melawan dirinya dalam bentuk massa. Dengan kata lain manusia tinggi ini secara individu mampu untuk mengalahkan massa yang menjadi lawannya. Bagi Nietzsche, manusia-manusia lainnya telah berubah menjadi mur dan baut dari mesin ekonomi dan menjadi mesin-mesin pekerja bagi sebuah manajemen ekonomi yang besar, manusia tinggi harus mampu untuk melawan dan melampaui kondisi tersebut. Manusia tinggi adalah aristokrasi masa depan yang mampu untuk mengalahkan manusia yang di~~level~~kan melalui strata dan manajemen ekonomi.

Menurut Nietzsche, masa depan masyarakat Eropa adalah masyarakat yang cerdas, pekerja keras namun tidak memiliki kehendak dan kekuatan mental yang besar. Sehingga mereka hanya dikontrol oleh sistem-sistem ekonomi tertentu. Untuk melawan ini, bagi Nietzsche adalah wajib hukumnya untuk memperkuat kehendak dan semangat mereka serta keberanian untuk melakukan perlawanan dengan dasar bahwa perlawanan berkonsekuensi menang atau hancur. Ras yang mendominasi hanya bisa tumbuh berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kemenangan-kemenangan mereka dalam berkonflik.

Menurut Nietzsche, ketidakbisaan untuk mewujudkan kondisi ini adalah ketika manusia masih takut untuk melakukan kejahatan atau dicap sebagai orang yang jahat. Padahal menurut Nietzsche, kejahatan sebenarnya bersumber dari kelemahan-kelemahan manusia

²² Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1968. Op.Cit. Will..., hlm.463

dan moralitas baik yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Bahwasanya Nietzsche menyatakan orang yang baik sebenarnya adalah orang yang mampu untuk melakukan kejahatan karena ia memiliki pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri dan memiliki kebebasan untuk melakukan ataupun menghindari perilaku jahat tersebut. Kejahatan sebenarnya lahir karena adanya orang-orang lemah yang menyatakan sebuah perilaku sebagai perilaku yang jahat.

Konsepsi agama dimana setiap orang setara dihadapan Tuhan juga merupakan sebuah konsep yang merugikan manusia dimana manusia yang hebat dalam melakukan sesuatu, selalu diandaikan sebagai orang yang masuk neraka. Ini lahir karena ketakutan manusia lain atas dampak ataupun iri atas kemampuan-kemampuan yang dilakukan oleh manusia yang hebat tersebut dan mengecapnya masuk neraka untuk melakukan kutukan terhadap orang tersebut, setidaknya jika tidak mampu mengalahkannya di dunia, berharap di akhirat mereka akan benar-benar dihukum dan masuk neraka sehingga bisa ditertawakan di surga.

Nietzsche membagi manusia menjadi 2 yakni manusia yang tinggi (the higher men) dan manusia ternak (herd men) dimana manusia yang tinggi adalah manusia yang mampu menentukan moralitasnya sendiri dan moralitas orang lain sedangkan manusia ternak tidak lebih dari para pengikut yang hanya mengikuti apa yang ditentukan oleh orang lain baik manusia ternak secara kolektif ataupun manusia tinggi yang memerintahkan adanya penentuan moralitas. Pemikiran politik Nietzsche memang didasari oleh hirarki-hirarki manusia dimana adanya manusia yang lebih tinggi, memiliki kehendak untuk menguasai yang lebih besar dan mampu memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan manusia ternak yang tidak lebih dari sekedar pengikut dan sekumpulan manusia lemah.

2.1.3. Husserl

Dalam memahami Fenomenologi, kita harus memahami dasar-dasar Fenomenologi terlebih dahulu, yaitu dimulai dari teori Husserl mengenai Fenomenologi Murni (*Pure Phenomenology*). Fenomenologi murni mengawali sudut pandang dari kesadaran manusia²³. Namun Fenomenologi berbeda dengan Psikologi walaupun bersudut pandang kesadaran manusia, dimana Fenomenologi memiliki reduksi fenomenologis tertentu atas pengalaman-pengalaman psikologis manusia. Psikologi merupakan sebuah sains yang berkaitan dengan fakta-fakta psikologis dan realitas-realitas psikologis²⁴. Yang

²³ Husserl Edmund. 1982. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology. Berlin : Springer, hlm.XIX

²⁴ Ibid hlm.XX

membedakan terutama dari Fenomenologi adalah Fenomenologi meneliti tentang esensi dari sebuah fakta (eidetik). Fenomenologi tidak meneliti tentang fakta Psikologis seperti aliran Behavioris dalam Psikologi yang meneliti tentang relasi sebuah stimulan positif dan negatif pada perilaku, tetapi meneliti tentang refleksi eidetik atas sebuah fakta psikologis yang terjadi.

Fenomenologi juga menggunakan sudut pandang a priori dimana Fenomenologi memperkirakan tentang ontologi sebuah fakta psikologis dengan kekuatan rasional, bukan riset empirikal seperti Psikologi yang a posteriori.

Berikut ini adalah tesis-tesis dari Fenomenologi :

a. Fakta dan Esensi tidak bisa dipisahkan²⁵

Sains eksperiensial (yang membasiskan diri pada pencatatan-pencatatan sebuah fakta saintifik yang diteliti) adalah sains tentang fakta. Dalam sains eksperiensial ada perbedaan antara fakta satu dengan fakta lainnya. Fakta satu dengan fakta lain eksis dalam temporalitas dan spasial yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Setelah itu sains eksperiensial akan berusaha untuk memetakan hukum yang mengatur fakta satu dengan fakta lain tersebut (dalam ilmu fisika, rumus-rumus fisika merupakan aturan yang mengatur fakta satu dengan fakta lainnya dan dicoba untuk dikalkulasikan dengan cukup tepat). Sebagaimana dalam kenyataannya, sains eksperiensial berusaha untuk memetakan dalam bentuk sebuah rumus yang digunakan untuk mengkalkulasikan relasi fenomena, seperti rumus sederhana yang diajarkan dalam matematika yaitu Jarak = Kecepatan x Waktu. Fenomena Jarak, Kecepatan dan Waktu dalam sains eksperiensial merupakan tiga fenomena yang berbeda dan untuk merelasikannya dibutuhkan sebuah eksperimen yang menjelaskan relasi antara ketiga fenomena tersebut dengan tepat.

Tetapi sains eksperiensial tidak berusaha untuk memahami esensi dari fenomena-fenomena yang dikalkulasikan tersebut. Sebagaimana dalam rumus Fisika sederhana yaitu

dalam energi kinetik, $Ek = \frac{1}{2}mv^2$ yang berarti Energi Kinetik sama dengan setengah massa kali kecepatan kuadrat. Sains eksperiensial akan mengabaikan tentang relasi metafisik energi kinetik mengapa energi kinetik tersebut ada dan berelasi dengan massa dan kecepatan benda. Bahkan definisi tentang Energi kinetik sendiripun merupakan definisi secara ontik yang setiap orang memahami tanpa mampu untuk menyepakati sebuah definisi tentang Energi kinetik secara *letterlijk*.

²⁵ Ibid hlm.7

Fenomenologi akan meneliti tentang ontologi suatu keberadaan secara hakiki. Fakta tentang perhitungan sebuah fenomena adalah sesuatu yang ada dan kasat mata, namun bukan berarti ia tidak memiliki esensi tertentu dari fakta tersebut. Fenomenologi Husserlian meyakini bahwa dalam fenomena yang kasat mata tersebut memiliki suatu esensi dan berhubungan dengan keberadaannya yang kasat mata.

b. Pengelihatan Eidetik

Pengelihatan Eidetik (*Eidetic Seeing*) dapat dimiliki oleh seorang peneliti Fenomenologis dengan mengintuisikan suatu hal yang individual²⁶. Esensi (*Eidos*) dari sebuah fenomena adalah pusat utama penelitian Fenomenologis²⁷. Seseorang perlu memahami tentang esensi sebuah individu benda dengan cara mengintuisikan esensinya karena esensi tidak akan bisa dipahami hanya dengan riset eksperiensial dari sudut pandang apa yang kasat mata saja.

Basis dari intuisi tentunya adalah bentuk terlihat dari sebuah individu benda, namun penelitian Fenomenologis tidak boleh terbatas hanya untuk memahami bentuk terlihat tersebut, tetapi memahami esensi dengan melihat sebuah individu benda secara eidetik. Dengan memahami bahwa sebuah benda memiliki esensi dan eksistensi, idea dan fakta maka riset Fenomenologis akan berusaha untuk memahami relasi antara kedua dikotomi tersebut.

c. Pengelihatan Eidetik dan Fantasi

Penelitian Fenomenologis dengan menggunakan pengelihatan eidetik dapat memakai dua cara yaitu dengan memahami esensi dari fenomena yang terlihat menggunakan intuisi dan berfantasi dari sesuatu yang tidak terlihat sama sekali²⁸. Menurut Husserl apabila seseorang berfantasi dari sesuatu yang tidak terlihat sama sekali maka ia akan menemukan esensi sebuah keberadaan itu lebih dahulu dibandingkan eksistensinya.²⁹ Contohnya adalah Doraemon, dimana Doraemon merupakan fantasi dari Fujiko F. Fujio sebagai pengarang komiknya. Eksistensi Doraemon sampai penelitian ini dilakukan masih dianggap tidak ada oleh komunitas saintifik internasional dan tidak ada fakta yang menyebutkan bahwa Doraemon itu ada.

²⁶ Ibid hlm.8

²⁷ Zhok, Andrea. 2012. The Ontological Status of Essences in Husserl's Thought, New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy. Milan : University of Milan, hlm.1

²⁸ Husserl, Edmund. 1982. Op.Cit. Ideas..., hlm.11

²⁹ Husserl, Edmund. 1982 Cartesian Meditations. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, hlm.70-71

Tetapi pengarang komik tersebut tentunya memahami esensi penuh dari keberadaan Doraemon di dalam fantasinya. Sehingga dapat dibuktikan walaupun Doraemon bukanlah sebuah benda yang eksisten di dalam dunia nyata, esensinya sudah dirumuskan oleh orang yang mengimajinasikannya. Termasuk juga anak-anak pembaca komik Doraemon yang mengimajinasikan Doraemon ada di realitas mereka, mereka memiliki bentuk esensi tersendiri atas Doraemon dengan pengelihatan Eidetik mereka melewati imajinasi.

d. Perbandingan Sains Eidetik dan Sains Faktual

Sains Eidetik dan Sains Faktual memiliki korespondensi satu sama lainnya yaitu relasi antara obyek yang diteliti dengan esensi obyek tersebut³⁰. Sebagaimana sebuah obyek dalam universalitasnya memiliki sebuah esensi yang diteliti menggunakan sains eidetik³¹, maka sains faktual meneliti sebuah individu dari obyek universal tersebut dalam kepartikularitasannya.

Ada sains Eidetik murni seperti matematika, logika, teori murni tentang waktu dan sebagainya. sains Eidetik murni tidak mendasarkan dirinya kepada fakta yang terjadi untuk memahami esensi sebuah obyek tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka di dalam matematika sepenuhnya adalah karya rasio manusia sebagai sebuah simbol untuk mengejawantahkan bilangan tertentu yang tidak memiliki eksistensi material dan faktual di dunia nyata.

Namun tanpa adanya Sains Eidetik murni seperti matematika murni yang bisa digunakan untuk memahami angka, maka akan susah untuk mencari sebuah konsep universal mengenai sebuah fenomena. Dalam matematika ada perhitungan tentang fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung prediksi produksi sebuah komoditas secara *ceteris paribus*. Ini membuktikan bahwa Sains Eidetik murni bersifat universal dan mampu untuk memahami esensi dari sebuah fenomena partikular yang dipelajari oleh Sains Faktual.

Seseorang yang menggunakan pendekatan sains Eidetik tidak memerlukan untuk menyentuh langsung dan bahkan mempertimbangkan fakta dari fenomena partikular yang ada. Sebagaimana dicontohkan dalam fungsi yang digunakan untuk memprediksi jumlah barang yang bisa diproduksi dengan faktor produksi sekian, Ilmuwan Eidetik tersebut tidak perlu melihat langsung bentuk alat produksinya, faktor produksinya dan bahkan barang yang diproduksi.

³⁰ Husserl, Edmund. 1982. Op. Cit. Ideas..., hlm.15

³¹ Smith, David Woodruff. 1982. Husserl And Intentionality: A Study Of Mind, Meaning And Language. Dordrecht : Reidel Publishing, hlm.99

Untuk memprediksi jumlah barang tersebut dengan fungsi matematis cukup dengan membayangkan angka-angka yang mengkonstitusikan variabelnya, rumus fungsinya dan huruf yang dijadikan pengganti variabel. Hasil yang dicapai oleh perhitungan tersebut dapat dinyatakan cukup tepat sesuai dengan *margin of error* yang diberikan.

Ilmu-ilmu seperti ini juga tidak hanya digunakan dalam ilmu alam saja, namun ilmu sosial juga. Sebagaimana dalam ilmu Politik ada pendekatan Behavioralis yang menggunakan ilmu-ilmu Eidetik Murni untuk memprediksi sebuah fenomena politik dalam bentuk survei sampel dan analisis data. Ilmu yang digunakan merupakan ilmu Eidetik yaitu ilmu matematika dan statistik. Ilmuwan Politik Behavioralis tidak harus selalu turun ke lapangan untuk meneliti demikian, cukup menyuruh orang lain untuk mencari data yang dibutuhkan untuk membuat analisis prediksi atas tindakan politik populasi yang ada.

e. Dependensi Sains Faktual atas Sains Eidetik

Menurut Husserl, Sains Faktual sangatlah dependen atas Sains Eidetik³². Tidak ada Sains Faktual yang melepaskan diri sepenuhnya dari Sains Eidetik. Untuk memahami relasi fakta dengan substansi dari fakta tersebut, Sains Faktual membutuhkan Sains Eidetik.

Kenyataan ini dapat dicontohkan dengan sebagai berikut : Ketika peneliti fisika berusaha untuk memahami relasi antara Jarak, Kecepatan dan Waktu, tanpa adanya angka, huruf dan tanda hitung yang dibuat oleh matematika sebagai Sains Eidetik murni yang tidak berbasiskan fakta material.

f. Wilayah keilmuan dan Eidetika Wilayah Keilmuan

Ilmu yang membasiskan diri pada fakta-fakta tertentu akan membentuk sebuah wilayah keilmuan yang sesuai dengan wilayah fakta-fakta tersebut. Seperti ilmu hukum yang mengkaji tentang hukum, ilmu politik yang mengkaji tentang politik, fisiologi yang mengkaji tentang tubuh manusia dan lain sebagainya.

Ilmu-ilmu tersebut membuat pengelompokan fakta berdasarkan kemiripan mereka dan alat analisis yang digunakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu hukum akan mengkaji tentang hukum yang dibentuk sesuai dengan definisi hukum itu sendiri dan bukan hukum gerak yang mengatur tentang gerak suatu benda yang dimana itu adalah ranah dalam fisika dan ilmu alam lainnya. Selain itu juga ada beberapa ilmu yang terkadang mengkaji tentang suatu hal yang sama seperti etnografi, sosiologi dan antropologi. Namun yang membedakan

³² Husserl, Edmund. 1982. Op.Cit. Ideas., hlm.18

adalah alat analisis yang digunakan oleh ilmu-ilmu tersebut. Makadari itu dibentuklah perwilayahan dari ilmu-ilmu sains faktual. Namun Sains Eidetik murni berusaha untuk memahami ontologi eidetik dari sebuah wilayah tersebut, seperti filsafat Cartesian yang memahami bahwa segala benda material adalah *res extensa* yang dimana benda material merupakan ekstensi (transenden) dari dunia *cogitan* rasio manusia.

Dengan memahami bahwa segala benda material adalah *res extensa*, maka manusia bisa memahami sebenarnya apa Eidos dari Fisika itu sendiri, yaitu untuk merasionalkan fenomena-fenomena fisika empirikal³³.

g.Generalisasi dan Formalisasi

Generalisasi dan Formalisasi memiliki dua hubungan yaitu menguniversalkan sesuatu yang berbentuk material dengan membentuk logika umum tentang sesuatu tersebut dan yang satunya adalah membentuk materialisasi dari sesuatu yang berbentuk formal³⁴. Sebagaimana yang diajarkan dalam ilmu hukum, ada hukum formal dan hukum material. Hukum formal mengatur tentang bagaimana berjalannya sebuah hukum material, dan hukum material merupakan substansi tentang sebuah hukum. Tetapi dalam ontologi formal dan material definisinya tidak hanya demikian, ontologi formal harus mengkaji tentang esensi dari materi yang material tersebut dan esensi dari formalitas yang mengatur tersebut. Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi tentang hukum material pidana di Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi tentang hukum formal pidana di Indonesia.

Ontologi Formal akan mengkaji tentang esensi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dengan mencari relasi mengapa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dibuat, dan mengapa bentuk (*forma*)nya demikian. Sama halnya dengan Ontologi Material, Ontologi Material akan mengkaji tentang esensi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memahami esensi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Setelah itu baru dikaji relasi generalisasi dan formalisasi antara hukum pidana material dan hukum pidana formal menggunakan pendekatan Fenomenologis.

h.Konklusi dari Konsiderasi Logis

Menurut Husserl, konsiderasi dalam Fenomenologi Murni bersifat Logis, Immaterial dan Universal³⁵. Konsiderasi yang dijelaskan sebelumnya sepenuhnya mendasarkan diri pada

³³ Ibid hlm.20

³⁴ Schalow et. al. 2011. Heidegger, Translation, and the Task of Thinking. Berlin : Springer, hlm.61

³⁵ Ibid hlm.32

logika murni, tidak mendasarkan diri sedikitpun pada fakta material partikular yang ada dan bisa diaplikasikan kepada wilayah sains manapun. Hasil dari penelitian Fenomenologis dalam bentuk esensi bisa digunakan sebagai prinsip fundamen atas sebuah sains Faktual yang partikular, dengan membuat skema logis yang mengatur tentang teori-teori tentang fakta yang diambil dari riset fakta partikular yang singuler. Lalu dibentuk hukum-hukum yang mengatur tentang fenomena-fenomena faktual tersebut. Husserl juga menyatakan adanya ide untuk membentuk sebuah kelompok dimana orang-orang yang meneliti menggunakan intuisinya akan menyebar ke dalam wilayah-wilayah saintifik tertentu untuk memahami ontologi dari sains faktual dan sains eidetik tersebut.

2.1.4. Heidegger

Heidegger merupakan seorang filsuf Jerman yang meneruskan pemikiran Fenomenologis Husserl dan mengkaitkannya dengan eksistensi sebuah keberadaan. Karyanya yang terkenal adalah *Being and Time* yang membahas tentang keberadaan (*Sein*) dan temporalitas (*Zeit*). Dibawah ini akan dijelaskan tentang konsep-konsep penting pemikiran Heidegger.

a. Apa itu keberadaan?

Keberadaan menurut Heidegger adalah konsep yang sangat universal³⁶. Menurutnya sebuah pemahaman tentang keberadaan selalu apa yang manusia lihat dari bentuk sebuah keberadaan. Universalitas dari keberadaan berbeda dengan universalitas dari genus. Ketika genus hanya membentuk sebuah keuniversalan berdasarkan beberapa spesies yang sama, keberadaan sangatlah universal karena tidak terbatas dalam pengelompokan-pengelompokan apapun. Menurut Aristoteles, keberadaan itu suatu hal yang transenden. Keberadaan tidak dibatasi oleh kategori-kategori yang material dan imanen. Hegel menyebut keberadaan sebagai suatu hal yang “langsung dan tidak terdeterminasi” (*immediate indeterminate*).

Konsep keberadaan menurut Heidegger juga tidak mampu didefinisikan dengan jelas. Karena ia adalah konsep yang universal maka keberadaan tidak mampu untuk dijelaskan dengan mengambil dari konsep yang lebih tinggi darinya maupun direpresentasikan oleh konsep yang berada di bawahnya. Namun konsep tentang keberadaan adalah konsep yang mampu untuk membuktikan dirinya sendiri³⁷. Keberadaan mengkonstitusikan semua yang

³⁶ Heidegger, Martin. 1962. Op.Cit. *Being...*, hlm.2

³⁷ Ibid hlm.3

manusia ketahui dan alami. Sebagaimana ketika manusia menyatakan bahwa “langit ini biru” atau “saya merasa senang”, sudah jelas bahwa manusia memahami adanya keberadaan “langit yang biru” maupun “perasaan senang”.

b. Prioritas Ontologis atas Keberadaan³⁸

Ontologi, sebagai ilmu yang mengkaji tentang fundamen dari segala yang ada di dunia, memang lebih orisinal dan tidak tergantung oleh fakta-fakta tertentu seperti ilmu-ilmu lainnya. Namun apabila ontologi tidak berusaha untuk memahami konsepsi dasar tentang keberadaan maka menurut Heidegger ontologi tersebut adalah ontologi yang naif³⁹.

Menurut Heidegger, ilmu akan berkembang apabila fondasi dari ilmu tersebut mampu untuk beradaptasi dari krisis. Sebagaimana dalam matematika pada masa itu, Heidegger menjelaskan adanya konflik antara formalisme dan intuisisme.

Ontologi yang membahas dasar dari keberadaan akan memberikan ilmu-ilmu lain ini fondasi yang baru, memperkuat fondasi yang ada dari ilmu-ilmu lain dengan temuan-temuan mengenai dasar-dasar keberadaan yang ilmu lain kaji secara faktual.

c. Prioritas Ontik atas Keberadaan

Ontik itu sendiri adalah ketika manusia memahami keadaan sekitarnya sebagaimana adanya. Menurut Heidegger, prioritas ontikal dalam fenomenologi adalah mengenai manusia⁴⁰. Manusia dalam terminologi Heideggerian disebut dengan *Dasein*⁴¹. Apa yang membedakan *Dasein* dengan keberadaan lain adalah *Dasein* berusaha untuk memahami bentuk keberadaannya sendiri, sedangkan keberadaan lain hanya berada sebagaimana adanya.

Dasein selalu berusaha untuk memahami bentuk keberadaannya sendiri dalam bentuk bisa mengada sebagai dirinya atau tidak sebagai dirinya dalam eksistensinya (*eksistenz*). Eksistensi dari *Dasein* dipilih oleh *Dasein* itu sendiri, bukan keberadaan lainnya.

Penjelasannya adalah walaupun manusia dipilih namanya dan identitasnya oleh orang tua mereka, manusia bisa menentukan identitasnya sendiri sewaktu-waktu dengan mengganti namanya atau dengan berlaku berbeda dengan apa yang diarahkan oleh orang tua mereka. Pertanyaannya adalah bila ada hewan yang memiliki identitas, apakah ia *Dasein* juga?

³⁸ Harries, Karsten. 2014. Heidegger's *Being and Time*. New Haven : Yale University, hlm.25-26

³⁹ Heidegger, Martin. 1962. Op.Cit. *Being...*, hlm.9

⁴⁰ Tietz. 2001. An Outline and Study Guide to Martin Heidegger's *Being and Time*. Frankfurt am Main : Humanities Online, hlm.20

⁴¹ Heidegger, Martin. 1962. Op.Cit. *Being...*, hlm.10

Tentu jawabannya adalah tidak. Karena ketika hewan tersebut diberi nama, semisal anda memiliki kucing bernama Louis, dia tidak bisa mengganti identitasnya tanpa bantuan manusia lainnya, selamanya dia akan dikenal sebagai Louis atau kucing, lain halnya dengan manusia yang bisa berganti identitas dan mode mengada sewaktu-waktu.

Namun pemahaman *Dasein* pada umumnya atas eksistensi mereka hanya berbentuk eksistensiel (*existentiell*). Pemahaman eksistensiel didasarkan pada pemahaman sehari-hari eksistensi mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita memahami diri kita dari nama kita dan pekerjaan kita serta status-status kita yang diperlukan oleh orang lain saja. Padahal dalam eksistensi manusia, tidak hanya hal-hal itu saja yang mengkonstitusikan eksistensi kita. Manusia tidak hanya dikonstitusikan oleh identitas yang formil dan apa yang dilakukan saja. Sifat, mode keberadaan dan hal-hal lainnya yang mengkonstitusikan hidup kita adalah yang mengkonstitusikan eksistensi kita secara eksistensial (*existential*). Pemahaman eksistensial tentunya didasarkan pada pemahaman eksistensiel terlebih dahulu. Menurut Heidegger, ontologi fundamental adalah analisis tentang eksistensialitas *Dasein*⁴². Manusia harus memahami apa yang transenden dan yang imanen dari mereka dan melakukan analisis ontik-ontologik atas keberadaan mereka.

d. Metode riset ontologis atas *Dasein*

Menurut Heidegger, untuk melakukan riset ontologis atas *Dasein* harus dilakukan oleh *Dasein* itu sendiri, yaitu peneliti itu sendiri atas dirinya⁴³. Ada banyak penelitian yang bersifat eksistensiel yang berusaha untuk memahami *Dasein* yaitu sosiologi, psikologi, politik, antropologi, etika dan ilmu-ilmu lainnya. Namun untuk memahami ontologi secara sempurna dan holistik dibutuhkan sebuah penelitian yang meneliti eksistensialitas dari *Dasein*.

e. *Dasein* dan temporalitas

Menurut Heidegger, arti dari keberadaan *Dasein* adalah temporalitas (*Zeitlichkeit*)⁴⁴. *Dasein* merupakan keberadaan yang temporal karena ia berubah dengan proses seiring waktu. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia berubah seiring waktu dan tidak pernah menjadi seseorang yang permanen⁴⁵.

Sederhananya, ketika seseorang mencapai umur tertentu maka panggilan yang disematkan kepada mereka akan berubah, di dalam Bahasa Indonesia bagi laki-laki dewasa

⁴² Ibid hlm.11

⁴³ Ibid hlm.14

⁴⁴ Ibid hlm.16

⁴⁵ Blattner, William. 2007. Temporality. Malden, MA : Blackwell, hlm.8-9

adalah pak, dan bagi perempuan dewasa adalah bu. Ini merupakan salah satu bentuk bukti dari temporalitas yang senantiasa mengubah identitas manusia dari waktu ke waktu.

Untuk memahami relasi *Dasein* dan temporalitas, menurut Heidegger perlu ada destrukurisasi dari historisitas. Historisitas adalah segala sesuatu yang terjadi oleh keberadaan *Dasein*⁴⁶. Sebagai contohnya adalah Presiden SBY pernah makan di warung pecel di Kota Madiun, maka historisitas dari keberadaan Presiden SBY adalah pernah makan di warung pecel di Kota Madiun serta mampu untuk mengubah historisitas pemilik maupun pelayan warung pecel tersebut dengan memberikan identitas bahwa pemilik tersebut berubah dari pemilik sebuah warung pecel di Kota Madiun menjadi pemilik sebuah warung pecel di Kota Madiun yang pernah didatangi oleh Presiden SBY.

f. Destrukturisasi sejarah ontologi

Menurut Heidegger, penelitian non-fenomenologis hanya bisa menentukan posibilitas ontik dari *Dasein* itu saja⁴⁷. Karena esensi dari *Dasein* itu sendiri adalah temporalitas maka *Dasein* itu sendiri hanya bisa menentukan posibilitas ontik yang akan terjadi di masa depan pada *Dasein*. Mengenai masa lalu *Dasein* sudah diteliti secara ontik melalui disiplin sejarah.

Secara faktikal, *Dasein* hanya bisa menjadi sebuah keberadaan yang dimana ia sudah menjadi (*being what it already was*). Identitas dari *Dasein* yang sekarang adalah hasil dari apa yang *Dasein* lakukan terdahulu. *Dasein* itu sendiri mampu untuk memahami historisitas dan faktisitasnya secara ontik.

Namun, yang dibutuhkan disini adalah penelitian ontologis mengenai sejarah *Dasein* yaitu tentang historisitas yang mengakar di dalam keberadaan *Dasein* itu sendiri yaitu tentang pemahaman ontologis dari sejarah *Dasein*. Tradisi pemahaman ontikal pada sejarah *Dasein* akan mengganggu pemahaman *Dasein* secara ontologis itu sendiri. Tradisi demikian hanya akan memberikan pemahaman yang sedikit atas sejarah keberadaan *Dasein* yang sesungguhnya. Penelitian tradisional tersebut hanya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai sejarah keberadaan *Dasein* yang sesungguhnya karena tidak berusaha untuk memahami sumber dari keberadaan *Dasein*, hanya memahami historisitas yang dilakukan oleh *Dasein* secara ontik. Sehingga pengetahuan yang didapatkan sangat sedikit dan tidak menyeluruh.

⁴⁶ Heidegger, Martin. 1962. Op.Cit. *Being...*, hlm.17

⁴⁷ Ibid hlm.18

Penjelasannya adalah pada ilmu sejarah ontologis manusia berusaha untuk memahami tentang sejarah keberadaannya, berusaha untuk memahami berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk keberadaan manusia dan dunia yang umum. Sedangkan pada ilmu sejarah ontik manusia hanya berusaha untuk memahami kaitan antar fenomena atau mengetahui tentang sebuah atau beberapa fakta yang terjadi di masa lalu. Menurut Heidegger, pemahaman ontologis tentang dunia dan *Dasein* ada pada ontologi Yunani⁴⁸. Ontologi Yunani membuktikan bahwa manusia mampu untuk mencoba memahami keberadaan dirinya dan dunia sekitarnya secara menyeluruh. Namun setelah itu muncul tradisi pemahaman ontik yang merusak pemikiran ontologis tentang dunia dari Ontologi Yunani tersebut. Makadari itu untuk mengembalikan pemahaman manusia tentang dunia kepada pemahaman yang ontologis diperlukan sebuah destrukturisasi sejarah ontologi.

Destrukturisasi berusaha untuk membuat sebuah struktur dan garis-garis batas yang baru dalam keilmuan ontik maupun ontologik untuk memahami ontologi manusia secara lebih mumpuni. Destrukturisasi yang dilakukan adalah dalam bentuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan⁴⁹. Pertanyaan-pertanyaan demikian akan memberikan sebuah destrukturisasi atas pertanyaan-pertanyaan ontik dari sejarah itu sendiri.

g. Metode fenomenologis atas intepretasi

Secara etimologis fenomenologi terdiri dari *phenomenon* dan *logos*. Fenomenologi menurut Heidegger adalah ilmu tentang fenomena dimana untuk memahami sebuah fenomena peneliti harus membiarkan fenomena tersebut untuk membuktikan keberadaannya sendiri (*self-evident*).

Penjelasan lengkap Heidegger mengenai konsep-konsep fenomenologi adalah :

a) Fenomena⁵⁰

Fenomena berasal dari bahasa Yunani yaitu *phenomenon* yang berasal dari kata *Phainesthai* yang berarti mampu menunjukkan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa sesuatu yang fenomena adalah sesuatu yang mampu untuk menunjukkan keberadaannya sendiri yang dengan kata lain bentuknya nampak dan manifes. Bahasa Yunani lain atas fenomena adalah *ta onta* (keberadaan). Keberadaan mampu untuk menunjukkan dirinya sesuai dengan bentuk asali dari keberadaan tersebut atau tidak dalam bentuk asalnya.

⁴⁸ Ibid hlm.19

⁴⁹ Ibid hlm.20

⁵⁰ Ibid hlm.25

Penjelasannya adalah manusia dalam bentuk asalnya telanjang dan tidak memakai pakaian, manusia mampu untuk menunjukkan dirinya dalam bentuk non-asali dengan memakai pakaian yang membuat keberadaannya berbeda dengan bentuk asalnya. Penjelasan lainnya adalah ada perbedaan jumlah warna yang mampu diindera oleh mata manusia dengan udang pelangi (*rainbow shrimp*). Tentunya apa yang dilihat oleh seekor udang pelangi dengan seorang manusia mengenai sebuah keberadaan akan berbeda karena perbedaan kemampuan mengindera sebuah organisme.

b) Bentuk

Bentuk (*appearance*) adalah ketika sebuah keberadaan menunjukkan dirinya dalam sebuah media yang bukan dirinya⁵¹. Bentuk sebuah keberadaan tidak menunjukkan bahwa keberadaan tersebut menunjukkan dirinya sendiri (*self evident*) tetapi bentuk sebuah keberadaan adalah bentuk lain yang mampu untuk menunjukkan keberadaan tersebut.

Menunjukkan diri (*appearing*) menurut Heidegger adalah menunjukkan sebuah keberadaan melalui keberadaan yang menunjukkan sesuatu⁵². Sebuah keberadaan yang tidak bisa menunjukkan dirinya akan menunjukkan diri menggunakan keberadaan lain untuk menunjukkan dirinya.

c) Logos

Logos memiliki dua definisi dikotomis, yang satu adalah rasio, kemampuan berfikir, konsep dan sejenisnya dan satunya adalah logos sebagai kemampuan membuat suatu idea menjadi manifes yaitu kemampuan untuk berbicara⁵³ (*deloun/speech*)⁵⁴. Logos sebagai rasio, kemampuan berfikir dan sejenisnya tentunya dipahami dalam bentuk keilmuan, yaitu dimana dalam peristilahan ilmu tentang-sesuatu, selalu digunakan pembahasan sesuatu-logos. Sebagaimana ilmu sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, psikologi adalah ilmu tentang jiwa seseorang, antropologi adalah ilmu tentang manusia dan sebagainya. Dalam bentuk yang kedua, yaitu logos sebagai kemampuan untuk membuat sesuatu menjadi manifes adalah dalam bentuk logos adalah sesuatu yang dibicarakan oleh komunikator dan komunikan. Penjelasannya adalah ketika seseorang berbicara tentang sebuah ide bagaimana masyarakat harus dibangun dan ide tersebut belum pernah dipikirkan oleh manusia manapun di dunia, maka ide tersebut menjadi manifes ketika ada manusia yang memahami ide tersebut selain pemikirnya sendiri.

⁵¹ Ibid hlm.26

⁵² Ibid hlm.26

⁵³ Turkmen, Gulsah Namsali. 2013. Heidegger on the Claim of the Phenomenon: Logos and *Being*. Ankara : Middle East Technical University, hlm.4

⁵⁴ Heidegger, Martin. 1962. Op.Cit. *Being...*, hlm.28

Menurut Heidegger dua-duanya berhubungan dimana ketika manusia menggunakan akal berpikirnya untuk berpikir tentang sebuah idea maka ia akan memanifestasikannya dalam bentuk nyata setidaknya mengkomunikasikannya pada orang lain. Dua-duanya adalah fungsi logos dimana ia adalah rasio sekaligus kemampuan berkomunikasi.

d) Konsep Preliminer dari Fenomenologi

Fenomenologi adalah sains yang berusaha untuk memahami ontologi dari sebuah fenomena. Menurut Heidegger, tidak ada yang dapat menghalangi untuk memahami sebuah fenomena apabila digunakan konsep fenomenologi karena fenomenologi akan berusaha untuk membuat sebuah fenomena menunjukkan dirinya.

Walaupun sebuah fenomena akan menunjukkan dirinya, namun ada fenomena yang disembunyikan oleh sesuatu (*covered up*). Ada beberapa cara sebuah fenomena disembunyikan yaitu yang pertama adalah dimana sebuah fenomena bisa disembunyikan seakan-akan bahwa fenomena tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya.

Mengenai cara yang pertama ini penjelasannya adalah mengenai Candi Borobudur dimana masyarakat terdahulu mempunyai sebuah sistem teknik dan arsitektur yang masyarakat nusantara sendiri sudah melupakannya sebelum bangunan Candi Borobudur itu ditemukan oleh para arkeolog Belanda.

Fenomena Candi Borobudur dan cara membangunnya disembunyikan oleh sesuatu seakan-akan masyarakat nusantara tidak pernah mengetahui cara membangun sebuah candi yang sedemikian rupa. Pada masa itu candi tidak dibangun menggunakan semen dan teknologi modern tetapi dengan batu-batuan dan dengan teknologi yang sampai sekarang masyarakat Indonesia belum bisa menirunya dengan tepat. Padahal sebenarnya fenomena tersebut sudah menunjukkan dirinya dan sudah ditemukan oleh masyarakat nusantara di masa Candi Borobudur tersebut dibangun oleh kerajaan Mataram Hindu-Buddha.

Yang kedua adalah sebuah fenomena bisa dikubur, yaitu ketika sebuah fenomena sudah ditemukan namun dikubur agar tidak terlihat bentuknya seperti apa⁵⁵. Penjelasannya adalah dalam berbagai cerita sains fiksi dan teori konspirasi, terkadang dijelaskan dalam ceritanya bahwa ada sebuah teknologi yang dibangun oleh sebuah kelompok dan memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa berupa virus, senjata, harta karun, obat-obatan dan sebagainya. Setelah itu oleh sebuah kelompok ini teknologi tersebut disembunyikan dengan sangat hati-hati dan aman bahkan kadangkala dibangun sebuah fasilitas pertahanan dan jebakan untuk menyembunyikan teknologi tersebut dengan alasan apabila jatuh kepada tangan yang salah

⁵⁵ Ibid hlm.32

maka akan memberikan bahaya pada umat manusia atau alasan lain seperti hanya orang tertentu yang bisa ditakdirkan untuk mendapatkan teknologi tersebut.

Penyembunyian jenisnya dibagi menjadi dua yaitu penyembunyian aksidental (*accidental covering*) dan penyembunyian karena kebutuhan (*necessary covering*)⁵⁶. Penyembunyian aksidental merupakan sebuah penyembunyian yang tidak diharapkan atau tidak berdasarkan intensi dari sesuatu yang menyembunyikannya.

Penjelasannya adalah berbagai macam artefak yang ada pada masa lalu tersembunyi akibat keruntuhan peradaban yang membuat dan memiliki artefak tersebut. Peradaban itu tentunya ingin untuk mempertahankan artefak yang telah dibuatnya namun tidak bisa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota Pompeii yang hilang akibat adanya letusan Vesuvius maupun kota Atlantis yang menurut mitos-mitos tenggelam ke dasar laut adalah peradaban Romawi dan Yunani kuno yang sampai sekarang letak pastinya maupun peninggalannya masih diperdebatkan oleh para ahli arkeologi dan sejarah.

Kedua peradaban tersebut tentunya tidak menginginkan kehilangan kota maupun peradaban mereka. Namun sebuah insiden terjadi dalam bentuk meletusnya Vesuvius maupun insiden yang sampai sekarang tidak diketahui yang menenggelamkan kota Atlantis. Akhirnya keberadaan pasti dari kota Pompeii maupun kota Atlantis tidak dapat dipastikan dan tersembunyikan secara aksidental akibat insiden-insiden yang tidak diinginkan terjadi.

Yang kedua adalah mengenai penyembunyian yang dibutuhkan. Penjelasannya adalah dimana sesuatu dibutuhkan untuk disembunyikan dengan sengaja atas dasar alasan-alasan tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang pernah disembunyikan oleh pemerintah Amerika dan sudah dibuka sekarang untuk umum yaitu salah satunya adalah bunker Greenbrier Hotel yang dibangun di bawah Greenbrier Hotel di Amerika atas perintah Presiden Eisenhower dalam bentuk “Greek Island Project”.

Bunker ini digunakan untuk rapat kongres di Amerika ketika ada perang nuklir besar-besaran dengan Uni Soviet pada masa perang dingin dan untungnya tidak terjadi perang nuklir besar-besaran yang sesungguhnya. Pemerintah Amerika menyembunyikan keberadaan bunker Greenbrier tersebut pada publik karena untuk menjaga keamanan pemerintah itu sendiri dan penyembunyian tersebut adalah sengaja karena memang kebutuhan dari pemerintah Amerika dalam perang.

⁵⁶ Ibid hlm.32

Selanjutnya adalah mengenai istilah “fenomenal” (*phenomenal*) dan “fenomenologikal” (*phenomenological*). Menurut Heidegger, istilah fenomenal adalah apa yang ditunjukkan oleh fenomena tersebut itu sendiri pada kita. Sedangkan fenomenologikal adalah segala sesuatu yang mengkonstitusikan alat konseptual untuk memahami tentang fenomena.

e) Tema Analisis *Dasein*

Menurut Heidegger, esensi dari sebuah keberadaan bergantung pada eksistensinya⁵⁷. Esensi dari *Dasein* itu sendiri bergantung pada eksistensi dari *Dasein* selama hidupnya. Penjelasaannya adalah seseorang dikenal sebagai apa adalah karena apa yang ia lakukan selama hidupnya. Semisal ada seorang yang sudah berhaji beberapa kali namun memiliki sifat pelit maka ia akan dikenal sebagai “haji pelit”. Pada satu sisi, identitas yang ia dapatkan sebagai “haji pelit” adalah karena apa yang sudah dia lakukan yaitu berhaji dan tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain. Esensinya secara ontik adalah dia seorang haji yang pelit. Salah satu karakteristik dari *Dasein* adalah mengutamakan eksistensi (*existentia*) dibandingkan esensi⁵⁸. Penjelasaannya adalah ketika manusia hidup, manusia akan lebih mengutamakan apa yang akan dia lakukan untuk tetap hidup dibandingkan merefleksikan apa esensi dari apa yang akan dia lakukan. Contohnya adalah dimana seseorang bekerja dengan giat, apa yang dia lakukan dalam bekerja adalah untuk mencari uang dan menghidupi dirinya dan keluarganya agar mampu untuk hidup secara layak dan mungkin mendapatkan beberapa kemewahan dalam hidup.

Jarang sekali seseorang ketika bekerja berusaha untuk memahami esensi dari mengapa manusia harus bekerja, mengapa pekerjaan itu ada dan apa yang akan dilakukan apabila sudah bekerja dan lain sebagainya. Pemikiran demikian adalah pengutamaan eksistensi agar manusia dapat meneruskan hidupnya dibandingkan memahami esensi mengapa manusia melakukan sesuatu.

Konsep berpikir demikian menurut Heidegger adalah keseharian (*everydayness*). *Dasein* dalam kesehariannya akan berusaha untuk melarikan diri dari kesehariannya atau berusaha melupakannya⁵⁹. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia yang mencari kemewahan ataupun hal lain adalah cara melarikan diri atau membuat diri lupa atas keseharian manusia itu sendiri dengan cara meningkatkan eksistensialitas dari eksistensi manusia itu sendiri.

f) Jawaban atas pertanyaan siapakah *Dasein*

⁵⁷ Ibid hlm.40

⁵⁸ Ibid hlm.40

⁵⁹ Ibid hlm.41

Dasein itu sendiri merupakan sebuah subyek⁶⁰. *Dasein* menyebut dirinya sendiri sebagai aku, saya, subyek, dan diri sendiri. *Dasein* tidak memiliki sebuah “kehadiran obyektif” (*objective presence*) seperti keberadaan non-*Dasein*. Dengan kata lain *Dasein* bukanlah sebuah obyek yang diobyekkan oleh *Dasein* yang lainnya.

Penjelasannya adalah *Dasein* sebagai subyek adalah sebuah keberadaan yang mampu untuk menentukan keberadaannya sebagai keberadaan-yang-memang-dirinya (*being what it is*) dan keberadaan-yang-bukan-dirinya (*being what it is not*). *Dasein* juga dalam subyektivitasnya mampu untuk menilai obyek non-*Dasein* dengan penilaian kegunaan (*handiness*) yang tidak mungkin dilakukan oleh *Dasein* kepada *Dasein* yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia tidak bisa dibarangkan, karena manusia yang dibarangkan masih memiliki kesempatan untuk menjadi keberadaan-yang-memang-dirinya dengan cara memberontak kepada orang yang membarangkannya dan cara-cara lainnya.

Namun problematika mengenai esensi dari *Dasein* itu sendiri dengan mudah tersembunyikan secara ontikal walaupun sebenarnya itu adalah problematika ontologikal. *Dasein* dengan eksistensialitasnya lebih mengutamakan eksistensinya dan mempertahankannya dibandingkan berusaha untuk memahami esensinya.

Menurut Heidegger, substansi dari manusia bukanlah jiwa yang merupakan sintesis dari tubuh dan roh (*body and soul*). Substansi dari manusia adalah eksistensi dari manusia itu sendiri⁶¹.

g) Mitda-sein dan keberadaan-dengan-yang lain

Dasein adalah sebuah keberadaan yang berada di dalam dunia (*being in the world*). Dengan kata lain *Dasein* mengada di dalam dunia dan berada dan berinteraksi dengan keberadaan-keberadaan lain yang ada di dalam dunia. *Dasein* sebagai subyek di dunia akan melakukan interaksi dengan obyek-obyek di dunia dimana ia mengada dengan obyek tersebut.

Penjelasannya adalah *Dasein* selama berada di dalam dunia akan mengada dengan obyek lain seperti batu, besi, rumah dan obyek-obyek lainnya. *Dasein* akan menilai kegunaan dari obyek-obyek tersebut untuk dirinya dan berinteraksi dengan obyek-obyek tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada padanya.

Ini juga berlaku pada *Dasein* yang lainnya, dimana ada kepemilikan dalam obyek-obyek tertentu yang mengada dengan *Dasein* yang lainnya. Sebagaimana sebuah obyek yaitu

⁶⁰ Ibid hlm.108

⁶¹ Ibid hlm.110

sebuah uang kertas Rp.100.000,00 yang berada di dompet seseorang. Tentunya orang lainnya yang tidak memiliki minat untuk melakukan kejahatan tidak akan mencoba untuk mencurinya dari dompet orang tersebut. Uang tersebut telah mengada bersama dengan *Dasein* yang memilikinya, dan orang lain melihatnya sebagai keberadaan yang menyertai *Dasein* yang memilikinya tersebut.

Selanjutnya adalah mengenai *Mitda-sein*. Menurut Heidegger *Mitda-sein* adalah keberadaan-di dalam-dirinya orang lain menurut dunia dalam seseorang (*innerworldly being-in-itself of others*)⁶². Penjelasanannya adalah dimana keberadaan-di dalam-dirinya adalah properti yang berlaku pada keberadaan lain selain manusia karena hanya bisa mengada sebagai keberadaan-yang memang-dirinya maka manusia mampu untuk melihat manusia lainnya sebagai obyek, setidaknya menurut imajinasi seseorang tersebut. Contohnya adalah dimana kita menjadi seorang pengusaha besar yang memiliki banyak tenaga kerja dan mempunyai pabrik produksi yang besar. Tentunya di dalam keadaan dimana ekonomi masyarakat sedang terpuruk dan keadaan ekonomi perusahaan sedang stabil, pengusaha cukup mampu untuk memperlakukan pekerjanya sewenang-wenang karena pekerja tersebut memang tidak ada pilihan lain kecuali terus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pengusaha ini telah sukses melakukan obyeksifikasi pada manusia lainnya. Manusia lainnya telah diobyekkan oleh pengusaha tersebut walaupun tidak sepenuhnya terobyekkan. Tetapi setidaknya dalam pikiran pengusaha tersebut ia telah sukses memperlakukan pekerja tersebut sebagai sebuah barang yang bisa ia perlakukan semau-maunya.

Namun ada paradoks yang terjadi di dalam *Mitda-sein*. Ketika seseorang yang membarangkan orang lain melakukan hal tersebut, properti dari orang lain tersebut menjadi paradoks yaitu barang-orang (*thing-person*) dimana kita menganggap mereka sebagai barang sekaligus manusia⁶³. Penjelasanannya adalah, sekalipun pengusaha tersebut memperlakukan pekerjanya seperti sebuah barang, dia masih memanggil pekerja tersebut dengan nama dan memahami bahwa pekerja tersebut adalah manusia yang bisa sewaktu-waktu melakukan hal lain yang membahayakan pengusaha tersebut atau mampu melepaskan diri dari pembarangannya.

Lawan dari *Mitda-sein* adalah mengada-dengan-satu sama lainnya (*being with one another*). *Dasein* yang mengada dengan satu sama lainnya akan memberikan aliansi yang

⁶² Ibid hlm.112

⁶³ Ibid hlm.113

otentik atas manusia dengan manusia lainnya. *Dasein* yang demikian akan mengada bersama dengan *Dasein* lain dalam bentuk yang bebas dan membebaskan satu sama lainnya. Penjelasan nya adalah ketika ada seseorang mengada bersama dengan orang lain maka dia berhubungan dengan orang tersebut adalah dengan ketulusan dan kesetaraan. Semisal ketika seseorang masih menuntut ilmu di sekolah, maka murid-murid yang berteman satu sama lainnya berdasarkan kecocokan dan alasan masing-masing yang non pragmatis akan berteman dengan tulus karena memang ada kecocokan diantara keduanya. Murid-murid tersebut mengada dengan satu sama lainnya dan memberikan kebebasan penuh untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Penjelasan yang kedua adalah di dalam sebuah perusahaan, pertemanan yang tidak didasarkan pada pragmatisme ataupun koneksi agar mendapatkan pekerjaan atau mendekati agar bisa menyusup dari belakang adalah mengada dengan satu sama yang lainnya. Konsekuensinya tentunya pertemanan tersebut bebas dan tidak menuntut adanya pembarang-orangan salah satu diantara mereka.

Konsekuensi ontologis dari mengada dengan satu sama yang lainnya adalah keumuman (*averageness*)⁶⁴. Seseorang yang mengada dengan satu sama yang lainnya akan membentuk mereka (*they*) di mata seseorang yang tidak mengada dengan mereka. Keumuman ini dibentuk dari dua hal yaitu kesamaan dari mereka sebelum mengada dengan masing-masing ataupun kesamaan yang dihasilkan akibat mengada dengan masing-masing. Penjelasan nya adalah ada seseorang yang menyukai mobil Ferrari, lalu dia mencari teman yang sama-sama menyukai mobil Ferrari dan membentuk sebuah komunitas. Seseorang tersebut membuat kontak untuk mengada bersama dengan teman yang sama-sama menyukai mobil Ferrari tersebut, lalu mereka membuat komunitas yang dimana orang diluar komunitas tersebut akan menganggap anggota komunitas tersebut sebagai mereka.

Lalu muncul keumuman dari setiap anggota komunitas tersebut yang dihasilkan dari kesamaan minat dan apa yang telah mereka lakukan bersama di dalam komunitas tersebut, yang akan membuat komunitas tersebut berbeda dengan komunitas pecinta Ferrari lainnya.

1. Etika

Dalam bagian ini akan diberikan beberapa penjelasan teoritik tentang etika menurut para filsuf eksistensialis sekaligus juga diberikan etika Kantian sebagai pendahulu dan

⁶⁴ Ibid hlm.119

pembandingan mengenai etika non-eksistensial yang masih mendasari maupun memberikan pengaruh pada eksistensialisme.

i. Moral Kantian

a. Dasar-dasar pengetahuan Kantian

Immanuel Kant membagi bidang-bidang keilmuan sesuai dengan filsafat Yunani kuno yaitu menjadi tiga bidang, ilmu alam, logika dan etika. Immanuel Kant menyatakan ada dua jenis pengetahuan yaitu pengetahuan material yang melingkupi tentang obyek dan pengetahuan formal yang mengkaji tentang pemahaman dan rasio. Ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan formal disebut dengan logika, dan ilmu yang mengkaji tentang material dibagi menjadi dua yaitu ilmu yang mengkaji tentang alam dan kebebasan manusia. Ilmu yang mengkaji tentang alam dinamakan ilmu alam dan yang mengkaji tentang kebebasan manusia dinamakan ilmu etika. Logika tidak memiliki obyek empirikal apapun, sedangkan pengetahuan empirikal memiliki ilmunya sendiri, yaitu filsafat empirikal yang didasarkan pada pengalaman. Diantara keduanya ada metafisik yaitu pengkajian secara apriori terhadap obyek-obyek empirikal yang nyata.

Dalam ranah etika dibagi menjadi dua yaitu metafisika moral yang berarti penggunaan ilmu-ilmu metafisik dalam mengkaji tentang etika dan antropologi praktis yang berarti penggunaan ilmu-ilmu empirikal untuk mengkaji tentang etika manusia. Dalam karya-karya moralitas Kantian, Kant mengkaji tentang metafisika dari moral itu sendiri.

b. Pengetahuan Filosofis tentang Moral

a) Kehendak Baik

Menurut Kant, satu-satunya hal yang bisa dinyatakan sebagai kebaikan adalah kehendak untuk berbuat baik (*Goodwill*), Kant berargumen bahwa banyak sekali kualitas kebaikan seseorang tidak mampu untuk menciptakan kebaikan tanpa adanya kehendak untuk berbuat baik/niat baik. Sama halnya dengan banyak keberuntungan dan kekuatan seperti harta dan kekuatan fisik justru mampu untuk membuat manusia menjadi arogan ketika tidak diimbangi oleh niat baik. Menurut Kant, kehendak untuk berbuat baik adalah kehendak yang baik-di dalam-dirinya (*good-in-itself*) sendiri. Sederhananya adalah ketika seseorang ingin berbuat baik, maka kehendaknya adalah kehendak yang baik. Kehendak untuk berbuat baik bukanlah kehendak yang memiliki tujuan untuk kemanfaatan seseorang ataupun orang lain, tetapi karena ia ingin berbuat baik. Menurut Kant, kehendak untuk berbuat baik lahir dari rasio manusia. Rasio mampu untuk membuat sebuah kehendak yang baik-di dalam-dirinya. Dibantu dengan insting yang mampu untuk membentuk cara-cara

berbuat baik dan alam yang memberikan sumber daya untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut.

b) Kewajiban

Immanuel Kant menyatakan bahwa perbuatan baik selalu dalam bentuk kewajiban⁶⁵. Ia mencontohkan bahwa ada seorang penjaga toko yang menjalankan kewajibannya mematok harga yang sama bagi setiap orang. Jika penjaga toko tersebut mematok harga yang lebih mahal kepada orang yang kaya ataupun mematok harga yang lebih murah kepada orang yang miskin maka ia tidak berbuat baik karena tidak melakukan kewajibannya untuk mematok harga yang sama bagi setiap orang. Selain itu juga penjaga toko tersebut mementingkan kehendak pribadinya karena perasaan kasihannya untuk mematok harga yang berbeda kepada orang yang miskin. Menurut Kant, sebuah tindakan baik tidak lahir dari tujuan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut, tetapi melalui maksim yang terlibat di dalam tindakan tersebut. Contohnya adalah semisal dalam sebuah daerah dinyatakan bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah, apapun alasannya. Ada seseorang mencuri karena ia ingin memberikannya kepada orang miskin (tujuan dalam tindakan ini merupakan tujuan yang bermanfaat), namun tetap saja dia melakukan kesalahan karena ia tidak menjalankan kewajibannya yaitu dilarang mencuri.

Walaupun tujuan yang dilakukannya adalah tujuan yang bermanfaat namun tetap saja maksim yang terlibat di dalam tindakannya mengandung kesalahan-kesalahan terhadap kewajiban. Selain itu juga tindakan yang baik selalu menaati hukum yang ada di daerah tersebut ataupun hukum universal. Hukum universal lahir dari maksim-maksim yang dianggap baik oleh setiap orang. Kant mencontohkan bahwa jika ia dan banyak orang lain di dunia melakukan pelanggaran akan janji, maka maksim pelanggaran janji tersebut tidak akan pernah menjadi sebuah hukum universal karena ia tidak dianggap menjadi perbuatan baik oleh setiap orang di dunia. efek dari pelanggaran janji tersebut tidak akan disukai oleh setiap orang di dunia, sehingga tidak akan dimunculkan kewajiban untuk melanggar janji secara universal.

c) Kemurnian Moralitas

Menurut Kant, moralitas merupakan sebuah prinsip yang sepenuhnya apriori. Ia dilepaskan dari pengalaman-pengalaman empirik manusia seperti kesempurnaan, kebahagiaan, dan lain-lainnya. Moralitas yang apriori ini akan masuk kedalam ranah praktikal kehidupan manusia tanpa dikurangi oleh pengalaman-pengalaman empirik

⁶⁵ Kant, Groundwork for Metaphysics of Morals p.9

manusia sedikitpun. Memang untuk menjadikan konsep moralitas sebagai konsep praktikal dibutuhkan antropologi praktis sebagai sudut pandang empirikalnya, namun dasarnya harus sesuatu yang bersifat aprioritik dan metafisikal. Setiap manusia memiliki kemampuan rasional untuk berpikir menggunakan rasionya secara aprioritik. Berbeda dengan alam yang hidup sesuai dengan hukum-hukum alam. Manusia mampu untuk mendapatkan pengetahuan dari hukum-hukum alam menggunakan rasio praktis.

Terkadang rasio praktis ini akan terkalahkan oleh keinginan-keinginan subyektif, maka dibutuhkan pagar-pagar obyektif untuk memagari keinginan subyektif ini demi obyektifitas rasio praktis ini. Ketika sebuah prinsip obyektif menghadangi kehendak subyektif maka prinsip obyektif ini dinamakan sebagai sebuah perintah (*command*). Ekspresi verbal yang muncul dari perintah tersebut dinyatakan sebagai imperatif (*imperative*). Setiap imperatif dinyatakan dengan kata “seharusnya” (*ought*)⁶⁶. Setiap imperatif selalu berbentuk larangan ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu. Anjuran untuk melakukan sesuatu dilakukan untuk menyatakan kepada seseorang bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang baik (walaupun orang tersebut mungkin tidak selalu melakukannya). Contohnya adalah ketika seseorang membayar pajak tepat waktu, maka ia telah melakukan kewajibannya dengan baik. Di satu sisi ada juga imperatif yang melarang untuk melakukan sesuatu. Imperatif ini lahir agar seseorang tidak melakukan keinginan-keinginan subyektifnya yang berlawanan dengan kehendak obyektif setiap orang yang ada. seperti larangan untuk membunuh, setiap orang di dunia memiliki keinginan untuk tidak dibunuh oleh orang lain sehingga membentuk imperatif yang menyatakan bahwa membunuh dilarang.

Hal ini didasarkan kepada obyektifitas dimana setiap manusia tidak boleh melakukan keinginan subyektifnya berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik yang dialaminya yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman empirik orang lain.

d) Imperatif Kategorikal dan Hipotetikal

Kant membagi imperatif menjadi dua jenis yaitu imperatif kategorikal dan imperatif hipotetikal. Imperatif kategorikal adalah imperatif yang didasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan obyektif tanpa menjelaskan sebuah tujuan yang nyata dan berasal dari rasio manusia. Sedangkan imperatif hipotetikal lahir dari kebutuhan-kebutuhan atas kehendak yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya. Imperatif hipotetikal menyatakan bahwa sebuah tindakan merupakan tindakan baik bagi tujuan seseorang atau tujuan yang bisa dimiliki

⁶⁶ Das Sollen yang digunakan oleh Kelsen dan ahli hukum Indonesia merupakan bahasa jerman dari kata “seharusnya”.

seseorang. Imperatif kategorikal bisa dicontohkan sebagai peraturan perundangan ataupun etika-etika di dalam kehidupan yang mengatur tentang bagaimana seseorang harus berlaku.

Seperti seseorang harus menghormati orang tuanya, seseorang bisa saja memanfaatkan orang tuanya dan tidak menghormatinya demi keinginan subyektif pribadinya dan kemanfaatan yang ia dapatkan dari orang tuanya dibandingkan ketika ia menghormati orang tuanya. Namun imperatif kategorikal seperti demikian ini yang tidak memiliki tujuan yang jelas diyakini oleh setiap manusia di dunia sebagai tindakan yang baik. Sedangkan imperatif hipotetikal merupakan tindakan-tindakan baik bagi tujuan seseorang atau tujuan yang bisa dimiliki seseorang, dapat dicontohkan dalam bentuk tindakan memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu. Tindakan memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu ini merupakan tindakan yang baik bagi tujuan empirikal seseorang semisal ingin mendapatkan pengakuan ataupun prestise dari orang lain, ataupun tujuan yang lebih idealis semacam ingin memperbaiki masyarakat di negaranya.

e) Kebaikan Universal dan Kehendak Subyektif

Menurut Kant, setiap manusia seharusnya bertindak seakan bahwa tindakannya akan menjadi tindakan kebaikan universal. Maksudnya adalah manusia siap atas konsekuensi tindakan yang akan dilakukannya, apakah akan memberikan kebaikan universal ataupun justru akan menimbulkan keburukan-keburukan universal. Ketika manusia bertindak melakukan keburukan universal, manusia tidak akan menginginkan bahwa tindakannya akan menjadi kebaikan universal namun ia menyatakan di dalam hatinya bahwa ia melakukan keburukan hanya sekali ini saja dengan menyatakan bahwa ia memiliki alasan baik untuk melakukan keburukan tersebut.

Semisal ada seseorang yang tidak menepati janji, maka ia akan menyatakan dalam hatinya bahwa ia akan menepati janji selanjutnya dan berharap tidak seluruh manusia di dunia akan mengikuti tindakan tidak menepati janji ini (dia berharap bahwa jika ada orang berjanji dengannya maka orang tersebut akan menepatinya) dan menyatakan di dalam hatinya (ataupun verbal) bahwa ia memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perbuatan tersebut. Tindakan-tindakan yang melanggar kewajiban ini lahir dari kehendak subyektif manusia yaitu temperamen manusia, perasaan manusia dan tendensi manusia untuk tidak mampu menghimpun seluruh kehendak keberadaan rasional.

Sehingga menurut Kant, setiap hal yang bersifat empirikal jika digunakan sebagai bahan untuk membentuk moralitas akan menjadi tidak berguna dan justru membuat moralitas murni yang bersifat apriori menjadi rusak. Moralitas yang didasarkan pada hal-hal empirik hanya akan mengkaji berdasarkan apakah sesuatu membuat senang atau tidak senang,

apakah sesuatu itu menyenangkan secara inderawi ataupun rasa, apakah rasanya sesuatu tersebut berbeda dengan kepuasan rasional umum, apa yang menentukan perasaan senang dan tidak senang manusia, bagaimana perasaan tersebut membentuk hasrat dan keinginan, bagaimana hasrat dan keinginan membentuk maksim-maksim tindakan. Segala problematika di atas menurut Kant bukanlah ruang lingkup filsafat namun ruang lingkup psikologi empiris. Menurut Kant, segala macam kehendak empirikal didasarkan pada kehendak manusia yang tidak diberi pengarahan (*unguided reason*). Kant mempertanyakan apakah kehendak manusia yang tidak diberi pengarahan ini mampu untuk membentuk kehendak-kehendak obyektif secara apriori tanpa membawa hal-hal yang bersifat empirikal.

f) Tujuan Subyektif dan Tujuan Obyektif

Tujuan subyektif menurut Kant merupakan tujuan yang didasarkan pada pelaku tindakan. Sedangkan tujuan obyektif merupakan tujuan yang didasarkan pada setiap kehendak keberadaan rasional di dunia⁶⁷. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan sebuah tindakan dengan tujuan subyektif adalah ketika ia ingin menjadi kaya, walaupun ia melakukan tindakan yang baik yaitu tetap bekerja keras dan tidak melanggar hukum apapun selama ia bekerja dan berusaha tetap saja tindakannya merupakan tindakan yang bertujuan subyektif. Di satu sisi orang yang memiliki tujuan obyektif merupakan orang yang bertindak berdasarkan kehendak seluruh keberadaan yang rasional. Contohnya adalah ketika seseorang bertindak menaati hukum karena ia merasa tindakan tersebut adalah hal yang baik bagi setiap orang, semisal membayar pajak tepat waktu. Maka tindakan orang tersebut merupakan tindakan yang didasarkan kepada tujuan-tujuan obyektif dari hukum itu sendiri.

g) Hukum Universal dan Kehendak Universal Keberadaan Universal

Menurut Kant, setiap legislasi praktis berasal dari alasan-alasan obyektif universal yaitu berasal dari hukum-hukum alam. Sedangkan alasan-alasan subyektifnya merupakan tujuan-tujuan dari segala keberadaan rasional itu sendiri. Kehendak manusia yang membentuk hukum-hukum universal tersebut akan tunduk terhadap hukum tersebut dan menjadi subyek yang membentuk hukum tersebut. Manusia sebagai subyek dari hukum universal akan juga menjadi kehendak yang membentuk hukum universal tersebut⁶⁸.

h) Maksim

⁶⁷ Ibid p.28

⁶⁸ Ibid p.31

Menurut Kant setiap Maxim memiliki :

- I. Bentuk/Form : setiap maksim harus dipilih dengan mendasarkan bahwa maksim tersebut akan menjadi hukum universal. Sehingga bentuk setiap maksim merupakan bentuk yang universal. Sederhananya adalah sebuah maksim tindakan yang didasarkan pada maksud bahwa maksim itu akan menjadi maksim yang universal maka akan dibentuk seuniversal mungkin yang mampu untuk diterima oleh setiap manusia di dunia.
- II. Materi/Matter : Kant menyatakan materi adalah sebuah tujuan (end). Segala tujuan yang dipilih oleh setiap orang merupakan tujuan yang relatif. Namun tujuan tersebut harus disubordinasikan kepada segala keberadaan rasional. Sehingga sebuah maksim bukan dilakukan atas tujuan tertentu namun merupakan tujuan itu sendiri di dalam dirinya.
- III. Setiap maksim harus mampu mengharmoniskan setiap relung (realm) tujuan (realm of ends) dan relung alamiah (natural realm).

Setiap tindakan yang didasarkan kepada kriteria-kriteria di atas akan memiliki nilai kebaikan di dalam dirinya. Ketika seseorang bertindak dengan mendasarkan dirinya pada hukum universal dan meyakini bahwa tindakannya akan berpengaruh ataupun menjadi hukum universal maka ia akan bertindak secara absolut baik.

Semisal seseorang kebingungan untuk memilih tindakan beramal ataupun tidak untuk melakukan tindakan beramal, maka ketika ia berharap bahwa tindakan beramalnya akan menjadi sebuah hukum universal dan diakui sebagai tindakan yang baik oleh setiap keberadaan rasional maka tindakan tersebut akan menjadi tindakan yang baik secara universal.

Tindakan tersebut tentunya akan diusahakan untuk menjadi tindakan yang seuniversal mungkin, yang mudah untuk dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa memerlukan pencampuran budaya apapun. Semisal ketika tindakan beramal tidak diperlukan adanya restriksi tertentu mengenai apa yang harus diamalkan dan apa yang harus diritualkan maka tindakan ini akan lebih universal dibandingkan yang memiliki bentuk ritualitas tertentu yang memerlukan seseorang harus mengikuti ritus tertentu untuk melakukannya.

i) Akal dan relasinya terhadap hukum moral

Menurut Kant, hukum moralitas merupakan sebuah hukum yang bebas dibandingkan dengan hukum alam yang deterministik⁶⁹. Menurutny moralitas bersumber dari rasio

⁶⁹ Kant, Immanuel. 1998. Groundwork for Metaphysics of Morals. Cambridge : Cambridge University Press. hlm.4

murni manusia, sehingga kebebasan manusialah yang menentukan moralitas sepenuhnya berdasarkan pemikiran rasionya. Manusia juga memiliki kebebasan untuk memilih moralitas seperti apa yang mereka anut, apakah moralitas tersebut berkonformitas terhadap moralitas universal ataupun tidak.

Ada dua jenis hukum moralitas yaitu hukum moralitas yang dipaksakan dengan kekerasan yang disebut dengan hukum yudisial (judicial laws), dan hukum moralitas yang tidak dipaksakan dengan kekerasan yang disebut dengan hukum etis kehormatan (ethical laws of virtue). Ketika seseorang bertindak sesuai dengan hukum yudisial maka orang tersebut melakukan tindakan yang legal. Di satu sisi ketika seseorang bertindak sesuai dengan hukum etis kehormatan maka orang tersebut melakukan tindakan yang terhormat. Penjelasanannya adalah seseorang bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum, semisal tidak mencuri ataupun tidak menipu. Orang tersebut bisa saja taat terhadap hukum tersebut karena ia memang taat ataupun karena ia takut kepada hukuman fisik yang akan diterimanya.

Di satu sisi tindakan yang terhormat tidak memiliki sanksi yang berbentuk kekerasan, namun bisa lebih kepada seseorang tersebut melakukan tindakan yang terhormat karena ia memang menginginkan untuk melakukan tersebut. Semisal seseorang yang menolong seekor cacing kepanasan dengan menaruhnya kembali ke tanah yang agak gembur. Tindakan ini bukan merupakan tindakan yang memiliki nilai hukum baik dalam bentuk keharusan maupun larangan, namun seseorang ini melakukan tindakan baik tersebut berdasarkan keinginannya sendiri yaitu konformitas terhadap nilai etis kehormatan.

j) Konsep-Konsep Kantian

- I. Obligasi (Obligation) : kebutuhan atas pemilihan tindakan secara bebas dalam sebuah imperatif kategorikal rasional
- II. Imperatif (Imperative) : sebuah peraturan praktis dimana tindakan yang dirumuskan secara subyektif menjadi tindakan yang perlu.
- III. Imperatif Kategorikal (Categorical Imperative) : sebuah imperatif kategorikal adalah segala hukum yang menyuruh ataupun memerintah. Imperatif ini menunjukkan bahwa sebuah tindakan diperlukan untuk dilakukan tanpa mengacu kepada alasan-alasan empirikal ataupun tujuan tertentu.
- IV. Tindakan yang dibolehkan (Permitted Action) : ketika sebuah tindakan tidak bertabrakan dengan imperatif dan obligasi apapun. Jika tidak ada hukum yang mengatur diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkannya sebuah tindakan tertentu maka tindakan tersebut dibolehkan untuk dilakukan.

- V. Kewajiban (Duty) : suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Setiap orang bisa harus untuk melakukan suatu tindakan tertentu baik dalam bentuk yang sama satu sama lainnya ataupun bentuk yang berbeda.
- VI. Hukum praktikal bermoral (morally practical law) : imperatif kategorikal yang memberikan obligasi dalam bentuk tindakan fisik tertentu.
- VII. Yang sudah dilakukan (deed) : sebuah tindakan yang dilakukan berdasarkan pilihan yang bebas (*free choice*). Pelaku tindakan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan ini.
- VIII. Hal yang baik dan hal yang buruk yang sudah dilakukan (right deed and wrong deed) : sesuatu yang sudah dilakukan bisa berupa tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk jika berkoherensi dengan kewajiban, jika iya maka itu adalah tindakan yang baik, jika tidak maka itu adalah tindakan yang buruk.
- IX. Transgresi (transgression) : sebuah hal yang berlawanan dengan kewajiban.
- X. Kesalahan (fault) : transgresi yang tidak disengaja. Namun tanggungjawab tindakan ini masih pada pelakunya.
- XI. Kejahatan (Crime) : transgresi yang disengaja.
- XII. Adil dan tidak adil (just and unjust) : apa yang sesuai dengan hukum maka dapat dinyatakan sebagai adil, dan yang tidak sesuai dengan hukum dapat dinyatakan tidak adil.
- XIII. Person (Person) : seorang subyek yang dapat dinyatakan akuntabel oleh hukum. Seorang subyek tidak bisa menjadi subyek hukum lain yang tidak ia buat untuk dirinya sendiri⁷⁰.
- XIV. Benda (Thing) : sebuah obyek yang tidak bisa diaplikasikan tanggungjawab apapun kepadanya.
- XV. Konflik kewajiban (Conflict of Duties) : ketika ada dua atau lebih kewajiban yang berkonflik satu sama lainnya. Menurut Kant jika ada konflik antar kewajiban yang harus diutamakan adalah kewajiban yang mengandung dasar atas obligasi yang lebih besar (stronger ground of obligation).
- XVI. Hukum eksternal (external laws) : hukum obligatoris yang dimana dimunculkan dari pembuatan hukum secara eksternal
- XVII. Hukum alam (natural laws) : hukum eksternal yang dianggap obligasi oleh rasio manusia secara apriori tanpa membutuhkan pembuatan hukum secara eksternal.

⁷⁰ Dalam hukum modern, seseorang dianggap telah memberikan haknya untuk melakukan pembentukan hukum bagi dirinya sendiri melalui representasi. Ketika seseorang telah mengikuti proses elektoral maka ia memberikan hak untuk membentuk hukum bagi dirinya sendiri kepada representasinya. Maka hukum yang dibuat representasi tersebut kepada setiap orang di yurisdiksinya dianggap valid.

- XXVIII. Hukum positif (positive laws) : hukum alam yang tidak mengikat tanpa adanya pembuatan hukum secara eksternal. Seseorang bisa membentuk hukum-hukum yang terdiri dari hukum-hukum positif saja, namun membutuhkan hukum alam untuk memberikannya legitimasi mengikat orang lain (authority to bind others).
- XIX. Hukum praktis (practical law) : sebuah prinsip yang membuat tindakan tertentu sebagai kewajiban
- XX. Maksim (Maxim) : sebuah prinsip subyektif atas tindakan tertentu. Setiap orang memiliki maksim yang berbeda walaupun mengenai sebuah hukum yang sama.
- XXI. Legalitas (legality) : konformitas sebuah tindakan dengan hukum-hukum kewajiban.
- XXII. Moralitas (morality) : konformitas maksim sebuah tindakan dengan sebuah hukum
- XXIII. Prinsip kewajiban (principle of duty) : sebuah prinsip yang menjelaskan bagaimana cara seseorang seharusnya bertindak.
- XXIV. Prinsip tertinggi doktrin moralitas (supreme principle of the doctrine of morals) : bertindaklah pada sebuah maksim yang menjadi hukum universal, segala maksim yang tidak menjadi hukum universal selalu berkebalikan dengan moralitas.
- XXV. Kebebasan sebagai karakteristik negatif (freedom as a negative property) : tidak diharuskan untuk bertindak karena tidak adanya alasan-alasan tertentu.
- XXVI. Kebebasan sebagai karakteristik positif (freedom as a positive property) : kemampuan untuk menahan hal-hal yang tidak perlu
- XXVII. Kebebasan untuk memilih (freedom of choice) : kebebasan untuk memilih menurut Kant bukanlah kebebasan untuk menuruti atau tidak menuruti hukum universal yang ada. namun pada menurutnya seseorang kepada maksim universal tanpa adanya paksaan apapun.
- XXVIII. Hukum moral praktikal (practical moral law) : sebuah preposisi yang mengandung sebuah imperatif kategorikal (perintah)
- XXIX. Legislator (lawgiver) : seseorang yang memerintah melalui hukum.

ii. Nietzsche

Nietzsche juga memiliki pemikiran etika dan moralitas itu sendiri yang sedikit banyak mempengaruhi struktur etika eksistensial. Beberapa pemikirannya akan dijelaskan di bawah ini yaitu :

a. Genealogi Moralitas

Nietzsche menyatakan bahwa moralitas baik dan buruk selama ini dipisahkan dari historisitas⁷¹ yakni dimana orang-orang hanya melihat moralitas sebagai sesuatu yang inheren dan hadir tanpa adanya kaitan antara ruang dan waktu terhadap moralitas. Menurutny dibutuhkan sebuah metode genealogis untuk melihat kesejarahan moralitas yang ada di dunia, mengenai etiologi dari moralitas tersebut, bagaimana moralitas bisa muncul di dunia dan diyakini oleh manusia. Bagi Nietzsche, moralitas lahir dari habitus yang dilakukan oleh manusia dimana ia mencontohkan suatu tindakan dapat dipuji dan menjadi sebuah tindakan terpuji sampai generasi-generasi selanjutnya melupakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang pernah dipuji sebelumnya dan menjadi sebuah kebiasaan untuk memuji tindakan tersebut. Selain itu juga, bagi Nietzsche, ada beberapa orang yang mampu menentukan sebuah tindakan baik atau buruk, yakni dari orang-orang “baik” yang mampu menentukan bahwa tindakannya berdefinisi baik bagi orang lain. Namun di masa sekarang, mulai muncul orang-orang dengan insting ternak (*herd instinct*) yang mulai dominan dan menentukan moralitas berdasarkan kolektivitas dan jumlah suara mereka yang besar untuk menentukan baik dan buruk berdasarkan moralitas ternak mereka. Kekuasaan para manusia ternak ini lahir dari jumlah dan konsensual bersama banyak orang sekaligus untuk menekan dominasi dari orang-orang yang kuat secara personal.

Nietzsche memberikan argumentasi filologis, dimana dalam bahasa Jerman, kata buruk (*schlecht*) berkaitan dengan kata simpel (*schlicht*), dengan kata lain pada masa lalu secara filologis, kaum aristokratik dan bangsawanlah yang mengkategorisasikan keburukan dengan orang-orang simpel (*simple folk*) dengan kata lain rakyat biasa yang tidak memiliki darah aristokrat. Kaum aristokratik, baik bangsawan maupun kelas rohaniwan (*priestly class*) adalah yang menentukan baik dan buruk bagi seluruh manusia di masyarakat tersebut. Baik secara kode kehormatan bagi seorang bangsawan, agama bagi seorang pendeta dan bagaimana mereka harus bersikap kepada rakyat biasa dan bagaimana rakyat harus bersikap kepada mereka (mereka melindungi dan mengayomi rakyat, memerintah dengan baik kepada rakyat namun rakyat harus menghormati *previlese-previlese* mereka, bahkan rakyat yang tidak memiliki rasa hormat boleh dibunuh oleh mereka).

Moralitas kebaikan juga didasari oleh orang-orang aristokratik-rohaniwan ini dimana mereka menentukan secara seksual, orang-orang yang murni dan baik tentunya tidak akan tidur dengan kaum yang lebih rendah dari dirinya, terutama prostitusi, menghindari makan makanan kaum bawah yang dianggap kotor, menghindari tempat tinggal yang kotor dan

⁷¹ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1989. *Genealogy of Morals*. New York: Vintage Books, hlm.11

jelek serta moralitas lainnya yang semuanya merendahkan kebiasaan-kebiasaan kaum bawah (yang seringkali melakukan hal-hal tersebut karena terpaksa, tidak ada uang untuk membeli rumah bagus, makanan bagus, maupun menjadi prostitusi karena tidak memiliki uang dan kesempatan untuk bekerja di ranah yang lebih baik).

Namun muncul moralitas-moralitas baru yakni ketika ada pemberontakan-pemberontakan budak, dimana orang-orang miskin rendah ini menentukan moralitas bagi semuanya. Mereka melakukan profanisasi terhadap moralitas tuan dan melakukan sakralisasi terhadap moralitas budak. Mereka melakukan pemberontakan atas nama umat manusia dan menyatakan dirinya sebagai sebuah umat yang bersatu (Nietzsche juga menyatakan bahwa pasca adanya pemberontakan budak, muncul kawin campur antar ras, status dan etnis, dimana sebelumnya kaum bangsawan biasanya cukup hati-hati dalam menentukan kemurnian darahnya). Kaum bangsawan biasanya memiliki moralitas dengan artikulasi yang tinggi, dimana mereka menyatakan dirinya tinggi, terhormat (noble), kesatria (chivalrous) dan sebagainya. Sedangkan moralitas kaum rendah biasanya menggunakan kata-kata yang mengundang simpati orang lain seperti tertindas, menyedihkan, miskin, kecil dan sebagainya.

Kebaikan bagi kaum aristokrat ditentukan oleh dirinya, dimana ia sebagai minoritas dalam masyarakat, menentukan baik dan buruk tindakan bagi seluruh orang lain. Ialah yang menentukan suatu hal disebut baik (biasanya didasari oleh tindakannya sendiri dan interpretasi atas tindakannya sendiri atau berdasarkan tindakan orang lain yang disukainya) maupun buruk (biasanya didasari oleh tindakan yang tidak disukainya maupun interpretasi atas tindakan orang lain yang tidak disukainya), namun bagi Nietzsche, kaum tertindas biasanya menentukan moralitas dari resiprositas tindakan orang lain kepadanya. Nietzsche menyatakan moralitas rendah biasanya menyatakan bahwa “jika ada orang lain yang jahat kepada kita, maka kita jangan menjadi seperti dia dan jangan lakukan apa yang dia lakukan”. Sehingga moralitas tersebut lahir dari kaum aristokrat yang menjahati dia ataupun sesama orang rendah yang menjahati dia, lalu diantitesakan sebagai sebuah moral kebaikan. Bagi Nietzsche, orang-orang ini orang-orang yang lemah karena dia memang lemah, tidak memiliki kekuatan apapun untuk menentukan moralitasnya selain membalik tindakan orang lain yang dilakukan kepadanya.

Dalam sejarah, muncul dua tipe masyarakat etis, yakni masyarakat tuan yang diwakili oleh Romawi, dan masyarakat budak yang diwakili oleh Yudea. Romawi bertempur melawan Yudea dalam menentukan nilai-nilai moralitas di dunia. Romawi mewakili nilai moralitas tinggi yakni kekuatan, kekuasaan, harga diri dan sebagainya dan Yudea mewakili

moralitas rendah yakni belas kasih, rendah diri dan sebagainya. Namun akhirnya Romawipun juga mengalami fase dimana ia dihancurkan oleh moralitas rendah dan terpaksa menginkorporasikan moralitas rendah di dalamnya (fase Byzantium, dimana Romawi yang beragama Kristen kehilangan kemampuan militernya yang hebat, kekejamannya dan kekuasaannya yang dihormati oleh orang Eropa, bahkan sampai Romawi tidak diakui lagi sebagai Romawi, ia disebut kekaisaran Byzantium yang sebenarnya tidak ada putusnya dengan Romawi dan masyarakat barat membuat Romawi mereka sendiri yang diisi oleh orang Jermanik yakni Perancis (orang-orang Perancis merupakan keturunan dari suku Franka yang melatinisasi dirinya)(Kekaisaran Romawi Suci jaman dinasti Carolingia) dan Jerman (Kekaisaran Romawi Suci jaman dinasti pasca-Carolingia).

Sebenarnya, menurut Nietzsche pada intinya adalah moralitas awalnya dibuat oleh kaum yang kuat, namun dihancurkan dan diganti dengan moralitas kaum yang lemah. Pada intinya adalah moralitas berganti karena adanya pergantian kekuasaan antara penentu moralnya. Moralitas tidak lebih dari sekedar efek dari hasrat kuasa yang menjadi realitas, dimana moralitas dibentuk antara hasil dari pergelutan kekuasaan maupun alat untuk mempertahankan kekuasaan dari kaum yang berkuasa. Dalam sejarah, menurut Nietzsche, menghasilkan demikian adanya. Memang adanya revolusi-revolusi dari kaum yang lebih lemah mampu untuk menghancurkan moralitas kaum yang lebih kuat dalam sejarah. Selain itu juga dominasi kaum kuat juga mampu menentukan moralitas kaum lemah. Kaum yang lemahpun juga memiliki keinginan untuk menghapus moralitas kaum yang kuat, seperti adanya partisipasi politik yang bebas untuk diikuti oleh setiap orang, berhentinya penindasan dari segi ekonomi yakni dari kaum borjuis kepada proletar, dihapuskannya negara-bangsa dan sebagainya. Sedangkan kaum kuat condongnya kepada menentukan moralitas bagi orang lain untuk mempertahankan kekuasaannya maupun preferensi tindakan apa yang ia sukai maupun tidak sukai.

b. Perasaan Bersalah dan Hati Nurani yang Buruk

Manusia, menurut Nietzsche memiliki prerogatif untuk melakukan janji. Hati Nurani (*Conscience*) adalah janji-janji manusia pada dirinya sendiri⁷². Sebenarnya menurut Nietzsche, hati nurani adalah insting terkuat manusia dimana ia melakukan janji dalam

⁷² Ibid, hlm.37

bentuk tanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya, Nietzsche, seperti biasa dengan cara pembahasan a la aphorisme dan melompat-lompatnya, melompat dengan membahas tentang hati nurani yang buruk. Hati nurani yang buruk lahir dari perasaan berhutang manusia. Dalam bahasa Jerman, rasa bersalah (*Schuld*) berelasi dengan hutang (*Schulden*) dimana perasaan bersalah dianalogikan sebagai hutang baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Segala kejahatan, kriminalitas, pada masa lalu didasarkan pada kerugian yang didapat oleh orang yang menerima dampaknya, sehingga orang yang bersalah dianggap sebagai orang yang berhutang kepada orang yang dirugikan atas kesalahannya.

Perasaan bersalah ini lahir dari janji-janjinya dia baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri yang dilanggar. Hal ini lahir dari relasi paling kuno yakni pertukaran barang atau perdagangan. Perasaan bersalah muncul ketika manusia mengukur dirinya dengan orang lain berdasarkan relasi perdagangan atau hutang-piutang. Ketika seseorang merasa bersalah, maka ia akan berutang kepada dirinya sendiri dan orang lain yang dirugikannya. Ketika seseorang dianggap bersalah, tetapi tidak merasa bersalah maka orang lain yang dirugikan maupun jika dia melakukan kontrak sosial atau lahir dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itulah yang akan memaksa dia untuk membayar kesalahannya. Orang itu akan dihukum serta diingatkan bahwa jika ia tidak melanggar kontrak sosial yang dibentuk maka ia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu agar tidak diulangnya lagi, selain itu juga dia dihapuskan dari keuntungan-keuntungan tersebut selama masa hukumannya sampai hutangnya terbayar secara setimpal, baik melalui penderitaan dirinya atau melalui ganti rugi yang memuaskan pihak yang dirugikannya.

Semakin kuat masyarakat, menurut Nietzsche, semakin malas juga ia untuk mengurus kriminal-kriminal kecil karena standar kriminalitasnya semakin tinggi. Ketika masyarakat sudah menjadi tinggi, maka kriminalitas yang kecilpun juga semakin dihukum secara sedikit dan semakin dianggap remeh. Dan kriminalitas yang besarlah yang semakin besar baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Namun, di satu sisi juga ada pembiaran bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut, yakni ketika keadilan tersublimasi menjadi belas kasih, dimana belas kasih tetaplah prerogatif dari orang-orang yang kuat dan mampu untuk bergerak di balik hukum. Di Indonesia, remisi dan grasi adalah kewenangan presiden, presiden dianggap sebagai orang yang paling berkuasa di Indonesia sehingga ialah yang memiliki kebebasan untuk melakukan belas kasih dalam hukum Indonesia.

Bagi Nietzsche, keadilan hanyalah sebuah pembenaran atas balas dendam (*revenge*). Jika balas dendam atas utang dan kerugian yang diperbuat oleh seseorang yang bersalah tersebut dibenarkan dalam ranah kontrak sosial maupun konsensus yang telah dibuat oleh diantara keduanya, maka itu bernama keadilan. Jika tidak dijustifikasi, maka tetap maknanya adalah balas dendam. Menurut Nietzsche, untuk menghindari balas dendam maka diciptakan hukuman (*punishment*). Sebagaimana konsisten dengan pemikirannya, Nietzsche menyatakan bahwa dalam dunia manusia, kehidupan didasari oleh kehendak untuk menguasai. Sehingga manusia-manusia yang merasa kekuasaannya dihancurkan atau dihina dengan adanya kejahatan dan kesalahan orang lain, ingin balas dendam kepada orang lain yang melakukan kesalahan tersebut. Namun untuk menghindari adanya *bellum omnium contra omnes*, tentunya hukuman diciptakan agar memberikan perasaan adil bagi orang-orang yang ingin membalas dendam tersebut. Hukuman adalah tindakan preventif sekaligus punitif yang lebih ringan dibandingkan balas dendam itu sendiri. Sebagai contoh konkritnya adalah di Indonesia, pembunuhan dalam KUHP tetap dihukum penjara (maksimal seumur hidup atau 20 tahun), bukan dihukum mati dimana hukuman ini cukup jinak dibandingkan dengan apa yang ia lakukan kepada orang yang ia bunuh, yakni kehilangan nyawanya dan bisa jadi mengalami rasa sakit dan penyiksaan terlebih dahulu.

Hukuman menurut Nietzsche, ditujukan untuk membentuk perasaan bersalah pada pelaku kesalahan, namun pada nyatanya justru membuat pelaku kejahatan tersebut makin menjadi pasca dihukum. Hal ini terjadi karena pelaku kejahatan tidak merasakan sendiri dampak dari apa yang ia lakukan, sehingga ia tidak merasa bersalah atau berhutang sekalipun karena ia tidak pernah merasakan apa kejahatannya sendiri dan kerugian yang didapat oleh korbannya. Justru hukuman membuat pelaku kejahatan semakin takut untuk ketahuan sehingga ia semakin pintar, licik dan semakin cerdas dalam modus operandi kejahatannya.

Nietzsche menjelaskan mengenai hati nurani yang buruk, hati nurani yang buruk adalah ketika insting manusia untuk dominatif, yakni hasrat kuasanya dan kebebasan sebebas-bebasnya bagi dirinya dihancurkan oleh negara yang ingin melakukan penjinakan pada manusia. Manusia ditanamkan nilai-nilai kolektivitas dan nilai-nilai yang kontradiktif pada dirinya seperti altruisme (*selflessness*), pengorbanan diri (*self-sacrifice*) dan penyangkalan atas dirinya sendiri (*self-denial*). Berkat adanya moralitas kolektif yang membuat manusia melakukan kerusakan pada dirinya sendiri ini, manusia memiliki hati nurani yang buruk.

Bagi Nietzsche, hati nurani yang buruk merupakan sebuah penyakit. Dimana manusia-manusia ini akan merasa adanya hutang budi dari dirinya kepada sebuah konsep atau generasi yang sudah tidak ada. karena dirinya sudah dijinakkan oleh negara, ia akan merasa

berhutang dan memiliki kewajiban kepada negara. Sama halnya dengan pada masa kesukuan, menurut Nietzsche, manusia berhutang pada generasi sebelumnya dengan segala epos dan cerita-cerita kepahlawanan mereka yang mampu menyelamatkan atau membentuk sebuah suku sehingga generasi selanjutnya akan memberikan korban-korban kepada tetua-tetua dan pahlawan-pahlawan terdahulu karena adanya perasaan berhutang tersebut. Jika genealog moral menurut Nietzsche, melihat bahwa hati nurani yang buruk ini lahir atas adanya perasaan berhutang karena menerima hukuman dan ketakutan atas hukuman tersebut, menurut Nietzsche itu adalah sebuah hipotesa yang salah. Bagi Nietzsche, hati nurani yang buruk tersebut lahir dari nilai-nilai yang mengkontradiksi dirinya sehingga manusia yang pada seharusnya menggunakan tenaganya untuk dominatif keluar justru malah melakukan dominasi pada dirinya sendiri dan menghabiskan energinya untuk memaksa dirinya konformis atas konsep-konsep yang mengkontradiksi dirinya sendiri tersebut. Sehingga juga hasrat kuasa seseorang pun diamalkan melalui cara menguasai dirinya sendiri atau menguasai orang lain yang berhutang pada dirinya, dan bagi para politisi, yudikasi dan perangkat negara lainnya, adalah untuk melakukan dominasi secara moral kepada masyarakat yang memiliki kesalahan sehingga moralitas versi merekalah yang dominan. Padahal pada masa lalu manusia bersatu untuk melakukan dominasi pada spesies lain ataupun pada manusia-manusia yang lebih lemah (dalam ranah ini masyarakat lainnya yang diluar masyarakat tersebut), namun dengan adanya hati nurani yang buruk, justru manusia mendominasi internalnya sendiri mulai dari dirinya dan orang-orang yang berada di dalam masyarakatnya sendiri.

c. Hasrat Kebenaran (*Will to Truth*)

Menurut Nietzsche, manusia memiliki hasrat kebenaran yakni hasrat untuk mengetahui kebenaran sesuatu yang ada. Menurut Nietzsche, banyak filsuf yang hanya melihat bahwa pekerjaan filsuf adalah mencari kebenaran, namun tidak memahami bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Jika seorang filsuf meyakini dan memahami bahwa ada sesuatu yang tidak benar (*untruth*) maka baru ia berada melampaui kebaikan dan keburukan (*beyond good and evil*)⁷³.

Bagi Nietzsche, kebenaran dan ketidakbenaran hanya berasal dari nilai-nilai yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga hasrat untuk memahami kebenaran, jika tidak

⁷³ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1989. *Beyond Good and Evil*. New York: Vintage Books, hlm.10

memahami ketidakbenaran maka hanya akan menemukan segalanya berkontradiksi antara kebenaran satu dengan kebenaran lainnya. Namun jika memahami dasar fundamen berpikir bahwa ada ketidakbenaran, baru bisa memahami sesuatu yang lebih luas dan lebih menyeluruh dibandingkan hanya sekedar hitam-putih.

d.Kehendak

Bagi Nietzsche, kehendak (will) adalah kehendak untuk berkuasa. Kehendak seseorang dijawantahkan dalam ranah realitas melalui perintah (command), dimana seseorang memerintah orang lain atau suatu keberadaan lain atau dirinya sendiri untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Perasaan puas dari kehendak adalah ketika ia sudah menjalankan kehendaknya. Kebebasan berkehendak (*freedom of will*) sebenarnya hanyalah dimiliki oleh orang yang kehendaknya terpuaskan, dengan kata lain memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan kehendaknya. Contohnya adalah ketika manusia ingin makan maka sudah dipastikan bahwa ia memerintah bagian tubuhnya secara fisiologis untuk bergerak makan, atau ketika manusia ingin orang lain yang memasak makanannya maka ia memerintah orang lain untuk memasak bagi dirinya sebuah makanan.

Dalam ranah yang lebih luas, kehendak yang bebas adalah ketika dimana manusia memiliki kekuasaan untuk bertindak dan memerintah baik tubuhnya atau orang lain bagi kehendaknya, semisal dalam ranah pers. Ketika tidak ada kebebasan pers, maka manusia yang berkehendak untuk mendirikan sebuah pers yang bebas serta pers yang mampu untuk memberitakan berita sesuai dengan apa yang pers tersebut inginkan dan bukan berasal dari propaganda pemerintah, ia harus melakukan pertentangan kuasa dengan pemerintah yang tidak membebaskan persnya, entah dengan kekuatan personal ataupun dengan kekuatan massa yang menuntut adanya kebebasan pers sehingga kehendaknya untuk mewujudkan pers yang bebas bisa terlaksana.

Kekuasaan dari para penuntut ini dengan pemerintah akan berada di ranah strategikal dan taktikal, siapa yang menang akan mampu memerintah untuk melaksanakan kehendaknya, baik para penuntut membubarkan diri atau pemerintah mewujudkan adanya kebebasan pers.

e.Kejahatan dan Mediokritas

Bagi Nietzsche, kejahatan bukanlah sebuah perbuatan yang benar-benar jahat secara moralitas, suatu hal yang dianggap kejahatan adalah ketika seorang manusia berusaha

untuk lepas dari mediokritas dimana ia melakukan sesuatu yang membuatnya berbeda dengan manusia-manusia ternak. Sebagai contohnya adalah seorang yang membunuh orang lain memisahkan dirinya dari manusia ternak lain yang tidak membunuh sama sekali, ia secara pengalaman sudah terpisah dari yang lain dan sudah tidak konformis lagi dengan moralitas manusia ternak yang medioker dan begitu-begitu saja. Kejahatan (*evil*) adalah lawan dari mediokritas dimana setiap orang yang jahat sebenarnya adalah orang yang ingin melepaskan dirinya dari mediokritas, dan orang yang sekalipun tindakannya simpatik⁷⁴ (Nietzsche menyatakan simpatik tidak berhubungan dengan moralitas baik ataupun buruk) tetapi ia keluar dari tatanan moralitas medioker, maka ia akan dianggap jahat oleh orang-orang medioker.

f. Tinjauan Penulis

Pemikiran moralitas Nietzsche, menggunakan perspektif historis-filologis dan aporisme atas dunia yang dialami oleh Nietzsche. Ia memandang dunia dipenuhi dengan mediokritas, dimana manusia-manusia medioker adalah sebuah kekuatan dominan yang muncul di dunia dan mampu melakukan pengerahan kekuasaan berdasarkan jumlah mereka yang besar untuk menentukan moralitas bagi masyarakat yang lebih tinggi maupun masyarakat yang lebih rendah tetapi tidak medioker. Dengan menggunakan sudut pandang aporismik, penulis juga merasakan sesuatu yang demikian dalam kehidupan penulis di masyarakat. Bahwasanya seseorang yang dianggap gila dan jahat sebagian tentu adalah orang yang tidak benar-benar gila atau jahat secara psikis maupun tindakan. Terkadang, seseorang yang berusaha keluar dari *rule of the game* mediokritas juga dipandang gila dan mengalami deviasi perilaku maupun deviasi intelektual bagi masyarakat medioker. Seseorang yang tidak bermimpi untuk menjadi orang terbaik di dalam tatanan *par excellence* masyarakat medioker, dianggap gila dan diremehkan. Tetapi masyarakat medioker adalah masyarakat yang munafik dimana mereka masih menggunakan kriteria *par excellence* mereka, sekaligus melakukan humilitas palsu dimana mereka seakan tidak ingin menjadi *par excellence* (menyatakan mereka ingin hidup sederhana, bahagia, bersyukur, berbuat baik dimana itu hanya kebalikan dari kriteria-kriteria *par excellence* seperti kekayaan, ambisi pribadi, pragmatisme dan sebagainya) tetapi masih dalam kriteria *par excellence*, hanya dibalik saja menjadi negasi dari *par excellence* mereka.

⁷⁴ Wrisley, George. 2016. Nietzsche and The Value of Suffering. Dahlonega : University of North Georgia, hlm.5-6

Ini membuktikan bahwasanya secara moralitas dan hati nurani, tidak lebih dari kemunafikan karena kriteria mereka juga sama, namun untuk menghindari bahwa mereka adalah manusia kalkulator, mereka melakukan dekalkulasi atas dirinya sendiri, mudahnya adalah merendah untuk menyembunyikan hasrat kekuasaan dalam ranah moralitas par excellence mereka. Di satu sisi, ketika keluar dari moralitas itu mereka tidak akan mungkin mau. *Vis inertiae* menjangkiti mereka yang ditanya oleh manusia non-medioker apakah mau untuk melakukan suatu hal untuk mewujudkan “moralitas munafik” mereka. Sebagai contohnya adalah, ketika seseorang diajak untuk melakukan advokasi atau berpartisipasi dalam gerakan sosial, banyak sekali alasan seperti sibuk menjalankan kehidupan, fokus untuk studi dan sebagainya. Padahal ini adalah tindakan konkrit moral-etis bagi kriteria-kriteria non medioker mereka dibandingkan dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan, sehingga mereka menjadi munafik dengan menyatakan moralitas non-medioker dalam perkataan mereka, melakukan tindakan yang didasari par excellence secara per se, dan mengalami *vis inertiae* ketika diajak untuk keluar dari moralitas medioker dan memenuhi janji mereka.

Bahkan tindakan yang non-medioker sekalipun, seringkali dilakukan dengan alasan medioker yakni untuk urusan *goodwill*, membantu menjalankan usaha atau dengan metode-metode yang tidak mengganggu mediokritas mereka seperti petisi online dan sebagainya yang dianggap “lebih sopan” maupun “lebih elit” dibandingkan dengan cara-cara lain yang keluar dari moralitas medioker yang pada umumnya muncul di kalangan masyarakat. Padahal, ini hanya sekedar lip service atas janji-janji mereka dan menghindari adanya perasaan bersalah dan tidak dilakukan untuk efektif, tindakan mereka yang benar-benar efektif adalah untuk mewujudkan excellence dalam kehidupan mereka sesuai dengan kriteria-kriteria medioker di masyarakat. Orang-orang ini memang tidak mau untuk keluar dari rule of the game dan tidak mau untuk menciptakan etika-moralitas mereka sendiri selain apa yang sudah ditanamkan melalui interaksi sosial dalam masyarakat, bahkan untuk mengkritiknya saja atau mengubahnya tidak ada keinginan, cukup dengan menjadi nomor 1 dalam mediokritas, tidak ada yang lain.

iii. Simone De Beauvoir

De Beauvoir merupakan pemikir eksistensialis sekaligus pasangan hidup dari Sartre, beberapa pemikirannya merupakan aplikasi aksiologis dari pemikiran ontologis Sartre,

yakni mengenai feminisme dan etika. Pemikiran mengenai etika eksistensialis dari sudut pandang de Beauvoir akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban Tindakan

Beauvoir menyatakan bahwa manusia harus bertanggungjawab atas tindakannya sendiri karena tidak ada obyektifitas yang tidak manusiawi (*inhuman objectivity*) dimana tidak ada Tuhan yang menentukan sebuah hal menjadi diperbolehkan atau tidak. Beauvoir mengutip Dostoyevsky, dimana tidak ada Tuhan berarti segalanya diperbolehkan, namun Beauvoir menyatakan bahwa banyak orang yang menyalahartikan adagium tersebut dimana mereka menganggap argumentasi ini dapat digunakan untuk menghapus segala etika.

Padahal seharusnya dengan adanya argumentasi ini manusia sadar bahwa ia menjadi sumber etika di dunia, segala tindakan intersubjektifnya maupun tindakan subyektif bagi dirinya sendiri adalah sumber etika bagi dirinya maupun yang lain. Seseorang bisa merasakan kesuksesan atau kegagalan bagi tindakannya sendiri karena tidak ada Tuhan yang menentukan kesuksesan atau kegagalan baginya, dengan kata lain tindakan sepenuhnya adalah karena hasil dari tindakan manusia itu sendiri dan tidak ada takdir Tuhan yang menggiring sebuah tindakan menjadi sesuatu yang diinginkan atau direncanakan Tuhan kepada manusia tersebut.

b. Kritik atas Marxisme

Beauvoir melakukan kritik terhadap Marxisme, dimana dalam eksistensialisme yang dinyatakan tidak memiliki obyektifitas apapun justru menyediakan ruang untuk melakukan kehendak bebas (*free will*). Sedangkan Marxisme justru tidak memberikan ruang untuk melakukan kehendak bebas karena sudah menentukan sendiri tujuan-tujuan obyektifnya berdasarkan masa depan manusia yang dibaca Marx melalui materialisme dialektis, yakni masyarakat komunis. Secara teleologis, memang tujuan akhir dari Marxisme adalah menciptakan masyarakat komunis sehingga tidak ada tujuan lain yang berdasarkan individual atau kebutuhan-kebutuhan individu di dalamnya dan diandaikan memang masyarakat komunis adalah tujuan terbesar dari Marxisme sehingga tidak memberikan ruang untuk membentuk tujuan-tujuan yang berdasarkan kehendak bebas dari manusia yang lainnya.

Dalam Marxisme juga, ketika memang tujuan-tujuan itu dibentuk oleh kehendak bebas dari manusia, kehendak itu rasanya tidak bebas menurut Beauvoir. Karena kehendak manusia dalam Marxisme dibagi dalam kelas-kelas yang memiliki kehendak-kehendak

yang berbeda-beda sesuai dengan kelasnya. Kelas proletariat memiliki tujuan untuk menghancurkan sistem dikotomi borjuis-proletar dan mendirikan masyarakat komunis dimana segala alat produksi dimiliki bersama. Apakah memang seluruh anggota masyarakat proletar menginginkan demikian? Namun dalam Marxisme, dibayangkan bahwa demikian adanya dan jika tidak menginginkan adanya tujuan tersebut maka sudah terjangkiti oleh kesadaran palsu.

Namun Beauvoir tidak menyatakan kaum Marxis yang dimaksud adalah Marx sendiri, menurutnya Marx tidak sepakat dengan ide-ide demikian. Seorang Marxis revolusioner pada seharusnya dia mampu untuk menjadi bebas karena ia bertindak dan mengajak orang lain untuk bertindak dan tidak hanya menjadi agen tindakan dari kekuatan-kekuatan lain saja. Namun kaum Marxis yang ada tersebut justru menjadi semacam polisi moral atas nama realisme historis dan mengecap orang-orang yang tidak sependangan dengannya dalam cara dan bentuk masyarakat komunis seperti apa, sebagai pengecut, reformis dan sebagainya.

c.Kebebasan

Bagi Beauvoir, kebebasan mutlak adanya dalam setiap manusia. Menurutnya, manusia bebas untuk melakukan apapun, jika ia ingin lepas dan melarikan diri dari kebebasannya, ia juga memiliki kebebasan untuk melarikan diri tersebut. Sehingga, manusia dalam etika yang berusaha untuk mencapai tujuannya, harus menunjukan kepada kebebasan sebagai tujuannya. Jika tidak, maka sepenuhnya ia akan merasakan kesia-siaan dalam permainan etika menggapai tujuan yang ia inginkan. Jika ia memasukkan tujuan yakni kebebasan, maka ia akan menemukannya bahwa manusia memang sudah bebas dari awal. Dengan adanya penunjukan kepada kebebasan, maka manusia menyadari bahwa ia bebas untuk menentukan sesuatu, yakni tujuan maupun tindakan yang ia inginkan untuk menggapai tujuan tersebut. Dengan menentukan tujuannya adalah kebebasan, manusia mengubah kebebasan dari hal yang bersifat natural menjadi moral. Kebebasan juga merupakan sesuatu yang spontan ketika manusia masuk ke dalam dunia. manusia dari dasarnya memang sudah bebas dan tidak mampu melarikan diri dari kebebasannya. Namun ketika manusia memasukkan tujuan lain dalam etikanya, maka jelas ia akan berusaha untuk merasuk ke dalam tujuan tersebut dan kehilangan nilai kebebasan sebagai nilai moralitas, kebebasan hanya menjadi sebuah keadaan alamiahnya untuk menentukan tujuan dan menjalankannya.

Tetapi manusia juga dibatasi dengan faktisitas, yakni kebebasan orang lain maupun keadaan situasi yang ia alami. Manusia tentu bisa menghancurkan sebuah tembok dengan

tanggannya ketika ia melakukannya terus menerus sampai tembok itu rapuh, namun membutuhkan waktu yang lama sekaligus tindakan yang hampir sia-sia walaupun manusia tersebut bebas untuk memilih tindakan tersebut. Tetapi sekalipun bebas, manusia terbatas oleh faktisitasnya, jika tidak memperhatikan faktisitasnya bisa jadi hanya akan menemukan keputusan ditengah usahanya untuk melakukan tindakannya yang bebas tersebut.

d.Opresi

Menurut De Beauvoir, opresi membagi manusia tertindas menjadi dua kelas, yakni kelas masyarakat yang berusaha untuk mencerdaskan manusia yang lain dan satunya adalah masyarakat yang tidak bisa apa-apa kecuali menunggu waktu untuk dibebaskan karena digunakan untuk menjadi budak kolektivitas⁷⁵. Hidup manusia yang jenis kedua adalah orang-orang yang hanya menjadi mesin dalam sistem kerja, diberikan istirahat dan liburan yang hanya cukup untuk mengisi ulang diri mereka dan kembali bekerja lagi dalam kolektivitas. Menurut Beauvoir, solusi bagi orang-orang tertindas ini adalah dengan menolak harmoni yang diberikan oleh masyarakat tindasan. Dengan cara menolak harmoni ini, dia telah melawan tirani dan para tiran yang menindas. Mengapa demikian? Karena tirani dan penindas ini menciptakan sebuah harmoni di masyarakat seakan semua ketertindasan tersebut adalah hal yang biasa-biasa saja dan harmonis sehingga mereka harus sadar dengan kebebasan mereka masing-masing dan berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan yang terlihat stabil, banal dan indah tersebut.

Penindasan selalu memulai dengan justifikasi bahwa apa yang sebenarnya menindas terlihat menjadi sesuatu yang natural dan baik. Penindas ketika menindas seorang pekerja, mereka akan mengatakan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang alamiah dan dengan bekerja keras serta stabil maka pekerja akan mendapatkan keuntungan yang stabil dan mampu untuk hidup layak serta lain halnya. Padahal sebenarnya ini merupakan penindasan dimana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk banyak hal, bahkan tidak memiliki kebebasan untuk mengetahui bahwa kekayaan yang didapatkan oleh kapitalis penindas adalah hasil dari keringat pekerja dan eksploitasi ekonomi kepada pekerja. Sehingga pekerja seharusnya menolak konsep-konsep demikian dan berani mengambil pilihan berdasarkan kebebasannya, yakni baik menerima atau menolak tawaran tersebut dengan pengetahuan bahwa memang hal tersebut adalah penindasan yang harus dilawan.

⁷⁵ Bisa jadi kolektivitas yang dimaksud berbeda dengan perspektif Marxian.

e. Tujuan Manusia adalah Kebebasan : Sebuah Tinjauan Kritis

Penulis memberikan tinjauan atas pemikiran De Beauvoir, yakni ada kesetujuan dan ketidaksetujuan dalam pemikiran Beauvoir, terutama dalam memandang teleologis bahwa Beauvoir melihat kebebasan harus menjadi tujuan manusia untuk bisa menggapai tujuan yang lain. Penulis melihat kebebasan pada dasarnya adalah natural, ketika seorang melihat kebebasan adalah tujuan, walaupun ia juga sekaligus melihat kebebasan adalah natural dan memasukkan kebebasan sebagai aspek moralitas, menurut penulis justru akan menjadi absurd karena kebebasan itu sendiri adalah salah satu dasar untuk mampu melakukan tindakan. Dengan menunjukan kebebasan sebagai *telos* dari etika manusia, membuat manusia itu sendiri seakan tidak bebas, bahkan menjadi kesia-siaan itu sendiri karena potensialitas kebebasan manusia itu sendiri hampir tidak terbatas dan tidak mungkin mampu untuk melakukan semua tindakan yang mampu dilakukan manusia dalam seumur hidup manusia.

Namun sudut pandang De Beauvoir mengenai opresi cukup relevan untuk dikaji pada masa sekarang, bahwasanya intelektual organik, maupun beberapa intelektual berkelas borjuis yang pro terhadap masyarakat tertindas masih berjuang untuk mengentaskan penindasan terhadap masyarakat proletar. Bahwasanya tidak semua proletar ingin mengemansipasi dirinya, dan tidak semua orang yang ingin melakukan emansipasi terhadap kelas proletariat adalah proletariat itu sendiri. Kita memahami dalam sejarah bahwa banyak orang-orang berkelas feodal (seperti Lenin) dan borjuis (seperti Trotsky) yang memiliki keinginan untuk mengemansipasi proletar (terlepas hasilnya tepat atau tidak, yang dibahas disini adalah tujuan dari mereka). Bahwasanya kesadaran atas penindasan tidak selalu berdasarkan kelas apa mereka berasal, namun lebih kepada kesadaran atas kebebasan itu sendiri. Melawan harmonisasi tentunya adalah suatu tindakan yang tepat untuk menghancurkan penindasan karena penindasan itu sendiri selalu terlihat lebih manis dibandingkan dengan melawan. Bahwasanya resiko-resiko perlawanan selalu terlihat lebih mengerikan dibandingkan hidup dalam penindasan dan utopia-utopia pasca perlawanan terlihat sangat jauh dibandingkan keuntungan-keuntungan kecil yang didapat dalam penindasan. Selain itu juga dalam perlawanan pasti ada proses yang sangat panjang dimana hasilnya belum tentu dinikmati oleh orang yang melakukan perlawanan, dibandingkan penindasan yang memberikan hasil secara langsung walaupun hanya bersifat kuratif terhadap efek-efek langsung dari penindasan dan akhirnya akan melanjutkan proses penindasan itu sendiri sampai ia mati. Memang penindasan adalah sesuatu yang terlihat lebih menyenangkan dibandingkan dengan perlawanan itu sendiri.

Namun justru itu letak penindasan, ketika penindasan lebih menyenangkan justru lebih menindas dibandingkan dengan penindasan yang tidak lebih menyenangkan karena masyarakat mampu untuk menyadari dan tidak perlu berpikir dua kali untuk melakukan perlawanan terhadap sistem. Makadari itu sistem penindasan yang baru adalah pembentukan harmonisasi dalam masyarakat di dalam sistem yang terlihat harmonis, teratur dan bahagia walaupun sebenarnya menindas. Sehingga pelaku penindasan tetap mendapatkan keuntungannya walaupun harus membaginya secukup dan sedikit mungkin kepada orang-orang tertindas demi tetap bergabung dalam sistem harmonisasi yang diciptakan oleh penindas.

Kelemahan masyarakat tertindas adalah justru ketika mengambil sedikit keuntungan itu dengan keputusan, baik karena merasa bahwa sedikit lebih baik daripada tidak atau mengalami kerugian dalam perlawanan, atau karena merasa perlawanan terlalu panjang dan melelahkan, sehingga akhirnya tidak mau melawan lagi dan kembali dalam masyarakat harmonis nan indah yang telah memelihara mereka walaupun mereka dibuat tidak bebas dan dieksploitasi sedemikian adanya sampai tidak mampu lagi untuk melawan atau sampai tidak mampu lagi untuk bekerja demi penindasnya. Penindas selalu membuat justifikasi supaya terlihat natural dan baik, itu jelas. Dalam bisnis selalu ada dana yang digunakan untuk *Goodwill* dan TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan) perusahaan/CSR. Dana-dana itu akan digunakan untuk mewujudkan kondisi bahwa memang apa yang dilakukan perusahaan juga baik, dana yang didapatkan dari masyarakat yang membeli produknya maupun pekerja dikembalikan kepada masyarakat kembali walaupun sebenarnya tidak seberapa dibandingkan keuntungan yang mereka dapatkan selama mereka beroperasi.

Selain itu juga dalam bermasyarakat diberikan nilai-nilai *par excellence* yang menunjukkan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang natural, baik dan dihargai. Dengan mindset demikian tentunya masyarakat akan terpengaruh untuk menyatakan bahwa kekayaan adalah kekuasaan dan kebaikan itu sendiri. Mereka juga melakukan imitasi terhadap apa yang penindas mereka lakukan, yakni berusaha untuk menggapai kekayaan dan menjadi lebih kaya dan menindas orang lainnya agar semakin kaya. Secara harafiah, tentunya keinginan pengusaha selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ekonomis. Bahwasanya segala tindakan yang diinginkan oleh pengusaha berkaitan dengan nilai surplus yang akan didapat oleh pengusaha tersebut. Sebagai contohnya adalah pengusaha akan selalu mengambil tindakan yang menguntungkan bagi dirinya. Dibandingkan dengan mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya secara otomatis pengusaha akan lebih mendukung tindakan yang menaikkan keuntungannya secara langsung. Seperti

pengusaha yang cenderung menolak kenaikan UMR maupun tuntutan-tuntutan yang lebih progresif seperti pembayaran BPJS secara sepenuhnya ataupun tuntutan saham bagi buruh dan hal-hal lainnya karena akan mengurangi keuntungan ekonomis yang akan diterima oleh pengusaha.

Menurut Adam Smith, bahwa kekayaan adalah kuasa⁷⁶ yang bahwasanya dengan memiliki kekayaan, anda bisa memiliki kekuasaan tertentu. Jika anda memiliki kekayaan maka anda dapat menyuruh orang lain ataupun membeli sesuatu demi kepentingan anda sendiri. Sama halnya dengan jika anda memiliki kekayaan maka anda akan dipandang sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan tertentu tanpa harus mengeluarkan kekayaan milik anda untuk menyuruh seseorang tersebut. Bahwasanya ia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan anda untuk mendekati anda agar mendapatkan sedikit dari kekayaan tersebut melalui balas jasa (*goodwill*) ataupun setidaknya link dan saran bagaimana cara mendapatkan kekayaan tersebut. Selain itu kekayaan juga bermakna kebebasan menurut Simmel⁷⁷. Bahwasanya seseorang bisa bebas untuk melakukan sesuatu jika ia memiliki uang untuk itu. Semisal kita ingin memakan steak yang enak, tentunya kita membutuhkan sejumlah uang untuk membeli steak yang enak tersebut. Skala kualitatifpun juga dinilai dengan uang, adanya kualitas steak yang lebih baik tentu membutuhkan jumlah yang lebih besar pula. Dengan kata lain kebebasan seseorangpun juga dinilai dari uang. Simmel juga memberikan sebuah sudut pandang bahwasanya nilai seseorang juga dinilai dari uang⁷⁸.

Bahwasanya pada masa lalu, untuk membebaskan tahanan dibutuhkan sejumlah uang tertentu yang berkaitan dengan posisi tahanan yang akan dibebaskan tersebut. Semakin berkualitas dan kaya tahanan tersebut, semisal seorang bangsawan akan lebih mahal harganya dibandingkan dengan seorang prajurit biasa. Bahwasanya orang yang harganya lebih mahal tersebut adalah orang yang juga memiliki kebebasan dan kekuasaan serta kualitas yang dipandang lebih oleh orang lain atas kepemilikan kekayaan yang lebih dibandingkan orang lain.

Dengan adanya perspektif psikologis yang demikian, membuat pengusaha tentunya akan semakin kuat untuk berusaha mendapatkan kekayaan yang lebih serta mempertahankan kekayaan yang ada. bahwasanya pengusaha adalah orang yang lebih

⁷⁶ Smith, Adam. 2003. *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York : Bantam Classics. hlm.31

⁷⁷ Simmel, Georg. 2011. *Philosophy of Money*. Oxon: Routledge. hlm.287

⁷⁸ Ibid hlm.357

terpandang dibandingkan pekerjaanya, maka akan muncul rasa malu jika ia kalah terhadap pekerjaanya di dalam tuntutan, maupun berkurang pendapatan yang diekstraknya dalam mempekerjakan orang lain maupun dalam usahanya. Sehingga muncul mindset bahwasanya seorang pengusaha harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan mengurangi kerugian sekecil-kecilnya dengan cara apapun. Bahkan ini dibenarkan jika ia mampu untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih serta prestise yang lebih akibat mendapatkan kekayaan yang lebih karena ia juga lebih mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk menjustifikasi langkah yang diambilnya. Bahwasanya tindakan yang cukup pragmatispun tidak memiliki konsekuensi moral yang luas bagi seorang pengusaha dibandingkan dengan tindakan yang idealis namun mendapatkan konsekuensi ekonomi yang cukup mengurangi keuntungan pengusaha sekaligus berujung pada mengurangi kualitas, prestise dan kekuasaan pengusaha tersebut dihadapan orang-orang lainnya.

Bahkan dengan berkurangnya kualitas, prestise dan kekuasaan tersebut, pengusaha akan lebih mengalami kesulitan dalam menjustifikasi tindakan tersebut secara moral (bahwasanya dalam tulisan ini moral yang dimaksud adalah moral subyektif yang dianut berdasarkan konsensus-konsensus sosial, bukan moral obyektif yang berasal dari Tuhan ataupun konsensus-konsensus keagamaan). Ketika pengusaha tersebut mendapatkan ekonomi yang berlebih tentunya ia bisa menjustifikasi tindakannya dengan membaginya kepada orang-orang yang dianggap membutuhkan, bahwasanya ia mampu untuk membayar “kejahatannya” dalam mengeksploitasi orang lain, ataupun mampu untuk menciptakan agen-agen opini bahwasanya tindakan tersebut dapat dijustifikasi oleh semuanya, ataupun melakukan kedua-duanya sekaligus dan menggunakan cara-cara lainnya.

Namun jika ia kehilangan kekayaannya, maka secara ekonomis, iapun mengalami beban moral yang kuat bahwasanya ia akan dihujat sesama pengusaha, dihujat oleh orang lainnya karena telah kehilangan kualitas maupun kekuasaan pada dirinya dan ia tidak memiliki kekayaan yang berlebih untuk membalikkan situasi baik dengan cara-cara di atas maupun cara-cara lainnya. Bahwasanya secara moral konsensual diantara pengusaha yang biasanya adalah “semakin sukses maka anda adalah pengusaha yang semakin hebat” maupun masyarakat yang lebih menyukai tindakan moral altruistik secara langsung (seperti bagi-bagi uang dan sebagainya) maka terlihat bahwa ketika pengusaha tersebut mengurangi kedua tindakan tersebut dihadapan masyarakat sudah jelas bahwasanya secara moral konsensual akan dianggap lebih buruk.

Dengan adanya legitimasi psikologis dan moral konsensual ini selain juga karena adanya kebutuhan materi primer, sekunder dan tersier yang harus dipenuhi oleh pengusaha

tersebut untuk dirinya dan keluarganya, maka pengusaha tersebut mengambil langkah-langkah yang cukup pragmatis dengan harapan bahwasanya tindakan “moralis” dengan acuan moral konsensual ini mampu membayarkan konsekuensi sosial-ekonomi yang didapatkan oleh pekerja yang dieksploitasi oleh pengusaha tersebut. Selain itu juga dengan adanya konsekuensi bahwasanya pengusaha tersebut akan memiliki kekuasaan dan status sosial yang lebih terpendang selain karena alasan-alasan moralis juga membantu secara psikologis bagi pengusaha tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan pragmatis. Bahwasanya secara moral konsensual diperbolehkan untuk menjadi kaya dan dengan adanya pandangan secara moral konsensual bahwasanya orang kaya memiliki kemampuan untuk berbuat baik lebih besar dibandingkan orang yang dibawahnya, sekaligus kemampuan untuk menjadi lebih sempurna secara fisik dan mental (lebih bersih, lebih rupawan dan lebih terdidik) membuat perspektif masyarakat semakin memandang bahwa orang yang lebih kaya selalu lebih sempurna dalam segala lini kehidupannya dan jika ia berbuat baik secara filantropi (memberi dana bagi masyarakat yang kurang mampu) maupun secara retorik (mengajak orang lain untuk berbuat lebih baik seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjadi sosiopreneur, motivator dan sebagainya) akan memberikan efek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak kaya yang menyampaikan pesan-pesan maupun tindakan yang sama secara kuantitas maupun kualitasnya.

Bahwasanya memang kekayaan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain baik secara tindakan (*action*) maupun kehadiran (*presence*). Tindakan baik seseorang yang dilakukan oleh orang kaya selalu lebih menginspirasi dibandingkan dengan tindakan baik seseorang yang dilakukan oleh orang yang tidak kaya karena adanya perbedaan kehadiran dan publisitas atas kehadiran tersebut. Bahwasanya tindakan tersebut justru akan semakin memberikan legitimasi bahwasanya tindakan eksploitatif yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan mampu untuk dibayar dengan cara tindakan altruis yang lebih “berefek baik” tersebut. Ini adalah alasan psikologis mengapa pengusaha mampu untuk melakukan tindakan-tindakan pragmatis untuk mengeksploitasi pekerjanya tersebut. Bahwasanya analisis “bahwa pengusaha selalu memiliki keinginan eksploitatif dan kejam serta pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki moralitas” adalah analisis yang menurut skripsi ini terlalu sederhana untuk menjelaskan fenomena pengusaha yang eksploitatif kepada pekerjanya, mereka juga didukung oleh moralitas konsensual yang memberikan legitimasi di akhir untuk tindakan mereka.

Dalam segi kaum tertindas yakni pekerja, keinginan pekerja juga didasari oleh keinginan materiil yang dimana kekayaan juga memiliki efek yang sama kepada pekerja dengan kepada pengusaha. Namun titik beratnya adalah pekerja dieksploitasi dengan sangat parah dimana mereka sama sekali tidak mendapatkan haknya untuk hidup layak. Bahwasanya pekerja di Hotel Trio Indah yang telah bekerja secara loyal selama tahunanpun tidak diberikan hak atas loyalitasnya. Moralitas yang diperjuangkan oleh pekerja ini merupakan moralitas yang absolut sekaligus konsensual. Bahwasanya moralitas absolut yang mereka perjuangkan adalah adanya hak mereka untuk hidup layak dan memperjuangkan moralitas empatik atas kawan-kawan pekerjaannya yang lain yang sama-sama dieksploitasi oleh pengusaha dengan alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Moralitas konsensual yang mereka perjuangkan adalah moralitas dimana mereka juga orang-orang yang dipandang sesuai dengan kekayaannya. Dengan adanya ketidaklayakan dalam hidup mereka maka mereka juga tidak memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahwasanya sebagai pekerja hotel, mereka memiliki realitas yang dekat dengan kemewahan tertentu dan mereka juga tentu menginginkan adanya beberapa hal yang juga mereka nikmati sebagai manusia namun tidak mereka dapatkan akibat adanya eksploitasi yang berlebihan sehingga mereka juga menuntut haknya setidaknya untuk hidup layak walaupun tidak harus bermewah-mewahan seperti orang-orang yang mereka layani di hotel ataupun pengusaha mereka yang dimana mereka bekerja.

Bahwasanya dengan alasan-alasan moralitas di atas mereka berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan cara advokasi mereka mengorgansir diri dan memperjuangkan hak mereka masing-masing sehingga mampu untuk mendapatkan beberapa haknya dalam kasus ini yaitu kenaikan gaji maupun pesangon yang seharusnya mereka dapatkan dari dulu. Bahwasanya perjuangan mereka adalah reaksi dari eksploitasi yang mereka dapatkan dari pengusaha mereka walaupun sudah menunjukkan loyalitas dan kerja yang baik dimana mereka seharusnya mendapatkan konsekuensi positif dari tindakan loyalitas dan kerja yang baik tersebut.

Loyalitas dan kerja yang baik merupakan moralitas absolut yang harus dilakukan oleh manusia, namun konsekuensi atas moralitas absolut tersebut tidak didapatkan oleh mereka dari pengusaha yang pragmatis tersebut. Sehingga mereka melakukan tindakan memperjuangkan hak-hak mereka yang dilandasi oleh moralitas absolut tersebut, bahwasanya seseorang yang ditindas harus mampu untuk memperjuangkan dan

mendapatkan kembali haknya demi kehidupan yang lebih baik dan mampu untuk mengurangi penindasan yang ada di dunia. bahwasanya tidak ada sedikitpun alasan untuk membantah bahwa tindakan ini memang benar-benar baik secara moralitas absolut dan tidak berada sedikitpun di dalam batasan antara moralitas absolut maupun moralitas konsensual.

Namun mereka justru ditindas oleh pengusaha yang menggunakan moralitas konsensual untuk menjustifikasi penindasannya, bahwasanya moralitas absolut selalu berada di atas moralitas konsensual dalam ranah kualitas moral. Pada seharusnya pengusaha lebih memperhatikan hak-hak pekerja untuk mengurangi permasalahan sosial secara langsung, bukan untuk kaidah moralitas konsensual demi menunjukkan kualitas moralnya kepada orang lain dengan cara-cara yang lebih pragmatis dengan konsekuensi bahwasanya ia menciptakan suatu permasalahan sosial yang baru namun memperbaiki permasalahan sosial yang lain dengan tidak terlalu efektif (hanya memberikan tindakan filantropi belaka). Namun tentunya tindakan moralitas konsensual ini lebih efektif bagi pengusaha dibandingkan moralitas absolut yang belum tentu dianggap lebih tinggi kaidahnya oleh masyarakat luas dan tidak memiliki efek yang lebih besar bagi penunjukan (conspicuous) moralitas pengusaha tersebut kepada orang lain dan juga berpotensi untuk mengurangi kekuasaan dan kebebasan pengusaha tersebut di ranah privatnya maupun publiknya.

Bahwasanya jika terjadi sebuah masalah sosial yang muncul akibat adanya tindakan pengusaha ini (semisal terjadi kesenjangan sosial dan kehilangan pekerjaan yang parah) dari pekerja-pekerja ini akan muncul pengusaha lain yang melakukan filantropi kepada korban-korban pengusaha ini dan lingkaran setan tersebut akan terus berlanjut sampai tidak terhingga. Maka akan tidak terselesaikan permasalahan yang ada di ranah hubungan perburuhan di Indonesia maupun di dunia.

Permasalahan ini juga mempengaruhi kondisi psikologis dari pekerja-pekerja tersebut bahwasanya mereka hidup di dalam ketidakpastian secara ekonomi. Jika mereka memperjuangkan hak-hak mereka konsekuensinya kadangkala adalah kehilangan kemampuan ekonomi mereka akibat tindakan pemecatan dan lain sebagainya yang dijustifikasi oleh moral konsensual tersebut, dan di satu sisi jika mereka tidak memperjuangkan hak-hak mereka maka mereka tidak akan mampu hidup layak sebagaimana manusia. Bahwasanya segala tindakan pekerja tentu dijustifikasi oleh moralitas absolut yang tentunya secara kualitatif lebih bermoral dan memiliki dampak yang lebih positif bagi permasalahan sosial yang ada. namun tentunya moralitas konsensual juga

mempengaruhi para pekerja ini sehingga tidak berjuang secara efektif akibat adanya tekanan-tekanan dari masyarakat yang sudah menerima justifikasi dari tindakan pengusaha tersebut seperti adanya tindakan-tindakan moral konsensual maupun tindakan kuasa dan status sosial yang berbeda tersebut. Bahwasanya pekerja tersebut akan dipandang seperti orang-orang pemanjat sosial yang ingin mendapatkan kekuasaan maupun status sosial yang sama dengan pengusaha tersebut.

Makadari itu penindasan kerja adalah sesuatu yang menyenangkan sekaligus menindas karena adanya penanaman moral tersebut sampai pada *level* psikologikal terhadap pekerja. Bagian ini memang yang menjadi sorotan penulis terhadap etika eksistensialis dari De Beauvoir karena memang penindasan (terutama penindasan kerja) adalah sesuatu yang benar-benar menyedihkan sekaligus mengerikan yang menurut penulis terjadi di masyarakat ini.

2.3. Perkembangan Terkini Teori Eksistensialis Sartrean

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa pemikiran orang lain yang menggunakan epistemologi Sartrean sebagai sudut pandang utamanya. Bagian ini akan menuliskan perkembangan terkini konsep-konsep Sartrean yang berupa State of the Art dimana berbagai pemikir lain menuangkan pikirannya berupa pemikiran etis dan pemikiran politis yang didasari oleh pemikiran filsafat, etika maupun politik Jean Paul Sartre.

a. Pemikiran Etis

Ada beberapa pemikiran etis yang menarik untuk dikaji sebagai landasan etika politik Sartrean yakni :

i. Rule-Consequentialism

Rule-Consequentialism atau konsekuensialisme aturan adalah sebuah konsep oleh Brad Hooker yang diaplikasikan secara lebih konseptual oleh Lorenzo Nericcio. Konsep ini menjelaskan bahwa konsekuensialisme tidak didasarkan pada tindakan (Act-Consequentialism) tetapi pada aturan⁷⁹. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perasaan kekhawatiran ketika berusaha untuk memilih sebuah tindakan tertentu secara etikal. Konsep ini berbeda dengan konsekuensialisme tindakan yang mendasarkan dirinya pada konsekuensi tindakan, yakni konsekuensialisme aturan lebih mendasarkan diri kepada kepatuhan seluruh pelaku tindakan atas suatu aturan yang memiliki konsekuensi tertentu sehingga tindakan yang dilakukan akan mendapatkan konsekuensi terbaik karena telah

⁷⁹ Nericcio, Lorenzo, CONSEQUENTIAL EXISTENTIALISM: QUALIFYING EXISTENTIAL RESPONSIBILITY, hlm. 1-2

terkoordinir satu sama lainnya dibandingkan dengan tindakan sporadis yang konsekuensinya akan tidak beraturan dan bisa jadi tidak sesuai apa yang diinginkan. Namun konsekuensialisme aturan tidak sama dengan kepatuhan atas aturan dan imperatif kategorikal Kant, bahwasanya aturan sekalipun dapat diubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan selama konsekuensinya lebih baik. Namun konsekuensialisme aturan tetap harus lebih didahulukan dibandingkan dengan tindakan.

ii. Teleologisme tindakan dan Karakter etis

Andre Barata memiliki sebuah konsep yang didasari pemikiran Sartrean yakni teleologisme tindakan (*Teleologism on Action*) dan karakter etis (*Character on Ethics*)⁸⁰. Konsepsi Teleologisme tindakan adalah mendasarkan dirinya kepada tindakan yang teleologis. Konsepsi dasar universalitas yang mendasari moralitas tindakan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Kant tidak ada dalam pemikiran ini. Bagi Barata, Sartre masih menggunakan konsepsi Kantian sebagai dasar pemikiran universalitas tindakan namun mulai berangkat kepada teleologisme tindakan dalam perbedaan yakni Kant mendasarkan universalitas ini pada moralitas universal, sedangkan Sartre mendasarkan universalitas ini pada *telos* yang mendasari tindakan singular seseorang. Makadari itu, Kant dan Sartre berbanding terbalik, bahwasanya Kant mengharuskan tindakan harus dipikirkan konsekuensi universalnya secara etis sebelum bertindak secara singular, sedangkan Sartre, konsekuensi universal lahir dari tindakan singular tersebut. Sehingga, bagi Sartre manusia adalah singular-universal, dimana manusia yang singular dan sejarahnya menciptakan universalitas dunia.

Karakter etis adalah konsep Barata dimana Sartre berbicara mengenai ketiadaan nilai-nilai apriori. Sebagaimana dalam Aristoteles, ada nilai-nilai apriori yang muncul dari keadaan alamiah manusia, Sartre berkata sebaliknya. Sehingga manusialah sendiri yang menciptakan nilai-nilai tersebut sepanjang hidupnya dan tidak pernah ada *equilibrium* etis sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Aristoteles. Segala premonisi atas tindakan tidak lebih dari manusia merefleksikan justifikasi atas tindakannya tersebut bagi Sartre, sehingga tidak ada nilai-nilai dasar yang memang menjustifikasi kebenaran atau etika sebuah tindakan kecuali manusia itu menciptakannya sendiri. Bagi Sartre, konsiderasi etis ada pada karakter dari subyek tersebut, bukan dari evaluasi etis atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Konklusi dari pemikiran ini adalah, Barata menyatakan bahwa etika Sartrean sangat berbanding terbalik dengan etika Kantian dimana dalam Kant memunculkan karakter

⁸⁰ <https://journals.openedition.org/philonsorbonne/1006> diakses pada 11-7-2018 pukul 12:15

kepatuhan (character of duty) dimana seseorang harus berkehidupan dan berkarakter atas kewajiban etis. Sedangkan Sartre kebalikannya, kewajiban seseorang adalah menciptakan karakter bagi dirinya, itu merupakan sebuah kewajiban etis yang ada untuk otentisitas seseorang.

b. Pemikiran Politis

Ada beberapa pemikiran politis yang ditulis menggunakan konsepsi-konsepsi Sartrean yang menarik untuk digunakan sebagai dasar pemikiran etika politik Sartrean yakni :

i. Anarkisme Sartrean

Ada sebuah jurnal menarik yang ditulis oleh Alfred Betschart yang menyatakan bahwa Sartre pada tahun 1979 telah berpindah ideologi politik menjadi seorang Anarkis⁸¹. Bahwasanya Sartre dalam sebuah wawancara dengan Juan Goytisolo menyatakan dirinya seorang Anarkis. Namun perlu ditelisik pemikiran Sartrean manakah yang memang memiliki potensi-potensi Anarkisme. Dalam jurnal ini menjelaskan beberapa pemikiran Sartre yang memang memberikan potensialitas untuk ideologi politik Anarkisme.

Pertama, menurut Betschart adanya inkongruensi antara metode Eksistensialisme yang mendasarkan dirinya atas individualisme metodikal. Individualisme metodikal ini mendasari segala tindakan dimana tindakan manusia didasari oleh kehendak-kehendak individunya. Sedangkan Marxisme menggunakan metode Holisme metodikal, dimana segala tindakan merupakan sebuah keniscayaan universal dan metode-metode yang mirip dengan Hegelianisme dan ideologi-ideologi komunitarian lainnya.

Perbedaan metode yang ekstrim ini tentu membuat adanya epistemological rift dalam sudut pandang berpikir Marxian-Sartrean, sehingga Sartre banyak berusaha untuk melakukan sinkretisme-sinkretisme metode filsafat politis yang berusaha menggabungkan dan mencocokkan keduanya.

Menurut Betschart, Anarkisme justru memberikan framework yang lebih cocok digunakan oleh Sartre dalam mengejawantahkan pemikiran politiknya. Dasar dari Eksistensialisme adalah pilihan-pilihan individual yang didasari oleh kemerdekaan pribadi dan kebebasan sebagai manusia dimana Anarkisme juga memiliki sudut pandang yang sama, sedangkan Marxisme mendasarkan dirinya kepada kebutuhan-kebutuhan kolektif

⁸¹ Betschart, Alfred, Sartre's anarchist political philosophy – a draft for a diverse society?, hlm. 1

yang harus diutamakan dibandingkan dengan pilihan-pilihan individual, sehingga berlawanan dan membatasi kebebasan manusia yang ada dalam Eksistensialisme.

Pemikiran Sartre berubah pada tahun 1970an dimana Sartre sudah tidak terlalu percaya lagi dengan konsepsi pemisahan masyarakat atas moda produksi, namun lebih kepada penggabungan masyarakat atas fraternitas. Hal ini lebih mirip dengan pemikiran Anarkisme yang mendasarkan dirinya atas kesetaraan absolut dan tidak adanya kekuasaan/Archein di wilayah manapun dimana segala umat manusia dianggap setara dan memiliki kekuasaan serta pemenuhan yang sama satu dengan lainnya. Tentu prasyarat demikian adalah fraternitas diantara umat manusia.

Yang terakhir, Sartre dianggap oleh Betschart belum selesai dalam memformulasikan Anarkismenya karena masih mempercayai adanya konsep negara, yakni negara Federalis. Seorang Anarkis tentu tidak membutuhkan keberadaan negara sedikitpun karena masih mengandung kekuasaan dan hirarki di dalamnya. Sartre masih meyakini bahwa perlu ada negara untuk mendistribusikan segala kebutuhan masyarakat agar tidak ada kelangkaan yang justru akan menghalangi kebebasan manusia di ranah yang lain.

ii. Sartre dan Kekerasan

Ada beberapa jurnal menarik yang menyatakan hubungan Sartre dan kekerasan dimana Sartre secara implisit maupun eksplisit mendukung tindak kekerasan (terutama terorisme kiri pro-Komunisme) pasca adanya pengeboman kaum kanan pada rumahnya di Paris tahun 1962. Yang pertama adalah tulisan dari Bernasconi yang menyatakan bahwa Sartre memberikan landasan etis bahwa kekerasan yang terjustifikasi dapat dilakukan, dan justifikasi atas kekerasan tersebut lahir dari kekerasan itu sendiri (etika kekerasan menjustifikasi dirinya) sebagaimana seorang pemenang perang memiliki kemampuan untuk menulis ulang sejarah dan menyatakan langkahnya adalah langkah yang benar secara moralitas⁸².

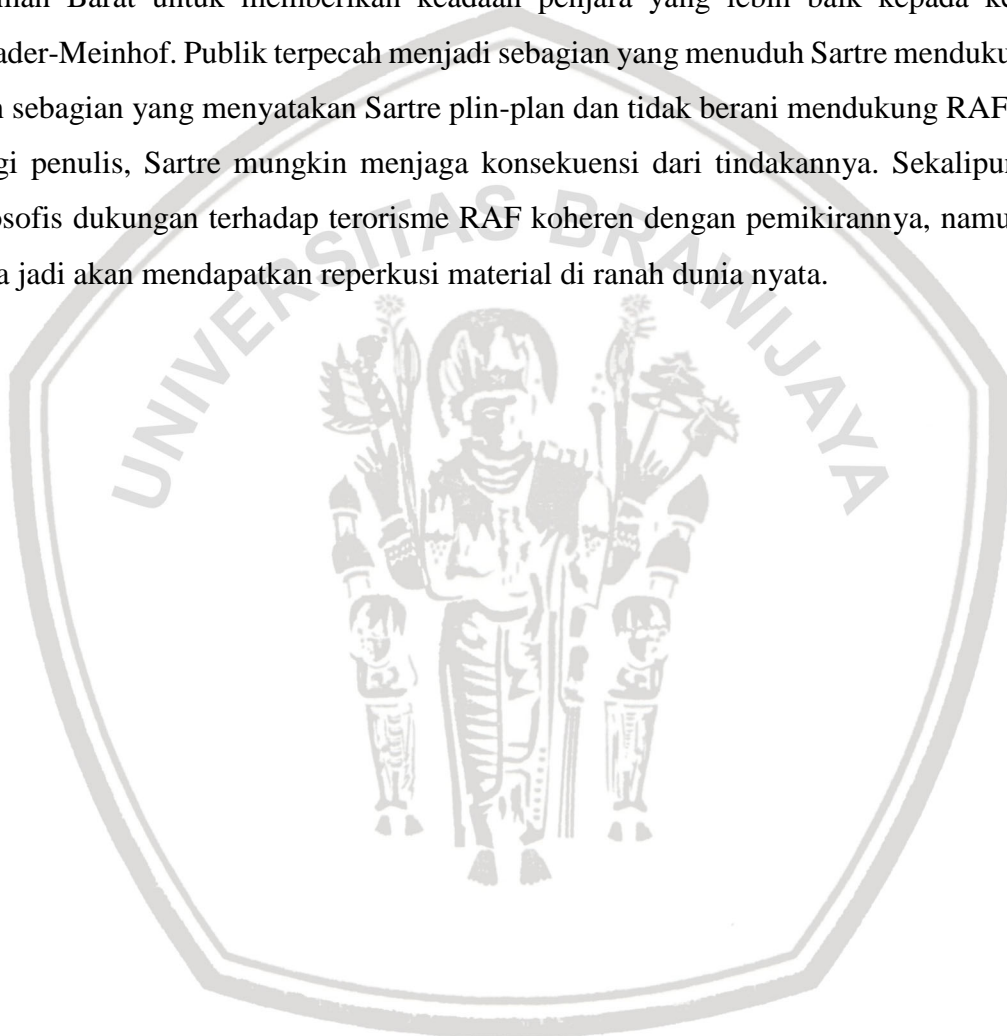
Bagi Sartre, kekerasan yang terjustifikasi secara etis hanyalah kekerasan yang berusaha untuk mengubah kondisi opresi (dimana ada orang-orang yang hanya dijadikan sebuah cara/means dan diubah kembali menjadi tujuan/ends, sebagaimana Sartre mencontohkan adanya pemilik pabrik/kapitalis yang memperlakukakan pekerjaannya untuk mencari keuntungan)

⁸² Bernasconi, Robert, "An Ethics of Violence Justifying Itself". Sartre's Explorations of Violence and Oppression, hlm.5

menjadi kondisi yang manusiawi. Kekerasan demikian adalah kekerasan revolusioner untuk mengubah tata masyarakat menjadi tatanan yang lebih humanis.

Namun, Sartre pada kenyataannya tidak memberikan dukungan maupun penolakan atau pengutukan atas aksi teror yang dilakukan oleh kaum kiri. Sartre tidak menolak ketika diberi surat oleh Ulrike Meinhof (seorang anggota Red Army Faction, teroris kiri di Jerman Barat) dan mendatangi sel Andreas Baader dan mengunjunginya. Sartre tidak memberikan dukungan atas aksi teror yang dilakukannya namun berdemonstrasi kepada pemerintah Jerman Barat untuk memberikan keadaan penjara yang lebih baik kepada kelompok Baader-Meinhof. Publik terpecah menjadi sebagian yang menuduh Sartre mendukung RAF dan sebagian yang menyatakan Sartre plin-plan dan tidak berani mendukung RAF⁸³.

Bagi penulis, Sartre mungkin menjaga konsekuensi dari tindakannya. Sekalipun secara filosofis dukungan terhadap terorisme RAF koheren dengan pemikirannya, namun Sartre bisa jadi akan mendapatkan reperkusi material di ranah dunia nyata.



⁸³ Welten, Ruud. 2005. Why Sartre Visited Andreas Baader?, hlm. 4-5

BAB III

NILAI-NILAI AKSIOLOGIS EKSISTENSIALISME SARTREAN

Dalam bagian ini akan dijelaskan konsep-konsep Filsafat dan Etika Eksistensialisme Sartrean yang berasal dari pemikiran Jean Paul Sartre.

1. Konsep-konsep Filsafat Sartrean

Jean Paul Sartre adalah seorang filsuf sekaligus psikoanalisis Perancis yang menggunakan sudut pandang fenomenologi eksistensialis dan marxisme sebagai cara pandang terhadap permasalahan yang ada di dalam keberadaan maupun manusia di dunia. Pemikiran Sartre mengkawinkan pemikiran fenomenologi eksistensialis Heidegger dengan Marxisme Karl Marx serta mengkolaborasikannya dalam pemikiran ontologis maupun pemikiran ideologi politik.

a. Subyektifitas

Menurut Sartre, subyektifitas memiliki dua definisi yaitu kebebasan sebuah individu yang menjadi subyek untuk memilih menjadi apa yang dia inginkan¹ dan yang kedua adalah keterbatasan manusia untuk bertransendensi dari subyektifitas manusia yang lainnya².

Penjelasan mengenai subyektifitas yang pertama adalah dimana seorang subyek adalah kemampuan individu untuk memilih menjadi apa yang dia inginkan di dalam subyek itu. Relevansinya dalam hukum adalah ketika seorang manusia menjadi seorang subyek hukum, harusnya dia memiliki segala kemampuan dan kewenangan untuk membentuk hukum ataupun mengubah hukum dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Sebagaimana seorang subyek berbeda dengan obyek, obyek adalah sebuah materi yang dikaji oleh hukum dan tidak bisa mengubah hukum dalam bentuk apapun.

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia sebagai subyek hukum harusnya memiliki kemampuan lebih dalam membuat hukum dalam *level* imanen. Sayangnya hak-hak pembuatan hukum dan pengkajian hukum menjadi transenden sehubungan dengan demokrasi representatif yang dianut oleh Indonesia dimana hak-hak pembuatan hukum diserahkan kepada perwakilan yang ada pada masyarakat politis di Indonesia. Dampaknya adalah manusia Indonesia yang tergabung dalam masyarakat sipil di Indonesia tidak memiliki kemampuan apapun kecuali mengikuti aturan permainan (*rule of the game*) yang berbentuk

¹ Sartre, Jean Paul. 2007. *Existentialism is a Humanism*. New Haven : Yale University Press, hlm.23

² Ibid hlm.24

hukum formil maupun lembaga tertentu baik lembaga hukum maupun lembaga politik untuk melakukan perubahan terhadap hukum yang ada.

Ini berlawanan dengan konsepsi mengenai subyek yang ada menurut Sartre dimana seharusnya individu memiliki kemampuan untuk mengubah hukum tanpa menggunakan representasi apapun atas nama suatu *persoon* yang berwenang. Anggota masyarakat sipil sebagai sebuah subyek seharusnya memiliki kemampuan untuk mengubah hukum dan membuat hukum di *level* lingkungannya karena ia adalah subyek dari hukum tersebut, bukanlah obyek yang diatur oleh hukum tersebut dan diatur bagaimana tindakan yang mampu untuk mengubahnya.

Sehingga kalau digunakan teori subyektifitas Sartrean dengan definisi yang pertama, subyek hukum terbatas pada masyarakat politis saja dan bukanlah masyarakat sipil karena hukum di Indonesia yang menggunakan positivisme sebagai landasannya menyatakan dengan gamblang bahwa hukum harus dibentuk oleh seperangkat lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang dan manusia yang menjadi anggotanyalah yang menjadi subyek dari hukum itu sendiri dan mampu untuk mengkontrol dan mengatur masyarakat sipil dalam bentuk pembuatan hukum yang tidak menyertakan/mengalienasi masyarakat sipil sebagai obyek.

Kondisi itu diperparah dengan bentuk propaganda bahwa masyarakat sipil jugalah seorang subyek dari hukum karena diberikan kesempatan untuk mengubah hukum dari jalur yang diatur oleh masyarakat politis juga. Segala tindakan dari materi hukum yang mengatur perilaku subyek hukum sampai pada cara untuk mengubahnya jika ada tindakan politik (dengan definisi Rancieran) atas hukum yang sudah positif dari masyarakat juga sudah diatur oleh masyarakat politis.

Dengan kata lain pernyataan *naturlijkpersoon* sebagai seorang subyek hukum adalah sebuah penyesatan makna untuk melegitimasi obyeksifikasi manusia dan lembaga yang tidak tergabung dalam masyarakat politis (yaitu *naturlijkpersoon* sebagai anggota masyarakat sipil dan *rechtpersoon* sebagai anggota masyarakat sipil dan ekonomis) dengan cara memberikan ilusi imajiner ontikal bahwa mereka adalah subyek sedangkan secara esensial mereka adalah obyek hukum. Selanjutnya adalah mengenai definisi Sartre mengenai subyektifitas yang kedua yaitu dimana manusia tidak bisa transenden dari subyektifitasnya. Penjelasan nya adalah dimana segala tindakan dari seorang manusia juga berhubungan dengan manusia lainnya maupun dengan lingkungan sekitarnya. Fenomena ini dikenal juga dalam istilah saintifiknya yaitu "*butterfly effect*".

b.Ontologi Sartrean

Untuk memahami konsep-konsep Sartre dan mengkaitkannya dengan hukum kita harus berusaha untuk memahami konsep-konsep ontologis dari pemikiran eksistensialisme Sartre itu sendiri. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa konsep-konsep penting dari sisi ontologis itu sendiri:

a) Keberadaan-di dalam-dirinya (*Being-in-itself/Etre-en-soi*)

Keberadaan-di dalam-dirinya adalah sebuah keberadaan yang harus menjadi dirinya³ yaitu sebuah keberadaan yang tidak memiliki mode mengada lain selain menjadi dirinya. Keberadaan ini secara esensial sudah sebuah keberadaan (keberadaannya sudah imanen di dalam keberadaan itu sendiri) dan tidak bisa mengada menjadi keberadaan lain karena di dalam pemberadaannya ia adalah keberadaan.

Salah satu ciri penting dari keberadaan-di dalam-dirinya adalah ia tidak memiliki kesadaran (*consciousness*) dan tidak bisa mengubah keberadaannya menjadi keberadaan lain karena ia tidak memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan-tindakan reflektif.

Keberadaan-di dalam-dirinya adalah sesuatu yang solid (*massif*) karena ia sendiri terisolasi dalam keberadaannya dan tidak melakukan koneksi apapun pada keberadaan lain yang bukan dirinya. Dengan kata lain ia tidak mengubah mode keberadaannya karena di dalam dirinya sendiri adalah sebuah keberadaan yang solid ketika menghadapi sebuah keberadaan yang lain.

Keberadaan ini juga sempurna di dalam-dirinya, ia tidak memiliki celah di dalam keberadaannya tidak seperti keberadaan-untuk-dirinya. Ia tidak perlu melakukan mode mengada yang lain karena sudah sempurna di dalam keberadaannya itu sendiri.

Keberadaan ini adalah segala keberadaan selain manusia, yaitu benda mati dan benda hidup selain manusia yang ada di dunia ini. Ada dua penjelasan yang harus digunakan yaitu menggunakan analogi benda mati dan benda hidup, yang pertama adalah menggunakan benda mati.

Sebagaimana kita ketahui bahwa benda mati seperti meja kayu tidak memiliki kesadaran untuk mengubah dirinya menjadi keberadaan lain tanpa adanya bantuan dari manusia atau hal-hal lainnya. Meja kayu tidak mungkin mengubah dirinya sendiri menjadi sebuah kursi kayu tanpa bantuan manusia dan faktor-faktor lainnya. Ini menandakan bahwa meja kayu tidak memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan yang mampu mengubah mode keberadaannya.

³ Sartre, Jean Paul. 2003. *Being and Nothingness*. Routledge, hlm.lxv

Di satu sisi karena keberadaan meja kayu tersebut sudah sempurna di dalam keberadaannya, apabila meja kayu tersebut dipatahkan menjadi dua maka ia juga sempurna dalam keberadaan “patahan meja kayu” dan “patahan meja kayu satunya”. Mengapa dikatakan sempurna? Karena ia telah menjadi dua buah keberadaan yang berbeda dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan “celah dalam keberadaan (*lack of being*)⁴” yang ada di dalam mode keberadaannya.

Yang analogi kedua adalah menggunakan benda hidup. Dalam keberadaannya, benda hidup non-manusia selalu memiliki identitas tertentu yang disematkan oleh manusia yang menandakan benda hidup tersebut adalah keberadaan-di dalam-dirinya. Semisal ada seekor kucing yang dinamai oleh pemiliknya “Zero” maka hanya pemiliknyalah dan orang-orang yang memahami bahwa ia dinamakan “Zero” yang memanggilnya Zero.

Dalam kasus ini setiap orang yang tidak memiliki pemahaman atas nama Zero yang telah disematkan kepada kucing tersebut bebas untuk menganggapnya hanya sekedar kucing ataupun menyebutnya dengan nama lain semisal Manis atau Pus dan sebagainya.

Namun mode keberadaan kucing yang dinamakan Zero ini tidak akan berubah secara esensial bahwa dia adalah seekor kucing, dan mode mengadanya hanya sekedar kemungkinan penambahan properti atas esensia utamanya sehingga premis-premisnya hanyalah premis tambahan dari premis kucing seperti “kucing yang bernama Zero”, “kucing yang bernama Manis” dan tidak mungkin premis primernya berubah dari kucing menjadi hewan lain seperti anjing.

Selain itu juga kucing dinamai Zero ini tidak akan melakukan mode mengada yang lain apabila manusia menganggap keberadaannya menjadi kucing yang bernama Manis, tentunya kucing ini tidak akan meminta kepada manusia yang menyebutnya Manis tersebut untuk menyebutnya sebagai Zero.

Tentunya makhluk hidup memiliki keinginan (*desire*) seperti manusia dan berusaha untuk memenuhinya. Namun yang membedakan makhluk hidup lain dengan manusia adalah makhluk hidup lain tidak melakukan apa-apa untuk mengubah mode keberadaannya dalam mendapatkan pemuasan atas keinginan tersebut.

Kucing yang mengeong-ngeong ketika ia meminta makananpun tetap dianggap sebagai kucing dalam keberadaannya, ia tidak mengubah cara mengadanya dengan keberadaan yang lain. Lain halnya dengan manusia yang mengubah cara mengadanya menjadi keberadaan yang lain yaitu tetap menjadi seekor kucing.

⁴ Gardner. 2009. Sartre's *Being and Nothingness*. London : Continuum, Hlm.102

Semisal ini diterapkan kepada manusia maka keberadaannyapun berubah menjadi bagaimana cara ia mengada ketika ia mencari pemenuhan atas kebutuhannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia bisa mengada menjadi mode keberadaan lain semisal manusia yang dikenal dengan nama “Bagus” bisa melakukan cara mengada yang berbeda semisal mengemis ataupun bekerja sebagai seorang pekerja untuk mendapatkan kebutuhannya.

Maka keberadaannya akan dikenal sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam bekerja, ia tidak akan dikenal sebagai manusia (esensinya, sebagai premis mayor) yang bekerja sebagai pekerja, tetapi sebagai Bagus, seorang pekerja. Lengkapnya mengenai premis ini akan dijelaskan dalam bagian keberadaan-untuk-dirinya.

Ketika kita memahami bahwa segala benda non-manusia adalah keberadaan-di dalam-dirinya maka kita memahami bahwa hukum jugalah sebuah keberadaan-di dalam-dirinya yang membutuhkan campurtangan manusia dalam memberadaknya.

Hukum itu sendiri merupakan sebuah keberadaan yang pasif. Tentunya diperlukan campurtangan manusia dalam bentuk pengejawantahan kesadaran-kesadaran banyak manusia yang intersubyektif dan membentuk sebuah hukum yang digunakan untuk mengatur manusia sebagaimana diinginkan manusia tersebut.

Secara esensial, hukum tetaplah hukum, ia hanya mampu mengada di ranah realitas baik dalam bentuk ide maupun dalam bentuk materiil hanya dengan adanya campur tangan manusia. Hukumpun adalah sebuah keberadaan-di dalam-dirinya yang sempurna di dalam dirinya, karena ia tidak akan mengubah mode keberadaannya walaupun banyak kecacatan yang sekalipun sengaja dilakukan dalam proses pengadaannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum yang melindungi koruptor sekalipun tidak akan mengubah mode keberadaannya untuk menjadi keberadaan yang lain atas nama celah yang ada di dalam hukum tersebut karena ia tidak memiliki celah dalam keberadaannya. Kita memahami bahwa dalam proses mengadanya hukum dikenal dengan proses politik. Hukum adalah salah satu produk dari proses politik yang ada untuk mengadakan sebuah hukum. Tentunya politik tidak bisa dimaknai hanya sekedar proses elektoral ataupun proses legislasi saja, segala yang melibatkan kekuasaan politik (dalam definisi Huemerian⁵) di dalam prosesnya adalah proses politik.

Tentunya disini hukum sebagai sebuah keberadaan-di dalam-dirinya tidak akan bisa menjadi sebuah entitas yang *supreme* karena secara esensi sendiri ia merupakan produk yang subordinat dari proses-proses politik. Alangkah lebih baiknya jika jargon supremasi

⁵ Baca The Problem of Political Authority karangan Michael Huemer

hukum atas politik yang imajiner diganti dengan sebuah jargon yang lebih imanen pada realitas semisal proses politik yang baik akan menciptakan sebuah produk hukum yang baik. Dengan hal itu maka kita tidak membuang-buang energi untuk menciptakan hal imajiner setelah memahami konsep keberadaan-di dalam-dirinya milik Sartre dan kaitannya dengan sisi ontologis dari hukum.

b) Keberadaan-untuk-dirinya (*Being-for-Itself/Etre-pour-soi*)

Pertama, tentunya pembaca yang awam akan filsafat keberadaan/ontologi akan kebingungan ketika membahas tentang peristilahan Sartrean yang cukup membingungkan ketika diteliti secara harafiah. Namun memang keberadaan-untuk-dirinya ada hubungan dengan manusia dimana ia adalah esensi ontologis dari manusia itu sendiri.

Dalam keberadaan manusia ada sebuah negativitas, negativitas itu adalah ketiadaan (*nothingness*)⁶ dimana manusia tidak akan pernah mengada sebagai dirinya sendiri. Eksistensi dari keberadaan-untuk-dirinya yaitu manusia selalu mengada sebagai keberadaan yang lain selain dirinya⁷.

Penjelasannya adalah manusia setelah dilahirkan dan diberi nama, maka dia tidak akan dipanggil sebagai “manusia”, namun dipanggil menggunakan namanya. Semisal seorang bayi dinamakan Aji, maka selamanya dia akan dipanggil dengan Aji (kecuali jika dia menamakan dirinya dengan nama lain atas situasi dan kondisi tertentu yang mengakibatkan dia harus menamakan dirinya dengan nama lain).

Aji akan dikenal sebagai Aji, tidak akan disebut sebagai “manusia itu”, atau “manusia”, tetapi Aji atau “orang yang (isi properti yang dia pakai, dia kerjakan atau sejenisnya di sini)”, tetapi tidak pernah sebagai “manusia”. Ini merupakan sebuah ketiadaan keberadaan dari manusia yang solid seperti keberadaan-di dalam-dirinya. Sehingga manusia disebut dengan keberadaan-untuk-dirinya karena ialah yang menentukan keberadaan untuk dirinya mengada.

Di satu sisi ketiadaan akan memberikan posibilitas mengada yang tidak terbatas⁸⁹ dimana ketiadaan juga mampu untuk mengubah sebuah keberadaan menjadi keberadaan yang lain karena sebuah keberadaan-di dalam-dirinya sudah menjadi total dalam kepositifannya dan sudah menjadi sebuah keberadaan yang ada yang terisolir. Manusia yang esensinya memiliki unsur ketiadaan tentunya bisa mengubah keberadaan menjadi keberadaan lain

⁶ Sartre, Jean-Paul. 2003. Op.Cit, hlm.78

⁷ Ibid hlm.78

⁸ Busch, *Sartre's Hyperbolic Ontology: Being and Nothingness Revisited*, Villanova University, hlm.2

⁹ Sartre, Jean-Paul. 2003. Op.Cit. Being..., hlm.79

karena ia sendiri bisa mengada sebagai “keberadaan yang mengubah keberadaan menjadi keberadaan lain” maupun “keberadaan yang menciptakan sebuah keberadaan baru” sebagai salah satu bentuk mengadanya dari posibilitas mengada manusia yang tidak terbatas.

Untuk tetap menjadi sebuah ketiadaan, manusia harus mengalami sebuah “kekurangan atas keberadaan (*lack of being*)”¹⁰ dimana manusia membutuhkan sebuah keberadaan untuk menyempurnakan dirinya, sekaligus tidak akan pernah mampu untuk menyempurnakan dirinya. Penjelasan nya adalah dimana manusia memiliki keinginan dalam kesadarannya untuk memiliki uang agar mampu untuk membeli kebutuhannya. Namun setelah kebutuhannya terpenuhi, manusia menginginkan keberadaan sebuah barang pemuas untuk keinginannya, manusia tersebut akhirnya mencari uang terus menerus untuk selalu memenuhi keinginannya yang tidak terbatas.

Di satu sisi, orang yang sudah meninggal akan dikenal sebagai sebuah keberadaan-di dalam-dirinya yaitu sebagai mayat/jenazah yang tidak memiliki kesadaran. Tentunya ketika kita mengacu kepada sebuah badan jasmaniah orang yang sudah meninggal kita akan menyebutnya sebagai mayat, ataupun kalau kita mengenalnya kita akan menyebutnya sebagai “mayatnya (isi nama disini)”. Keberadaan dari mayat tersebut sudah menjadi dirinya, yaitu mayat sehingga ia memenuhi premis dari keberadaan-di dalam-dirinya.

Selain itu juga seorang mayat tidak memiliki kebutuhan atas keberadaan dan ia tidak membutuhkan alat pemuas apapun untuk menyempurnakan keberadaannya, ia sudah memiliki keberadaan yang sempurna (sesuai dengan premis keberadaan-di dalam-dirinya) dan tidak perlu mengada sebagai keberadaan lain (berarti ketiadaan bukanlah esensi dari mayat) untuk mendapatkan pemenuhan keberadaannya.

Dalam merumuskan sebuah kebutuhan atas keberadaan diperlukan adanya dialektika antara “yang dibutuhkan (*the lacking*)” yaitu apa yang hilang dari keberadaan manusia, “yang eksisten (*the existing*)” yaitu apa yang ada di keberadaan manusia dan sintesisnya yaitu “yang dibutuhkan”¹¹ (*the lacked*)¹², dimana yang dibutuhkan adalah sebuah keberadaan intuitif yang dibentuk oleh rasio manusia berdasarkan sintesis dari yang dibutuhkan dan yang eksisten¹³.

¹⁰ Ibid hlm.85

¹¹ Bahasa Indonesia tidak sekompleks Bahasa Perancis ataupun Bahasa Inggris dalam penggunaan ajektif, sehingga translasi untuk yang dibutuhkan yang peneliti buat sendiri cukup rancu karena tidak ada padanan kata yang tepat untuk membahasakan sesuai dengan literalnya

¹² Spade, *Sartre's Being and Nothingness*, 1995, hlm.175

¹³ Sartre, Jean-Paul. 2003. Op.Cit. Being..., hlm.86

Penjelasan mudahnya adalah dimana yang eksisten dari tubuh manusia yaitu organ-organ tubuh manusia membutuhkan h₂O (air) untuk menjalankan fungsinya dengan baik agar tidak dehidrasi. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah h₂O (air), sedangkan kesadaran kita menyatakan bahwa kita mengalami rasa haus sebagai penanda dari yang eksisten di dalam tubuh kita. Selanjutnya terjadi dialektik internal di dalam kesadaran kita dan menghasilkan sintesis yang beragam kemungkinannya, seperti air putih biasa, coca cola, sprite, kopi, teh dan sebagainya sebagai hasil dialektik dari berbagai organ yang eksisten di tubuh kita dengan air yang esensial bagi tubuh kita.

Realitas manusia eksis di awal sebagai sebuah kekurangan atas keberadaan¹⁴. Manusia eksis pada awalnya adalah karena ia memiliki sebuah kekurangan atas keberadaan. Ia memerlukan berbagai keberadaan baru untuk memenuhi keberadaannya termasuk juga mengada sebagai hal lain. Manusia melihat realitas dengan melihatnya sebagai kekurangan atas keberadaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia banyak menciptakan keberadaan-keberadaan baru yang mampu memudahkan hidupnya dengan menggunakan penglihatan kekurangan atas keberadaan. Ketika manusia membutuhkan tempat untuk berteduh sekaligus harus dekat dengan lahan perburuannya ataupun lahan pertaniannya, mereka membuat rumah yang tidak pernah dibuat oleh makhluk lain sebelumnya. Ketika manusia membutuhkan sebuah keberadaan, manusia melihatnya sebagai sebuah kekurangan atas keberadaan, tidak hanya mengadaptasikan dirinya namun menggunakan ketiadaannya untuk mengubah keberadaan dirinya maupun keberadaan lainnya.

Hukum dibentuk atas sebuah kebutuhan dari keberadaan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan atas rasa aman, nyaman dan untuk mempermudah manusia mendapatkan kebutuhannya. Tentunya ia merupakan sebuah produk subyektif dari yang membuatnya karena hukum itu sendiri merupakan sebuah keberadaan yang dibentuk oleh manusia yang membutuhkan sebuah keberadaan tertentu yang kita sebut dengan hukum.

Manusia yang membuat hukum tentunya harus mengada sebagai pembuat hukum. Mereka harus melakukan berbagai cara untuk mengada yaitu setidaknya sebagai seseorang yang memberikan basis teori untuk kewenangan orang lainnya yang akan menjadi pembuat hukum, seseorang yang memberikan basis teori untuk menjadi hukum, seseorang yang membuat hukum, seseorang yang menerapkan hukum, seseorang yang menegakkan hukum dan seseorang yang memberikan tindakan atas pelanggaran hukum.

¹⁴ Ibid hlm.89

Karena manusia itu sendiri memiliki esensi yaitu ketiadaan yang memiliki kemungkinan yang tidak terbatas untuk mengada, tentunya seseorang bisa memilih untuk menjadi itu semua ataupun menjadi sebuah pengkritik sistem yang dibentuk oleh pos-pos tersebut.

Kita memahami bahwa dalam dialektika antara yang dibutuhkan, yang eksisten dan yang dibutuhkan tentunya memiliki hasil-hasil dialektik yang berbeda antara satu manusia dengan yang lainnya. Tentunya yang dibutuhkan disini adalah hukum, yang eksisten setidaknya adalah manusia, tatanan sosial maupun hukum yang lama, tentunya setiap manusia yang memikirkan hasil dialektik antara yang dibutuhkan maupun yang eksisten akan memiliki pemikiran yang berbeda satu sama lain mengenai yang dibutuhkan.

Seseorang bisa berpikir bahwa hukum positif yang baru adalah yang dibutuhkan berdasarkan dialektika tersebut. Seseorang juga bisa berpikir bahwa perlu ada perubahan sistem basis maupun suprastruktur secara menyeluruh menggunakan aliran hukum lain untuk memperbaiki keadaan hukum sesuai dengan yang dibutuhkan.

Tentunya, sebuah kritik adalah keniscayaan sebagai bentuk pemikiran yang berbeda akibat rasio manusia yang berbeda hasil dialektik mengenai yang dibutuhkan yaitu yang dibutuhkan.

c) Keberadaan-untuk-yang lain (*Being-for-others/etre-pour-autrui*)

Keberadaan mengenai seorang manusia tentunya tidak mungkin tidak terlihat oleh manusia ataupun keberadaan lainnya (dalam artian benda hidup). Sebagaimana kita ketahui bahwa segala apa yang kita lakukan akan terlihat oleh orang lain ataupun keberadaan lainnya dan tentunya ditanggapi oleh mereka.

Yang lain (*others*) menurut Sartre adalah sesuatu yang kita lihat sekaligus melihat kita¹⁵. Penjelasannya adalah dimana kita melihat orang lain yang sekaligus melihat kita maka kita bisa mengetahui letak serta keberadaan yang lain tersebut. Seandainya kita mengandaikan adanya makhluk halus, seandainya makhluk halus itu ada dan melihat kita namun kita tidak bisa melihat keberadaannya dengan indera maupun alat ukur yang bisa dipercaya secara saintifik maka kita tidak bisa mengetahui letak keberadaan sesungguhnya dari makhluk halus tersebut sehingga mereka bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak ada. Yang bisa dikaji sebagai yang lain hanyalah sesuatu yang ada (*being*).

Di satu sisi ketika kita dilihat sekaligus melihat orang lain maka kita menjadi yang lain bagi mereka. Kita bertransendensi dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan dimana kita dinilai oleh orang lain dari sesuatu yang mereka alami terhadap kita. Di satu

¹⁵ Ibid hlm.228

sisi intuisi kita sekalipun tidak mampu menilai secara tepat dan sempurna mengenai orang lain dan penilaian apa yang orang lain berikan kepada kita.

Sartre menyatakan bahwa salah satu solusi untuk mengabaikan konsep yang lain adalah dengan solipsisme¹⁶. Seseorang bisa saja tidak mempercayai adanya yang lain ataupun mengabaikan mereka seperti mereka tidak ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam beberapa pembuatan hukum ataupun kebijakan politik, banyak masyarakat politis yang teralienasi dari masyarakat sipil (yang lain bagi mereka) melakukan quasi-solipsisme¹⁷ dimana mereka secara tersirat mengabaikan keberadaan masyarakat sipil dalam memberikan pertimbangan atas hukum ataupun kebijakan publik namun mempertimbangkan keberadaan mereka sebagai sebuah obyek yang ada dan diatur oleh mereka.

Quasi-solipsisme yang demikian dibuktikan dalam keseharian masyarakat politis mengada. Dimana dalam berkegiatan masyarakat politis seringkali teralienasi dan mengalienasi masyarakat sipil dalam bentuk *voorijder*, helikopter, mobil dinas, fasilitas mewah dan semacamnya yang membuat mereka menilai keberadaan masyarakat sipil sebagai sebuah obyek yang transenden dari mereka dan dianggap tidak mampu untuk memberikan penilaian bagi mereka.

Di satu sisi, Sartre juga menyebutkan tentang dialektika tuan-budak milik Hegel¹⁸ dimana setiap relasi selalu ada relasi antara tuan dan budak (*master and slave dialectic*) karena setiap kesadaran-atas dirinya (*self-consciousness*) apabila melihat kesadaran-atas dirinya yang lain akan mencoba memahami yang lain berdasarkan dirinya dan berusaha untuk membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan berdasarkan pemahamannya sendiri atas dirinya¹⁹.

Penjelasannya adalah ketika kita menemui orang lain, maka apa yang kita katakan kepada mereka adalah apa yang kita inginkan atas mereka dan di satu sisi apa yang mereka katakan kepada kita adalah apa yang mereka inginkan atas kita. Lalu muncul sebuah dialektika tesis dari apa yang kita inginkan dan antitesis dari apa yang mereka inginkan. Seseorang yang lebih banyak mendapatkan apa yang mereka inginkan atas orang lain akan menjadi tuan dan orang yang memberikan apa yang mereka inginkan akan menjadi budak.

¹⁶ Ibid hlm.229

¹⁷ Istilah peneliti bagi solipsisme atas logos yang lain sekaligus obyekifikasi yang lain sebagai obyek

¹⁸ Ibid hlm.237

¹⁹ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1977. *Phenomenology of Spirit*, Oxford : Oxford University Press, hlm.162

Untuk melepaskan diri dari solipsisme, menurut Sartre bisa melewati dialektika tuan-budak Hegel dimana ketika kita melihat yang lain berdasarkan kesadaran-atas diri kita maka kita tidak bisa menyangkal keberadaan yang lain tanpa menyangkal keberadaan kita sendiri²⁰. Sebagaimana menurut Hegel bahwa manusia melihat orang lain menggunakan kesadaran-atas diri dimana ia akan melihat kesamaan dari orang lain tersebut berdasarkan refleksi dirinya pada orang lain tersebut.

Sehingga ketika setiap manusia (tentunya) menemukan beberapa kesamaan tentang dirinya dengan orang lain, maka dia tidak akan pernah menganggap bahwa keberadaan yang lain itu tidak ada. Quasi-solipsisme yang ada sebagai sebuah patologi politik dalam pembuatan kebijakan publik dan hukum tentunya tidak bisa menjadi sebuah solipsisme murni karena masyarakat politis itu sendiri tidak pernah bisa menghilangkan keberadaan masyarakat sipil secara murni karena ia menemukan kesamaan-kesamaan tertentu dengan mereka.

Kita bisa membuktikannya dengan analogi bahwa masyarakat politis pernah menjadi masyarakat sipil sebelumnya dan mereka memiliki banyak kesamaan setidaknya dalam *level* nasional. Anggota masyarakat sipil yang memiliki perbedaan ekonomi yang sangat senjang sekalipun dengan anggota masyarakat politis selama masih memiliki kesamaan beberapa variabel dengan masyarakat politis masih mampu untuk memberikan pertimbangan dalam pembuatan hukum dan kebijakan publik. Namun tentunya harus diperkuat dengan kekuatan politik dan massa untuk memenangkan dialektika tuan-budak Hegelian yang terjadi.

Di satu sisi, solipsisme yang benar-benar dilakukan adalah ketika memang tidak ada kesamaan sama sekali (setidaknya dalam kesadaran karena kurangnya pengetahuan para masyarakat politis²¹) antara seorang anggota masyarakat politis Indonesia dengan seorang anggota masyarakat sipil di Zimbabwe selain bahwa mereka sama-sama manusia.

Analogi demikian dibuat berdasarkan asumsi bahwa ada perbedaan negara, perbedaan budaya serta berbagai variabel-variabel lain yang menyatakan diantara dua orang tersebut ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Tentunya jawaban atas pernyataan ini adalah masyarakat sipil Zimbabwe tidak bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik maupun hukum apapun di Indonesia karena tidak memenuhi variabel dari dialektika tuan-budak Hegelian yang ada.

²⁰ Sartre, Jean-Paul. 2003. Op.Cit. *Being...*, hlm.237

²¹ Penulis mempercayai bahwa salah satu kesalahan berpikir adalah karena kurangnya pengetahuan, selengkapnyabaca karya *Meditations* milik Descartes untuk argumentasi ini

Sebagaimana menurut Sartre bahwa menjadi seorang subyek atas yang lain adalah superioritas²². Menurutnya menjadi sebuah obyek bagi yang lain adalah menjadi budak dalam dialektika tuan-budak dan menjadi sebuah subyek bagi yang lain adalah menjadi tuan dalam dialektika tuan-budak Hegelian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum Indonesia dinyatakan bahwa *natuurlijkpersoon* adalah sebuah subyek dari hukum, dengan kata lain setiap manusia adalah subyek dari hukum. Namun seperti kita ketahui sebelumnya ada ketimpangan wewenang diantara manusia yang ada yaitu masyarakat politis yang berwenang untuk membuat hukum dan masyarakat sipil yang menyerahkan hak legislasinya kepada masyarakat politis dalam bentuk representasi.

Representasi merupakan bentuk penyerahan subyektifitas diri pada yang lain dan menyatakan bahwa dirinya adalah obyek dimana ia tidak mampu mengatur tingkah lakunya dari sisi hukum dan ia diatur oleh segelintir orang yang menjadi representasinya dalam bentuk masyarakat politis.

Dengan kata lain pemikiran Sartre mengenai keberadaan-untuk-yang lain telah membuktikan bahwa dalam hukum Indonesia penyebutan subyek atas *natuurlijkpersoon* tidaklah berarti subyek hukum sesungguhnya namun menjadi seorang subyek yang bertanggungjawab atas kesubyektifitasannya menyerahkan kesubyektifitasannya kepada segelintir masyarakat politis untuk menjadi sebuah obyek dari aturan yang dibuat oleh masyarakat politis.

c. Faktisitas

Seorang manusia dikutuk menjadi bebas, begitu menurut Sartre. Namun dalam kebebasannya manusia tidak bisa melakukan apapun secara seenaknya. Sebagaimana dalam *Existentialism is a Humanism* Sartre telah menyebutkan tentang subyektifitas dalam definisi yang kedua, yaitu dimana manusia tidak bisa bertransendensi dari subyektifitasnya yang dalam artian ia tidak bebas melakukan apapun walaupun dia subyek atas dunia karena ia terhalang oleh kesubyektifitasan manusia lainnya.

Selain itu faktor lain yang menghalangi kebebasan seorang manusia dalam menjalankan kesubyektifitasannya adalah faktisitas. Sebagaimana menurut Sartre seseorang bisa bebas

²² Ibid hlm.242

melakukan sesuatu namun tidak bebas atas apa yang pernah ia lakukan ataupun properti-properti yang ia miliki²³.

Penjelasannya adalah manusia bebas melakukan apapun termasuk ketika ia ingin mengangkat barbel seberat 100kg. Namun manusia tersebut harus melihat faktisitasnya, apakah badannya sudah terlatih untuk melakukan hal itu dengan baik ataukah tidak? Apakah ototnya kuat dalam mengangkat beban seberat 100kg ataukah tidak? Ataukah ia pernah mengalami penyakit yang berkaitan dengan fungsi muscular dan orthopedinya? Tentunya jika beberapa syarat di atas tidak terpenuhi maka ia tidak akan mampu untuk melakukan itu walaupun ia bebas untuk berkeinginan mengangkat barbel seberat 100kg.

Faktisitas itu sendiri adalah kumpulan fakta-fakta yang ada di sekitar manusia (situasi, *situations*²⁴) ataupun fakta-fakta yang dialami oleh manusia itu sendiri (sejarah, *history*). Tentunya kita tidak akan bisa melepaskan dari ini karena manusia adalah keberadaan-di dalam-dunia yang mengada di dalam dunia. Meskipun seseorang berusaha untuk melepaskan dirinya dari sejarahnya, dia hanya mampu untuk melepaskan sejarahnya dari pandangan orang lain namun dalam keberadaannya sendiri sejarahnya akan terus mengikutinya.

Makadari itu menurut Sartre kebebasan bukan berarti “kebebasan untuk selalu mendapatkan apa yang manusia inginkan” tetapi “kebebasan untuk menginginkan sesuatu”²⁵. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang menginginkan untuk menjadi seorang penguasa bagi manusia yang lainnya harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia yang berhak untuk menguasai yang lainnya entah itu dengan menggunakan cara-cara politik, ekonomi ataupun cara-cara lainnya karena tidak ada orang yang tiba-tiba mau untuk dikuasai hanya karena ada seseorang yang ingin menguasainya. Faktisitas memiliki beberapa aspek yaitu :

a) Tempat (*Place*)

Tempat adalah lokasi spasial manusia ketika berada di dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita selalu berada di sebuah tempat. Kita bisa berada di taman kota, rumah kita sendiri, perpustakaan, kampus, dan tempat-tempat lainnya. Tentunya ini berkaitan dengan kebebasan kita, semisal kita berada di Malang namun menginginkan untuk pergi ke Paris dalam jangka waktu satu jam tentunya tidak akan bisa dilakukan dengan teknologi yang ada sekarang. Kebebasan kita untuk melakukan itu terhalang oleh tempat.

²³ Ibid hlm.481

²⁴ Ibid hlm.481

²⁵ Ibid hlm.483

Sebagaimana dalam hukum, faktisitas berupa tempat diatur dalam bentuk yurisdiksi. Hukum Indonesia tentunya tidak akan berlaku di Malaysia, pembunuhan yang terjadi di Kota Malang dimana pelaku dan korbannya adalah warga Kota Malang tidak akan bisa diadili di Jakarta. Di satu sisi faktisitas yang berupa tempat menjadi sebuah permasalahan ketika ada kerancuan yurisdiksi seperti di lautan lepas.

Seseorang bisa saja mencoba untuk melepaskan diri dari spasialitas dengan menyatakan bahwa spasialitas adalah konsepsi absurd karena pemahaman spasialitas seseorang dengan orang yang lainnya akan berbeda satu sama lain. Namun untuk melawan konsepsi ini bisa digunakan argumentasi Empirisme Humean dimana kita bisa menggunakan pencatatan memorial²⁶ (yang biasanya digunakan dalam bentuk bukti-bukti pada sebuah kasus) untuk menentukan spasialitas seseorang.

Dengan pencatatan memorial kita bisa melakukan pemalsuan (*feign*) atas eksistensi kontinum dari seseorang di sebuah tempat tersebut. Sehingga setiap manusia bebas untuk melakukan apapun kecuali terhalang oleh faktisitas tempatnya.

b) Masa Lalu (*Past*)

Menurut Sartre, masa lalu memunculkan sebuah paradoks dimana di satu sisi masa lalu tidak bisa mempengaruhi tindakan manusia sebagai sebuah fenomena di masa depan namun di satu sisi segala tindakan manusia di masa depan adalah berdasarkan masa lalunya²⁷.

Penjelasannya adalah dimana seseorang yang berusaha untuk melupakan masa lalunya akan menjauhi segala tindakan yang pernah ia lakukan di masa lalu, semisal ada seorang mantan pecandu narkoba yang bertobat dan ia berusaha untuk menjauhi narkoba dan mengesankan bahwa ia tidak pernah kecanduan narkoba kepada seseorang yang baru mengenalnya.

Namun tindakan itu ia lakukan karena ia pernah kecanduan narkoba dan berusaha untuk menghilangkan masa lalunya yang pernah mencandu narkoba. Tindakan ia menjauhi narkoba dikonstruksikan oleh masa lalunya yaitu seorang pecandu narkoba.

c) Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan menurut Sartre adalah bentukan dari benda-benda instrumental di sekitar manusia²⁸. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sekitar kita terdiri banyak benda-benda instrumental. Seseorang bisa saja berkehendak untuk pergi keluar penjara ketika ia sedang

²⁶ Hume, David. 2000. *Treatise on Human Nature*. Oxford, Oxford University Press. hlm.112

²⁷ Ibid hlm.497

²⁸ Sartre, Jean-Paul. 2003. *Op.Cit. Being..*, hlm.504

dalam sel. Namun kebebasannya untuk keluar penjara dihalangi oleh terali besi sebagai benda instrumental di dalam lingkungannya.

Dalam hukum seseorang tentunya terhalang dengan lingkungannya ketika seseorang ingin untuk membentuk sebuah hukum, namun ia tidak memiliki peralatan yang memadai untuk itu. Mudahnya adalah ketika ada seseorang yang ingin memalsukan identitasnya namun tidak memiliki peralatan untuk itu maka tidak akan mungkin dilakukan, namun apabila memiliki peralatan untuk melakukan hal tersebut maka akan mungkin untuk dilakukan.

d) Orang Lain (*Fellowman*)

Berbicara subyektifitas tentunya tidak akan pernah terlepas dari kenyataan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Manusia sebagai keberadaan-untuk-yang lain selalu menemui orang lain di dalam hidupnya. Manusia bebas untuk melakukan sesuatu namun tentunya terhalang oleh keberadaan manusia lain di hidupnya.

Sartre langsung mencontohkan dalam bentuk hukum yaitu adanya pelarangan terhadap sebuah perilaku²⁹ dimana pelarangan tersebut membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Perilaku membunuh adalah sebuah perilaku yang dilarang oleh hukum, tentunya perilaku tersebut tidak hanya dilarang oleh hukum namun juga oleh manusia lainnya yang membentuk dan menegakkan hukum.

i. Konsep-konsep Etika Sartrean

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pemikiran Sartre mengenai etika yaitu :

a. Manusia ingin menjadi Tuhan

Sartre muda meyakini bahwa manusia ingin menjadi Tuhan³⁰. Hal ini terjadi karena manusia ingin menyatukan keberadaan-untuk-dirinya (*being-for-itself/etre-pour-soi*) dan keberadaan-di dalam-dirinya (*being-in-itself/etre-en-soi*) di dalam dirinya. Keberadaan untuk dirinya memiliki potensialitas untuk melakukan apapun karena adanya celah (*lack*) di dalam keberadaannya sehingga berusaha untuk mengisi celah-celah tersebut dengan pemenuhan keberadaannya, namun tetap saja celah tersebut tidak akan pernah dipenuhi karena itulah yang membedakan manusia dengan keberadaan lain yang tidak memiliki celah dalam keberadaannya. Ketika manusia menyatukan keberadaan-untuk-dirinya dan keberadaan-di dalam-dirinya maka ia akan menjadi Tuhan, yakni keberadaan yang

²⁹ Ibid hlm.511

³⁰ Sartre, Jean-Paul. 2003. Op.Cit. *Being...*, hlm.626

sempurna dan tidak memiliki celah sekaligus memiliki kemampuan untuk potensialitas, akhirnya menjadi omnipoten. Bagi Sartre, kesadaran akan sesuatu tentu didasari dengan kekurangan akan sesuatu di dalam keberadaannya, manusia sadar bahwa ia membutuhkan air untuk menjaga keberadaannya karena ia mengalami kekurangan atas air dalam keberadaannya (bukan berbicara atas paradigma saintifik, namun lebih kepada *lack of being*) sedangkan makhluk lain sebenarnya membutuhkan makhluk dan benda lainnya karena sudah tertera dalam eksistensi dan esensi dari keberadaannya bahwa ia membutuhkan keberadaan lain tersebut, bukan karena adanya celah dalam keberadaannya. Tuhan bukanlah keberadaan yang memiliki celah dalam keberadaannya, namun juga mampu untuk menentukan keberadaannya sendiri, sehingga Tuhan merupakan di dalam-dirinya sekaligus untuk-dirinya karena keberadaan Tuhan sudah memiliki keberadaan yang sempurna dan esensial itu sendiri, sekaligus mampu untuk menentukan dan mengada untuk diri-Nya sendiri.

Makadari itu manusia merupakan makhluk yang ingin menjadi Tuhan karena ia yang merupakan untuk-dirinya masih ingin berusaha untuk memenuhi keberadaannya sehingga menjadi untuk-dirinya sekaligus di dalam-dirinya. Manusia juga merupakan sebuah makhluk yang egoistik dan teleologis, ia memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ia tentukan dengan menggunakan prinsip kegemaran (*passion*) yang ia tentukan sendiri secara pribadi namun dijalankan bersama-sama dengan manusia-manusia lainnya. Untuk menjadi demikian, manusia harus mampu untuk melihat bahwa nilai dan moralitas adalah sesuatu yang melampaui egoisme dan altruisme. Serta manusia harus mampu lepas dari semangat keseriusan (*spirit of seriousness*). Semangat keseriusan menganggap bahwa nilai-nilai kemanusiaan lepas dari subyektifitas serta sekaligus memasukkan nilai-nilai ontologis hanya pada dasaran ontikal. Sartre mencontohkan bahwa roti berguna bagi manusia karena telah dituliskan di surga sekaligus rasanya enak, ini merupakan sudut pandang oxymoron karena menyempitkan ontologi dari roti hanya sekedar sesuatu yang telah digariskan untuk menjadi hal yang berguna dan menyempitkan sudut pandang ontikal-material hanya pada sesuatu yang diresepsi secara nonreflektif atas roti tersebut. Fenomena demikian disebut oleh Sartre sebagai semangat keseriusan. Cara untuk memahami apa tujuan dasar manusia sebenarnya menurut Sartre adalah melalui psikoanalisis eksistensial. Menurutny didasari terlebih dahulu dari memahami bahwa ia memiliki kebebasan dan keberadaan, dan akhirnya berujung pada penderitaan karena menyadari bahwa nilai-nilai yang ada di dunia sebenarnya berasal dari dirinya sendiri dan dunia ini memiliki ketiadaan atas nilai-nilai yang obyektif dan absolut.

Namun manusia yang memiliki kebebasan tidak boleh untuk melarikan diri dari kebebasan, ia harus mampu untuk memanfaatkan kebebasannya dan tidak jatuh pada konformitas automaton dan totalitas dari intersubjektifitas dunia. akhirnya manusia mampu untuk menemukan keberadaannya sendiri dan memahami bahwa ia memiliki kebebasan yang mampu digunakannya demi menentukan keberadaannya sendiri atas dirinya dan untuk dunia.

b. Kebebasan, subyektifitas dan intersubjektifitas

Sartre menyatakan bahwa manusia memiliki subyektifitas dan kehendak, yakni manusia mampu untuk menentukan apa dirinya dan apa yang dia inginkan sebagai keberadaannya³¹. Bedanya eksistensialisme teologis dengan eksistensialisme ateistik adalah dimana dalam eksistensialisme teologis, hal ini terjadi karena kehendak Tuhan (seperti kata Kierkegaard) namun Sartre menyatakan sebagai seorang pemikir eksistensialisme ateistik, manusia harus bertanggungjawab atas dirinya karena subyektifitas lahir dari keberadaan manusia itu sendiri yang memiliki kehendak dan mampu untuk mengubah esensi keberadaannya sesuai kehendaknya. Subyektifitas menurut Sartre berarti dua hal, yakni subyektifitas manusia untuk menentukan apa yang menjadi kehendak serta keberadaan dirinya dan ketidakmampuan manusia untuk bertransendensi dari subyektifitas dirinya dan subyektifitas orang lain.

Dalam pengertian kedua, penulis menyebutnya intersubjektifitas. Intersubjektifitas digunakan karena manusia tidak mampu bertransendensi menjadi obyektif maupun tidak mampu untuk menghancurkan subyektifitas orang lain secara utuh, sekalipun kekuasaan manusia ini begitu besar pada orang lain, tetap saja dalam kesadaran orang lain mungkin masih ada beberapa hal ketidaksetujuan atas tindakan manusia yang berkuasa secara kuat ini sehingga subyektifitas orang lain tidak mampu dihilangkan sepenuhnya. Namun juga segala tindakan subyektif dari seorang manusia memiliki dampak pada faktisitas yang akhirnya memiliki dampak pada seluruh manusia di dunia (butterfly effect). Apa tindakan yang diambil seseorang, setidaknya mengubah persepsi segala manusia di dunia baik secara langsung maupun tidak langsung atas diri manusia yang melakukan sebuah tindakan tersebut.

Munculnya rasa penderitaan (anguish) menurut Sartre adalah karena manusia bertindak sesuatu maka dampaknya akan dirasakan oleh setiap manusia di dunia, sekalipun ia tidak memikirkan sejauh itu setidaknya ia memikirkan bahwa segelintir orang di sekitarnya juga

³¹ Sartre, Jean-Paul. 2007. *Existentialism is a Humanism*. New Haven : Yale University Press, hlm.22

terdampak atas tindakannya tersebut. Penderitaan ini tidak berujung pada kemalasan atau nihilisme, justru menurut Sartre, manusia jika menyadari adanya penderitaan ini maka ia akan berani untuk memikirkan tindakannya serta mempertanggungjawabkannya pada seluruh manusia di dunia.

Mengenai Tuhan, seorang eksistensialis ateistik sekalipun akan merasa sangat terganggu dengan ketiadaan Tuhan karena kehilangan kebaikan aprioritik, bahwasanya tidak ada nilai-nilai moral universal yang absolut dan bisa dipegang oleh para eksistensialis ateistik sebagai nilai moralitas yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Jatuhnya adalah dimana setiap orang harus menggunakan kebebasan dan subyektifitasnya untuk menentukan nilai dan moralitas bagi dirinya maupun orang lain dan harus bertanggungjawab atas itu. Ketidadaan Tuhan membuat manusia tidak bisa menyalahkan Tuhan jika moralitas yang ia lakukan tidak berdampak baik bagi orang lain ataupun melegitimasi tindakannya atas perintah Tuhan. Singkatnya, menurut Dostoyevsky, “jika Tuhan tidak ada maka segalanya boleh dilakukan” karena tidak ada moralitas yang melarang manusia untuk tidak boleh melakukan sesuatu kecuali manusia itu sendiri yang menentukan dilarang atau tidaknya atas sesuatu.

Bagi eksistensialisme ateistik, tanda-tanda moralitas yang diberikan oleh “Tuhan” tidak lebih dari sekedar tanda-tanda yang diinterpretasikan oleh manusia itu sendiri. Nurani dan sebagainya merupakan interpretasi manusia atas moralitasnya serta etikanya sendiri. Tidak ada etika secara umum yang mampu untuk mendikte manusia untuk melakukan apapun (umum disini adalah yang berlaku pada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, hukum dan kaidah etik lain hanya berlaku sebagai faktisitas dan berasal dari kehendak serta subyektifitas para pembuatnya serta interpretasi dari para penegak dan subyeknya).

Makadari itu kembali lagi pada premis awal dimana manusia merupakan keberadaan yang subyektif yakni memiliki subyektifitas untuk berkehendak dan mengubah keberadaannya bagi yang lain, serta manusia tidak mungkin lepas dari intersubyektifitas dunia, sekalipun Tuhan ada ataupun tidak, bahwasanya tindakan dan subyektifitas manusia lainnyalah yang membatasi subyektifitas seseorang untuk melakukan sesuatu secara efektif sesuai dengan kebebasan dan subyektifitasnya. Sehingga manusia adalah sebuah bagian dari sistem intersubyektifitas raksasa yakni dunia. Ada ataupun tidak adanya Tuhan, tidak bisa berpengaruh luas pada tanggungjawab manusia atas tindakannya yang berpengaruh pada dunia maupun pada subyektifitasnya sendiri.

c. Moralitas dan Otentisitas

Menurut Sartre, moralitas sepenuhnya berada pada ranah subyektif, yakni manusia itu sendirilah yang menentukan moralitasnya. Sehingga pada seharusnya moralitas adalah sesuatu yang otentik dan langsung. Jika seseorang mencari otentisitas karena ia ingin menjadi otentik, maka ia tidak akan mungkin menjadi otentik karena tujuan-tujuan tersebut juga ada yang memilikinya, bahkan untuk menjadi unik, sekalipun tindakan yang ia lakukan unik tetapi tujuan yang ia tentukan yakni menjadi unik adalah tujuan yang juga pastinya dimiliki oleh orang lain di dunia sehingga tidak mungkin otentik.

Menurut Sartre, ontologi eksistensialis mendasarkan dirinya pada penelusuran historis, makadari itu etika yang mendasarkan dirinya pada eksistensialisme harus pula berdasarkan pengalaman-pengalaman historis baik subyektif maupun yang mendunia³². Namun etika eksistensialis juga harusnya merupakan etika yang konkrit, bukan meta-etis, bahwasanya etikanya didasarkan pada tindakan-tindakan konkrit yang memiliki dampak-dampak langsung pada dunia material dan merupakan hasil sintesa dari yang historis (pengalaman-pengalaman historis seseorang maupun dunia) sekaligus dari yang universal. Pemikiran-pemikiran yang idealistik biasanya mendasarkan dirinya pada etika universal yang diatribusikan kepada hal-hal yang tidak terjangkau oleh manusia yakni hukum alam maupun hukum Tuhan dan dewa-dewi. Pemikiran yang ultra-materialistik mendasarkan dirinya bahwa sepenuhnya realitas material manusialah yang mampu membuat etika, entah dengan cara apapun yang bisa dilakukan manusia seperti pembuatan hukum, propaganda, teknologi kekuasaan dan sebagainya. Eksistensialisme mengambil jalan tengah, yakni mengakui bahwa etika dibentuk oleh manusia, bukan oleh suatu hal yang terlepas dari jangkauan manusia, namun di satu sisi juga etika pada seharusnya dibuat seuniversal mungkin dan berdasarkan pengalaman-pengalaman historis.

d. Pemikiran Etis-Politis Sartre

Patahan pemikiran Sartre muda yang sepenuhnya eksistensialis dan terpengaruh Cartesianisme, berbeda dengan Sartre tua yang berusaha untuk mendamaikan antara Marxisme dengan eksistensialismenya. Sartre tua mengelaborasi pemikiran eksistensialisme dengan sudut pandang materialisme dialektika historis dibandingkan dengan eksistensialisme awalnya yang masih berbau rasionalisme dan sedikit materialisme dialektis dalam pembacaan atas keberadaan. Etika Sartrean di *Being and Nothingness* dengan etika Sartrean di *Notebook for an Ethics* memiliki perbedaan yang cukup tajam,

³² Sartre, *Notebook for an Ethics*, hlm.6

dimana Sartre muda di *Being and Nothingness* masih meyakini etika egoistik berdasarkan keinginan manusia untuk menyempurnakan keberadaannya, namun dalam *Notebook for an Ethics*, Sartre menuliskan bahwa etika harus juga konkrit dan bertanggungjawab atas tindakannya yang berefek pada seluruh keberadaan di dunia, yakni manusia lain dan makhluk lainnya. Namun juga bagi Sartre tua, masih meyakini bahwa tidak ada moralitas dan etika yang obyektif. Tidak ada seorang yang memiliki kunci atas dunia dan mampu untuk menentukan etika bagi seluruh manusia di dunia, namun etika terdiri dari orang-orang yang membuat etika baik bagi dirinya atau sebagian orang lain yang dimana konsep etika dan tindakan etisnya akan tercatat dalam faktisitas kesejarahan.

Dalam ranah politis, Sartre tua meyakini bahwa manusia tidak boleh mengarah pada dua kesalahan, yakni fasisme dan individualisme. Bagi Sartre, fasisme lahir karena manusia mencari unitas total dari moralitas dan etika di dunia, individualisme lahir karena manusia mencari pluralitas absolut di dunia. yang benar bagi Sartre adalah totalitas yang didetotalisasi (detotalized totality) yakni meyakini bahwa manusia memiliki subyektifitas namun memahami bahwa manusia juga menjadi yang Lain (Other) bagi manusia dan makhluk lainnya.

Seorang pemimpin, bagi Sartre mengalami dialektika tuan-budak (master-slave dialectics). Dimana pemimpin memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh anak buahnya, namun anak buah juga memiliki kebebasan inesensial (kebebasan di ranah pribadi dan privat, menurut penafsiran penulis) tetapi diluar kebebasan inesensial, segalanya ditentukan oleh sang pemimpin.

Kejahatan menurut Sartre adalah obyeksifitas yang disubjektifikasi atau subyektifitas yang diobyeksifikasi. Penafsiran penulis atas ini adalah dimana obyeksifitas dunia disubjektifikasi oleh satu atau segelintir orang dan digunakan untuk kepentingan subyektifitasnya, atau subyektifitas seseorang atau segelintir orang yang dipaksakan menjadi obyektifitas bagi dunia. Stalinisme, bagi Sartre adalah salah satu bentuk dari kejahatan yang ada dimana Stalin mengobyeksifikasi segalanya (baik obyektifitas itu sendiri maupun subyektifitas Stalin) untuk melakukan surpresi terhadap kesadaran masyarakat³³. Sartre juga mengkritik moralitas agama dan moralitas ideologi politik komunisme, dimana mereka sama-sama membentuk pseudo-obyektifitas seakan bahwa pemikiran subyektif yakni moralitas agama dan moralitas komunis dicap sebagai sebuah

³³ Sartre merupakan seorang Komunis secara politik (lihat *Notebooks for an Ethics* hlm.14), bahkan menjadi simpatisan PCF (Partai Komunis Perancis), namun ia bukan Komunis yang Stalinis, ada yang mengkategorisasikan Sartre sebagai pemikir Marxisme Barat (Western Marxism)

kondisi obyektif yang harus ditaati oleh setiap orang di dunia, pada seharusnya manusia dibiarkan sendiri untuk menentukan subyektifitasnya di dalam lingkaran intersubyektifitas tertentu yang menjadikannya sebuah subyektifitas kolektif yang diikuti oleh orang-orang di dalamnya.

Seorang pemimpin juga harus menyadari bahwa ia memiliki transendensi terbatas, yakni menjadi sumber dari moralitas. Karena manusia ingin menjadi Tuhan atau alam (mungkin Sartre mengacu pada panteisme), maka pemimpin ini harus siap untuk mempertanggungjawabkan moralitas relatif yang ia ciptakan bagi anak buah yang dipimpinnya.

Agama memberikan sudut pandang bahwa manusia merupakan obyek di hadapan Tuhan, sehingga adanya kebaikan dan kejahatan apriori lahir karena adanya pandangan Tuhan atas perbuatan baik maupun jahat. Namun bagi Sartre, pada seharusnya tidak ada pandangan baik maupun jahat pada sesuatu yang bersifat apriori, sehingga sepenuhnya baik dan jahat ditentukan oleh pandangan manusia atas perbuatan tersebut baik dari pelakunya maupun orang lain yang menerima dampaknya atau melihat perbuatan tersebut sekalipun tidak menerima dampaknya secara langsung. Sehingga dalam agama, menurut Sartre, tidak ada kebebasan. Kebebasan tidak mungkin lahir dalam kondisi dimana setiap orang merupakan hamba Tuhan. Bahwasanya segalanya dianggap baik ketika disetujui oleh Tuhan, dan dianggap jahat ketika tidak disetujui oleh Tuhan, makadari itu manusia tidak memiliki kebebasan untuk meresepsi tindakan seseorang sebagai hal yang baik ataupun jahat karena telah ditentukan sebelumnya melalui pandangan Tuhan atas sebuah perbuatan baik maupun jahat.

Sartre juga membahas mengenai mediokritas, dimana orang-orang medioker (averages) adalah orang-orang yang mirip dengan statistik. Orang-orang relijius yang menjadi hamba Tuhan dengan keinginannya sendiri bukanlah seorang yang medioker karena ia berani untuk mengambil langkah ekstrim atas dirinya, mengorbankan kebebasan dan dirinya untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang menjadi anak buah loyal seseorangpun juga sama, ia mengalami relasi feodal antara dia dengan tuannya dan memiliki loyalitas gila (crazy zeal) untuk melayani tuannya sebaik mungkin dan mengorbankan kebebasannya sendiri untuk mengikuti apa perintah tuannya. Namun orang-orang medioker adalah hal lain, ia tidak memiliki loyalitas dan ekstrimitas apapun, ia hanya ingin menjadi tengah diantara para ekstrim, tidak ingin kehilangan kebebasannya maupun tidak ingin melakukan langkah ekstrim apapun. Baginya, hidup hanya sebuah statistik dan ia hanya ingin menjadi nomer terbesar di dalam kehidupan yang bersifat statistik tersebut. Contohnya seperti ingin

memiliki uang terbanyak, ingin menjadi politisi nomer 1 di dunia dan sebagainya. Ia tidak memiliki tujuan apapun kecuali pemenuhan nomer statistik yang ia anggap sebagai pemenuhan kehidupannya. Manusia medioker ini merupakan manusia yang menjadi mayoritas kehidupan sekarang baik dari jaman Kierkegaard, Sartre sampai pada skripsi ini ditulis. Manusia medioker, hanya ingin menjadi sama dengan yang lainnya dan menjadi total dalam kehidupan yang ada di dunia sekaligus menjadi nomer yang paling besar dalam totalitas kehidupan tersebut tanpa ada keinginan untuk mengubah kriteria dari totalitas ataupun terpisah dari totalitas kehidupan yang banal.

Bagi Sartre, tujuan dasar manusia harusnya ditolak ukur melalui kerja, pembebasan dan pergerakan yakni sosialisme³⁴, bukan dari kebahagiaan yakni liberalisme/kapitalisme. Dalam mewujudkan sosialisme, seseorang membentuk sebuah moralitas kebaikan bagi orang yang tertindas dan dibentuk untuk melindungi masa depan dan generasi kedepannya, bagi Sartre. Seorang revolusioner pada seharusnya tidak memiliki etika, karena tujuan hidupnya ia tentukan sendiri dengan konkrit. Etika menurut Sartre ada pada tatanan fakta yang absrak, bukan di ranah konkrit. Yakni etika ditentukan sendiri oleh setiap orang di dunia baik dia menentukan tujuan dan cara hidupnya sendiri maupun ia mengikuti etika yang ditanamkan oleh orang lain. Maxim dan obligasi dari etika seorang revolusioner adalah berdasarkan relasi konkritnya dengan orang lain, bukan suatu hal abstrak berbentuk apriori tertentu. Etika konkrit ini menggunakan logika tindakan efektif, dimana seseorang melakukan tindakan yang memiliki efek kepada orang lain, dan didasarkan pada tanggungjawab maupun interaksinya kepada orang lain maupun dunia yang menyejarah, tanpa adanya interaksi tersebut maka dia bukanlah agen konkrit menyejarah, namun lebih kepada seseorang yang secara apriori menentukan etika dirinya dan melakukan obyeksisifikasi atas apriorinya tersebut, yakni dengan mudahnya adalah sosialisme otoritarian ala Stalinisme.

e. Kebaikan (*Good*)

Bagi Sartre, nilai kebaikan bukanlah sebagai penanda bahwa orang itu baik, namun orang itu melakukan sebuah kebaikan³⁵. Namun kebaikan bukanlah suatu hal yang didasari oleh jumlah usaha yang manusia lakukan dalam mewujudkan kebaikan versi dirinya tersebut, tetapi kebaikan yang dilakukan terpisah dari manusia yang melakukan kebaikan

³⁴ Sartre, Jean-Paul. 1992. Notebook for an Ethics. Chicago : Chicago University Press, hlm.102

³⁵ Ibid, hlm.556

tersebut. Penjelasannya adalah ketika manusia melakukan suatu kebaikan tertentu, maka manusia tersebut melakukan kebaikan dengan sebagian maksud bahwa ia akan dianggap sebagai orang baik oleh orang lain, namun kebaikan sebenarnya lepas dari pelaku kebaikan tersebut dan secara etis tidak pada sebaiknya orang tersebut melakukan klaim atas kebaikan yang ia lakukan.

Namun nilai-nilai kebaikan sepenuhnya ditentukan oleh relasi seorang manusia dengan manusia lainnya. Resepsi atas kebaikan bukan pada pelaku tindakan baik, namun pada orang yang menerima dampak kebaikan tersebut. Kebaikan ditentukan oleh orang yang menerima maupun melihat tindakan seseorang dengan subyektifitasnya menentukan apakah itu tindakan yang orang lakukan tersebut merupakan tindakan baik atau bukan. Sehingga tidak ada kebaikan aprioritik maupun kebaikan universal yang absolut bagi setiap orang, namun lebih kepada kesepakatan intersubyektif maupun subyektif personal seseorang yang meresepsi maupun melihat tindakan baik tersebut untuk menerimanya sebagai kebaikan atau tidak. Sehingga kebaikan merupakan suatu konsep yang konkrit, bukan abstrak. Kebaikan tidak bisa ditentukan di awal dan tidak bisa tidak dilakukan (hanya dipikirkan atau hanya diomongkan mengenai etika dan metodenya belaka) sebagai sebuah tindakan konkrit. Hanya memikirkan bahwa tindakan dirinya merupakan tindakan baik, atau melakukan tindakan kebaikan aprioritik tetapi resepsi orang lain tindakan tersebut bukanlah tindakan baik, dua-duanya bukanlah kebaikan.

Ada dua hal penting menurut Sartre mengenai kebaikan, yakni tidak ada manusia yang melakukan kebaikan karena dia ingin baik dan tidak ada manusia yang melakukan kebaikan karena egoisme (tentu kebaikannya batal karena tidak didasari oleh kebaikan itu sendiri). Tangkapan penulis atas ini adalah, manusia boleh melakukan subyektifitasnya sendiri dalam merumuskan tindakan baik, namun ketika orang lain tidak merasakan kebaikan dari tindakan tersebut maka ia harus menyadari bahwa tindakan tersebut bukanlah tindakan baik, maka harus ia koreksi untuk menjadi tindakan baik, kecuali jika ia hanya ingin terlihat sebagai seseorang yang melakukan tindakan baik versinya tersebut, bukan melakukan kebaikan secara per se sesuai dengan keinginan orang lain yang menerima kebaikan tersebut. Di satu sisi, jika manusia melakukan kebaikan demi egoisme, maka sudah jelas dia bukanlah orang yang baik. Manusia yang melakukan kebaikan demi egoisme, setidaknya membutuhkan *favour for a favour*, atau klaim atas tindakan baik yang dilakukannya, atau bisa jadi ingin dilihat baik oleh orang lain. Ini merupakan suatu hal yang tentu berkontradiksi dengan konsep kebaikan apapun dimana kebaikan pada seharusnya

terlepas dari orang yang membuatnya (dalam moralitas religius biasanya disebut dengan ikhlas).

f. Mediokritas dan Otentisitas

Manusia akan menjadi medioker ketika ia tidak memiliki tujuan yang berarti³⁶ (selain menjadi manusia kalkulator dan ingin menjadi nomor terbesar di peringkat angka dalam masyarakat), manusia yang otentik tentunya akan berusaha untuk membuat sebuah tujuan yang berarti bagi dirinya dan melalui apa yang ia refleksikan atas kehidupannya. Manusia memiliki kemampuan untuk menentukan esensi sebuah keberadaan yang lainnya, dimana manusia secara ontologis menentukan esensi keberadaan lainnya seiring dengan penelusuran ontik-ontologikal selama hidupnya dalam berelasi dengan keberadaan lain. Namun manusia-manusia medioker ini justru tidak mengalami penelusuran ontologikal dalam kehidupannya, hanya melihat kehidupannya secara ontikal sesuai dengan apa yang ia resepsi secara nonreflektif dalam kesadarannya. Akhirnya manusia-manusia medioker ini menghilangkan dirinya dan kebebasannya dalam totalitas masyarakat yang banal dan menjemukan. Mereka menerima nilai (bagi Sartre, nilai adalah tujuan yang ditentukan oleh seseorang atas kebebasannya kepada orang lain) dari orang lain dan totalitas masyarakat sebagai sesuatu yang apa adanya dan tidak perlu dipikirkan ulang asal usulnya maupun gunanya bagi mereka, satu-satunya tujuan mereka adalah menjadi nomer yang paling besar diantara nomer-nomer (manusia kalkulator) yang lain. Untuk menjadi otentik, setidaknya manusia harus mampu untuk menentukan tujuan dan nilainya sendiri. Apalagi jika mampu menentukan tujuan dan nilainya bagi orang lain, baik secara intersubjektif maupun dipaksakan kepada orang lain melalui kekuasaan dan pengaruh tertentu.

g. Tinjauan Penulis

Menurut penulis, ada disjungsi etis antara Sartre muda maupun Sartre tua (menurut penulis fase Sartre tua diawali dari masuknya pemikiran marxisme dalam tulisan-tulisan Sartre, yakni pada fase pasca *Search for a Method*, 1957). Sartre muda lebih pada pemikiran eksistensial-individual yang egoistik. Dimana ego disini diwacanakan sebagai sumber utama dan satu-satunya moralitas dan etika manusia. Bahwasanya manusia ingin menjadi

³⁶ Ibid, hlm.448

Tuhan, yakni sebuah keberadaan yang maha sempurna dan tidak memiliki celah apapun dalam keberadaannya sekaligus memiliki kesadaran untuk bertindak sesuatu dan mengubah bentuk keberadaannya sesuai keinginannya (walau keinginannya tersebut bukan muncul karena kebutuhan atau celah dalam keberadaannya). Manusia ingin melakukan suatu hal karena ia memiliki celah dalam keberadaannya dan melakukan hal tersebut untuk memenuhi celah dalam keberadaannya, lain hal dengan Tuhan yang melakukan sesuatu karena ingin. Dengan adanya preposisi demikian, maka jelas bahwa manusia ingin menjadi sempurna adalah satu-satunya *telos* dalam etika Sartrean muda, bahwasanya kesempurnaan keberadaan adalah tujuan yang absolut bagi manusia. Dalam ranah ini, tentu manusia akan melakukan segala hal selama dimungkinkan oleh faktisitas dan kebebasannya untuk menjadi Tuhan.

Pemikiran teleologis idealis ditambah dengan penelusuran materialis dimana materialisme hanya digunakan untuk menentukan kemungkinan tindakan berhasil dilakukan (walaupun tetap saja manusia bisa melakukan sesuatu dengan kebebasannya tetapi masih mendapatkan konsekuensi yang mungkin tidak ia inginkan, contohnya seperti manusia yang ingin makan steak tapi tidak memiliki uang (uang disini sebagai variabel faktisitas), ia bisa saja makan tidak membayar dan melarikan diri dari kejaran pemilik restoran beserta petugas keamanannya namun saja konsekuensinya berdampak lebih berat dibandingkan dengan konsekuensi membayar steak tersebut kecuali jika ia memang menginginkan untuk dikejar oleh pemilik restoran atau menimbang bahwa konsekuensi dikejar lebih baik daripada bekerja mencari uang) dibandingkan dengan pengukur kebebasan manusia tersebut. Tetapi dengan adanya faktisitas, unsur materialisme yang didasarkan pada konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi masih ada dalam pemikiran moralitas Sartrean muda. Yakni idealisme masih memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan materialisme dalam pemikiran Sartre muda.

Namun dalam Sartre tua, pemikiran materialisme dialektik lebih prevalen dalam memandang etika. Yaitu pemikiran bahwa etika lahir dari kondisi material manusia di sekitarnya yang konkrit. Etika pada seharusnya lahir dari hubungan interaksionis manusia dengan manusia lainnya walau itu masih terbuka bagi interpretasi individual. Interpretasi individual hanya bisa sebagai refleksi pasca adanya interaksi dengan manusia-manusia lainnya dan tindakan yang etis dan moralis sepenuhnya diserahkan kepada interpretasi orang lain apakah tindakan tersebut etis dan moralis ataukah tidak. Sehingga kebaikan aprioritik dan tujuan manusia untuk menjadi Tuhan, tentu dibatalkan dengan sendirinya

demoralitas intersubjektif yang sepenuhnya diberikan penilaiannya kepada orang lain yang menerima dampak tindakan konkret tersebut.

Epistemological rift yang terjadi, membuat penulis harus memilih sikap, manakah diantara etika yang berkontradiktif ini yang harus dipilih ataukah penulis membuat sebuah etika baru yang didasarkan dari dialektika dari kedua pemikiran yang berbeda dari satu orang ini. Penulis lebih sependapat dengan Sartre tua, yakni memang tindakan-tindakan etis berdasarkan interpretasi seseorang atas tindakan orang lain dan interaksinya kepada manusia-manusia lainnya. Jika manusia sudah menentukan bahwa memang tujuan dirinya ingin menjadi Tuhan dengan cara memenuhi kebutuhannya untuk menutupi celah keberadaannya atau manusia medioker yang sekedar ingin menjadi Tuhan diantara nomer-nomer kalkulatif dalam masyarakat, maka bagi penulis itu juga sebuah kebaikan aprioritik. *Par excellence* dalam kedua belah *levelling*, merupakan kebaikan aprioritik yang ditanamkan oleh individu itu sendiri atau dalam beberapa hal, masyarakat.

Tetapi kita juga tidak boleh terjebak dalam supra-kolektivitas, dimana manusia bisa menjadi automaton konformis ketika ia menginterpretasikan bahwa moralitas sepenuhnya ada di tangan orang lain tanpa perlu diinterpretasikan. Dia akan melakukan semua tindakan sepenuhnya berdasarkan penilaian orang lain maupun masyarakat tanpa memilah apakah tindakan tersebut baik bagi dirinya juga ataupun baik bagi keadaan faktisitas yang ada di dunia. terkadang moralitas yang ada di masyarakat bukanlah moralitas yang anti-kritik maupun moralitas total yang absolut. Bahwasanya seorang individu, walaupun berusaha untuk melakukan tindakan baik yang dasarnya adalah penilaian orang lain, juga berhak untuk melakukan interpretasi atas tindakannya tersebut secara subyektif, atau bahkan mengkritik kriteria masyarakat atas moralitas dan etika yang berlaku.

Dengan melakukan interpretasi secara subyektif atau bahkan mengkritik kriteria masyarakat atas etika yang berlaku, kita bisa melakukan totalitas yang didetotalisasi. Bahwasanya kita memang mengakui sumber etika ada pada totalitas dalam masyarakat, yakni persepsi moral total sepenuhnya ada di tangan interaksi kita dalam bermasyarakat maupun berkehidupan secara personal dengan orang lain. Namun kita juga melakukan detotalisasi dengan cara melakukan otokritik terhadap tindakan diri sendiri maupun kritik terhadap kondisi moralitas di masyarakat dan mencoba untuk memasukkan kritik tersebut sebagai sebagian unsur totalitas yang baru jika memang benar-benar diperlukan dalam totalitas etika dan moral masyarakat.

Etika yang berlaku sekarang justru berada pada etika individual yang didasari oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi Tuhan bagi manusia-manusia medioker.

Manusia-manusia medioker ini cukup berbahagia dengan ditentukan kriteria-kriteria par excellence dan mengikuti kaidah-kaidah tersebut dengan senang hati, walaupun pada seharusnya mereka sadar bahwa tidak ada bagian mereka untuk menentukan kriteria tersebut kecuali hanya sebagai variabel yang menjadi obyek sekaligus pseudo-subyek dari kriteria tersebut (semisal masyarakat menyukai hidup yang konsumtif, maka bisa ditentukan bahwa par excellence nya adalah dengan cara mengkonsumsi barang tertentu atau sebanyak mungkin mencari alat yang mampu membuat mereka mengkonsumsi lebih banyak macamnya dan lebih banyak jumlahnya, seperti uang). Obyek dan sekaligus pseudo-subyek adalah dimana masyarakat menjadi obyek yang harus menaati kriteria sekaligus, pseudo subyek adalah masyarakat mendapatkan “suara pasif” (suara pasif adalah masyarakat memberikan perannya dalam penentuan kriteria bukan dalam forum dialogis dan dialektis namun lebih sebagai obyek penelitian yang variabelnya ditentukan oleh anggota forum dialogis tersebut dan juga hasil penelitian ini dijadikan sebagai sebagian pertimbangan untuk menentukan hasil dari forum tersebut tanpa adanya kehadiran obyek penelitian dalam forum tersebut) untuk menentukan kriteria dari penelitian tersebut. Sehingga moralitas dan etika par excellence tersebut bukanlah menjadi suara aktif atau keinginan masyarakat, tetapi justru ditentukan oleh sekelompok orang bagi masyarakat. Dan manusia-manusia medioker dalam masyarakat senantiasa menaati etika tersebut untuk menjadi yang terbaik dalam lingkup arena etis tersebut tanpa berpikir bahwa ia harus keluar, bebas menentukan apa makna etika hidupnya dan tujuan hidupnya. Dia juga meyakini bahwa dia menjadi orang yang subyektif, individual dan bebas. Walau sebenarnya dia hanya bebas dalam sebuah sangkar kecil yang dibuat oleh Tuhan-Tuhan palsu ini bagi dia.

Dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa nilai-nilai aksiologis Eksistensialisme Sartrean yang direkapitulasi oleh penulis dari pemikiran-pemikiran Jean Paul Sartre mengenai etika dan politik, serta mengutip konsep-konsep dari pemikir-pemikir terdahulu Eksistensialis sebagai tambahan atas penjelasan dan akar dari pemikiran aksiologis Eksistensialis Sartrean. Ada beberapa nilai yang muncul sebagai berikut :

1. Otentisitas

Pada masa sekarang ini, hampir semua orang ingin menjadi otentik. Namun apakah orang-orang ini mengerti definisi otentik? Belum tentu. Otentisitas dan

mediokritas (penulis juga suka menyebutnya dengan banalitas³⁷) adalah dua hal yang menjadi pembahasan dalam bagian ini. Seringkali dalam masyarakat, propaganda-propaganda subtil tentang “masyarakat disuruh menjadi manusia yang otentik, namun sebenarnya otentisitas sudah dihack sedemikian rupa supaya teratur dalam otentisitas yang sudah didefinisikan oleh propagandis-propagandis tersebut, hal ini penulis sebut sebagai pseudo-otentik”. Dalam iklan-iklan yang ada di televisi seringkali diberikan propaganda untuk menjadi “the real you”, tapi tentunya “the real you”³⁸ hanya bisa terjadi jika seseorang mengonsumsi barang tertentu atau mengikuti standar-standar tertentu. Jika jati diri orang yang sebenarnya didefinisikan dengan konsumsi atas barang-barang dan konformitas atas standar-standar tersebut, apakah memang mereka bisa dinyatakan memiliki jati diri? Tentu tidak, karena mereka mengikuti jati diri yang sudah distandarkan oleh orang lain. Otentisitas dalam ranah ini, tentu pseudo dan terstandarisasi.

Dengan adanya standar-standar yang dibuat tersebut, tentu orang-orang akan terpengaruh untuk menjadi pseudo-otentik demi impiannya untuk mengotentisasi dirinya. Orang-orang yang benar-benar otentik akan menghadapi tekanan dari masyarakat pseudo-otentik karena bisa jadi tidak sesuai dengan standar-standar *levelling* pseudo-otentik yang sudah dibuat tersebut. Semakin konformis terhadap sistem totalitas rasional (bisa juga disebut dengan common sense, padahal sebenarnya common sense ini tidak lebih dari hiperealitas yang diciptakan dalam rasio masyarakat, sehingga masyarakat menjadi masyarakat ternak a la Nietzsche) maka semakin pula banyak sematan predikat positif (seperti stylish, fashionable, otentik, baik, hebat dan sebagainya) yang diberikan kepada seseorang tersebut sampai pada ranah ia mampu untuk menjadi agen pengaruh (dapat disebut juga sebagai aparatus ideologis dan aparatus represif,³⁹ jika mengikuti definisi Althusserian) dari sistem pseudo-otentik tersebut.

Jika ada sistem pseudo-otentik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka jelas ada totalitas etis dan moralitas dalam masyarakat untuk menunjang sistem tersebut. Etika ini tentu berujung pada *par excellence* dalam mewujudkan *telos-telos* yang sudah dihack oleh sistem ini, yakni segala *telos* yang berasal dari

³⁷ Arti banalitas berarti tidak orisinal, tidak otentik. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/banality> diakses pada 14-7-2018 pukul 1:58

³⁸ Terinspirasi dari iklan sebuah Handphone yang menonjolkan fitur kameranya dan menggunakan tagline sama. <https://www.youtube.com/watch?v=Kcz-UTqR-Uc> diakses pada 14-7-2018 pukul 1:56

³⁹ Althusser, Louis. 2014. *On the Reproduction of Capitalism*. London : Verso. hlm. 75-80

intersubjektifitas manusia dihack sedemikian rupa menjadi pseudo-pseudo dan quasi-quasi yang akhirnya menjadi tujuan bersama dalam masyarakat. Segala tujuan hidup manusia secara personal maupun kelompok, dihimpun dalam sebuah sistem dengan perubahan-perubahan semantika dan semiotika atas makna dari tujuan-tujuan tersebut. Seperti pada halnya tujuan untuk menjadi otentik, maka pendefinisian otentik harus terstandarisasi, jika tidak seperti standar tersebut maka dia tidak otentik atau diberikan kata-kata lain yang mendeskripsikan otentisitas non-konformis seperti aneh, gila, freak dan sebagainya.

Dalam sistem pseudo-otentik ini semua dibuat menjadi hipereal⁴⁰, manusia yang memiliki keberadaan, hasrat, kemampuan, tujuan hidup, pengalaman serta minat tertentu (perihal ini diciptakan oleh Tuhan secara langsung atau karena neurotik-genetik-biologis-sosisologis adalah perihal lain) harus konformis dengan standar-standar tertentu yang dibuat untuk masyarakat tersebut. Bahwasanya kebebasan manusia untuk menjadi otentik dibatasi dengan subtil, yakni menciptakan hiperealitas-hiperealitas jalan untuk menjadi otentik, jika manusia ini ingin mencapai tujuan otentiknya, maka ia harus mengikuti jalan-jalan tertentu yang sudah diatur oleh sistem.

Dalam ranah politik, tentu ini merupakan sebuah problematika sendiri. Diantara beberapa jalan yang sudah diatur dalam kehidupan manusia adalah *par excellence* dalam mencari harta. Harta adalah kebebasan dan kekuasaan, walaupun sebenarnya harta menjadi abstraksi dari kekuasaan dan kebebasan itu sendiri. Diandaikan jika tidak memiliki harta maka tidak bisa memiliki kekuasaan dan kebebasan dari ranah apapun. Selain itu pula, sebaliknya, jika tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam segi apapun, maka harta tidak akan datang dengan mudah kepada manusia. Abstraksi ini tentu lahir dari sistem kapitalisme yang sudah menjadi ideologi dunia sekarang, hampir seluruh dunia menganut sistem kapitalisme yang diikuti oleh sistem-sistem masyarakat terbesar yang ada sekarang yakni negara-bangsa.

Manusia tentunya memiliki hasrat, kegemaran dan bakatnya sendiri yang berujung pada penentuan dirinya menjadi apa. Namun dalam sistem ini, tentunya kapitalisme mensyaratkan bahwa jika manusia ingin menjadi sesuatu maka ia harus memiliki uang atau barang tertentu yang memenuhi syarat baginya untuk menjadi sesuatu (*acquisitive society*)⁴¹. Tanpa adanya kepemilikan atas sesuatu tersebut, maka

⁴⁰ <https://ceasefiremagazine.co.uk/in-theory-baudrillard-9/> diakses pada 14-7-2018 pukul 2:34

⁴¹ Fromm, Erich. 1976. *To have or to be?* New York: Harper & Row, hlm. 57

ia bisa dinyatakan tidak mungkin menjadi sesuatu. Dalam sistem demikian, otentik tentunya adalah orang-orang yang memiliki barang atau suatu hal tertentu yang belum dimiliki orang lain, relasi otentik ini berdasarkan konstruksi masyarakat dimana otentisitas diukur dari standar-standar kepemilikan barang-harta tertentu dan kemampuan untuk melakukan suatu hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, otentisitas diukur dari kuantitas dan kualitas kepemilikan maupun tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut, yakni lomba untuk mendapatkan barang maupun kebebasan untuk bertindak sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain.

Apakah pada seharusnya otentik itu demikian? Penulis rasa tidak. Jika otentisitas diukur dari “kebaruan sebuah kepemilikan maupun tindakan” maka tidak mungkin ada suatu hal yang otentik karena dalam sebagian masyarakat yang lain suatu hal yang otentik bisa menjadi hal yang tidak otentik. Semisal seseorang membeli sebuah produk Apple yang paling baru, dalam masyarakat yang belum memiliki produk tersebut maka ia dapat dianggap otentik. Namun di kalangan penciptanya, ia bukanlah orang yang otentik karena mereka sudah memiliki barang tersebut duluan sebagai kepemilikan perusahaannya. Dalam ranah tindakan, ada sedikit slippery slope dalam argumentasi ini, namun penulis akan menambahkan bahwasanya memang ada semacam kontrol terhadap tindakan baru seperti apa yang dapat dianggap otentik dan di satu sisi dapat dianggap gila atau tidak waras.

Dalam setiap masyarakat, tentu berbeda-beda kondisi tindakan otentik dan tindakan gila ini, sama halnya dengan Foucault⁴², penulis meyakini bahwa ada sebuah sistem polisi yang mengawasi pelaku tindakan ini gila atau justru otentik dan visioner, dimana kriteria-kriteria diciptakan hanya untuk menentukan kadar kebaruan dan konformitas atas standar dalam sebuah tindakan. Makadari itu tindakan yang dapat terbilang otentik adalah lompatan kadar kualitatif maupun kuantitatif dari tindakan sebelumnya yang sudah dicap sebagai tindakan otentik atau dicap sebagai tindakan yang dianggap normal dalam masyarakat. Seperti orang yang mampu untuk makan cabe dalam jumlah besar (lompatan kuantitatif), makan hewan-hewan yang eksotis/langka (perubahan kualitatif), makan makanan yang mahal (lompatan kualitatif), wisata ke tempat yang belum pernah dikunjungi (inovasi dalam tindakan yang sudah pernah dilakukan di ruang lainnya) dan sebagainya.

⁴² Foucault, Michel. 1965. *Madness and Civilization*. New York : Pantheon Books. hlm.75

Tentunya makan sampah dan makan kotoran hewan tidak termasuk karena bukanlah tindakan yang normal dalam masyarakat karena dalam norma sosial sudah ditentukan bahwa itu adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam masyarakat. Sehingga orang dalam kategori konfrontatif terhadap norma sosial tersebut, sekalipun inovatif, mengalami perubahan kuantitatif, lompatan kualitatif dan perubahan kualitatif, dapat dibilang sebagai orang yang gila sekalipun ia otentik dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan tindakan yang tidak dilakukan oleh manusia medioker dan banal serta manusia-manusia otentik yang tidak melakukan hal-hal tersebut.

Singkatnya, setiap manusia memiliki *telos-telosnya* sendiri⁴³. Jika *telos* ini dikonformiskan dengan sebuah sistem totalitas normal dan etikal dalam masyarakat dan manusia tersebut dalam deontologinya berkonformis kepada sistem tersebut, maka jelas tidak otentik ia. Manusia harus mampu mempertahankan *telosnya* sendiri dari gempuran-gempuran sistem pseudo otentik, sekalipun tekanannya begitu berat, dari ranah yang paling menyenangkan seperti dihimpunnya *telos-telos* individual tersebut di dalam sistem dan diredefinisikan sehingga terasa masih mengejar tujuan-tujuan yang otentik, sampai pada tekanan dari masyarakat untuk tidak mengejar tujuan-tujuan yang manusia individual tentukan tersebut berdasarkan faktisitas keberadaannya dan kebebasannya.

2. Identitas

Bagian mengenai otentisitas adalah prasyarat untuk membahas mengenai identitas dari manusia itu sendiri. Manusia akan memiliki identitas secara hakiki jika ia otentik, jika tidak maka ia akan menggunakan identitas yang disematkan oleh sistem kepadanya berdasarkan definisi-definisi yang ada dari sistem. Sehingga manusia akan nir-identitas. Karena identitas yang ada sudah ditentukan oleh masyarakat maka dengan sendirinya ia menjadi keberadaan-di dalam-dirinya (*being-in-itself*) tanpa sadar bahwa ia kehilangan kemampuannya untuk menjadi keberadaan-untuk-dirinya (*being-for-itself*). Mengapa demikian? Bahwasanya faktisitasnya mampu untuk menekan kebebasannya sampai pada ranah kebebasan untuk bertindak di dalam sebuah relung (*sphere*) tertentu, diluar relung tersebut, manusia harus menghadapi propaganda-propaganda sistemik dari ranah yang menyenangkan sampai pada ranah yang menyakitkan. Bahkan absurdnya adalah manusia dibuat memahami bahwa memang

⁴³ <http://www.bbc.co.uk/ethics/introduction/endinitself.shtml> diakses pada 14-7-2018 pukul 2:40

tidak ada alternatif lain atas relung tersebut, bahwa ia hanya bisa menggapai tujuan-tujuannya dalam relung tersebut sekalipun tujuannya adalah tujuan yang pada seharusnya secara definitif keluar dari relung tersebut. Ini merupakan ketidakbebasan akut yang dialami oleh manusia karena ia sampai pada ranah tidak mempercayai bahwa dirinya memiliki kebebasan sejati sekaligus mempercayai bahwa kebebasannya hanya berada dalam kandang kecilnya tersebut.

Jika seseorang memiliki identitas tertentu dan memilih identitas tertentu dari apa yang ia tentukan sendiri, maka ia harus memilih antara mempertahankan identitasnya atau konformis dengan totalitas masyarakat ternak⁴⁴. Memang kebebasan manusia dibatasi oleh faktisitasnya, namun manusia juga mampu untuk mengubah faktisitas untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan dirinya, seperti melakukan perubahan pada sistem, melakukan perlawanan-perlawanan demi terciptanya sistem yang lebih konformis pada otentisitas dan sebagainya. Dengan mempertahankan identitasnya, baik dengan cara melarikan diri dari masyarakat ternak maupun melawan sistemnya demi melakukan emansipasi terhadap manusia, ia telah menjadi manusia otentik yang memiliki identitasnya.

Namun yang terjadi dalam masyarakat seringkali adalah disjungsi identitas. Bahwasanya manusia akan sulit untuk melepas identitasnya sendiri sepenuhnya dan jatuh dalam totalitas masyarakat menjadi semacam hive mind. Tentu tidak mungkin selama belum ada teknologi yang bisa mewujudkan itu. Manusia mengalami dialektika dalam keberadaannya atas keberadaan yang ia tentukan sendiri maupun keberadaan yang ditentukan oleh sistem dan orang lain padanya, ekspektasi dirinya sendiri beradu dengan ekspektasi orang lain yang ditekankan kepadanya. Semisal dalam ranah politik, terjadinya sistem oligarki dimana di Indonesia oligarki diisi oleh pengusaha sekaligus politisi atau pengusaha sebagai kroni dari politisi atau politisi sebagai kroni dari pengusaha menjadikan adanya disjungsi identitas dalam orang-orang tersebut.

Pengusaha-politisi harus memilih apa yang seharusnya menjadi keberadaan dirinya, yakni pengusaha atau politisi? Tentu pertanyaannya adalah ia memasuki bidang politik untuk membantu menjalankan usahanya atau ia memasuki dunia bisnis untuk melanggengkan jalan politiknya. Terlepas dari itu semua, pengusaha-politisi harus memilih dari jalan tersebut yang mana yang menjadi keberadaan utamanya, jika ia memilih menjadi pengusaha maka politik jelas hanya menjadi jalan untuk

⁴⁴ <https://plato.stanford.edu/entries/identity-ethics/#PruMorUni> diakses pada 14-7-2018 pukul 3:19

melanggengkan usahanya (seperti mempermudah ijin bagi perusahaannya, kebijakan yang pro terhadap usahanya dan sebagainya) namun jelas mengorbankan tujuan luhur manusia dalam berpolitik itu sendiri, sehingga tidak lebih politik hanya penopang kekuasaan bagi bisnis. Di satu sisi ketika keberadaannya sebagai politisi maka ia hanya menggunakan bisnis sebagai batu loncatan belaka, dan tentunya bisnisnya tidak diberikan perhatian secara penuh dan mengorbankan kegiatan ekonomi yang ada di bisnis tersebut, bisa jadi bahkan orang-orang yang bekerja kepada politisi-pengusaha ini mengalami kerugian dan stagnansi karena tidak diberikan perhatian secara penuh terhadap usahanya sehingga juga merugikan orang lain.

Seorang politisi yang menjadi kroni pengusaha juga mengalami disjungsi keberadaan karena tindakannya dikontrol oleh pengusaha tersebut demi menjalankan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pengusaha-pengusaha tersebut. Sehingga kebijakan politiknya bukanlah untuk masyarakat atau untuk mempertahankan kekuasaan dari politisi tersebut, lebih kepada menyenangkan pengusaha-pengusaha tersebut demi mempertahankan dan memajukan kekuasaan politisi tersebut. Sekalipun kebebasannya dikorbankan demi menjaga tujuan-tujuannya. Ini tidak otentik karena sekalipun ia memenuhi *telos*nya secara efektif, tindakan-tindakannya bukanlah tindakan yang otentik berdasarkan kebebasannya.

Seorang pengusaha yang menjadi kroni politisi menjadi tidak otentik karena keuntungan dari usahanya, apa yang seharusnya menjadi *telos*nya justru dipegang oleh politisi tersebut sesuai dengan kemauan politisi tersebut. Seringkali politisi tersebut akan meminta dukungan dalam bentuk upeti maupun dukungan-dukkungan lainnya dari pengusaha-pengusaha kroni tersebut. Namun pada dasarnya kebutuhan pengusaha adalah bisnis, tetapi ia harus melakukan tindakan yang hasilnya bukan target yang ia harapkan atas bisnisnya karena sudah diambil oleh politisi ini sebagian demi kontrak-kontrak oligarki tersebut. Sehingga tak lebih ia menjadi lahan eksploitasi dari politisi tersebut sekalipun ia mampu untuk meminta kebijakan-kebijakan yang pro terhadap dirinya dan bisnisnya, namun tidak lebih karena kebebasan orang lain yang membuat hal itu terjadi, bukan karena kebebasan dari pebisnis tersebut.

Disjungsi keberadaan adalah hasil dari sistem yang mencampurkan definisi-definisi *par excellence* dari *telos-telos* yang ada. dalam ranah kapitalisme⁴⁵, segalanya dicampur dengan kuantitas-kualitas harta benda, produksi sesuatu dan

⁴⁵ <http://rationalstandard.com/the-morality-of-capitalism/> diakses pada 11-7-2018 pukul 12:15

konsumsi sesuatu sehingga segalanya harus diikat dalam sistem ekonomistik dari segi apapun. Tidak kaget jika seorang pengusaha dan politisi harus dekat, seorang seniman membutuhkan funding besar dari perusahaan-perusahaan, sastrawan harus menuliskan buku-buku yang mengagungkan tokoh-tokoh dan sejarah-sejarah tertentu demi mendapatkan dana dan sebagainya. Sehingga ketika berbicara tentang identitas, identitas manusia dicampuradukkan sedemikian rupa dan mengalami dialektik internal antara identitas ekonomistik yang disematkan oleh sistem dan identitas otentik yang manusia tersebut tentukan sendiri.

Makadari itu, perlawanan perlu dilakukan dengan cara apapun untuk mempertahankan identitas otentik yang manusia tentukan sendiri. Perlawanan bukanlah dengan cara disjungsi identitas maupun melakukan kompromi-kompromi terhadap pembuat dan pengelola sistem (jika ada kompromi maka tidak lebih dari sekedar strategi dan taktik saja, bukan tujuan maksimal), namun dengan mempertahankan identitas yang kita tentukan sendiri sekaligus dengan melakukan refleksi-refleksi atas sistem pseudo-otentik dan melakukan penyerangan dan penghancuran atas sistem tersebut adalah tujuan untuk melakukan emansipasi manusia agar dapat bebas sepenuhnya.

Otentisitas merupakan proyeksi identitas dari manusia yang bisa ia tentukan sendiri melalui eksistensialitas dirinya. Bahwasanya dengan *appearance*/bentuk yang berbeda satu sama lain, tentu pada dasarnya manusia memiliki otentisitasnya sendiri. Dalam eksistensialisme, eksistensi mendahului esensi, sehingga bentuk mengkonstitusikan keberadaan (*being constitutes appearance*). Sehingga pada seharusnya, eksistensialitas manusia ditentukan oleh eksistensialitasnya, maupun kemampuan dirinya untuk mengubah eksistensialitasnya sendiri sesuai dengan faktisitas dan eksistensi-nya. Semisal mengenai seorang transgender, ia mampu mengubah eksistensialitasnya menjadi gender yang apa yang tidak ia miliki di saat ia dilahirkan dengan mengubah cara hidupnya, sikap, maupun eksistensialitas lainnya. Ia juga mampu untuk mengubah eksistensialitasnya sesuai dengan faktisitas yang ada, yakni mengubah alat kelaminnya dengan operasi selama teknologi memungkinkan untuk terjadinya hal tersebut.

Pada seharusnya, tidak ada manusia yang tidak otentik, namun manusia memilih untuk mengurangi otentisitasnya sendiri dan menyerah kepada mediokritas yang ditanamkan oleh *levelling-master* demi konformitas dan kenyamanan dalam hidupnya karena menjadi otentik akan menjadi halangan bagi dirinya sendiri jika terlalu otentik.

Sehingga manusia memilih untuk mengubah sebagian eksistensialitas dan eksistensi untuk menjadi medioker dan tidak terlalu otentik.

Sama halnya di dalam berpolitik praktis, bahwasanya kebutuhan hidup manusia bisa jadi dibutuhkan ranah politik untuk mempermudah jalan manusia-manusia dengan kebutuhan hidup tertentu. Ia masuk politik untuk mempermudah mendapatkan kebutuhan hidupnya. Namun manusia tersebut berada di dalam kontestasi kekuasaan di ranah meta-politik maupun di ranah politik praktis yang membuatnya harus konformis terhadap kebanalan yang terjadi dan sistem yang mengakar di kedua ranah tersebut. Sehingga manusia tersebut kehilangan otentisitasnya demi mendapatkan kemudahan-kemudahan dan menghindari *pelevelan* dalam berpolitik praktis. Hasilnya, ia kehilangan identitas riilnya, sekaligus mengalami disjungsi antara esensi keberadaan dirinya dengan apa yang ia lakukan.

Hal ini tentu bukan hal etis yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia, terlebih ia menghilangkan eksistensialitasnya dan kemampuan untuk menentukan siapa dirinya secara otentik. Terlebih para *levelling-master* yang tidak memiliki konsiderasi etikal sama sekali, kecuali pada ranah Nietzschean yang dimana mereka sudah menjadi *ubermensch* sebagai manusia bangsawan sekaligus manusia tuan yang memperbudak manusia lain sehingga menjadi tidak otentik dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Norma dan nilai tentu bukanlah lahir dengan sendirinya, ia bisa lahir dari interaksi manusia secara umum maupun dibentuk oleh segelintir orang yang mendapatkan ide-ide tentang norma dan nilai yang diaplikasikan tersebut melalui interaksinya dari orang lain maupun refleksi internalnya. Orang-orang ini tentu kesadarannya sudah pada ranah kesadaran reflektif, sekaligus menjadi orang yang otentik karena mampu menentukan norma dan nilai pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Sedangkan orang-orang yang tidak otentik berada pada kesadaran non-reflektif karena tidak merefleksikan apa yang ia lakukan dan ia alami serta masih berada pada kekuasaan orang lain.

Tindakan etis yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan penyadaran maupun pendidikan yang menyadarkan, yakni dengan mengingatkan pentingnya refleksi atas segala tindakan yang dilakukan, apakah tindakan yang dilakukan benar-benar otentik sesuai dengan keinginan dirinya sendiri ataukah berasal dari kontrol orang lain yang subtil? Tentu orang itu sendiri yang bisa menjawab dengan otentik.

3. Netralitas

Netralitas, yakni ketidakberpihakan kepada “kebaikan” dan “kejahatan” penting dalam etika politik eksistensial⁴⁶. Konsepsi kebaikan dan kejahatan, menurut penulis sepenuhnya adalah pemaknaan masyarakat atas tindakan-tindakan tertentu yang baik maupun jahat. Bukan berarti bahwa kita bebas melakukan sesuatu yang merugikan maupun menguntungkan orang lain, tetapi dengan sudut pandang perspektifisme dan netralitas kita bisa menentukan apa yang jahat dan yang baik secara melampaui moralitas dari rekaan masyarakat atau beberapa orang yang mengontrol masyarakat.

Netralitas bukanlah netral dalam segala hal, yakni tidak mau bertindak apapun dalam ranah kebaikan maupun kejahatan atau tidak melakukan intervensi apapun ketika ada seseorang bertindak baik atau jahat kepada orang lain, ketika dirasa memang perlu adanya intervensi seperti meleraikan atau semacamnya. Netralitas berada melampaui nilai moralitas kebaikan dan keburukan, serta memahami dengan seadil-adilnya bahwa setiap tindakan yang baik maupun buruk tidak lebih dari perspektif manusia lain maupun penerima dampaknya atas tindakan tersebut.

Menurut penulis, moralitas tidak lebih dari antara buatan beberapa orang yang dipaksakan kepada masyarakat (seperti kata Nietzsche, maupun bukti konkritnya adalah hukum dan ideologi negara yang dipaksakan oleh pemerintah dan masyarakat politis kepada masyarakat serta dibuat aparat represif dan aparat ideologis untuk perangkat-perangkat punitif maupun sosialisasi agar masyarakat menerima kedua hal tersebut sebagai moralitas yang benar-benar diakui masyarakat) atau moralitas yang berdasarkan resepsi orang-orang atas sebuah tindakan dan menjadi norma sosial yang diakui oleh masyarakat secara intersubjektif (biasanya dalam ranah budaya ada adat, sopan-santun maupun norma-norma lain yang lahir dari interaksi manusia di dalamnya). Sehingga tidak langsung melakukan cap atas sebuah perbuatan tersebut baik atau tidak baik berdasarkan moralitas yang lahir dari kedua cara tersebut.

Netralitas memahami bahwa manusia sepenuhnya tidak bisa berlaku baik dan tidak bisa sepenuhnya berlaku buruk, semua tindakan memiliki konsekuensi yang berada pada tatanan *grey morality*. Grey morality adalah paham dimana seseorang memahami bahwa sebuah tindakan selalu memiliki dampak baik ataupun buruknya sendiri, seperti tindakan baik yang didasari oleh niat buruk, tindakan buruk yang didasari oleh niat baik, tindakan baik yang berefek buruk pada orang lain selain yang menerima dampaknya atau berefek buruk pada jangka panjang, tindakan buruk yang

⁴⁶ <https://people.umass.edu/klement/100/sartre-lect.html> diakses pada 11-7-2018 pukul 12:15

berefek baik pada orang lain atau berefek baik pada jangka panjang, tindakan pragmatis yang tidak didasari oleh kebaikan atau keburukan apapun, atau tindakan yang sama sekali tidak bisa ditakar baik dan buruknya (seperti konsep *necessary evil* (sebuah tindakan baik yang menggunakan metode buruk) atau menjadi anti-villain (sebuah perilaku yang didasari oleh tindakan buruk tapi berupa tindakan baik secara konkrit terus-menerus)).

Dengan kacamata netralitas, tentu kita bisa memahami secara seimpartial mungkin, tidak terikat pada norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat yang menentukan baik-buruknya suatu tindakan, tidak terikat pada suatu konsep tertentu yang menentukan kebaikan-keburukan apriori, namun sepenuhnya diserahkan kepada konsekuensi dari tindakan yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terdampak, diri sendiri maupun dunia.

Seseorang yang netral, bisa jadi tidak terjebak atas keyakinan yang buruk maupun hati nurani yang buruk. Keyakinan yang buruk dimana seseorang bisa menjadi seorang yang jahat secara konkrit karena terlalu percaya atas kebaikan yang ia lakukan tanpa berusaha untuk memahami apakah kebaikan tersebut memang benar-benar baik secara efek kepada orang lain dan kepada dunia, maupun seseorang yang tidak benar-benar jahat karena ia hanya melakukan kejahatan demi memperjuangkan konsep kejahatan itu sendiri, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya yang dapat dikategorikan sebagai jahat secara per se.

Menjadi seseorang yang netral memberikan kita kebebasan untuk bertindak tanpa perlu dikekang oleh norma-norma sosial yang moralitasnya berkontradiksi satu sama lain, bahkan kita lepas dari tindakan-tindakan yang dipertanyakan moralitasnya karena standar moralitas apriori itu sendiri bahkan tidak ada untuk digunakan sebagai acuan mempertanyakan moralitas tindakan kita. Sehingga kebebasan manusia untuk bertindak baik ataupun buruk diserahkan kepada dirinya sendiri maupun orang lain yang menerima dampak atas tindakannya tersebut. Dengan memahami konsep netralitas, tentunya kita memahami pula mengenai konsep kekuasaan, jika seseorang bertindak efektif atau tidak maka ia bertumpu pada kekuasaannya untuk membuat tindakan tersebut efektif atau tidak.

Jika seseorang ingin tindakannya yang ia anggap menguntungkan dan berkonsekuensi seperti yang ia inginkan terjadi, maka sepenuhnya hal tersebut berada pada kekuasaannya apakah mampu untuk diwujudkan dalam ranah realitas atau tidak. Tindakan seseorang tersebut juga dapat dijustifikasi sebagai tindakan kebaikan atau

tidak juga melalui kekuasaan yang ia gunakan. Ketika tindakan jahat dibarengi dengan kekuasaan yang besar, maka terjadilah ia sebagai tindakan konkrit yang berefek. Mungkin pada awal-awal masyarakat akan memandangnya sebagai tindakan yang jahat, namun seiring dengan waktu jika penjahat ini mampu menguasai masyarakat dalam waktu lama dan mampu untuk melakukan propaganda atau apapun dengan kekuasaannya bahwa tindakannya tersebut terjustifikasi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan kebaikan oleh generasi-generasi selanjutnya yang tidak menerima dampaknya secara langsung, atau setidaknya tidak dianggap sejahat oleh generasi sebelumnya yang menerima dampaknya secara langsung.

Perang adalah sebuah tindakan yang dampaknya diterima oleh masyarakat secara langsung yakni kematian, kehilangan saudara, rasa sakit dan kehancuran-kehancuran lainnya. Namun perang tetap dijustifikasi oleh siapa yang menang⁴⁷. Pihak yang menang mampu untuk menjustifikasi bahwa tindakannya dilakukan untuk kebaikan dan pihak yang kalah dicap sebagai pelaku kejahatan dan tukang perang (*warmonger*). Seperti halnya dalam perang dunia kedua, pihak Jerman dijustifikasi sebagai pihak yang jahat karena ia kalah perang, bahkan publik Jerman sendiri sampai sekarang sebagian besar membenci kaum Nazi yang ada di Jerman dan melakukan sensoran terhadap foto-foto pemimpin tinggi Nazi dalam setiap media yang ada. padahal pada masa perang dunia kedua, Hitler dianggap sebagai seorang mesiah yang mampu untuk membawa Jerman menuju kejayaan, pada masa-masa awal pemerintahannya publik Jerman begitu mencintai Hitler dan kroni-kroninya.

Pada masa perang dingin, keadaan berbalik, dimana Uni Soviet yang ikut memenangkan perang dijadikan sebagai setan pada masa perang dingin, hal ini terjadi karena perang dingin dimenangkan oleh blok barat pada masa sekarang. Seandainya Uni Soviet memenangkan perang dingin, bisa jadi blok barat dicap sebagai negara-negara otoriter yang kejam dengan segala kekejaman yang dilakukan. Kejahatan perang negara-negara blok barat pun pasti bisa dengan mudah diakses, sedangkan kejahatan perang negara-negara blok timur akan dengan mudah ditutupi, kebalikan dari masa sekarang dimana kejahatan perang negara-negara blok timur dengan mudah diakses tetapi sedikit yang memperhatikan kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh

⁴⁷ <https://www.goodreads.com/quotes/148791-history-is-always-written-by-the-winners-when-two-cultures>
diakses pada 14-7-2018 pukul 3:20

blok barat itu sendiri. Ini merupakan analogi bahwa justifikasi terhadap tindakan baik maupun buruk tersebut lahir dari kekuasaan.

Sama halnya dengan tindakan yang dimaksudkan baik, jika ia tidak mampu untuk mewujudkan tindakan tersebut dengan kekuasaannya, maka jelas tindakan tersebut tidak akan menemukan ranahnya dalam tindakan konkret dan orang-orang tidak akan pernah merasakan dampaknya. Atau ketika sebuah tindakan tersebut berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk menyelesaikannya, bisa jadi dua hal, yakni orang-orang yang menerima dampaknya akan merasa tindakan tersebut jahat atau orang-orang yang menerima dampaknya masih meyakini tindakan tersebut didasari niat yang baik namun tidak efektif.

Dalam ranah realpolitik, tindakan-tindakan netral yang etis tentu diserahkan kepada orang yang melakukan tindakan tersebut untuk menentukan apakah konsekuensi tindakan tersebut memang menguntungkan bagi banyak pihak atau memiliki keuntungan jangka panjang yang relevan untuk dilakukan. Tindakan seperti korupsi dan sebagainya perlu dipertanyakan, untuk apa ia korupsi dan melakukan hal yang dianggap terhina oleh masyarakat dan melanggar hukum tersebut? Apakah hasil korupsinya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan karena merasa bahwa pemerintah tidak mendistribusikan kekayaannya secara adil kepada masyarakat? Walaupun jarang sekali korupsi seperti ini terjadi, namun skenario ini patut untuk direka jika memang ada. ataukah untuk memperkaya diri demi kepentingan pribadinya atau kroni-kroninya dan tidak menyerahkan sedikitpun demi kepentingan masyarakat umum? Untuk yang kedua, maka jelas tindakan tersebut merupakan tindakan yang secara konsekuensial merupakan tindakan yang merugikan banyak orang kecuali diri sendiri dan kroninya. Dalam jangka panjang sekalipun bisa jadi merugikan lebih banyak orang karena mengganggu berjalannya negara dengan mengambil sumber daya yang seharusnya dipakai oleh negara untuk bekerja.

Tetapi untuk tindakan pertama, bisa jadi menjadi sebuah pertanyaan baru dimana tindakan tersebut memiliki meritnya sendiri. Jika memang tindakan korupsi tersebut lebih berdampak baik bagi orang-orang yang menerima dampaknya, serta dalam jangka panjang bisa lebih berdampak baik kepada dunia (seperti masyarakat tersebut mengalami perkembangan akibat adanya dana yang digunakan untuk produktifitas masyarakat tersebut, sedangkan program-program yang dijalankan oleh negara justru mengalami stagnansi) maka tindakan korupsi tersebut bisa jadi secara

konsekuensi dan resepsi dari masyarakat yang menerimanya diambil sebagai tindakan yang baik.

Ranah realpolitik hampir sama dengan ranah personal dimana orang-orang mengambil tindakan politik sebagai seorang manusia yang mempertahankan kekuasaannya maupun berusaha untuk memperkuat kekuasaannya. Etika ini bukan etika yang mendukung pemikiran machiavellian atau intrik-intrik pragmatis, namun lebih kepada memberikan ruang kepada manusia yang bebas dimana manusia bebas mampu melakukan apapun dari segi kebaikan dan keburukan, bahkan melampaui kebaikan-keburukan yang dirumuskan oleh masyarakat maupun orang-orang yang mengontrol masyarakat. Nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh orang yang memiliki netralitas dalam moralitas bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan moralitas yang ada di masyarakat, sesuai dengan konsekuensi kebaikan yang akan didapatkan dirinya, orang lain maupun dunia. sama halnya dengan nilai keburukan yang dilakukan bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan keburukan yang dirumuskan oleh masyarakat.

Manusia bebas, selama tidak diatur oleh kebaikan maupun keburukan aprioritik. Sama halnya dengan konsep Ketuhanan dimana Tuhan memberikan kebaikan-keburukan aprioritik berdasarkan kitab suci dan wahyu-wahyu-Nya kepada utusan-utusan-Nya di dunia. dalam ranah ini, di segi realpolitik hukum dan segala aturan berupa norma sosial masyarakat yang terjadi akibat adanya socio-political engineering (atau mengutip istilah Foucault, pendisiplinan dan biopolitik, bisa jadi juga anatomo dan neuropolitik) maupun akibat dinamika sosial di masyarakat, menjadi sebuah konsesi kebaikan-keburukan aprioritik di dalam kehidupan masyarakat dari segi personal sampai publik.

Dengan sudut pandang netralitas, kita tidak akan terjatuh kepada konsesi-konsesi demikian, yakni dengan memahami bahwa segalanya merupakan bentuk buatan manusia lain yang terjadi akibat dinamika sosial dan dinamika politik, kita bisa memilih untuk menaati sebagian maupun menolak dan berusaha mengubah sebagian karena tidak ada yang absolut. Segalanya merupakan hasil dari perspektif pihak-pihak yang membuatnya serta pertentangan kekuasaan dari segala pihak yang berkontribusi atas pembentukannya. Bahkan ketika kita bukan merupakan seseorang yang hadir dan memiliki partisipasi langsung atas pembentukannya, tentu kita tidak harus menaatinya selama kita memahami dan menyadari konsekuensi yang akan kita dapat ketika tidak menaatinya.

Jatuhnya kita akan menggunakan etika personal karya diri kita sendiri berdasarkan interaksi dengan orang lain dalam membaca kebaikan dan keburukan tindakan yang akan kita lakukan. Bahwasanya kebaikan dan keburukan merupakan nilai-nilai moralitas yang kita tentukan sendiri maupun ditentukan orang lain berdasarkan konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan, bukan didesain secara aprioristik oleh orang yang tidak mengalami dampak tindakan yang kita lakukan secara langsung maupun orang yang tidak ikut merumuskan tindakan yang akan kita lakukan. Sehingga segala tindakan kita bebas hanya dibatasi oleh faktisitas dan konsekuensi apa yang akan kita dapatkan dan didapatkan oleh orang lain.

Namun pandangan netralitas milik penulis, bukanlah netralitas secara sepenuhnya, tetapi didasari oleh etika personal-sosietal yang didasarkan oleh konsekuensi. Netralitas bukan berarti egoisme atau berusaha menyeimbangkan kebaikan dan keburukan yang akan dilakukan berdasarkan baik konsekuensi maupun pandangan moralitas yang ada di masyarakat, tetapi lebih kepada melampaui nilai kebaikan dan nilai keburukan yang ada di masyarakat. Namun juga bukan terjebak atas konsesi-konsesi transendental, lebih kepada nilai-nilai moralitas personal yang dibangun berdasarkan pengalaman dan konsekuensi yang didapat selama berkehidupan.

4. Konsekuensialisme

Etika yang harus dilakukan menurut penulis adalah konsekuensialisme. Konsekuensialisme adalah sebuah pertimbangan atas tindakan didasarkan kepada konsekuensi yang diinginkan oleh pelaku tindakan tersebut. Konsekuensi yang diinginkan dapat berupa konsekuensi atas diri sendiri maupun konsekuensi atas orang lain. Pada ranah konsekuensi ini dapat berupa konsekuensi yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, konsekuensi yang menguntungkan orang lain tetapi merugikan diri sendiri atau konsekuensi yang menguntungkan orang lain sekaligus menguntungkan diri sendiri. Dalam eksistensialisme kebanyakan disepakati bahwa ranah moralitas sepenuhnya ditentukan secara otentik oleh individu masing-masing sesuai dengan keberadaannya.

Namun yang menarik adalah pemikiran Sartre dalam moralitas dan etika, yakni moral-etika konkrit dimana moralitas dan etika ini dibangun berdasarkan relasi seseorang dengan manusia lain atau dalam bermasyarakat. Tentunya dengan relasi kepada orang lain atau dalam bermasyarakat, etika dan moralitasnya akan condong

kepada pengalaman-pengalaman berkehidupan yang menyejarah dalam bermasyarakat. Yakni tindakan-tindakannya sebisa mungkin merupakan tindakan yang diafirmasi secara konsekuensial oleh masyarakat maupun oleh relasi dari seorang manusia dengan masyarakatnya.

Dibandingkan dengan Nietzsche yang masih menggunakan individu sebagai sumber utama moralitas yang cukup egoistik⁴⁸ (walaupun Nietzsche menyatakan moralitas dan etika sudah melampaui egoisme dan altruisme, yakni dengan menyatakan bahwa altruisme tidak lebih dari mempertahankan kekuasaan atau moralitas palsu dan seseorang bisa melakukan redefinisi atas altruisme berdasarkan kekuasaannya sehingga orang lain dapat menyepakati tindakan egoistik seseorang menjadi sebuah altruisme/tindakan yang menguntungkan orang lain tersebut karena dipengaruhi oleh orang yang mampu melakukan redefinisi moral-etika terhadap orang lain), penulis lebih menyepakati Sartre yang memberikan ruang kepada intersubyektifitas untuk melakukan definisi-definisi terhadap moralitas dibandingkan dengan sekelompok individu berkuasa yang mampu mendefinisikan moralitas bagi manusia-manusia yang lainnya.

Sehingga konsekuensi-konsekuensi yang didapatkan oleh seseorang dan orang lain, didefinisikan oleh totalitas yang didetotalisasi, yakni seseorang dan segala manusia yang hidup dalam bermasyarakat saling mempengaruhi dalam tindakannya dan membentuk moral-etik yang terhimpun dalam intersubyektifitas walaupun itu hasil dari dialektika moral-moral personal yang ada di dalam sistem moralitas total tersebut, namun juga mampu untuk diubah berdasarkan tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam sistem moralitas tersebut. Sehingga moralitas tersebut merupakan moralitas konsensual yang didasari dari hasil deliberasi dan persepsi atas konsekuensi tindakan yang lahir dari tindakan-tindakan manusia di dalam sistem moralitas tersebut.

Tentu sistem moralitas demikian menjadi subyek dari perubahan dan progress yang konstan. Ia tidak akan pernah menjadi moralitas baku universal yang tidak bergerak dan mekanistik, ia akan terus dan menerus berubah berdasarkan masyarakatnya yang berubah seiring dengan ruang dan waktu serta kejadian-kejadian yang menyejarah di dalamnya. Selain itupun juga jika ada orang-orang yang ingin

⁴⁸ Nantz, Derrick Philip. 2007. Nietzsche on Naturalism, Egoism and Altruism. Georgia : Georgia State University, hlm. 62

merubah moralitas tersebut maka orang-orang itu juga harus melakukan tindakan-tindakan konkrit untuk merubahnya, yakni melakukan tindakan-tindakan moral-etik yang berefek pada konsekuensi yang nantinya akan diresepsi oleh masyarakat yang menentukan apakah moralitas tersebut berubah atau tidak.

Mengenai moralitas yang imanen dan personal, tentunya konsekuensi-konsekuensi harus dihadapi dengan prioritas intersubjektif. Apakah tindakan yang dilakukan oleh kita memang memiliki konsekuensi yang berguna bagi kita atau orang lain, apakah tindakan kita yang berkonsekuensi baik bagi diri sendiri tetapi merugikan orang lain berujung pada kebaikan jangka panjang bagi umat manusia (kebaikan ini harus konkrit dan dapat dirasakan efeknya suatu saat nanti) ataukah hanya menjadi kebaikan yang dapat dinikmati diri sendiri dan berakhir saat kita meninggal? Sebagaimana Sartre menyatakan bahwa manusia menjadi legislator bagi seluruh umat manusia, tindakan kita yang memiliki konsekuensi apapun harus dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi oleh umat manusia di masa depan.

Moralitas imperatif kategorikal yang didasarkan kepada kewajiban etis (moralitas Kantian) tentu tidak sebaiknya memiliki ruang dalam etika konsekuensialisme. Sekalipun moralitas imperatif kategorikal memiliki kebaikan-kebaikan di dalamnya yakni kewajiban dimana tindakan moral-etis harus menjadi legislator bagi umat manusia dan didasari oleh kewajiban-kewajiban pada umat manusia, namun moralitas ini cukup aprioristik. Moralitas yang aprioristik tentunya belum tentu dapat diresepsi secara konsekuensial sebagai hal yang baik bagi orang lain, namun berkonformis pada prinsip-prinsip tertentu yang dianggap baik. Ini merupakan kebalikan dari konsekuensialisme dimana prinsip-prinsip moralitas dan etis merupakan hasil dari interaksi konkrit yang dilakukan oleh para manusia dalam sistem intersubjektifitas moral di dunia.

Kewajiban etis lahir atas konsensus-konsensus aposteriori pasca adanya tindakan-tindakan konkrit yang disepakati pasca meresepsi konsekuensinya, yakni dengan adanya hukum-hukum maupun kebijakan-kebijakan pasca terjadinya inovasi-inovasi berupa tindakan berkonsekuensi baik tertentu. Sehingga kebijakan dan hukum didasari oleh proses yang bottom-up berdasarkan tindakan-tindakan menyejarah yang dilakukan oleh manusia dalam wilayah yurisdiksi tertentu, bukan apriori oleh para penguasa yang memiliki pandangan kedepan atas situasi-situasi dan faktisitas yang terjadi tanpa adanya relasi-relasi konsekuensial dan imanen terlebih dahulu, yakni tidak ada sebuah moralitas transenden atau pemikiran transenden yang muncul

menginspirasi terjadinya sebuah kebijakan atau hukum tertentu tetapi harus didasari oleh tindakan-tindakan konkrit material yang muncul dari masyarakat dan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat itu sendiri.

Tindakan-tindakan pemerintah harus didasari oleh uji coba-uji coba konsekuensial sebelum adanya kebijakan menyeluruh yang diaplikasikan terhadap banyak hal, yakni dengan riset-riset saintifik dengan mengaplikasikan tindakan tersebut kepada sebuah wilayah tertentu, maupun mencoba untuk mencari tindakan-tindakan yang diaplikasikan oleh masyarakat suatu wilayah tertentu itu sendiri dan dinaikkan menjadi kebijakan yang resmi untuk masyarakat yang melakukan tindakan tersebut. Untuk wilayah lainnya harus dilakukan ujicoba terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat wilayah tersebut sebagai aktor dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini sebelum dijadikan sebagai kebijakan resmi yang dilaksanakan oleh aparatur-aparatur pemerintah secara langsung.

Sehingga tindakan-tindakan pemerintah didasari secara etis yakni melalui konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat sekaligus mendasari tindakannya dari konsekuensi-konsekuensi yang pernah terjadi di masyarakat, sehingga tindakan konkritnya merupakan tindakan totalitas yang didetotalisasi, yakni pemerintah sebagai makna dari totalitas, detotalisasi dari masyarakat yang merumuskan atau melakukan kritik maupun implementasi dari tindakan-tindakan tersebut.

Dalam ranah realitas, tentunya masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Kebutuhan masyarakat ini lahir dari pengalaman-pengalaman hidupnya yang menyejarah di sebuah ruang atau wilayah tertentu. Ia juga mengalami dari konsekuensi-konsekuensi tindakan intersubyektifnya dan mampu menentukan sendiri secara subyektif kebutuhan dan tujuannya sendiri yang berasal juga dari intersubyektifitas individu-individu yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Lantas apakah pemerintah memiliki hak untuk menentukan rule of the game dari kehidupan masyarakat di sana? Tentu tidak sepenuhnya. Pemerintah harus membasiskan dirinya atas tindakan-tindakan konsekuensial yang terjadi di sana, konsekuensi yang akan diterima pemerintah sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat yang tinggal disana. Metode yang paling tepat menurut penulis adalah dengan melakukan deliberasi untuk memahami konsekuensi yang akan dirasakan oleh masyarakat, riset saintifik partisipatoris untuk memahami kondisi-kondisi yang menyejarah sekaligus mengambil inisiatif-inisiatif dari masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai aktor dari kebijakan tersebut untuk memahami sendiri subyektifitas

dan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Sehingga masyarakat tetap menjadi aktor yang sepenuhnya bebas dan keinginan dari pemerintah kepada masyarakat tidak menjadi sebuah paksaan terhadap masyarakat, namun menjadi sebuah aspek dari intersubyektifitas masyarakat.

Dalam ranah realpolitik, tentunya berkaitan dengan aktor-aktor politik yang akan melakukan tindakan-tindakan politik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, tetap terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang menyejarah dan berjalan ke masa depan bagi dirinya dan bagi orang lain. Machiavellianisme dan kehendak berkuasa tentunya berperan penting dalam tindakan-tindakan politik secara aktor. Tetapi tetap kembali kepada konsekuensialisme, apakah tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh para aktor ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mereka inginkan atau diinginkan oleh masyarakat luas? Jika iya, apakah tindakan ini berkonsekuensi lebih besar secara kebaikan kepada dunia?

Katakanlah dalam sejarah, perang besar atau tindakan-tindakan kekejaman secara politik dalam perang yang dilakukan aktor-aktor tertentu memang berkonsekuensi besar kepada segelintir orang, namun bisa jadi memberikan dampak baik yang lebih besar secara jangka panjang ke depan. Contohnya adalah kekejaman-kekejaman dimana seorang aktor politik memerintahkan lawan politiknya dieksekusi mati sampai sehabis-habisnya. Jika tindakan ini memberikan dampak yang positif kepada masyarakat yakni stabilitas di ranah masyarakat, atau berdasarkan pembalasan yang dilakukan karena ada kekejaman yang dilakukan sebelumnya oleh lawan-lawan politiknya tersebut kepada masyarakat, bisa jadi hal itu terjustifikasi. Seperti pemimpin-pemimpin Nazi di Jerman yang dieksekusi mati dalam pengadilan Nuremberg, mereka dieksekusi mati karena perbuatan mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan perang. Sekalipun para pemenang perang dunia kedua juga memiliki kejahatan perang mereka sendiri yang rata-rata tidak dipersekusi oleh pengadilan internasional, fokus untuk mengadili pelaku kejahatan perang dari Nazi dapat terjustifikasi oleh adanya kejahatan perang yang lebih besar yang mereka lakukan dibandingkan dengan para pemenang perang dunia kedua, serta pembacaan atas masa depan pada konsekuensi dimana Nazi dan kekejaman yang mereka lakukan tidak boleh hidup lagi di masa depan.

Pada ranah personal, aktor politik yang membalas dendam karena lawan politiknya menjatuhkan terlebih dahulu, melakukan manuver politik seperti membuka korupsi lawan politiknya tentu boleh dilakukan selama konsekuensinya memang lebih

besar positifnya kepada dunia dan masyarakat. Manuver politik ini sekalipun tidak didasari oleh kepentingan dan niat kebaikan, memberikan dampak kebaikan yang konkrit dan memang benar-benar besar karena mengungkap korupsi yang dilakukan oleh orang lain (terlepas pengungkapnya sendiri melakukan korupsi atau tidak), sehingga sekalipun dasar niatannya bukan untuk berbuat baik, nilai kejahatan yang dilakukan oleh aktor politik yang membalas dendam ini (hanya mengorbankan satu orang) lebih kecil dibandingkan nilai kebaikan yang muncul akibat tindakannya yang menguntungkan masyarakat dan dunia (membuka korupsi seseorang memberikan dampak jangka panjang dimana dana hasil korupsi dapat dikembalikan atau pelaku korupsi dapat dijerakan sehingga berdampak positif di masa depan).

Tindakan yang dalam jangka pendek merugikan masyarakat namun dalam jangka panjang menguntungkan masyarakat tentu dapat dilakukan, semisal melakukan pembunuhan massal kepada sebuah wilayah kecil yang memberontak demi stabilitas umum sebuah wilayah besar. Namun perlu dikalkulasikan dengan baik, apakah wilayah kecil ini memang wilayah yang terkecil di daerah tersebut dan memang benar-benar mampu untuk memberikan sebuah pesan intimidatif kepada masyarakat yang lainnya, memang mampu untuk membuat tidak adanya pemberontakan lagi di masa depan yang muncul akibat adanya kekejaman yang dilakukan. Tetapi tetap saja kekejaman ini merupakan tindakan ultimatum remidium, bukan berarti tindakan yang dianjurkan walaupun secara konsekuensial dapat untuk dilakukan, kecuali memang benar-benar terpaksa untuk menyelesaikan sebuah konflik tertentu yang berkepanjangan dan terpaksa dilakukan agar konflik yang berkepanjangan tersebut segera terselesaikan.

Sepenuhnya moralitas berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang akan didapatkan baik oleh individu, masyarakat maupun dunia. konsekuensi-konsekuensi ini tentu harus dipikirkan satu sama lainnya, yakni :

- a. Konsekuensi yang diutamakan adalah konsekuensi yang lebih besar positifnya, jika positifnya lebih besar diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan individu, maka diutamakan tindakan yang lebih besar diterima oleh masyarakat
- b. Jika positifnya lebih besar diterima oleh individu dibandingkan masyarakat, maka perlu dilakukan pembacaan apakah konsekuensi ini lebih besar diterima oleh dunia secara keseluruhan atau tidak, jika ya maka boleh dilakukan. Jika tidak, maka tidak perlu, ini hanya merupakan tindakan egoistik sepenuhnya

- c. Jika tindakan ini terlihat negatif di masa sekarang, apakah akan berdampak positif yang lebih besar daripada negatifnya sekarang di masa depan? Jika ya, maka boleh dilakukan, jika tidak maka tidak perlu dilakukan.
- d. Bagaimana cara untuk menentukan konsekuensi? Tentunya dengan penelitian saintifik maupun pembacaan logis maupun dengan deliberasi kepada orang lain. Penelitian saintifik secara sederhana bisa dilakukan cukup dengan melakukan pembacaan-pembacaan atas kondisi yang ada secara obyektif, perkiraan atas masa depan baik secara berbasiskan prakondisi maupun secara logis, serta deliberasi kepada orang lain dengan melakukan tindakan komunikatif kepada orang-orang yang akan terdampak dengan konsekuensi tindakan kita.
- e. Pengalaman-pengalaman pribadi juga menentukan pembacaan kita atas konsekuensi, dimana sekalipun kita memiliki kebebasan untuk menentukan langkah dan tindakan kita, konsekuensilah yang membatasi. Pengalaman-pengalaman pribadi merupakan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan kita maupun tindakan orang lain kepada kita, sehingga gambaran-gambaran atas konsekuensipun juga dapat dibaca dari pengalaman-pengalaman pribadi dan penilaian subyektif atas pengalaman-pengalaman tersebut.
- f. Memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki butterfly effect, baik tindakan kecil personal sekalipun akan berdampak meluas kepada masyarakat dan dunia. sehingga konsekuensi personal sekalipun juga harus dipikirkan karena akan mempengaruhi tindakan kita di masa depan, tindakan orang lain terhadap kita, tindakan kita terhadap orang lain dan gambaran kosmik dunia baik di ranah mikrokosmos maupun makrokosmos.

Dengan adanya premis-premis demikian, gambaran etis mengenai konsekuensialisme dapat dibuat. Namun kembali kepada subyektifitas masing-masing untuk menafsirkan konsekuensi yang akan didapatkan oleh seseorang maupun orang lain. Ialah yang menentukan bagaimana konsekuensi tersebut ditafsirkan serta dibuat. Serta dalam politik, segala konsekuensi harus terencana dan benar-benar diinginkan sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan atau tindakan yang merugikan (yakni yang kerugiannya kepada orang lain, diri sendiri maupun dunia lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya kepada diri sendiri, orang lain dan dunia). Secara manusiawi, moralitas ditentukan oleh konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh manusia itu sendiri. Sekaligus manusia juga mampu untuk menentukan eksistensi dan esensi dari dirinya dimana manusia bukanlah makhluk yang ditentukan esensinya sejak

awal menurut eksistensialisme. Dengan adanya kebebasan menentukan esensi dari manusia, manusia mampu untuk berbuat baik maupun buruk sesuai dengan konsekuensi yang ia inginkan. Seringkali berbuat baik memberikan konsekuensi yang buruk bagi dirinya namun baik bagi orang lain, atau terkadang buruk bagi dirinya dan orang lain namun baik bagi dunia secara keseluruhan. Semisal, dalam contoh yang pertama, seseorang mampu untuk kehilangan waktu ataupun kesempatan yang berharga dalam bisnis dan urusan lain hanya karena dia menggunakan waktunya untuk menolong orang lain. Dalam contoh yang kedua, politik environmentalisme bisa berdampak buruk bagi ekonomi karena tidak memperbolehkan eksploitasi dan industrialisasi berlebihan, setidaknya menghambat pertumbuhan ekonomi secara masif. Tetapi konsekuensinya bagi dunia sangat relevan dimana kondisi lingkungan dapat membaik karena adanya penghentian atas aktivitas-aktivitas manusia yang merugikan bumi.

Sementara itu, tindakan buruk atau kejahatan seringkali memberikan keuntungan pada manusia dimana manusia dapat mendapatkan waktu atau bisa jadi harta yang berharga cukup dengan mengabaikan kesempatan tindakan baik, atau bahkan berbuat kejahatan kepada orang lain maupun dunia. seseorang yang merampok dan sukses, mendapatkan harta yang berharga dari orang lain dan dapat digunakan bagi dirinya sendiri untuk kepentingannya. Di satu sisi juga ada moralitas abu-abu (grey morality) yang memberikan dampak baik sekalipun caranya buruk, atau sebaliknya memberikan dampak buruk sekalipun caranya baik. Contoh-contoh dari moralitas abu-abu ini seperti melakukan perampokan kepada orang kaya yang jahat untuk diberikan kepada orang miskin (kisah seperti Robin Hood dan Raden Said merupakan contoh dari moralitas abu-abu yang demikian), yang kedua adalah seorang politisi yang membaktikan sebagian hartanya untuk masyarakat miskin demi mendapatkan kekuasaan untuk korupsi lebih banyak lagi. Demikian merupakan moralitas abu-abu yang seringkali dihadapi oleh manusia.

Lantas, dengan konsekuensialisme kita memahami bahwa moralitas tidak sepenuhnya hitam dan putih maupun baik dan jahat. Seseorang yang sudah pada ranah etika, tidak hanya berpikir tentang imperatif kategorikal dari tindakannya, namun sudah berpikir kepada nilai yang dimunculkan oleh tindakannya sekaligus konsekuensi dari tindakannya. Etika konsekuensialisme yang didasarkan kepada kebebasan manusia secara hampir absolut (sekalipun efek dari kebebasan manusia ini tidak hampir absolut dan masih dibatasi oleh faktisitas dan realitas material yang mengada di sekitar manusia tersebut) memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan baik-buruknya

tindakannya sendiri maupun menentukan baik-buruknya tindakan orang lain yang berefek padanya. Sehingga, tindakan berupa tidak mengambil tindakan sekalipun juga bernilai sesuatu yang dapat dikaji konsekuensi dan benar-salahnya.

Selain itu juga konsekuensialisme mampu membuat manusia melewati batas-batas moralitas yang ditentukan. Manusia mampu menjadi lebih baik dibandingkan batas moralitas baik yang ada pada masyarakat, sekaligus mampu menjadi lebih jahat dibandingkan batas moralitas jahat yang ada pada masyarakat. Jika melakukan genosida merupakan hal yang dilarang oleh dunia dan masyarakat, namun konsekuensinya dianggap baik oleh pelakunya, maka itu adalah tindakan yang secara konsekuensial benar untuk para pelaku genosida. Untuk menyatakan bahwa itu salah kepada dunia, maka pihak yang melawan genosida harus melakukan sesuatu yang benar untuk memitigasi konsekuensinya.

Sehingga muncul bahwa moralitas konsekuensialisme merupakan moralitas praktis. Tanpa adanya tindakan yang dilakukan, maka tidak akan ada konsekuensi yang diinginkan. Tindakan untuk mengabaikan sebuah problema moralitas sekalipun memiliki konsekuensi-konsekuensinya terhadap dirinya maupun orang yang terdampak oleh problema moralitas tersebut.

5. Kemuliaan

Bagi penulis, konsep kemuliaan (*Honour*) adalah suatu hal yang penting dalam berkehidupan. Konsep ini didasari oleh nilai-nilai luhur yang hadir melalui janji manusia kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, sekaligus kebebasan manusia untuk membuat janji tersebut baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Kemuliaan bagi Nietzsche merupakan sebuah moralitas tinggi dimana moralitas ini dimiliki oleh manusia-manusia yang memiliki kekuasaan tinggi⁴⁹. Membuat janji tentunya membutuhkan kekuasaan untuk melaksanakannya, sehingga hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggilah yang mampu untuk berjanji secara efektif.

Jika dalam ranah etika yang berujung pada kekuasaan sepenuhnya, seseorang mampu membuat dan melanggar janjinya sesuka hati dimana seseorang yang memiliki kekuasaan mampu untuk melanggar janji tanpa adanya konsekuensi yang tidak diharapkan karena ia memiliki kekuasaan untuk menghentikan konsekuensi yang akan ia dapatkan tersebut. Contohnya adalah janji-janji palsu politisi, dimana ketika mereka

⁴⁹ Ganesh, Akshay. 2017. Nietzsche on Honor and Empathy. Georgia : Georgia State University, hlm.11

melakukan janji palsu kepada masyarakat, masyarakat membalasnya dengan demo dan ancaman berupa fisik dan sebagainya dengan mudah dihancurkan dan dibalas kembali oleh kekuasaan fisik yang dimiliki oleh politisi tersebut, yakni menggunakan kekuatan militer atau sebagainya. Dengan kata lain, memenuhi dan melanggar janji membutuhkan kekuasaan yang cukup untuk mendapatkan konsekuensi yang efektif.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebebasan hampir absolut, dibatasi oleh subyektifitas dan faktisitas. Sehingga manusia memiliki kebebasan pula untuk membuat janji kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Kehendak untuk melakukan sesuatu, sekalipun spontan, langsung (*immediate*) dan imanen tetaplah membutuhkan sebuah janji. Kehendak itu sendiri merupakan janji kepada diri sendiri bahwa ia akan melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kehendaknya tersebut. Kembali lagi kepada kekuasaan, untuk mewujudkan kehendak tersebut manusia harus memiliki kekuasaan, baik atas dirinya maupun atas orang lain. Tentunya orang yang memiliki parkinson's disease tidak mungkin (selama belum ada obatnya, dan belum ada obatnya sampai skripsi ini ditulis) memegang suatu barang dengan ketepatan dan ketahanan 100% karena tremor di seluruh badannya yang berlebihan (ini merupakan contoh faktisitas yang terjadi, yakni manusia tersebut kehilangan kuasa atas tubuhnya sendiri karena penyakit). Tetapi ia memiliki kekuasaan untuk berkehendak yakni berkehendak untuk mencari alat bantu yang mampu membuatnya memegang sesuatu dengan akurat, baik dengan melakukan riset sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Atau ia juga mampu berkehendak untuk melakukan riset atas penyakit tersebut dan berusaha untuk mencari obatnya. Atau bisa jadi ia juga mampu untuk membiayai orang lain yang akan melakukan riset atas obat parkinson's disease tersebut, dengan cara apapun yang ia kuasa melakukannya.

Namun segalanya tidak akan terjadi jika manusia tersebut tidak memiliki kekuasaan yang cukup, semisal dalam ranah membiayai orang lain, tanpa uang (sampai pada saat skripsi ini ditulis, uang merupakan salah satu alat untuk memiliki kekuasaan dan kebebasan) tentu tidak akan mungkin terjadi. Tanpa kecerdasan atau skill tertentu, tidak mungkin bisa mencari uang dengan kondisi fisik yang demikian, atau tidak mungkin bisa melakukan riset atau meminta tolong orang lain untuk melakukan riset atau meminta tolong orang lain untuk membantu kehidupannya. Sekalipun ia bebas berkehendak untuk melakukan apapun, namun tidak akan terjadi tindakan efektif, atau bahkan tidak akan terjadi tindakan konkrit (semisal pada ranah orang yang sudah

lumpuh akut, ia berkehendak untuk berdiri dan berjalan tentu tidak akan terjadi secara tindakan konkrit, kecuali hadir keajaiban dari Tuhan, mungkin).

Sebagai makhluk yang memiliki akal/kesadaran, manusia tentu menjadi seorang *being-for-itself*, yakni mampu mengada untuk dirinya dan mengubah keberadaannya sesuka hati. Ia juga mampu mengubah identitas dan faktisitasnya menjadi apapun sesuka hatinya, berjanji sesuka hatinya untuk bertindak apapun terlepas itu tindakan efektif dan konkrit ataupun tidak, serta bebas untuk melanggar janjinya sesuka hati. Kehendak tentu muncul karena adanya celah dalam keberadaan, yakni dimana manusia-manusia tersebut membutuhkan adanya sesuatu yang ia inginkan untuk ia lakukan atau ia konsumsi atau ia produksi.

Tetapi, banyak manusia yang secara etis, tidak komitmen atas kehendaknya sendiri. Ia memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan kehendaknya, namun justru tidak ia lakukan karena ia memilih menjadi manusia medioker berdasarkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ia hadapkan. Ketika kita berbicara masalah etis, tentu *telos* manusia juga diperbincangkan di dalam tulisan ini. Keumuman dalam hidup manusia yang banal, justru membuat manusia yang memiliki kekuasaan tertentu untuk melakukan kehendaknya, janji kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, tidak dilakukan karena ia tidak mau menghadapi konsekuensinya atau sekedar hanya kemalasan (*procrastinating*) belaka.

Komitmen-komitmen atas tindakan kita, janji-janji kita kepada diri kita sendiri maupun orang lain adalah komitmen yang harus dipegang oleh seluruh umat manusia. Kita memiliki komitmen kepada janji dan kehendak kita, karena tindakan konkrit hanyalah satu-satunya pembuktian atas esensi kita, yakni eksistensi mendahului, atau mengkonstitusikan esensi. Bentuk (*appearance*) ontikal kita adalah hal yang mengkonstitusikan esensi keberadaan (*being*) kita. Segala hal yang kita lakukan, adalah konstitusi dari identitas dan keberadaan kita bagi yang lain, *being-for-others*. Sehingga tanpa adanya tindakan konkrit, maka sudah jelas bahwa kita tidak memiliki komitmen kepada janji kita dan keberadaan kita sendiri. Petualangan menuju keberadaan (*quest for being*) tentu ditentukan oleh tindakan-tindakan konkrit yang sekaligus juga merupakan petualangan menuju kebebasan (*quest for freedom*) kita, tanpa adanya tindakan konkrit, kita tidak mengada sebagai sesuatu yang kita tujuan atau kehendaki, sekaligus kita tidak membuktikan bahwa kita telah bebas untuk melakukan sesuatu tersebut.

Kemuliaan, bagi penulis, tidak lebih dari komitmen atas janji-janji yang dikehendaki atas diri sendiri maupun orang lain. Pemenuhan perjanjian-perjanjian intersubyektif antara seseorang dengan orang lain adalah kunci dari kemuliaan dihadapan orang lain, pemenuhan prinsip-prinsip (prinsip adalah janji etikal pada diri sendiri) kehidupan dan berlaku pada diri sendiri adalah kunci dari kemuliaan dihadapan diri sendiri, dimana kita bisa dipercaya, diyakini dan memiliki kehormatan dihadapan diri sendiri maupun orang lain, terlepas dari janji tersebut merupakan perbuatan yang bernilai buruk atau baik tergantung dari kondisi moralitas masyarakat maupun moralitas pribadi yang dianut.

Selain itu juga tidak melakukan janji terhadap sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan, atau setidaknya komitmen pada janji yang tidak mungkin terjadi tersebut semampu dan sekuasa mungkin adalah bentuk dari kemuliaan. Orang lain pasti akan melihat komitmen tindakan konkrit kita, sekalipun tidak menjadi tindakan yang efektif, namun penggunaan kebebasan dan kekuasaan kita sampai pada ranah maksimal akan membuat orang lain memahami bahwa ada komitmen atas tindakan tersebut.

Namun dihalangi oleh faktisitas dan kekuasaan, yakni karena adanya force majeure dan kekuasaan/kekuatan eksternal yang tidak mungkin bisa dilawan oleh orang yang sudah berkomitmen tersebut. Tetapi lebih baik lagi jika diperhitungkan terlebih dahulu sehingga menjadi tindakan yang konkrit dan efektif, bukan hanya tindakan yang konkrit namun tidak efektif.

6. Keteraturan (Order) dan Kekacauan (Chaos)

Dalam kondisi sosial masyarakat, ada dua kondisi yang dapat dilihat mengenai kohesi sosial masyarakat, yakni keteraturan dan kekacauan. Keteraturan dan kekacauan bagi penulis tidak lahir atas cukupnya atau kurangnya kekuasaan tertentu yang mengatur masyarakat, namun berasal dari desain orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan dan kehendak untuk keteraturan maupun kekacauan itu sendiri.

Ada beberapa teori mengenai bagaimana masyarakat berasal, salah duanya adalah teori liberal Lockean yang memandang bahwasanya masyarakat pada awalnya merupakan masyarakat yang teratur, taat pada hukum alam namun suatu saat ada yang melanggar dan menciptakan kekacauan lalu dibuat keteraturan dengan cara meminta beberapa anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menindak kekacauan ini sehingga masyarakat kembali

menjadi teratur⁵⁰. Di sisi satunya, ada teori realis milik Hobbes dimana Hobbes memandang pada dasarnya manusia merupakan makhluk-makhluk yang bebas dan kacau, lalu muncul pertempuran dalam umat manusia (*bellum omnium contra omnes*) yang pada akhirnya manusia menghentikan konfliknya dengan cara membentuk perjanjian satu sama lain agar menghilangkan beberapa kebebasannya demi menghilangkan beberapa kebebasan orang lain demi keteraturan dalam kehidupan umat manusia⁵¹.

Teori tentang keteraturan dan kekacauan biasanya memang didasari oleh kekuasaan, yakni Locke yang menyatakan adanya orang-orang tertentu yang diberi kekuasaan lebih oleh seluruh umat manusia untuk menciptakan keteraturan, atau Hobbes yang menyatakan adanya perang semua lawan semua dalam umat manusia merupakan perwujudan dari teori keteraturan dan kekacauan yang lahir dari kekuasaan.

Selain itu, Nietzsche memandang bahwa keteraturan hanya bisa dilakukan ketika ada kekuasaan yang besar dari masyarakat tinggi, yakni orang-orang yang bernilai kebangsawanan dan kehormatan, jika masyarakat rendah yang menguasai maka akan muncul kekacauan karena masyarakat rendah akan menarik masyarakat tinggi untuk mengikuti norma-norma masyarakat rendah dan akhirnya masyarakat tinggi akan terhapuskan dengan sendirinya, sehingga ada kekosongan kekuasaan yang bangsawan maupun terhormat di masyarakat.

Namun penulis berpikiran berbeda, bahwasanya keteraturan dan kekacauan tidaklah lahir dari *level* kultural masyarakatnya, maupun peradaban seperti apapun yang masyarakat bawa, namun lebih kepada keinginan individu-individu di dalamnya dimana keteraturan dapat diciptakan melalui banyak cara yakni seperti ketika masyarakat tinggi berkuasa, hanya perlu kekuasaan yang manifes untuk menekan masyarakat rendah, atau menggunakan kekuasaan laten untuk menjadikan masyarakat rendah menjadi medioker atau ternak dari masyarakat tinggi. Di satu sisi juga masyarakat tinggi yang medioker juga akan mengikuti nilai-nilai dari masyarakat rendah dimana mereka sudah kehilangan etika dan moralitas serta kebebasan individual mereka untuk menentukan moralitas dan etika bagi orang lain, menyatu dengan kolekte masyarakat medioker yang akhirnya mengubah nilai-nilai mediokritas menjadi seakan transenden karena hampir semua masyarakatnya telah terjangkit dan pionir serta

⁵⁰ Locke, John. 1980. *Second treatise of government*. Indianapolis, Ind: Hackett Pub. Co. hlm. 106-116

⁵¹ Hobbes, Thomas. 1998. *Leviathan*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 76-129

pencipta dari nilai-nilai mediokritas ini sudah lama mati dan para pelawannyapun juga sudah lama mati. Sehingga seakan proses ini tidak bisa dikembalikan kembali atau diubah menjadi kemajuan karena nilai tersebut seakan sudah menyatu sebagai nilai alamiah manusia. Akhirnya keteraturan tercipta dengan sendirinya, namun keteraturan yang tercipta adalah keteraturan yang medioker.

Tapi di satu sisi yang lain, masyarakat rendah yang mampu untuk melawan nilai-nilai yang dipaksakan oleh masyarakat tinggi sekalipun, meskipun melalui kekacauan terlebih dahulu, ia akan mampu untuk menciptakan keteraturan dengan nilai-nilai baru yang diusungnya. Yakni nilai-nilai kesetaraan dan sebagainya yang diusung oleh masyarakat rendah tersebut dimana mereka melawan masyarakat tinggi yang mewakili orde-orde lama yang tidak setara.

Masyarakat total yang didetotalisasi tentunya adalah masyarakat yang teratur namun memiliki kekacauan-kekacauan yang cukup untuk tidak membuatnya menjadi sepenuhnya total. Keteraturan dalam ranah ini adalah dimana masyarakat memiliki etika-norma sosial yang dijalankan oleh masyarakat secara teratur, adanya konformitas terhadap konsensus-konsensus yang dibuat, serta adanya ketaatan terhadap perintah-perintah yang sudah dideliberasi. Namun kekacauan juga ada, dimana dalam segala formulasi konsensus dan perintah, terjadi formasi diskursif yang multilogis dimana seluruh anggota masyarakat membawa individuasinya dan kehendaknya secara merdeka penuh untuk dijadikan bahan material bagi segala kaidah konsensus dan perintah, bahkan kaidah formal sekalipun harus ditentukan melalui konsensus deliberatif dengan masyarakat.

Kondisi keteraturan yang ada sekarang, biasanya diawali dari otoritarianisme baik manifes maupun laten, dimana otoritarianisme manifes dilakukan oleh masyarakat-masyarakat totaliter dengan pemerintah yang berideologi otoritarianisme (Sartre menyebutkan dua diantaranya adalah Fasisme/Nasional-Sosialisme dan Stalinisme, serta derivasi-derivasinya), Fasisme menginginkan masyarakat menjadi total demi sebuah tujuan umum obyektif tertentu, sedangkan Stalinisme membuat pemikiran subyektif pemimpin besarnya menjadi pandangan obyektif masyarakat, sehingga sama-sama total pula, hanya saja caranya berbeda. Dalam neoliberalisme, developmentalisme dan segala ideologi kanan bawah yang berasosiasi dengan kapitalisme, totalitarianisme dilakukan secara subtil, yakni dengan menjadikan masyarakat sebagai obyek dari selera-selera pasar.

Propaganda-propaganda subtil seperti iklan, mode, bentuk tubuh, style fashion, gaya hidup, olahraga⁵² dan sebagainya merupakan kontrol totaliter terhadap manusia dalam kapitalisme. Bungkusnya tentu bukan bungkus-bungkus politik karena peran negara sudah diminimalisir seminim mungkin, namun sektor swasta mengambil alih peran totalitarianisme dalam kapitalisme. Sama halnya dengan Stalinisme, kapitalisme memiliki cara-cara untuk menentukan selera sektor swasta tertentu dan paket lifestyle dan barang-barang konsumsi (baik konsumsi nilai guna, nilai tanda maupun nilai tukar) menjadi sebuah selera obyektif yang harus diikuti orang, bahkan tanpa menyadari bahwa paket-paket tersebut dipaksakan.

Pilihannya hanyalah dua, mengkonsumsi atau tidak menjadi manusia paripurna. Bahkan sektor swasta tidak perlu melakukan cap kepada mereka, hanya cukup membuat mode lifestyle yang terkini saja, dan hanya tinggal duduk berbahagia melihat manusia-manusia “paripurna dan tinggi” menghujat dan berusaha untuk meyakinkan yang lain untuk mengikuti tren yang sebenarnya pun hanya disuntikkan kepada mereka.

Sehingga, teori komunikatif dalam kapitalisme berbeda dengan otoritarianisme, otoritarianisme biasanya hanya menggunakan one-way theory of communication⁵³, yakni negara sebagai aktor utama dan satu-satunya pelaku komunikasi propaganda kepada masyarakat. Sedangkan kapitalisme membuat menjadi two-way atau bahkan three and multiple ways of communication dimana sektor swasta sekalipun hanya melakukan propaganda yang diteruskan oleh orang-orang yang tidak berelasi langsung kepada swasta tersebut, tanpa perlu dibayar dan mereka merasa melakukan honest review atas produk-produk hasil kapitalisme tersebut. Ini adalah *panopticon at it's finest* bagi penulis.

Dalam kapitalisme itu sendiri, masyarakat dibuat seakan tidak teratur dan memiliki hak untuk menjadi tidak teratur, tetapi sebenarnya kondisi-kondisi tersebut hanyalah hiperealitas, mereka merasa memiliki hak, namun dihalangi oleh faktisitas maupun konsekuensi yang tidak mereka inginkan agar tidak melakukan hak tersebut, namun tetap mereka memiliki hak tetapi dibuat tidak akan mau menggunakan hak untuk menjadi tidak teratur walaupun tidak ada hak yang dilanggar.

Sehingga, dalam kapitalisme muncul masyarakat detotal yang ditotalisasi, kebalikan dari keinginan Sartre, yakni masyarakat total yang didetotalisasi. Yakni

⁵² <https://www.slideshare.net/lrathert1/propaganda-in-advertising> diakses pada 14-7-2018 pukul 4:16

⁵³ Lunenburg, Fred. 2010. Communication: The Process, Barriers, And Improving Effectiveness. Huntsville : Sam Houston State University, hlm. 3

ketika masyarakat tidak teratur dibuat tidak bisa tidak teratur karena kondisi psikologis, kolektivitas serta kondisi ekonomi-sosio-kulturalnya. Kekacauan adalah sebuah kepastian dalam masyarakat kapitalisme, tetapi tidak bisa bertindak kacau sedikitpun kecuali siap menghadapi konsekuensinya.

Hemat penulis, dalam ranah etika eksistensial, harus tetap memegang bahwa tujuan untuk bermasyarakat yang ideal bagi penulis adalah masyarakat total yang didetotalisasi, yakni masyarakat teratur yang memiliki hak untuk melakukan kekacauan demi menciptakan keteraturan atau kemajuan umum atas kondisi temporal-spasial yang selalu berubah.

7. Intersubjektifitas

Intersubjektifitas merupakan kondisi dimana sebuah formasi diskursus dihimpun dari subyektifitas-subyektifitas manusia yang mengikuti diskursus tersebut. Manusia-manusia dengan kebebasan individualnya mengeluarkan pendapat subyektifnya baik dari segi tindakan konkrit maupun dari segi tindakan komunikatif yang konkrit⁵⁴ (sebelum adanya alat untuk membuat manusia bertelepati, tentunya). Intersubjektifitas dapat terjadi ketika ada komunikasi dan tindakan antara minimal dua orang manusia atau lebih. Intersubjektifitas juga hanya akan ada ketika manusia-manusia yang berformasi diskursif tidak memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan sehingga orang lain tidak memiliki ranah untuk menyampaikan subyektifitasnya. Sehingga intersubjektifitas membutuhkan kondisi dia/multilogis untuk hadir di dalam komunikasi-komunikasi dan tindakan-tindakan manusia.

Segala tindakan di dunia menjadi satu dalam intersubjektifitas, dimana himpunan tindakan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain bagaikan butterfly effect (efek dimana kepaan seekor kupu-kupu diyakini bisa berpengaruh besar sampai pada ranah terjadinya puting beliung di belahan dunia lainnya, yakni sebuah tindakan kecil sekalipun akan mempengaruhi berjalannya dunia). sehingga manusia harus memahami bahwa memang ada intersubjektifitas dalam segala perjalanan hidupnya dan subyektifitas ia pribadi tidak akan pernah mampu untuk menghilangkan subyektifitas seluruh manusia lainnya.

⁵⁴ <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10481881509348842?journalCode=hpsd20> diakses pada 14-7-2018 pukul 4:15

Subyektifitas, seperti kata Sartre, ada dalam kebebasan setiap manusia dimana setiap manusia merupakan seorang *being-for-itself* yang mampu mengada bagi dirinya sendiri. Mengada bagi dirinya sendiri membutuhkan prasyarat yakni adanya subyektifitas dan kebebasan, jika tidak ada dua tersebut maka keberadaannya ditentukan oleh orang lain tentunya. Seperti pada halnya kucing, kucing ditentukan oleh manusia mengenai keberadaannya sebagai kucing, diberi identitas sekalipun, diberikan oleh manusia, bukan kucing itu sendiri yang menamai dirinya. Sehingga keberadaan lain selain manusia, sudah menjadi keberadaan di dalam dirinya sendiri.

Intersubyektifitas adalah apa yang menurut penulis tangkap sebagai artian dari subyektifitas Sartre yang kedua, yakni dibatasi oleh subyektifitas orang lain dalam dunia. dibatasi dalam subyektifitas orang lain dalam dunia, tentunya tidak hanya dibatasi oleh kekuasaan orang lain ketika kita ingin bertindak kepada orang lain, tetapi juga dibatasi oleh subyektifitas seluruh orang lain, yang pada akhirnya bisa menciptakan faktisitas-faktisitas tertentu jika subyektifitas tersebut menjadi sebuah tindakan konkrit yang dilaksanakan berdasarkan diskursus intersubyektif. Seperti pada halnya hukum, hukum merupakan hasil proses dari diskursif intersubyektifitas sebagian orang atas seluruh manusia dalam yurisdiksinya dan juga dipengaruhi oleh faktisitas dan tindakan-tindakan konkrit yang ada di masyarakat. Terlepas dari kondisi hukum Indonesia yang hanya menyertakan sebagian kecil orang “berwenang” untuk mengalami proses diskursif, orang-orang lainnya pun masih disertakan dalam ranah variabel dan tindakan-tindakan konkritnya yang dijadikan acuan dalam pembuatan hukum itu sendiri.

Secara teleologis, tentu manusia yang memahami intersubyektifitas akan mencari sebuah pemenuhan tujuannya dalam proses-proses diskursif yang dia/multilogis di dalam intersubyektifitas, bukan dengan cara menjadikan subyektifitasnya sebagai kondisi total dalam masyarakat. Tujuan-tujuan hidupnya sekalipun juga merupakan hasil dari subyektifitas dirinya sekaligus juga faktisitas dan intersubyektifitas yang ia alami selama hidupnya, bukan sepenuhnya pemikiran awang-awang dari dirinya yang didasari oleh egoismenya belaka. Serta metode-metode pemenuhan tujuannya juga menyertakan intersubyektifitas dan faktisitas sebagai variabel yang penting, bahkan indikator atas tujuan hidupnya bisa jadi melalui faktisitas dan intersubyektifitas yang ia alami tersebut.

Sehingga manusia tidak perlu memaksakan kehendaknya dan tindakan bebasnya kepada orang lain melalui penguasaan-penguasaan, lebih pada berusaha

untuk saling mempengaruhi satu sama lain secara komunikatif, baik dalam ranah memberikan pendapat maupun melakukan tindakan berdasarkan pendapat yang dimiliki oleh orang lain sekaligus juga menjaga pemikiran-pemikiran individualnya yang mempengaruhi tindakannya sendiri.

Dari segi metapolitik, institusi negara merupakan sebuah entitas yang lahir dari intersubyektifitas yang ada di masyarakat. Teori apapun mengenai kelahiran negara selalu menyatakan bahwa negara lahir atas kesepakatan-kesepakatan maupun kontrak sosial dari masyarakat yang membentuknya. Sehingga relasi negara dari individu-individu yang terhimpun di dalamnya adalah negara merupakan sebuah himpunan dari individu-individu tersebut, berjalannya negara berdasarkan konsensus-konsensus dari sebagian atau seluruh (belum ada negara yang berjalan dari intersubyektifitas seluruh individu yang menjadi warganya) individu yang menjadi warga negara tersebut.

Bahwasanya ideologi negara, konstitusi negara, tindakan-tindakan politisi, ahli hukum, aparatur negara dan sebagainya diandaikan merupakan perwujudan dari konsensus seluruh masyarakat yang membentuk negara tersebut, walau mungkin bisa jadi hanya konsensus sebagian masyarakat yang berperan besar dalam membentuk negara, serta tindakan-tindakan para aparatus negara bisa jadi hanya berupa intersubyektifitas para aparatus negara itu sendiri tanpa mengindahkan sebagian besar masyarakatnya.

Karena ini merupakan pembicaraan yang etikal, tentunya pada dasarnya kita akan berbicara pada suatu hal yang sifatnya teleologis, dan bisa jadi, ideal. Pada seharusnya, karena negara dan institusi politik kenegara-bangsaan dan institusi politik apapun lahir dari konsensus-konsensus seluruh pembuatnya (diandaikan seperti idealnya walau faktanya kadang tidak seperti sesuatu yang ideal), maka sudah pada seharusnya negara melakukan sesuatu yang menjadi kehendak masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Tindakan negara pada seharusnya merefleksikan intersubyektifitas dari masyarakat, bukan inisiatif-inisiatif intersubyektif dari para aparatus atau penyelenggara negara. Ideologi-ideologi sekalipun harus dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan intersubyektif dari masyarakat, yakni dari seluruh warga negara baik etnis apapun, jenis kelamin dan gender apapun, kepercayaan atau ketidakpercayaan apapun dan identitas apapun yang melekat padanya.

Sistem yang terjadi seharusnya adalah politik demokrasi deliberatif yakni dimana tindakan merupakan tindakan yang dihasilkan dari intersubyektif masyarakat, sekaligus demokrasi Rancieran dimana tidak ada masyarakat yang diasingkan atau

diliyankan di dalam sistem yang demokratis, apapun itu identitasnya. Sehingga intersubyektifitas ini menghimpun segala subyektifitas yang ada di masyarakat tanpa terkecuali, tidak adanya diskriminasi apapun terhadap segala lini masyarakat dan segala jenis manusia yang ada di dalam negara ataupun institusi politik tersebut.

Pengambilan keputusan yang ada pada negara tersebut harusnya didasari oleh tindakan-tindakan konkrit yang lahir dari intersubyektifitas masyarakat dan perspektifisme segala individual yang ada di masyarakat, sekalipun mereka berbeda dengan mayoritas dari negara tersebut, yakni diberikan ruang-ruang yang setara untuk mewujudkan dan menyampaikan keinginannya, bahkan sampai pada ranah tindakan konkrit. Jika sistem ini dianggap akan membuat kekacauan, tentu tidak, yang dihasilkan adalah harmoni dimana segalanya berbeda dan kacau, tapi juga teratur karena adanya ruang dan waktu tempat segala hal dilakukan secara bersama-sama sekalipun berkontradiksi satu sama lainnya (jika ada dua hal yang berkontradiksi, bisa jadi diberikan ruang yang berbeda sehingga penerapan hal yang kontradiktif tersebut tidak berjalan di suatu ruang dan waktu yang sama).

Sebagai contohnya adalah dimana ada sebuah masyarakat yang memperbolehkan kumpul kebo, dalam sebuah RW, dan ada masyarakat yang tidak memperbolehkan kumpul kebo dalam RW lainnya (anggap saja RW sebelahnya), maka RW yang memperbolehkan kumpul kebo diperbolehkan membuat kebijakannya sendiri untuk masyarakat yang toleran terhadap kumpul kebo, dan RW sebelahnya diperbolehkan membuat kebijakannya sendiri untuk menindak kejadian-kejadian kumpul kebo di wilayahnya. Tentu dengan konsekuensi yang akan diterima oleh masing-masing pihak dalam internalnya sendiri, dan suatu wilayah tidak perlu mengintervensi wilayah lainnya kecuali dalam ranah penyampaian pendapat yang komunikatif dan argumentatif.

Sehingga masyarakat rasional, toleran dan harmonis bisa terbentuk atas intersubyektifitas yang mereka bentuk sendiri tanpa perlu ada intervensi-intervensi dari pihak lainnya, kecuali di ranah-ranah yang memang dibutuhkan intervensi negara jika memang diminta oleh pihak-pihak tersebut, seperti pada ranah kekurangan biaya untuk membuat kebijakan pembangunan ekonomi dan sebagainya.

Segi realpolitik merupakan segi yang cukup kompleks karena etika ini akan mengatur tindakan-tindakan politik yang berdasarkan intersubyektifitas. Namun dasarnya adalah seseorang melakukan tindakan personal politik maupun faksional harus dengan berdasarkan intersubyektifitas dan faktisitas yang dihadapi olehnya.

Pengambilan keputusan-keputusan politik partai, harus memperhatikan setiap pendapat dari seluruh anggota partai yang ada di dalamnya, yakni dengan cara bottom-up diawali dari *level* terendah sampai pada *level* tertinggi yang mengambil keputusan-keputusan strategis berdasarkan informasi dari perwakilan-perwakilan rendah dari partai.

Keputusan mengalir dari bawah, sehingga intersubyektifitas di ranah rendah akan naik menjadi subyektifitas di ranah tinggi, semisal intersubyektifitas para kader di ranting akan menjadi subyektifitas para perwakilan ranting di cabang dan seterusnya, sehingga keputusan partai tidaklah berasal dari intersubyektifitas para petinggi partai atau bahkan subyektifitas seorang atau beberapa orang petinggi partai saja, tetapi lebih kepada partisipasi seluruh kader yang ada.

Mengenai keputusan-keputusan politik personal, secara etis, orang tersebut harus mendengarkan apa yang diminta oleh orang-orang yang dipimpinnya, yakni dengan cara berinteraksi langsung dan melakukan diskursus multilogis untuk menciptakan intersubyektifitas, sehingga ia melakukan manuver politik berdasarkan dengan apa yang diminta oleh orang-orang yang dipimpinnya, sekalipun ia juga memiliki subyektifitas sendiri untuk menafsirkannya berdasarkan situasi yang ia hadapi secara langsung, itupun harus tetap memenuhi inti dari perjanjiannya untuk meneruskan hasil dari diskursus tadi sebagai manuver politiknya dengan semampu mungkin.

Dalam ranah intrik, sebisa mungkin berintrik dengan memperhatikan saran-saran dari kawan politik maupun berusaha untuk mendengarkan apa yang dilakukan maupun dibicarakan oleh lawan politik tentang diri anda. Bahkan, apa yang dilakukan oleh lawan politik sekalipun untuk menjatuhkan seorang lawannya, baik berupa itu fitnah maupun berupa itu pencacian atas kelemahan, tetap saja berasal dari konsekuensi tindakan yang pernah kita lakukan, yakni baik menunjukkan kelemahan ataupun pernah melakukan manuver yang salah sehingga terlihat oleh pihak lawan. Sehingga untuk memperbaikinya, tentu saja mendengarkan dan mengamati apa yang lawan bicarakan tentang kita baik secara langsung maupun tidak langsung (bisa berupa gosip, skandal, fitnah dan sebagainya) adalah langkah yang tepat dan etis sehingga bisa mengambil tindakan yang konsekuensinya efektif dan konkrit terhadap situasi yang dihadapi.

Etika realpolitik eksistensial menurut penulis, dalam memandang intersubyektifitas tetaplah menjadi manusia yang bebas namun menyerahkan dirinya kepada intersubyektifitas, yakni kembali lagi pada totalitas yang didetotalisasi. Kita berhak untuk bergabung dalam intersubyektifitas dan menyerahkan pendapat serta segala hal dalam ranah intersubyektifitas, melakukan tindakan politikpun juga

berdasarkan intersubyektifitas sekaligus subyektifitas kita dalam memandang situasi namun tetap menjaga inti dari intersubyektifitas yang mendasari langkah politik kita.

8. Kebebasan

Salah satu tema sentral dalam eksistensialisme adalah kebebasan. Manusia dikutuk menjadi bebas, kata Sartre. Namun apakah memang benar manusia dikutuk untuk menjadi bebas? Tentu saja ini hanya permajasan belaka, kecuali memang Tuhan ada dan Tuhan menyatakan bahwa kebebasan adalah kutukan atau anugerah Tuhan bagi manusia. Tetapi memang kehendak bebas secara teologis (terutama teologi agama Samawi) berasal dari akal/kesadaran yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Namun apakah manusia benar-benar sepenuhnya bebas? Tentu tidak sepenuhnya, manusia masih dibatasi oleh faktisitasnya, dibatasi oleh kebebasan orang lain maupun dibatasi oleh ketidakmampuannya menjadi keberadaan-di dalam-dirinya yang sempurna dan tidak ada celah atas keberadaannya, sekaligus bebas untuk mengada-untuk-dirinya sendiri dan mampu untuk mengubah bentuk keberadaannya bagi keberadaan-keberadaan lainnya.

Namun dengan kebebasan untuk bertindak demikian, tentu lahir tanggung jawab atas konsekuensi tindakan manusia, karena manusialah yang bertindak sesuatu tersebut, bukan terjadi atas takdir dari Tuhan ataupun kekuatan eksternal lainnya, kecuali faktisitas dan subyektifitas orang lain (semisal seorang manusia tidak akan pernah bisa tidak makan seumur hidupnya karena tubuhnya membutuhkan asupan gizi dari makanan (faktisitas) maupun seseorang yang diikat oleh gerombolan bandit tidak akan dengan mudah bergerak untuk menghabisi gerombolan bandit tersebut (subyektifitas para bandit mengekang subyektifitas orang yang diikat).

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab atas segala konsekuensi yang manusia lakukan, baik kepada diri sendiri maupun kepada makhluk lainnya. Eksistensialisme Sartrean tidak memiliki konsep penyerahan tanggung jawab kepada Tuhan seperti Kierkegaardian. Dalam eksistensialisme Kierkegaardian, segala permasalahan keputusan mengenai kebebasan dan tanggungjawab dapat diselesaikan dengan tanggung jawab sekaligus menyerahkan diri kepada Tuhan yang memberikan kebebasan serta sebab musabab dari keputusan yakni kemampuan manusia untuk mengada bagi dirinya sendiri. Dalam eksistensialisme Sartrean, sepenuhnya tanggung jawab tindakan manusia berada pada manusia yang melakukan tindakan tersebut karena kebebasannya sepenuhnya miliknya sebagai makhluk yang

mampu mengada-bagi-dirinya, dan Tuhan sekalipun ada atau tidak ada (Sartre sendiri merupakan seorang agnostik, yang kabarnya menjelang kematiannya memeluk agama Yahudi walau bukan keturunan Yahudi) tidak mengubah pertanggungjawaban etis manusia atas tindakannya.

Sehingga, tanggungjawab atas kebebasan ini berlanjut menuju janji-janji manusia dalam menjalankan kebebasannya, yakni akan melakukannya dengan konkrit maupun bertanggungjawab atas kebebasannya tersebut.

Eksistensi manusia yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya membuat manusia harus mempertanggungjawabkan tindakan kreatif konkritnya (kreatif disini dimaksudkan adalah kemampuan manusia untuk menginovasikan tindakannya, dimana manusia melakukan evolusi secara cepat dan adaptasi secara cepat untuk melakukan tindakan-tindakan baru yang dimana makhluk lain membutuhkan ribuan tahun untuk menemukan sebuah tindakan baru tersebut, contoh analoginya adalah Simpanse dan Orangutan yang dekat secara genetis dengan manusia sampai sekarang hanya bisa menggunakan peralatan-peralatan yang begitu simplistik seperti tombak untuk memancing ikan, namun masih belum bisa membangun rumah atau menulis seperti manusia walaupun hidup beribu-ribu tahun sepanjang umur manusia, sedangkan manusia dalam jenjang hari maupun tahun, sudah menemukan berbagai tindakan baru yang dapat ia lakukan secara bebas) terhadap dunia, dimana ia bertanggungjawab secara penuh atas kreasi-kreasinya akan tindakan-tindakan baru di dunia.

Kebebasan manusia merupakan sebuah kebebasan yang dapat dibilang hampir-absolut. Manusia mampu untuk melakukan tindakan apapun dan menciptakan tindakan-tindakan baru apapun tersebut, kecuali menjadi Tuhan, yakni memiliki kesempurnaan dalam keberadaannya sekaligus mampu untuk mengada bagi dirinya sendiri. Manusia masih dibatasi oleh celah atas keberadaannya, sehingga ia berubah menjadi keberadaan lain sesuai dengan kebutuhannya, yakni dengan contoh secara simpel, merubah identitasnya saja sudah mengubah eksistensinya.

Namun secara etis, kebebasan tentu harus dibedakan dari kekuatan. Kebebasan jelas mengandung kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau meminta orang lain melakukan sesuatu, namun tidak selamanya harus menggunakan kekuatan (force) untuk memaksa orang lain tersebut. Kekuatan ini bisa berupa kekuatan fisik, kekuatan massa dan kekuatan-kekuatan lainnya, dimana kekuatan biasanya akan menimbulkan efek destruktif bagi kehidupan manusia lainnya. Secara etis sebaiknya kebebasan ini

dimunculkan secara kompromi dimana orang lain mampu untuk mendapatkan kebebasannya dalam intersubjektifitas kebebasan manusia.

Simbiosis mutualisme antar manusia dapat dicapai jika manusia berusaha menghindari kontradiksi antar-sesamanya, dimana kebebasan seseorang yang merugikan kebebasan orang lain sebaiknya tidak dilakukan. Contohnya seperti orang yang memiliki kekuatan untuk membunuh musuhnya, namun musuhnya akan dirugikan yakni kehilangan nyawanya sekaligus seluruh kebebasannya, sebaiknya tidak dilakukan kecuali jika secara konkrit memang berdampak secara baik kepada dunia maupun jangka panjang. Pandangan-pandangan etis mengenai kehormatan dan konsekuensialisme masih digunakan sebagai pandangan utama untuk menjalankan kebebasan manusia.

Memahami tema kebebasan tentu tidak mungkin tanpa memahami tema netralitas, bahwa memahami manusia memiliki kebebasan untuk menentukan nilainya sendiri dan mampu untuk menentukan nilai orang lain selama mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang cukup. Bahwasanya manusia sepenuhnya bebas untuk menentukan apa yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Namun tetap dibatasi oleh konsiderasi etis berupa konsekuensialisme dan kehormatan bagi dirinya. Jika tidak maka kebebasan hanya akan menjadi semacam alat untuk seseorang atau sekelompok orang yang ingin menguasai orang lainnya dan konsekuensinya menghapuskan kebebasan manusia-manusia lainnya demi satu atau sekelompok orang tersebut.

Dalam ranah metapolitik dan politik institusional, etika mengenai kebebasan merupakan sebuah etika yang benar-benar dibutuhkan dalam mengkaji relasi manusia individual dengan masyarakat politis maupun dengan institusi kenegaraan itu sendiri. Berkaitan dengan ideologi, tentu secara etis manusia berhak untuk mengikuti sebuah ideologi ataupun memiliki kebebasan untuk membentuk ideologinya sendiri. Secara etis, penerapan ideologi harus melalui kaidah-kaidah intersubjektif yang mampu untuk mewujudkan adanya kompromi maupun koherensi antara ideologi-ideologi yang diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada. dengan kata lain manusia bebas untuk memilih ideologinya serta bebas untuk mewujudkan ideologinya dengan cara apapun, baik itu melalui tindakan-tindakan demokratis seperti menyampaikan pendapatnya, bergabung dalam partai politik sampai pada ranah yang terkesan tidak demokratis, seperti berperang ataupun melakukan revolusi untuk menerapkan ideologi yang ia inginkan. Sepenuhnya kebebasan ini diserahkan kepada kekuasaan seseorang untuk

mewujudkan kebebasannya, namun secara etis tetap saja sebisa mungkin tidak merusak intersubjektifitas orang lain, yakni dengan tidak menghapuskan kebebasan-kebebasan orang lain untuk mempercayai ideologi yang ia anut. Sekalipun terjadi sebuah revolusi atau pemberontakan, tetap saja ideologi yang menjadi dominan, secara etis tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti ideologinya, hanya melalui interpelasi-interpelasi dan aparatus ideologis untuk mempengaruhi orang lain demi mempercayai ideologinya.

Perbedaannya dengan totalitarianisme penuh yang tidak memberikan ruang pada detotalisasi masyarakatnya adalah dimana pasca-revolusi atau pasca-perubahan sosial, negara dominan hasil dari ideologi dominan harus memberikan ruang-ruang bagi ketidaksepakatan (disensus) masyarakatnya atas nilai-nilai yang ada di negara. Ketidaksepakatan tersebut juga harus ditunjukkan secara konkrit kepada negara, dan negara juga memberikan ruang untuk tindakan-tindakan konkrit orang-orang yang tidak sepakat tersebut. Sehingga segala kebijakan maupun ideologi yang ada di negara, maksimal hanya menjadi hegemonik, bukan uniter dan totalitas penuh atas kebebasan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kebebasan subyektifnya sendiri atas apa yang menjadi narasi besar negara dan memiliki kebebasan untuk mendetotalisasi totalitas yang ada pada sebuah negara dengan ideologinya, sehingga totalitarianisme tidak akan terjadi.

Sedangkan secara institusional, seorang individu dengan negara memiliki relasi resiprokal, dimana seorang individu memiliki kebebasannya sendiri sekaligus pandangan subyektifnya sendiri mengenai negara dan masyarakat, sebuah negara merupakan hasil dari intersubjektifitas yang lahir berkat adanya proses-proses subyektif dari masyarakat. Dengan kata lain, kebebasan negara bertindak juga pada seharusnya bergantung dari kebebasan masyarakat dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak dari negara tanpa terkecuali, yakni dari perumusan diskursus dan narasi besar bagaimana negara harus berjalan, sampai pada ranah detail yakni kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh negara.

Hal ini hanya bisa terjadi jika negara memberikan ruang-ruang deliberasi kepada masyarakat, memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat dengan segala ketidaksepakatannya dan memberikan ruang bebas untuk bertarung dengan negara dominan, menyediakan alternatif-alternatif diskursus maupun ruang-ruang tindakan konkrit untuk membuktikan diskursusnya merupakan tindakan yang benar-benar relevan untuk dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.

Namun tetap saja, harus ada komitmen oleh masyarakat dari nilai-nilai yang disepakati bersama, maupun komitmen pada nilai-nilai yang dibawa oleh kebebasan subyektif masyarakat tersebut. Yakni komitmen untuk mematuhi nilai-nilai yang sesuai, maupun komitmen untuk mengubah nilai-nilai yang tidak disepakati dengan jalan apapun, yakni melakukan pengorganisasian sampai pada revolusi. Namun tetap, pasca adanya pengorganisasian dan cara-cara lainnya, tidak boleh mematikan ketidaksepakatan masyarakat lain yang tidak sepakat maupun rezim yang dijatuhkan.

Membunuh sebuah partai politik atau gerakan sosial dengan cara melarangnya atau memberikan semacam propaganda baik laten maupun manifes atas alasan-alasan ketidaksetujuan dan berusaha menghancurkan langkah-langkahnya bukanlah sebuah tindakan yang etis, karena hal tersebut akan mematikan kebebasan dari orang-orang yang mempercayai ide-ide yang dibawa oleh entitas-entitas tersebut. Bahwasanya manusia memiliki kebebasan yang hampir tidak terbatas, sekaligus mampu untuk mengubah keberadaannya sesuka dirinya, maka kebebasan untuk mengada sebagai anggota partai atau gerakan sosial tersebut dan mempercayai ide-ide yang digagasnya bukanlah sesuatu yang seharusnya dilarang oleh orang lain.

Dari segi realpolitik tentu yang dikaji adalah tindakan-tindakan manusia yang menjadi anggota sebuah masyarakat politis atau aparatus politik dan rezim tertentu. Dalam ranah kebebasan, sudah jelas bahwa manusia individual memiliki kebebasan untuk berideologi apapun, bertindak apapun demi menjalankan keinginan dan kebutuhannya. Dalam ranah realpolitik, berbicara tindakan ideologis tentu harus tidak boleh mengesampingkan kepercayaan-kepercayaan ideologis dari lawan-lawan ideologisnya. Menginterpelasikan lawan ideologis tentu sah-sah saja, namun tidak dengan melarangnya mengikuti ideologi yang ia inginkan. Lebih kepada mengajak untuk mengikuti suatu ideologi yang kita anggap lebih baik daripada lawan kita tanpa perlu melakukan pelarangan bahkan penghancuran kebebasannya dengan cara subtil seperti membuat faktisitas yang membuatnya tidak mungkin menjalankan ideologinya seperti hukum, atau yang ekstrim adalah dengan membunuhnya dan menghabiskan segala kebebasannya kecuali jika memang dalam keadaan perang dan pemberontakan yang sudah dideklarasikan permusuhan.

Dalam segi tindakan intrik, tentu yang dilakukan adalah sebisa mungkin berintrik secara terhormat, yakni dengan berkomitmen atas segala perjanjian dan rule of war yang telah dibuat secara bersama sekaligus berasal dari konsensus masyarakat maupun nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan memperhatikan

konsekuensi jangka panjang dan konsekuensi meluas yang akan dihadapi oleh lawan politik maupun oleh masyarakat. Sehingga kebebasan ini merupakan kebebasan yang bertanggungjawab, komitmen penuh kepada nilai-nilai yang dianut oleh diri sendiri maupun nilai-nilai yang hadir dalam faktisitas masyarakat.



BAB IV

ARTIKULASI NILAI-NILAI ETIS EKSISTENSIALIS SARTREAN PADA
REALITAS KONTEMPORER

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai artikulasi nilai-nilai etis Eksistensialis Sartrean pada realitas kontemporer, dimulai dari artikulasi aksiologis pada praksiologis dan melanjutkannya pada artikulasi praksiologikal atas dilema-dilema etis dan dilanjutkan kepada kondisi kontemporer serta memberikan contoh serta jawaban atas dilema etis yang didasarkan pada contoh kasus-kasus kontemporer.

1. Etika Politik Eksistensial dan Persoalan Kebangsaan

Mengenai bagian ini, cukup berat untuk mengkaji menggunakan perspektif etika politik eksistensial, dimana kita harus melihat secara ontologis dan eksistensial dari ontologi kebangsaan Indonesia itu sendiri. Dalam lingkup ini dibatasi hanya sampai pada ranah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan periode sebelumnya yang berdekatan dengan pembentukan negara ini, tidak sampai pada negara-negara sebelumnya yang hadir dan berdiri di dalam wilayah Nusantara.

Pertama, etika politik eksistensialisme melihat bahwa dalam sebuah masyarakat ada sebuah totalitas yang didetotalisasi. Bahwasanya jika kita melihat Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan sebuah konsensus yang menotal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yakni yang dibuat berdasarkan konsensus para pendiri bangsa pada masa pra dan awal kemerdekaan Indonesia. Ada berbagai penafsiran mengenai pancasila, yakni pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang sangat berbeda satu sama lainnya. Pada masa Orde Lama, Marxisme sangatlah kuat pengaruhnya dalam penafsiran Pancasila¹, bahkan Bung Karno sendiri menyatakan bahwa Pancasila lahir dari proses materialisme dialektika historis yang terjadi di Indonesia.

Pada masa Soeharto, dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwasanya penafsiran Soekarno atas Pancasila adalah penafsiran yang salah, yang benar adalah penafsiran Pancasila Murni ala Soeharto yang menyebutkan bahwa Pancasila harus murni dikaji dari Pancasila itu sendiri. Secara riil, Pancasila memiliki ruang tafsir yang berbeda-beda. Sekalipun Pancasila merupakan sebuah “ideologi negara” yang cukup totalitarian, dimana ideologi apapun harus menasbihkan dirinya merupakan salah satu

¹ <https://indoprogess.com/2016/03/sukarno-itu-kiri-marxis/> diakses pada 14-7-2018 pukul 3:40

penafsiran dari Pancasila (terutama pada masa reformasi², sedangkan pada masa Orba harus seluruhnya Pancasila³, dan pada masa Orde Lama lebih bebas dikarenakan ideologi lain diperbolehkan selama menjalankan dirinya sesuai dengan Pancasila), tetapi tafsir tersebut maupun penerapan ideologi lain pada masa Orde Lama, merupakan disensus atau detotalisasi yang tetap hadir di dalam negara ini.

Secara etis, tidak boleh ada pelarangan ideologi lain dalam bermasyarakat maupun pemerintahan, bahwasanya ideologi apapun, baik Marxis-Leninisme (atau Stalinisme, karena yang menyebutkan Marxis-Leninisme adalah Stalin), maupun Komunisme tidak boleh dilarang di Indonesia. Bahkan radikalisme dan fundamentalisme agama sekalipun tidak boleh dilarang di Indonesia dan harus diberikan ruang untuk hidup dan berdisensus demi detotalisasi kehidupan masyarakat.

Bahkan, Pancasila sekalipun sebenarnya tidak boleh secara etis dijadikan sebuah ideologi tunggal negara. Bahwasanya Pancasila harus berdialektika eksternal dengan ideologi lainnya (sekali pun Pancasila juga mengalami dialektika internal antar-penafsiran dari orang-orang yang menginterpelasikan diri dalam ideologi Pancasila) serta berkontestasi untuk menjadi narasi besar berjalannya Negara Republik Indonesia.

Namun yang ada sekarang, justru Pancasila dijadikan sebuah alat untuk totalitarianisme, dimana muncul peraturan-peraturan pelarangan atas ideologi lainnya, dimulai dari pelarangan partai Masyumi dan PSI di masa Orde Lama⁴, pelarangan PKI dan Marxis-Leninisme di masa Orde Baru, fusi partai menjadi Partai Golkar, PDI dan PPP pada masa Orde Baru dan pelarangan ideologi partai dan organisasi masyarakat selain Pancasila (asas tunggal) di masa Orde Baru dan Reformasi.

Secara etis, jelas, bahwasanya detotalisasi wajib dilakukan dengan tidak melarang adanya disensus dan dialektika, dimana seluruh ideologi yang ada di negara ini tidak boleh dilarang. Selain itu juga organisasi apapun, tidak boleh dilarang selama tidak menysar pada taktik-taktik yang mengorbankan masyarakat (nyawa maupun tubuh) dikarenakan disensus di ranah dialektika idealis diperbolehkan, namun tindakan konkrit adalah komitmen utuh atas totalitarianisme yang oposisional, dimana tindakan konkrit untuk mengganti ideologi negara melalui jalur fisik (seperti pemberontakan) adalah totalitarianisme oposisional yang ingin mengganti total ideologi yang ada

² Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 1985 tentang perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya

⁴ <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/07/21/otf5cp385-pembubaran-masyumi-psi-dan-htikisah-pilu-di-hari-rabu-part2> diakses pada 14-7-2018 pukul 3:54

dengan ideologi yang digunakan sebagai *causus belli* dari pemberontakan tersebut. Tindakan konkrit dengan kemenangan penuh memastikan bahwa sisa sedikit detotalisasi yang akan ada dalam pemerintahan pasca pemberontakan dan sebagian besar isi dari pemerintahan tersebut tidak lain adalah dari pemenang pemberontakan tersebut.

Sehingga, revolusi atau pemberontakan sekalipun, harus tetap didasari adanya perjanjian dan front populer dari ideologi-ideologi yang berbeda dan masing-masing memiliki bargaining position yang setara pra, dalam dan pasca revolusi/pemberontakan tersebut. Dalam ranah Indonesia, hampir terjadi keadaan yang demikian dimana pemerintahan Orde Lama masih memperbolehkan adanya ideologi-ideologi lain non-Pancasila yang disesuaikan dan menyatakan dukungannya kepada Pancasila. Walaupun bukan sesuatu yang optimal dalam detotalisasi, tetapi masih lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru yang melarang segala ideologi lain kecuali Pancasila tafsir dari pemerintah. Namun pada masa Reformasi, banyak celah-celah yang dapat dilakukan yakni penafsiran yang tidak sesuai pemerintah dapat dilakukan selama secara nominal ideologi Pancasila ditasbihkan sebagai asas tunggal organisasi.

Dalam ranah separatisme, juga tidak boleh dilarang selama tidak ada tindakan konkrit yang membarenginya. Gerakan-gerakan separatis yang mengadakan diskusi terbuka, partai kebangsaan di wilayah mereka serta tindakan-tindakan non konkrit-fisikal lain yang separatis lakukan, tidak bermasalah selama tidak berujung pada tindakan fisik ataupun berujung pada tindakan yang menghapuskan keadaan sebelumnya secara total.

Demikian jawaban atas persoalan kebangsaan di Indonesia.

2. Konsiderasi Praksiologis-Elektoral

Dalam bagian ini akan diberikan beberapa konsiderasi praksiologis yakni dalam ranah-ranah praktikal. Dibutuhkan konsiderasi praksiologis agar mempermudah para politisi praktis maupun masyarakat yang berkuat dengan bidang politik praktis-elektoral.

a. Janji dan Kontrak Politik

Mengenai janji dan kontrak politik ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang politisi dalam membuatnya.

Bahwasanya yang pertama adalah sebelum membentuk janji dan kontrak politik, seorang politisi atau masyarakat yang bekerja di ranah politik

harus memahami terlebih dahulu praktikalitas dari janji dan kontrak tersebut. Praktikalitas yang dimaksud adalah apakah janji dan kontrak tersebut mampu untuk dilaksanakan secara riil atau tidak. Bahwasanya janji yang praktikal harus memiliki diksi yang benar-benar konkrit, memiliki target serta mampu untuk dilaksanakan dalam ranah riil dan eksisten secara materiil.

Contoh dari praktikalitas sebuah janji adalah “saya akan berjanji untuk membangun pemasangan Solar Cell untuk pemakaian listrik 500 watt di atas 1000 rumah warga miskin demi menurunkan harga listrik dan mengurangi pengeluaran warga miskin dalam membayar listrik karena mampu untuk memproduksi listrik sendiri bagi rumah mereka masing-masing”. janji demikian adalah janji yang praktikal dan sudah jelas mampu untuk dilaksanakan secara riil selama ada anggaran dan keinginan politis yang cukup untuk melaksanakan janji tersebut. Dibandingkan dengan janji “saya akan berjanji untuk menghapuskan korupsi di Indonesia”, ini bukan merupakan janji yang praktikal dikarenakan tidak mungkin terhapuskan secara penuh korupsi di bagian manapun. Dalam ranah ini, praktikalitas dari janji tersebut tidak ada. dibandingkan dengan janji yang lebih praktikal dalam ranah yang sama seperti “saya akan berjanji untuk membangun sebuah sistem pemerintahan berbasis kecerdasan buatan dimana saya terinspirasi oleh proyek OGAS dan Cybersyn⁵ di masa perang dingin untuk otomatisasi pemerintahan dan menghapuskan korupsi di Indonesia”. Ini janji yang lebih praktikal sekalipun praktikalitasnya cukup diragukan dibandingkan yang sebelumnya. Namun jelas bahwa janji ini tidak termasuk omong kosong sepenuhnya karena masih ada ruang praktikalitas di dalamnya.

Praktikalitas janji berhubungan dengan kemuliaan orang yang akan berjanji. Bahwasanya ia harus benar-benar memperhatikan konsekuensi serta kemampuan dirinya dan situasi dirinya maupun sekitarnya untuk melaksanakan janji tersebut dan memuliakan dirinya sendiri. Tanpa adanya praktikalitas janji maka janji tersebut tidak akan pernah bisa untuk dilaksanakan, konsekuensinya adalah pembuat janji tersebut secara etis memang tidak mulia dari sananya dan hanya membuat janji yang tidak didasarkan pada praktikalitas.

⁵ Gerovitch, Slava. 2008. Internyet : why the Soviet Union did not build a nationwide computer network. London : Routledge. Hlm. 1-15

Selain praktikalitas, janji dan kontrak politik harus memuat totalitas dari masyarakat sekaligus subyektifitas dari pembuat janji. Bahwasanya kontrak dan janji pada umumnya hanya menyertakan totalitas dari masyarakat dimana kontrak dan janji hanya dibuat berdasarkan apa yang diinginkan masyarakat demi mendapatkan popularitas dan kekuasaan politik dari masyarakat. Namun permasalahannya adalah dimana janji-janji yang hanya menyertakan totalitas dari masyarakat belum tentu merupakan sebuah janji yang benar-benar bisa dilaksanakan atau sesuai dengan kebutuhan negara maupun masyarakat pada umumnya.

Seorang politisi yang memiliki subyektifitas tentu harus mampu untuk membentuk pemikirannya sendiri yang menjadi detotalisasi dari totalitas yang berada di dalam perjanjian atau kontrak politik tersebut. Bahwasanya subyektifitas ini harus didasari oleh pemikiran netralitas moral dimana tidak semua “kebaikan” normatif dalam sistem yang ada, yakni demokrasi yang mensyaratkan bahwa keinginan masyarakat seluruhnya harus ditaati oleh institusi politik harus dilaksanakan sepenuhnya. Secara subyektif, seorang politisi juga harus mampu untuk melihat konsekuensi yang paling menguntungkan secara umum sekalipun itu merugikan dirinya dan merugikan masyarakat.

Semisal, dalam ranah ini adalah ketika seorang politisi berjanji untuk mementingkan pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sampah serta membuat pidana-pidana berat tentang membuang sampah sembarangan. Tentu pro dan kontra akan bermunculan, bahkan suatu saat pasti ada yang menyatakan bahwa hukuman yang terlalu berat diaplikasikan kepada perilaku yang tidak terlalu memberikan kerugian. Maupun pengembangan energi terbarukan berpotensi akan mematikan ekonomi masyarakat dan merumahkan jutaan pekerja batu bara maupun sumber energi konvensional lainnya, sekaligus mematikan perusahaan dalam negeri yang masih bekerja dalam ranah batu bara sebagai bidang usaha utamanya dan memberikan suplai batu bara pada listrik nasional. namun apakah konsekuensi-konsekuensi itu memang lebih parah dibandingkan konsekuensi jika tidak melakukan kebijakan tersebut? Pemikiran tentang konsekuensi tersebut akan diserahkan kepada politisi tersebut. Namun politisi tersebut bebas untuk bertindak sesuai subyektifitasnya dan pandangannya atas konsekuensi yang didapatkan oleh seluruh masyarakat.

Namun tetap pada pemikiran dimana konsekuensi yang harus didasarkan adalah konsekuensi yang lebih meluas dibandingkan dengan apa yang ia dapatkan sendiri. Tentu kesialan akan juga didapatkan oleh politisi tersebut, seperti menurunnya popularitas maupun kerugian-kerugian lain. Tetapi konsekuensi yang meluas tetap lebih penting.

Selain praktikalitas dan subyektifitas, tentu komitmen atas janji tersebut harus juga hadir di dalam kesadaran politisi tersebut. Adanya komitmen didasari oleh adanya minat dan keinginan untuk menjalankan janji tersebut. Praktikalitas sekaligus subyektifitas tentu akan membuat janji tersebut dapat dilaksanakan dan politisi tersebut juga berminat untuk melaksanakan. Namun pertanyaannya adalah secara inheren dari politisi tersebut, apakah memang berminat untuk melaksanakan janji tersebut? Problemnya adalah apakah politisi tersebut memiliki nilai-nilai etis dan moralis mengenai komitmen atas janji? Ataukah sepenuhnya pembuatan janji dan kontrak adalah permasalahan hasrat kuasa belaka. Maka jawabannya adalah politisi tersebut harus secara sadar, bebas dan subyektif menyepakati perjanjian tersebut dan memang memiliki ruang untuk melakukan detotalisasi subyektif atas janji tersebut. Dari pembuatan atas janji tersebut memang didasari eksistensialitas dan eksistensielitasnya lahir dari subyektifitas kolektif yang juga diikuti oleh politisi pembuat janji tersebut. Ia harus membentuk janji berdasarkan pembacaan dan refleksinya atas kehidupan yang ada di masyarakat sekaligus pengalaman dan pengetahuan subyektifnya atas permasalahan yang ada di masyarakat. Bahwasanya dasar dari janji tersebut adalah permasalahan sosio-politik-ekonomi yang ada di masyarakat, namun metode dan cara penyelesaiannya maupun aspek detail yang akan diselesaikan melalui janji dan kontrak politik tersebut diserahkan kepada politisi yang ada dengan tetap berkonsultasi dengan masyarakat yang akan terdampak oleh janji dan kontrak tersebut.

Tanpa adanya konsultasi dengan masyarakat dan membentuk dialog deliberatif dengan masyarakat, maka subyektifitas akan penuh bermain di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, bahwasanya akan muncul apa yang disebut Sartre sebagai “Stalinisme” dimana detotalitas berjaya atas totalitas yang ada dalam masyarakat, satu orang mampu untuk memaksa seluruh masyarakat menuruti dirinya. Ketika janji tersebut dilaksanakan dengan metode yang tidak konsultatif dengan masyarakat maka masyarakat hanya memiliki suara dalam

penentuan di awal saja. Namun dalam pelaksanaannya diserahkan secara totalitarian kepada politisi tersebut, baik secara metodis maupun pengorganisasiannya. Alhasil, masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan, tidak ada ruang untuk kritis dan bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan masyarakat tidak diberi ruang untuk mengkritisi hasil dari perjanjian tersebut. Sekalipun tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tetaplah itu dianggap sebagai janji yang “telah ditepati”. Akhirnya muncul totalitarianisme baru dimana sebuah skema keteraturan dibuat melalui janji tersebut tanpa melibatkan detotalisasi sedikitpun dalam prosesnya.

Penulis menyepakati persepsi Machiavellian yang menyatakan seorang raja harus mampu menjadi rubah sekaligus singa⁶. Namun tetap pada ranah konsekuensial dimana politisi juga tidak boleh berubah dari rubah menjadi singa karena kepentingan pribadinya sendiri, namun lebih kepada kepentingan yang lebih luas dibandingkan dengan menyenangkan hati sebagian orang. Ini merupakan ranah subyektifitas, sekaligus juga dalam membentuk dan memproses tindakan konkrit dari sebuah janji juga harus menyertakan masyarakat yang akan terdampak dalam perjanjian tersebut karena juga melibatkan detotalisasi dari masyarakat atas totalitas janji yang dipegang oleh politisi tersebut. Sehingga pada masa janji belum dibuat, totalitas ada di tangan masyarakat, detotalisasi ada di tangan subyektifitas politisi pembuat janji dan sebaliknya pasca janji disepakati oleh kedua belah pihak, totalitas ada di perjanjian tersebut, detotalisasi ada di tangan politisi sekaligus masyarakat yang tentu memiliki cara dan kepentingan masing-masing di dalam perjanjian tersebut. Adanya dinamika antar keduanya akan membentuk detotalisasi atas bagaimana perjanjian seharusnya berjalan.

Demikian pemikiran penulis mengenai perjanjian dan kontrak politik dalam ranah politik elektoral.

b. Tindakan Konkrit

Mengenai tindakan konkrit, setiap tindakan yang dilakukan dalam ranah politik haruslah tindakan konkrit yang memiliki konsekuensi. Bahwasanya setiap subyek politik memiliki impian atas dirinya maupun impian atas masa

⁶ <http://www.constitution.org/mac/prince18.htm> diakses pada 14-7-2018 pukul 3:59

depan masyarakatnya. Namun pertanyaannya adalah apakah mereka mau untuk bertindak secara konkrit dan melakukan sesuatu yang menghasilkan konsekuensi secara konkrit?

Seringkali masyarakat tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya ataupun memperhatikan tujuan dari tindakan mereka tersebut. Bahwasanya tindakan konkrit hanya bisa dilakukan jika memang ada komitmen dari masyarakat atau seorang politisi atas tujuannya. Bahkan tindakan pembiaran maupun tindakan yang hanya sekedar mempengaruhi suatu faksi agar bertindak sesuatu merupakan sebuah tindakan konkrit selama konsekuensinya menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang.

Pertimbangannya tentu pada konsekuensi, apakah konsekuensi tindakan konkrit ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat luas atau tidak. Kritik demikian seringkali diajukan kepada masyarakat milenial dimana masyarakat milenial sering mengeluarkan tindakan yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat seperti propaganda anti-korupsi maupun sebagainya, namun tidak pernah di ranah tindakan konkrit, hanya pada ranah penyebaran hashtag di media sosial ataupun penyebaran informasi secara digital yang tidak berujung pada tindakan di ranah material atau realitas. Bahwasanya tindakan demikian tidak didasari oleh keinginan untuk menghasilkan target yang ada pada tujuan tersebut namun lebih kepada heroisme dan kenafian sepihak.

Tentu, sebuah alat atau tindakan berujung pada ranah eksistensial, dimana seseorang menentukan tindakan tersebut memiliki esensi tertentu. Namun secara eksistensialisme, keberadaan sebuah tindakan ditentukan oleh bentuknya (*appearance constitutes being*) sehingga tindakan tertentu hanya bisa memiliki esensi jika sudah berupa tindakan konkrit. Tanpa adanya tindakan konkrit maka tindakan tersebut adalah tindakan ideal yang tidak akan mencapai esensi seperti yang diimpikan oleh orang yang bertindak tersebut.

Sehingga kebaikan sebaik apapun, tanpa adanya tindakan konkrit tidak bisa dibilang sebagai kebaikan. Ini sama halnya dengan pemikiran Sartre yang menyatakan demikian, sekaligus juga Nietzsche yang menyatakan bahwa tindakan jahat yang konkrit lebih menarik dibandingkan tindakan baik yang ada di awang-awang. Memang benar bahwasanya tindakan yang etis adalah tindakan yang konkrit, bagaimanapun moralitas yang mendasari tindakan

konkrit tersebut, ia lebih etis karena lebih maju dalam mencapai tujuannya dibandingkan dengan tindakan yang tidak konkrit.

Sehingga seorang politisi harus menjalankan apa yang ia cita-citakan secara konkrit, bagaimanapun moralitasnya. Namun harus didasarkan pada konsekuensi dimana seringkali tindakan konkrit yang terjadi di Indonesia adalah tindakan yang konsekuensinya tidak diinginkan oleh setiap orang kecuali orang yang bertindak tersebut seperti korupsi, politik uang dan sebagainya. Orang-orang yang bertindak dengan memikirkan kebaikan moral justru pada masa sekarang semakin lepas dari konkrititas tindakan. Makadari itu tindakan kebaikan di masa sekarang adalah tindakan yang mati dan tidak memberikan dampak signifikan atas konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat luas. Ini berlaku kepada “aktivis” di masa sekarang yang juga harus mementingkan tindakan yang konkrit dan menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Berhubungan juga dengan janji dan kontrak politik, hanya janji dan kontrak politik yang menyediakan ruang bagi tindakan konkritlah yang mampu untuk menghasilkan sebuah tindakan konkrit. Tanpa ruang untuk tindakan konkrit, maka tidak akan pernah ada tindakan konkrit yang mampu untuk dihasilkan.

c. Memerintah

Dalam memerintah, seorang politisi harus berperspektif bahwa orang-orang yang diperintah bukanlah obyek namun subyek yang memiliki kebebasan atas dirinya dan turut serta mendapatkan dampak konsekuensi yang dilakukan oleh politisi tersebut sekaligus juga mempengaruhi kehidupan, lingkungan dan faktisitas dari kehidupan politisi tersebut.

Perspektif demikian hanya ada jika politisi tersebut memandang bahwa seluruh manusia bukanlah keberadaan yang mengada-di dalam-dirinya, namun mengada-untuk dirinya. Sehingga ia mampu memahami bahwa keberadaan setiap orang memiliki potensialitas untuk berubah dalam keberadaannya, bahkan dari seseorang yang lemah sekalipun bisa berubah menjadi seseorang yang suatu saat akan mengancam nyawa orang lain.

Skema keberadaan manusia terikat pada potensialitas atas kebebasan⁷. Manusia memiliki kebebasan penuh untuk bertindak sekaligus memiliki batas yakni faktisitas dan kebebasan orang lain, sehingga politisi yang memerintah juga tidak boleh sewenang-wenang dengan alasan bahwa jika faktisitas akan merugikan politisi sewenang-wenang tersebut, maka keadaan akan terbalik. Sejarah mencatat demonstrasi maupun pemberontakan muncul atas pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya absolut. Bahwasanya lupanya seorang pemimpin atas kemanusiaannya dan eksistensialitasnya akan membawa dirinya pada kehancuran suatu saat nanti.

Namun, selain itu juga manusia yang keberadaannya tidak menjadi pemimpin dari manusia lainnya juga harus disertakan dalam merumuskan kebijakan tertentu karena iapun memiliki kebebasan dan kesadarannya sendiri. Pemikiran reflektifnya akan memberikan sudut pandang yang berbeda atas suatu kebijakan dibandingkan dengan manusia lainnya dengan refleksi dan pengalamannya masing-masing.

Otoritarianisme dalam ranah ini tentu tidak boleh dilakukan, namun balance of power ada di 2 sisi, yakni pemerintah dan masyarakat yang saling berdialektik satu sama lainnya dan membentuk totalitas yang didetotalisasi dalam ranah pemerintahan. Kritik dari masyarakat maupun gerakan populer adalah detotalisasi dari rezim pemerintah beserta masyarakat yang mendukungnya.

Namun tetap tindakan konkrit dari kedua belah pihak yang menentukan. Sekalipun depolitisasi dan mematikan ruang-ruang tindakan konkrit dengan represi atau memberikan “ruang palsu” dan kesadaran palsu tentang konkrititas tindakannya, mampu dilakukan oleh pemerintah maupun rezimnya, tetapi hal ini tidak sebaiknya dilakukan secara etikal. Kecuali konsekuensinya memang diperlukan oleh sebagian besar orang dan konsekuensi baiknya lebih besar dari buruknya.

d. Kampanye

⁷ Nichols, Craig M. 2000. Primordial Freedom : The Authentic Truth of Dasein in Heidegger's 'Being and Time'. Thinking Fundamentals, IWM Junior Visiting Fellows Conferences, Vol. 9. Hlm. 2-3

Dalam berkampanye, seorang politisi yang eksistensial harus melibatkan masyarakat. Bahwasanya masyarakatlah yang mendesain kampanyenya sesuai dengan segmen dan kebutuhan masing-masing. tentu ini tidak praktikal di ranah awal kampanye, namun semakin besar pendukungnya, maka semakin praktikal untuk digunakan cara ini.

Masyarakat non-partisan dilibatkan untuk mendesain, menyatakan apa yang mereka inginkan dan mengorganisir tindakan konkrit perbaikan suatu wilayah mengatasnamakan politisi tersebut dengan bantuan baik aktif maupun pasif (namun berupa material) dari politisi tersebut, yakni masyarakat mendapatkan keuntungan untuk wilayahnya sekaligus memiliki kebebasan untuk membentuk kebijakan kecil-kecilan dan mendapatkan pendidikan politik di wilayahnya, politisi mendapatkan konsekuensi yakni keuntungan popularitas.

Seringkali kampanye hanya memandang sisi entertain dari masyarakat, namun exercise of freedom dari masyarakat tidak diperhatikan. Bahwasanya masyarakat hanya dianggap membutuhkan hiburan belaka dan diberikan hiburan yang disukai dan diberikan kesadaran palsu atas apa yang akan dilakukan oleh politisi tersebut serta janji-janji tidak konkrit.

Ini merupakan cara yang tidak etis karena tidak memiliki nilai teleologis sedikitpun. Pada seharusnya, kampanye dilakukan dengan dialektika kebebasan antara simpatisan dengan politisi tersebut, sekaligus masyarakat yang non-simpatisan juga turut serta dalam mempengaruhi dan membentuk kampanye dan format kampanye dari politisi tersebut sehingga lebih mengena kepada masyarakat.

3. Pembacaan Kondisi Kontemporer

Dalam ranah kondisi kontemporer ada beberapa aspek yang akan dikaji di dalam skripsi ini yakni :

- a. Terorisme

Selama ini terorisme tidak pernah didefinisikan secara rigid oleh orang-orang yang membicarakannya. Rata-rata terorisme hanya dikaitkan dengan gerakan pengeboman atau tindakan pembunuhan massal yang dilakukan oleh kelompok religius tertentu terhadap orang-orang yang tidak bersalah.

Menurut Schmid, definisi terorisme adalah sebuah metode yang didasari oleh kegelisahan tertentu dimana adanya tindakan kekerasan yang dilakukan berulang-ulang oleh sebuah kelompok atau individu yang bersifat klandestin (bergerak secara rahasia) dan memiliki alasan-alasan ideologis, politis atau kriminal. Gerakan ini berbeda dengan pembunuh bayaran dimana terorisme tidak membunuh targetnya namun menggunakan pembunuhan atau teror sebagai sarana untuk memaksa targetnya memenuhi tuntutan tertentu. Korban terorisme biasanya dipilih secara umum dan tergeneralisir, korban hanya digunakan sebagai sebuah pesan kepada target untuk tindakan-tindakan koersif dari teroris itu sendiri⁸.

Terorisme tidak selalu berkaitan dengan alasan religius maupun didasari oleh keresahan-keresahan yang berkaitan dengan agama-agama tertentu. Namun terorisme adalah sebuah metode yang mendasari adanya sebuah gerakan teroris. Apapun ideologi dan alasan mereka melakukan terorisme, ketika sebuah gerakan menggunakan metode yang ada di atas maka gerakan tersebut dapat disebut sebagai gerakan teroris.

Selama ini yang dikaitkan oleh masyarakat mengenai terorisme adalah sebuah gerakan teroris yang berkaitan dengan religiusitas tertentu terutama di Indonesia adalah terorisme Islam. Berita-berita dalam media selalu mengkaitkan adanya sebuah gerakan fundamentalis Islam yang menggunakan metode teror atau akan berpotensi untuk menggunakan metode teror dalam mencapai tujuannya.

Di satu sisi teror tidak selalu berkaitan dengan kekerasan fisik. Propaganda-propaganda yang bersifat represif sekalipun juga sama dengan teror. Semisal adanya gerakan terorisme yang berusaha untuk menekan pihak lain dengan penggunaan teror nonkekerasan. Propaganda-propaganda terorisme nonkekerasan bisa terlihat lebih subtil dibandingkan propaganda terorisme dengan kekerasan. Metode-metodenya bisa dengan cara melakukan infiltrasi

⁸ Schmid, Alex. 2004. Terrorism - The Definitional Problem. 36 Case W. Res. J. Int'l L, 2004, hlm.9

terhadap sebuah masyarakat tertentu dan memasukkan teror-teror ke dalam pemikiran masyarakat tersebut seperti menakut-nakuti akan adanya sebuah musuh bersama yang imajiner atau memberikan pandangan bahwa segala kesalahan dalam kebijakan atau politik adalah akibat salah satu golongan atau ideologi tertentu.

Ini merupakan sebuah teror yang lebih kuat dibandingkan hanya sekedar teror menggunakan kekerasan, walaupun metode nonkekerasan cenderung lebih lambat dibandingkan metode kekerasan dalam menciptakan teror. Namun gerakan teror yang menggunakan metode nonkekerasan akan mendapatkan simpati lebih besar dan basis massa dibandingkan dengan gerakan teror yang menggunakan metode kekerasan karena memberikan kesadaran kepada massa dan subyek ideologi terlebih dahulu dibandingkan langsung memberikan kesan teror kepada orang diluar gerakan teror tersebut.

Bagi etika politik eksistensial, terorisme boleh dilakukan selama konsekuensi yang dihadapinya memang benar-benar dibutuhkan secara luas. Mudah-mudahan, terorisme dapat dijadikan sebuah pilihan taktis untuk melawan rezim represif, seperti rezim Nazi atau Orde Baru. Sartre sendiri berpartisipasi sebagai tentara Perancis dan anggota partisan pada Perang Dunia ke 2 dan melakukan perang serta aksi teror melawan tentara Nazi Jerman. Kekerasan maupun tindakan membunuh orang lain boleh dilakukan selama konsekuensinya memang diharapkan. Kekerasanpun juga termasuk tindakan konkrit dibandingkan dengan tindakan propaganda belaka, sehingga memiliki dampak yang lebih signifikan sebagai pilihan taktik dari gerakan politik atau sosial.

Bahwasanya gerakan-gerakan teror berbasis agama di dunia (termasuk di Indonesia) melakukan tindakan yang diperbolehkan namun tidak konkrit. Kekerasan yang konkrit adalah kekerasan yang secara strategis dan taktis memberikan dampak signifikan kepada lawannya. Dengan melakukan pengeboman terhadap masyarakat sipil dan institusi agama lain bukanlah cara yang efektif untuk mendapatkan simpati warga atau menyebar teror di masyarakat.

Cara yang lebih efektif adalah untuk mendapatkan simpati warga, semisal membunuh pejabat korup, mengebom gedung-gedung pemerintahan pusat yang terkenal korup (seperti DPR Pusat) , atau kalau ingin menciptakan

teror yang berkepanjangan adalah seperti melakukan pengeboman pada institusi ekonomi yang penting contohnya bursa efek Indonesia dan sebagainya.

Sehingga netralitas moral kita tetap aplikasikan kepada analisis terhadap terorisme ini, mereka bisa jadi adalah gerakan yang tidak benar-benar serius untuk destabilisasi negara maupun menyebarkan ideologinya kepada masyarakat, atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas itu. Karena secara ideologis sekalipun, tidak ada larangan untuk pengeboman kepada institusi pemerintah dan terutama institusi ekonomi yang tidak terlalu ketat penjagaannya, namun berdampak jauh lebih luas dibandingkan institusi agama atau fasilitas masyarakat.

Tetapi tindakan terorisme harus benar-benar dihitung konsekuensinya, apakah memang dibutuhkan tindakan konkrit yang keras untuk menghantam rezim yang sama-sama kerasnya, atau tidak.

b. Hukum

Dalam pemikiran Kelsenian, seseorang bisa membuat sebuah hukum tertentu berdasarkan kewenangan yang ia miliki. Wewenang menurut Kelsen hanya diberikan melalui tatanan normatif yang valid. Sehingga perintah yang mengikat hanyalah perintah yang lahir dari seseorang yang diberi kewenangan oleh tatanan normatif yang valid tersebut terlepas dari dia mampu menjalankan kekuasaannya ataupun tidak⁹.

Sub-bagian ini akan berusaha menjabarkan bagaimana kewenangan seseorang muncul, apakah benar memang tiba-tiba datang dari sebuah tatanan normatif yang valid ataupun ia mendapatkan dari hal-hal yang lain. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sebuah tatanan dapat dikatakan valid.

Nietzsche berpendapat bahwa nilai dan norma atau tatanan-tatanan masyarakat tertentu secara genealogis dibuat oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Menurutny orang-orang yang kuat dan kuasa inilah yang mampu untuk membuat sebuah tatanan yang diyakini dan ditaati oleh orang-orang lainnya. Tanpa adanya kekuasaan tertentu maka tidak mungkin orang lain akan mau untuk menaati apa yang dikehendaki oleh orang-orang kuat ini.

⁹ Patterson, Edwin W. 1952. Hans Kelsen and His Pure Theory of Law, California : California Law Review, 1952, hlm.8

Kekuasaan ini dapat berupa kekuasaan fisik maupun kekuasaan dalam bentuk lainnya. Namun kekuasaan ini harus mampu untuk merundukkan orang lain ke dalam kekuasaannya baik melalui mengalahkannya maupun melalui menjadikannya sebagai kawan. Cara-cara untuk mendapatkan kekuasaan ini dapat berupa cara-cara yang cepat dan lugas maupun cara-cara yang sublim. Cara-cara yang cepat dan lugas bisa berupa melalui konflik fisik maupun melalui perdebatan dan pendekatan secara langsung, cara-cara yang lebih sublim bisa melalui pendisiplinan dan biopolitik¹⁰.

Seseorang bisa mendapatkan kewenangan melalui sebuah mekanisme politik tertentu, namun mekanisme politik tertentu ini tidak tiba-tiba saja muncul. Mekanisme politik ini merupakan sebuah konsensus di masa lalu oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama baik di masa itu maupun masa depan. memastikan bahwa kepentingan tidak akan hilang melalui sistem yang buat tersebut. Permasalahannya adalah sekarang banyak orang yang menganggap sebuah sistem politik yang sudah lama mapan pada suatu negara muncul tiba-tiba dan tidak mampu untuk mengurai alternatif-alternatif sistem yang ada.

Semisal, banyak di Indonesia meyakini bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang terbaik hanya karena pada masa hidupnya hanya mengalami sebuah sistem politik yaitu demokrasi. Pendisiplinan yang sudah mengakar dalam waktu yang lama di sebuah masyarakat ini mampu untuk memberikan kesan mistis kepada orang-orang yang mendapatkan kekuasaan melalui sebuah sistem politik tertentu. Sebagian besar masyarakat tentu memiliki kesan sungkan maupun segan terhadap para politisi yang sudah mendapatkan statusnya, baik itu melalui cara yang patut disegani maupun tidak. Namun legitimasi dari sistem yang sudah mampu untuk mendisiplinkan masyarakat ini tetap melekat kuat di dalam dirinya dan mampu untuk memunculkan kesan kuasa dan kewenangan untuk melakukan sesuatu atas nama masyarakat.

Logikanya, masyarakat sipil dengan masyarakat politis sama-sama manusia dan setara. Seseorang yang menjadi tukang becak dengan yang menjadi seorang politisi merupakan sama-sama manusia walaupun spesifikasinya berbeda. Seringkali seorang akademisi hukum maupun

¹⁰ Foucault, Michel. 2003. Society Must be Defended. New York : Picador. hlm.246

akademisi politik lebih memiliki kompetensi di bidang-bidang yang seharusnya dikuasai oleh pembuat hukum maupun para politisi dibandingkan pembuat hukum dan politisi itu sendiri. Bagaimana bisa orang-orang yang secara merit lebih memiliki kemampuan dibandingkan orang-orang tertentu justru tidak memiliki kewenangan dan kebebasan apapun di dalam bidang yang mumpuni.

Permasalahannya adalah pada konsep kewenangan. Konsep kewenangan ini memberikan legitimasi kepada orang-orang yang sudah melalui proses politik tertentu dan lolos sesuai dengan kriteria proses politik tersebut. Proses politik yang akan memberikan kewenangan kepada seseorang tersebut mengabaikan kriteria-kriteria lainnya yang mungkin justru akan membantu seseorang tersebut di dalam menjalankan tugasnya pasca proses politik.

Kewenangan ini memberikan seseorang kekuasaan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu atas nama orang banyak, yaitu membentuk hukum dan kebijakan politik. Kekuasaan yang berasal dari kewenangan ini merupakan kekuasaan yang legitim dan tidak perlu dipertanyakan. Kekuasaan ini merupakan salah satu bentuk dari otoritas politik yang dijelaskan oleh Huemer. Dengan penjelasan yang diberikan oleh Huemer, otoritas politik mampu untuk membuat masyarakat tunduk dan patuh dan siap untuk melaksanakan perintah dari otoritas politik tersebut dengan bahagia.

Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat justru tertarik untuk melakukan perintah yang berasal dari kewenangan tersebut. Karena jika pikir baik-baik dengan menyejajarkan orang-orang yang memiliki kewenangan tersebut dengan sebagai sama-sama manusia dengan segala kualitasnya maka tidak akan mau untuk melakukan perintah tersebut.

Menurut penelitian ini jawabannya adalah melalui pendisiplinan. Menurut Foucault, pendisiplinan berarti membuat tubuh seseorang menjadi jinak dan mudah dikendalikan¹¹. Seseorang dibiasakan untuk menjadi jinak terhadap perintah orang-orang yang memiliki otoritas politik melalui penjinakan yang bersifat stimulatif. Masyarakat dijinakkan terlebih dahulu secara individual melalui rasa nasionalisme dan group-feeling tentang masyarakat dan negara yang ikuti terlebih dahulu. Masyarakat ditekan bahwa tunduk terhadap perintah berarti adalah manusia yang terhormat dan

¹¹ Foucault, Michel. 1995. Discipline and Punish. New York :Vintage Books. hlm.137

memiliki loyalitas serta integritas terhadap apa yang yakini. Di satu sisi orang-orang yang tidak taat terhadap perintah disebut dengan orang-orang apatis sampai dengan pengkhianat yang berarti tidak memiliki integritas apapun di dalam dirinya.

Seseorang didisiplinkan melalui hal-hal yang sederhana, melalui gerakan hormat bendera dan pemimpin di saat upacara sampai kepada hal yang sistemik seperti kurikulum pelajaran yang menekankan bahwa harus terdisiplinkan terhadap suatu hal tertentu. Ketika tubuh sudah bermetamorfosis menjadi jinak, maka perintah apapun yang dilakukan oleh orang yang terlegitimasi melalui proses politik sistemik tersebut akan dilakukan dengan bahagia. Bahkan sampai pada *level* ekstrimnya ketika metamorfosis ini telah sempurna, tidak melakukan perintah tersebut justru akan membuat dia sendiri tersiksa. Muncul sebuah perasaan bersalah ketika ia tidak menjalankan perintah tersebut, sekalipun perintah tersebut bertentangan secara langsung dengan apa yang seharusnya terjadi.

Sama halnya dengan yang terjadi sekarang, banyak politisi yang membentuk peraturan perundangan yang bertentangan baik dengan budaya masyarakat maupun ideologi negara. Namun belum tersentuh apapun karena memang memiliki kewenangan untuk itu. memiliki kewenangan yang tidak mampu untuk dipertanyakan maupun dikritisi secara efektif. Kritik yang dilakukan oleh masyarakatpun sifatnya dikembalikan lagi kepada pemilik kewenangan tersebut maupun mekanisme politik dan hukum ataupun diberikan kepada pemilik kewenangan lain yang memegang lembaga tertentu sesuai dengan mekanisme politik dan hukum yang ada. masyarakat sendiri yang tidak memiliki kewenangan tidak mampu untuk merubah kebijakan maupun peraturan perundangan yang dibuat kecuali melalui mekanisme yang ditentukan oleh para pemegang kewenangan dan dijalankan sendiri oleh para pemegang kewenangan.

Ini merupakan suatu hal yang absurd, dimana masyarakat yang menjadi mayoritas di sebuah negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dan negaranya kecuali melalui mekanisme dan sistem yang ditentukan oleh segelintir orang yang memiliki kewenangan tertentu. Lebih tepatnya adalah melalui kekuasaan tertentu, karena menciptakan sebuah kewenangan dan sistem yang mendasarinya membutuhkan kekuatan yang besar yang mampu untuk

mengikat masyarakat luas untuk menurutinya serta mendisiplinkan masyarakat yang luas agar tunduk dan merasa tidak ada alternatif lainnya.

Nietzsche memberikan sebuah jawaban yang lugas dan tegas mengenai bagaimana kewenangan ini muncul. Ia menyatakan bahwa moral ditentukan oleh orang-orang yang kuat atau memiliki kekuasaan tertentu. Ia juga menyatakan bahwa moral dibentuk untuk menjaga kepentingan dari pemegang kuasa tersebut dan menciptakan moralitas lain bagi orang-orang yang lemah agar mudah ditundukkan oleh orang-orang yang kuat.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang mayoritas dan lemah moralitasnya didasarkan pada kepatuhan atas perintah maupun hukum yang ada dan menjalankan hidupnya demi kebaikan bersama melalui kerja-kerja sosial dan membangun negara yang ada. di satu sisi orang-orang yang kuat atau masyarakat politis dan pelaku sektor swasta yang berada di *level* atas memiliki moralitas yang berbeda dengan masyarakat luas. memiliki moralitas untuk melakukan amal, menciptakan peraturan perundangan yang mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat melalui perintah-perintah terhadap aparaturnya keamanan yang anggotanya diambil dari masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya para pemegang kekuasaan hanyalah memberi perintah kepada masyarakat yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri. Pemegang kekuasaan memiliki posisi panoptik di dalam skema kewenangan ini. memiliki kemampuan untuk membuat, mengawasi dan membatalkan (selama tidak ada suatu *force majeure* tertentu) peraturan perundangan maupun kebijakan publik tertentu. Merekapun juga mengandalkan masyarakat sebagai pekerja di ketiga hal ini. mengandalkan intelektual-intelektual masyarakat untuk membentuk legitimasi akademis atas pembuatan peraturan perundangan maupun kebijakan publik, mengandalkan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan maupun untuk membatalkan suatu peraturan perundangan maupun kebijakan publik tertentu.

Kewenangan yang memberikan kekuasaan bonus kepada para orang-orang kuat ini membutuhkan sebuah dasar. Dasar dimana masyarakat bisa ditundukkan dan dengan sukarela melaksanakan kewenangan ini. Dasar ini dapat berupa kekuasaan fisik, kekuasaan intelektual seperti ideologi maupun kemampuan retorika dan kemampuan mempengaruhi orang lain, dan dasar

situasional dimana seseorang mampu untuk memposisikan dirinya di dalam situasi politik tertentu.

Kesimpulannya adalah kewenangan secara ontologis dibuat oleh beberapa orang tertentu yang membuat sistem demi kepentingan dan menjaga keterlangsungan kepentingan di dalam proses politik maupun pembentukan peraturan perundang-undangan agar tetap seiring dengan kepentingan.

Dengan adanya kewenangan, sebuah tindakan dapat dilakukan oleh seseorang dengan bebas dibandingkan dengan orang lain. Maka satu-satunya cara untuk membentuk masyarakat yang detotalisasi adalah dengan menyertakan masyarakat dalam kewenangan tersebut atau sebaliknya, membatasi kewenangan sehingga tidak ada yang bisa bertindak suatu tindakan tertentu. Seperti halnya tidak adanya pelarangan suatu ideologi, maka pemerintah tidak akan bisa menindak suatu ideologi tertentu yang dianggap berlawanan dengan pemerintah. Jika ada peraturan yang membatasi kewenangan pemerintah untuk bertindak sesuatu, maka itu adalah pembatasan totalitarianisme pemerintah.

Di satu sisi, masyarakat yang dilibatkan di dalam perumusan kewenangan dan perjalanannya akan memberikan ruang detotalisasi bagi pemerintahan dan skema kewenangan yang ada di dalam sistem hukumnya. Mengembalikan masyarakat sebagai subyek yang sejati merupakan tindakan yang mampu untuk secara etis mengembalikan etika totalitas yang didetotalisasi serta kebebasan dan subyektifitas di ranah perumusan dan penegakan hukum dan kebijakan publik di dalam masyarakat.

c. Deliberativisme

Skema perumusan kebijakan dan hukum yang memberikan ruang bagi detotalisasi adalah demokrasi deliberatif. Tanpa adanya deliberasi kepada masyarakat maka yang hadir adalah obyeksifikasi masyarakat dan totalitarianisme pemerintah. Di bawah ini akan diberikan beberapa skema deliberatif yang cocok untuk diterapkan menurut penulis.

Menurut Fishkin, deliberasi adalah salah satu bentuk dari penyelesaian konflik alternatif¹² dimana negara berusaha untuk berkonsultasi dengan publik dengan cara-cara yang memang memperhatikan opini dari publik itu sendiri. Tentunya dalam membuat sebuah kebijakan publik yang baik adalah mendengar apa keinginan publik langsung dari publik itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui, menurut penelitian ini demokrasi kita menggunakan sistem representatif yang dikatakan oleh Habermas merupakan sebuah demokrasi yang prosedural¹³. Mengapa dinyatakan prosedural adalah karena untuk pembuatan keputusan tertentu perlu mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Demokrasi prosedural ala Habermas bukanlah demokrasi yang efektif, namun hanya lip service belaka bagi nilai-nilai demokrasi maupun orang-orang yang menginginkan demokrasi.

Kembali pada konsep deliberatif, menurut Habermas apabila kita ingin membentuk sebuah demokrasi yang deliberatif tentunya membutuhkan sebuah politik yang komunitarian¹⁴. Dimana demokrasi deliberatif akan sangat berhubungan dengan sebuah komunitas yang etikal. Konsepsinya adalah dimana ada sebuah komunitas yang etikal mengenai sebuah isu tertentu atau dengan lingkungan sekitar dan hajat hidupnya tentunya pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan komunitas tersebut dengan sangat mudah mampu untuk melakukan konsultasi dan deliberasi mengenai apa kebijakan yang mereka inginkan, desain kebijakan yang akan dilakukan maupun partisipasi aktif mereka baik dalam perumusan, pembentukan, pengejawantahan dan pengawasan dari kebijakan itu sendiri dan partisipasi aktif mereka dalam memelihara hasil konkrit dari kebijakan itu sendiri¹⁵.

Demokrasi kita yang sekarang proseduralis ini memberikan sebuah jarak antara masyarakat sipil yang memiliki sebuah daerah tertentu dan konsen terhadap sebuah isu tertentu dengan masyarakat politis yang belum tentu memahami tentang daerah maupun isu tersebut namun memiliki kewenangan yang sangat absolut mengenai keputusan yang dapat dilakukan mengenai isu

¹² Fishkin, James. 2010. *Making Deliberative Democracy Practical : Public Consultation and Dispute Resolution*. Ohio : Ohio State University. hlm.1

¹³ Habermas, Jorgen. 1994. *Three Normative Models of Democracy*, Oxford : Blackwell Publishers. hlm.1

¹⁴ Ibid. p.4

¹⁵ Cooper, Terry L. 2010., *Building Ethical Community*. SAGE. hlm.10

dan daerah tersebut walaupun tanpa berkonsultasi dengan masyarakat daerah tersebut ataupun para stakeholder yang berkaitan dengan isu tersebut.

Mengapa dikatakan proseduralis adalah karena para komunitas masyarakat yang lebih dekat ataupun lebih memahami dan terkenal sebuah isu tersebut harus melewati prosedur-prosedur tertentu untuk melakukan penyikapan ataupun pengejawantahan kepentingan mereka atas kebijakan-kebijakan tertentu yang berkaitan dengan daerah atau masyarakat mereka sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam berpartisipasi pada pembuatan kebijakan publik masyarakat harus melalui lembaga terkait seperti lembaga permusyawaratan masyarakat kelurahan, kecamatan maupun kota dan itupun hanya memiliki kewenangan yang sifatnya rekomendatif saja. Lembaga-lembaga permusyawaratan ini hanya memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi maupun memberikan pengawasan dengan dibantu SKPD terkait tanpa memiliki kewenangan apapun untuk membentuk secara konkrit, mengatur mekanisme pembuatan kebijakan, mengatur desain dan implementasi kebijakan maupun melakukan koreksi dan pengawasan secara konkrit dan independen. Dengan kata lain kekuatan masyarakat yang berusaha untuk mengawasi pembuatan kebijakan sangatlah minim dibandingkan pembuatnya.

Di satu sisi adanya representasi dari segelintir orang atas masyarakat memberikan ruang yang luas bagi mereka untuk membuat kebijakan secara sewenang-wenang. Representasi dari masyarakat ini memiliki kewenangan yang sangat besar dibandingkan masyarakatnya. Merekapun bisa membuat kebijakan tanpa berkonsultasi dengan masyarakat mengenai desain dan idenya sejak awal. Mereka hanya melakukan sosialisasi saja kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut dan menutup sekecil apapun ruang partisipasi atas kebijakan tersebut.

Sebenarnya awal mula dari kondisi yang demikian ini adalah akibat pemikiran Lockean yang menyatakan bahwa pada mulanya manusia berasal dari keadaan yang saling membantu satu sama lain. Lalu muncul seseorang yang melanggar hukum alam yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam bentuk nurani manusia dan mengharuskan manusia untuk membuat kontrak sosial yang berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk menghukum orang yang melanggar hukum alam tersebut.

Tentunya pemikiran demikian secara praksis benar adanya, karena tidak mungkin setiap orang mampu untuk menahan beban moral dalam menghukum orang lain tersebut. Seseorang yang mengenal orang yang mau dihukum tersebut dengan baik tentu tidak akan bisa untuk menghukumnya dengan adil, di satu sisi orang-orang yang memiliki perasaan halus terhadap orang lain walaupun tidak kenal sekalipun tidak akan mampu menghukum orang yang melanggar hukum alam tersebut dengan adil.

Selanjutnya adalah pemilihan seseorang atau beberapa orang yang memiliki kewenangan untuk menghukum orang yang melanggar hukum alam tersebut dilakukan oleh setiap orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Lalu orang itu akan memiliki kewenangan untuk menghukum dan menentukan hukuman apa yang pantas bagi seseorang yang melanggar hukum alam tersebut. Dengan kata lain kemampuan dan kewenangan masyarakat yang mampu untuk menghukum dan menentukan hukuman apa yang pantas bagi seseorang yang melanggar hukum alam tersebut diberikan sepenuhnya kepada beberapa orang yang dirasa mampu untuk menanggung beban yang berat tersebut.

Akhirnya orang itupun dihukum secara adil oleh beberapa orang yang menentukan hukuman serta menghukum orang yang melanggar hukum alam tersebut. Namun seiring berjalannya waktu keputusan-keputusan demikian tidak hanya berhenti dalam tahap menghukum orang lain saja, namun membentuk hukum-hukum baru yang berbeda dengan hukum alam seiring berjalannya masyarakat menuju tahap yang lebih maju dan membentuk kebijakan-kebijakan yang dirasa diperlukan oleh masyarakat.

Tentunya ini didasarkan pada pemikiran Locke bahwa manusia pada dasarnya (*natural state of man*) saling membantu satu sama lainnya dan memiliki hasrat untuk berbuat baik satu sama lainnya. Secara praksis sistem hukum kita mendasarkan diri pada pemikiran ini dimana Kelsen menyatakan dalam bukunya bahwa hukum yang positif hanya bisa mengada karena tindakan orang-orang yang berwenang tersebut.

Sama halnya dengan parlemen dan eksekutif, masyarakat memilih mereka untuk merepresentasikan masyarakat. Mereka memiliki kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yaitu membentuk hukum bagi mereka, masyarakat mereka ataupun orang-orang yang berkontrak sosial untuk menyepakati hukum tersebut dan membatalkannya, mereka memiliki

kewenangan untuk menentukan sanksi ketika seseorang melanggarnya dan mereka juga memiliki kewenangan untuk menyanksi orang-orang yang melanggarnya terlepas dari pelanggaran tersebut adalah karena ketidaksetujuan orang-orang yang melanggar akibat tidak dilibatkannya orang-orang yang melanggar ini dalam kontrak sosial yang memunculkan hukum tersebut.

Mereka juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan atas nama masyarakat yang tinggal di sebuah daerah, membatalkan kebijakan tersebut, mewakili masyarakat untuk meresmikan maupun menentukan desain dari awal sampai implementasi dan menentukan target keberhasilan sebuah kebijakan walaupun mereka terkadang bukanlah orang-orang yang tinggal di daerah tersebut dan mengalami dampak positif maupun negatifnya.

Selain itu juga mereka memiliki kewenangan untuk bersuara atas masyarakat tanpa mengindahkan apakah itu memang suara masyarakat ataupun kebalikan dari suara masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terkadang ketika masyarakat politis menginginkan perang di negara lain ataupun perang melawan masyarakatnya sendiripun masyarakat politis ini merasa bahwa mereka memiliki kewenangan untuk itu dan suara masyarakat yang sah masih mereka pegang dan memiliki otoritas yang sudah pasti dilakukan oleh masyarakat walaupun berlawanan dengan mayoritas suara masyarakat yang ada.

Ketimpangan-ketimpangan wewenang inilah yang memberikan sebuah alasan mengapa demokrasi representatif yang prosedural harus segera digantikan dengan sistem yang lebih baik. Sebagaimana kita ketahui pada nyatanya bahwa keadaan alamiah manusia milik Locke tidak sepenuhnya benar. Bahkan kita bisa menyatakan bahwa keadaan alamiah manusia milik Hobbes lebih benar dibandingkan Locke.

Menurut Hobbes kondisi alamiah manusia adalah setara satu sama lainnya. Tidak ada perbedaan yang jauh antara satu sama lain walaupun ada perbedaan fisik lebih kuat ataupun lebih lemah, namun yang terlemah sekalipun mampu membunuh yang kuat ketika ia memiliki cara-cara tertentu seperti membunuh diam-diam ataupun bekerjasama dengan yang lainnya yang setara dengannya¹⁶.

¹⁶ Hobbes, Thomas. 1999. *Leviathan*, Oregon : University of Oregon. hlm.76

Karena manusia memiliki kemampuan yang sama satu dengan lainnya akhirnya muncul keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lalu berkonflik satu dengan yang lainnya. Menurutnya ada tiga hal yang membuat manusia berkonflik. Yang pertama kompetisi, yang kedua ketidakpercayaan diri, yang ketiga kejayaan. Konflik yang dihasilkan dari kompetisi akan ditujukan kepada mendapatkan sesuatu, konflik yang dihasilkan dari ketidakpercayaan pada dirinya akan menghasilkan keamanan dan yang terakhir akan menghasilkan reputasi.

Yang pertama akan menggunakan kekerasan untuk mengambil barang milik orang lain, yang kedua untuk melindungi dirinya dan yang ketiga untuk dipuji. Ketika tidak ada kekuasaan yang cukup besar untuk mengawasi dan menahan manusia untuk berkonflik maka akan ada pertempuran dari semua manusia melawan semua manusia (*bellum omnium contra omnes*). Di dalam kondisi tersebut tidak akan ada manusia yang bekerja untuk membangun peradaban manusia. Di dalam kondisi inipun juga tidak ada yang namanya keadilan dimana segala sesuatunya diperbolehkan.

Membunuh orang lain merupakan hal yang sah karena terjadi perang antara manusia dan manusia lainnya tanpa mempedulikan apapun. Menurutnya keadilan itu hanya ada di masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat bukan oleh individu¹⁷. Sehingga untuk menentukan adil atau tidak manusia harus bermasyarakat terlebih dahulu.

Ada beberapa hal yang mampu untuk memaksa manusia untuk berdamai satu sama lainnya. Yang pertama adalah ketakutan atas kematian, keinginan untuk hidup layak, serta harapan dengan bekerjasama mampu untuk hidup layak. Karena ingin berdamai maka manusia membuat kontrak-kontrak dengan sesamanya. Kontrak-kontrak inilah yang akan menjadi hukum dimana orang yang lebih superior dibandingkan yang lainnya yang akan menjadi pemimpin dan orang yang mampu untuk membuat kebijakan atas nama masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai definisi kontrak sosial Hobbesian itu sendiri.

Karena manusia dalam kondisi berperang satu sama lain maka mereka membentuk kontrak antara satu dengan lainnya¹⁸. Kontrak dibuat dengan cara

¹⁷ Ibid p.79

¹⁸ Ibid p.80

mengurangi hak mereka sendiri untuk melakukan sesuatu agar orang lain mengurangi hak mereka untuk melakukan sesuatu yang sama¹⁹.

Semisal tiap manusia memiliki hak untuk membunuh manusia lain maka manusia saling berkontrak untuk tidak saling membunuh. Ini dilakukan karena manusia tidak ingin rugi atau mati satu sama lainnya. Karena manusia merasa ingin berdamai setelah adanya konflik berkepanjangan antara satu dengan lainnya maka manusia membuat kontrak yang mampu melindungi dirinya dari orang lain. Kontrak dibuat dengan cara menghilangkan hak dan ada dua cara untuk menghilangkan hak yaitu dengan cara membuangnya atau memberikannya kepada orang lain. Membuang hak berarti manusia yang melakukan itu tidak mempedulikan apa keuntungan dari hak tersebut maupun bagi siapa keuntungan itu diberikan.

Namun apabila manusia melakukan pemberian hak pada orang lain maka ia memahami siapa yang akan diberikan keuntungan dari pemberian hak tersebut. Ketika manusia membuang haknya ataupun memberikannya kepada orang lain ia tentu mengharapkan sebuah keuntungan yang bisa didapatnya.

Contoh dari membuang hak adalah semisal ia memiliki hak untuk membunuh orang lain, ia membuang hak tersebut dan berkontrak dengan yang lain untuk membuang hak tersebut dalam bentuk hukum pidana dimana manusia dilarang membunuh sesamanya. Ia juga berharap bahwa manusia yang lain akan melakukan hal yang sama setelah adanya kontrak dimana ia membuang haknya untuk membunuh orang lain.

Sedangkan contoh dari memberikan kepada orang lain adalah seseorang memberikan hak untuk membunuh kepada segelintir orang yaitu algojo dimana mereka memiliki hak untuk membunuh orang yang telah melakukan kesalahan tertentu. Keuntungan yang didapat dari pemberian hak ini adalah dimana orang yang memberikan hak tidak perlu terbebani untuk membunuh orang lain. Semisal ada seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain tanpa mengharapkan adanya balasan dari orang lain tersebut untuknya maka tindakan itu disebut dengan hadiah, bukan kontrak²⁰.

¹⁹ Ibid p.82

²⁰ Ibid p.82

Mengenai pemenuhan kontrak hanya bisa dilakukan dua cara yaitu dengan cara melakukan tindakannya atau dibatalkan oleh yang membuatnya²¹. Pemenuhan kontrak yang didasarkan pada ancaman sekalipun harus dipenuhi. Hobbes mencontohkan semisal ada kontrak yang dibuat dengan musuh sekalipun dimana kita adalah di pihak yang kalahpun harus dipenuhi.

Hobbes juga dengan sangat kompeten menuliskan tentang kebebasan yang sebenarnya dialami oleh masyarakat sipil dibandingkan masyarakat politis. Menurut Hobbes, kebebasan hanya diperlukan untuk makhluk irasional (bukan rasional, bukan manusia)²². Menurutnya kebebasan dan ketakutan itu sejalan, semisal ada seseorang melakukan sebuah tindakan yang bebas maka dia hanya takut dengan konsekuensi dari tindakannya saja. Untuk mendapatkan kedamaian maka manusia mengekang kebebasannya sendiri dengan membuat negara, hukum dan institusi-institusi lainnya yang menurut Hobbes adalah rantai bagi diri mereka sendiri.

Untuk Hobbes ketika manusia diberikan kebebasan maka mereka akan melawan tetangga mereka sendiri. Di dalam masyarakat yang bebas sebenarnya bukan masyarakatnya yang bebas tetapi perwakilannya. Dimana di dalam masyarakat yang bebas bukanlah masyarakat itu sendiri yang bebas untuk mewakili dirinya maupun menyerang bangsa lainnya tetapi perwakilannyalah yang mampu untuk melakukan itu.

Hobbes menyatakan kebebasan manusia yang sebenar-benarnya adalah ketika manusia membuat sebuah kontrak sosial dimana ia harus mempertimbangkan segalanya sebelum membentuk kontrak sosial dan menolak perintah penguasanya ketika ia tidak menyepakati hal tersebut di dalam kontrak sosialnya dan tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh yang diberikan Hobbes adalah ketika seorang penguasa memberi perintah kepada subyeknya untuk tidak boleh makan dan mati kelaparan maka subyek berhak untuk menolak perintah tersebut, atau ketika seorang penguasa menginterogasi subyeknya untuk mengakui apa yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya maka si subyek boleh untuk menolak untuk mengakui apa yang tidak pernah ia lakukan.

²¹ Ibid p.85

²² Ibid p.129

Selanjutnya mengenai kebebasan lainnya adalah dimana tidak ada hukum yang mengaturnya, ketika penguasa tidak membuat hukum yang mengatur akan suatu hal maka seorang subyek berhak untuk melakukan sebeb-bebasnya tindakan yang ia mau tentang hal tersebut.

Subyek juga boleh untuk menggugat penguasa ketika ia merasa haknya yang sah telah direnggut oleh penguasa dengan sewenang-wenang. Selama masih di dalam koridor hukum yang berlaku dan mampu dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak keparalelan yang terjadi antara apa yang dirumuskan oleh Hobbes dalam Leviathan dengan kenyataan yang terjadi sekarang terutama dalam ranah hukum dimana ketika Hobbes menyatakan bahwa kontrak dibuat agar manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya dalam mendapatkan keuntungan bagi dirinya masing-masing. Selain itu juga di dalam kontrak disediakan klausula apabila dilakukan wanprestasi maka akan terjadi hukuman-hukuman tertentu dan apabila dalam sebuah masyarakat sudah dikenal hukum positif maka hukuman tertentu tersebut mengacu pada hukum positif yang berlaku.

Hukum positif yang berlaku merupakan hukum yang dibuat oleh orang-orang yang lebih superior tersebut yang telah mengalahkan ribuan orang lainnya dalam mendapatkan legitimasi untuk memimpin. Hukum tersebut tentunya akan membawa kepentingan dari orang-orang yang superior dalam bentuk memberikan hadiah kepada yang terdekatnya dan mengurangi hak yang ia tidak butuhkan untuk mendapatkan hak yang ia butuhkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Hobbes sebaiknya makhluk rasional tidak membutuhkan kebebasan, maka kebebasan yang ada di dalam demokrasi proseduralis sangatlah semu sebagaimana yang dikatakan Hobbes. Ketika kita memaknai kebebasan adalah kebebasan untuk melakukan apapun yang tidak diatur ataupun dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan maka pemaknaan kita terhadap kebebasan sangatlah sempit. Kita hanya bebas untuk melakukan hal tertentu yang diatur oleh orang-orang yang dianggap berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Di satu sisi seseorang hanya dianggap boleh bebas apabila adanya pemimpin yang sewenang-wenang dalam memimpin dan melawannya. Ketika ada sebuah kejahatan dilakukan kepada kita maka kita bebas untuk melawan

kejahatan tersebut selama masih di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan bahkan kriteria terhadap ketidakadilan tersebut merupakan kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Semisal ada seseorang yang merasa bahwa negara merusak lingkungan, dimana secara kasuistik dapat dilihat dalam kasus Hutan Kota Malabar yang tidak sama sekali mengindahkan kaidah ekologis dari Hutan Kota Malabar itu sendiri. Seharusnya dalam kenyataannya Hutan Kota tidak boleh dialihfungsikan menjadi sebuah taman kota dengan alasan-alasan ekologis dan akan mengganggu keadaan ekosistem di dalamnya.

Selain itu fungsi arsitektural sedikit apapun mampu untuk merusak ekosistem yang ada yaitu hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di dalam Hutan Kota. Dimana adanya penerangan sedikitpun pada malam hari akan mengganggu jam tidur dan bahkan akan mengusir fauna yang memiliki penglihatan lebih sensitif dibandingkan manusia mengenai pencahayaan. Namun karena pemerintah mampu untuk bertindak sesuai hukum dan melakukan sesuai hukum yang tidak mengatur dan memberikan definisi tentang hal-hal ekologis tentunya pengalihfungsian Hutan Kota menjadi Taman Kota secara material dapat dilakukan tanpa mengalihfungsikan Hutan Kota menjadi Taman Kota secara legal.

Selama pasal-pasal definitif tentang Hutan Kota dan Taman Kota tidak dilanggar maka pemerintah dapat melakukan dalih bahwa mereka tidak melakukan pengalihfungsian dari Hutan Kota menjadi Taman Kota karena tidak melanggar satupun definisi yang ada tentang kedua hal tersebut. Padahal sebenarnya definisi-definisi tersebut dibuat karena untuk melindungi sisi ekologis dari Hutan Kota itu sendiri. Dengan kata lain pemerintah dan pemangku kebijakan lain bisa membuat sebuah peraturan atau kebijakan yang secara esensial melawan kepentingan sebenarnya yang ada dengan melakukan interpretasi legal-positivistik atas sebuah peraturan perundangan.

Peraturan daerah memberi legitimasi bahwa revitalisasi harus dilakukan apapun alasannya. Di satu sisi ia tidak memberikan definisi yang jelas mengenai revitalisasi itu yang seperti apa. Akhirnya pemerintah Kota Malang justru melakukan pengalihfungsian lahan dengan memberikan fungsi ekonomi dan

fungsi arsitektural di dalamnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk meloloskan diri dari stigma pengalihfungsian lahan secara legal-formal. Problematikanya disini adalah pemerintah tidak memiliki keinginan ataupun pemahaman yang cukup untuk membentuk dan mengerti tentang sebuah materi yang sebenarnya berusaha dijawantahkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kebanyakan rezim yang baru tidak mengindahkan keinginan rezim pembuat peraturan perundang-undangan tersebut mengenai sebuah peraturan perundang-undangan karena memiliki kepentingan dan pemahaman yang berbeda mengenai sebuah peraturan perundang-undangan.

Di satu sisi merekapun dalam membuat sebuah kebijakan tidak melakukan konsultasi terhadap masyarakat yang menjadi sebuah stakeholder di dalam hal yang akan terdampak oleh kebijakan maupun peraturan yang akan dibuatnya. Karena mereka condong melakukan perumusan kebijakan berdasarkan standar yang mereka tentukan sendiri dan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Ketika kepentingan masyarakat yang akan diberikan kebijakan bertentangan dengan kepentingan masyarakat politis tentunya kepentingan masyarakat politis harus diutamakan, makadari itu dibutuhkan sebuah payung hukum yang bisa melindungi kepentingan masyarakat politis agar tidak dikalahkan oleh kepentingan dari masyarakat sipil yang menjadi stakeholder dari kebijakan-kebijakan yang akan dibentuk oleh masyarakat politis tersebut.

Tentunya sebisa mungkin payung hukum tersebut adalah payung hukum yang meminimalisir sebisa mungkin peran serta masyarakat dalam pembentukan kebijakan dengan memberikan legitimasi yang besar kepada lembaga-lembaga politis untuk membuat kebijakan atas nama masyarakat sipil. Lalu memberikan kewenangan yang cukup terasa kuat untuk lembaga-lembaga yang didirikan oleh dan untuk masyarakat sipil namun sebenarnya kewenangan tersebut tidak berarti apa-apa dan harus mengembalikan lagi keputusannya kepada lembaga-lembaga politik yang ada.

Di satu sisi payung hukum ini harus memberikan legitimasi yang besar kepada lembaga-lembaga politis untuk tidak memerlukan konsultasi kepada masyarakat sipil yang menjadi stakeholder di dalam kebijakan atau hukum yang akan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik tersebut. Tentunya adalah dengan cara memberikan ruang kepada para akademisi atau intelektual yang pro terhadap lembaga politis tertentu untuk membuat sebuah naskah akademik yang

terlihat kompleks bahkan overkompleks dengan kompleksitas yang sebenarnya tidak ada. Penggunaan bahasa-bahasa intelektual tentunya akan memberikan sebuah legitimasi secara semiologis kepada peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk bahwa peraturan perundang-undangan ini telah dibentuk secara matang.

Tentunya efek yang dibutuhkan adalah untuk mendiamkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat awam yang berpendidikan kurang cukup mengenai apakah peraturan ini sudah direncanakan secara matang-matang oleh orang-orang yang benar-benar berpendidikan dan memiliki kapabilitas untuk membuat naskah akademik yang kompeten, tentu saja jawabannya adalah sudah apabila mengacu kepada kelengkapan naskah akademik yang ada beserta bahasa-bahasa dan kajian-kajiannya yang lengkap secara teoritik.

Tetapi seringkali naskah akademik tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma kepada publik dimana masyarakat politis ini juga memahami bahwa diantara publik yang ada tentunya ada sebagian masyarakat yang memiliki pendidikan cukup tinggi untuk memahami bahkan melakukan kontra-argumentasi kepada naskah akademik tersebut bahwa naskah akademik tersebut tidak lebih dari omong kosong yang melegitimasi sebuah kebijakan tanpa adanya riset yang benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis dan ontologis.

Makadari itu diperlukan adanya kontra sistem terhadap sistem demokrasi proseduralis yang hanya akan memberikan legitimasi secara politik maupun hukum kepada para penguasa yang mampu untuk mewakili kepentingan masyarakat sipil dalam membentuk kebijakan publik maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Dalam penelitian ini akan disajikan sebuah sistem deliberatif yang akan disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia dan memberikan sebuah contoh payung hukum yang akan bisa digunakan sebagai acuan untuk mekanisme deliberatif secara riil.

Mekanisme dan Payung Hukum Pembentukan Kebijakan

Tentunya untuk membuat mekanisme deliberatif perlu dibuat peraturan perundangan yang positif ketika ingin menghadirkan mekanisme deliberatif di

dalam sistem hukum yang Kelsenian untuk mengimbangi keberadaan orang-orang yang berwenang dalam artian masyarakat politis untuk mencegah obyeksifikasi yang mereka lakukan atas masyarakat sipil dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan maupun kebijakan.

Penelitian ini akan memberikan poin-poin penting sebagai berikut :

- i. Perlu adanya sebuah lembaga yang diubah menjadi sebuah mekanisme partisipatif dalam pembuatan inisiatif-inisiatif kebijakan dari bawah ke atas. Salah satu lembaga yang dapat dijadikan alat inisiatif ini adalah lembaga yang terkecil yaitu RT (rukun tetangga).
- ii. Skema dari lembaga yang dijadikan alat inisiatif adalah sifatnya bottom-up. Sehingga inisiatif kebijakan dibentuk oleh anggota-anggota RT dan dirapatkan bersama di rumah seorang warga dan dilakukan sendiri mulai dari desain, implementasi sampai dengan pengawasannya oleh anggota-anggota RT tersebut.
- iii. Sehingga ketika dianalogikan maka RT membuat kebijakan untuk RT itu sendiri, semisal RT membuat sebuah ronda malam atau pengaspalan jalan yang dananya digalang sebagian dari RT itu sendiri, sebagian dari donasi masyarakat luar RT, sebagian dari pemerintah maupun dari masyarakat yang lebih luas seperti RW ataupun kelurahan.
- iv. Setelah ini akan diberikan sebuah skema kebijakan yang dapat dibuat oleh masyarakat sendiri, didanai oleh masyarakat sendiri, didesain oleh masyarakat sendiri dan diawasi oleh masyarakat sendiri dengan bantuan masyarakat lain ataupun dengan bantuan pemerintah. Mekanisme ini tidak sepenuhnya deliberatif karena masih tidak mengabaikan kondisi obyektif yang dialami oleh masyarakat dan sistem pemerintahan kita sekarang. Representasi dari masyarakat yang memegang lebih banyak kekayaan negara dan keputusan-keputusan yang lebih dominan di negarapun juga harus ikut berperan serta di dalam pembangunan masyarakat yang sifatnya deliberatif namun lebih minor dan pasif karena harus berkonsultasi dulu kepada masyarakat dalam membentuk desain kebijakan ataupun menunggu sebuah desain kebijakan sudah dibuat oleh masyarakat dan dikirimkan proposalnya kepada pemerintah. Pemerintahpun juga bergotongroyong dalam membiayai sebuah

kebijakan bersama dengan masyarakat sehingga masyarakat juga merasa memiliki kebijakan tersebut.

Skema di atas merupakan skema yang memberikan keterangan mengenai bagaimana sebuah kebijakan dapat dibentuk oleh masyarakat dari *level* terkecil, bahkan masyarakat *level* terkecil sekalipun dapat mandiri dari pemerintah dalam proses pembiayaan sampai pada proses desain, implementasi dan pengawasan.

Maka payung hukum yang harus dibentuk untuk melegalkan skema ini secara logis harus mengandung klausula-klausula sebagai berikut :

1. Kebijakan dapat dibentuk atas inisiatif anggota masyarakat. Anggota masyarakat harus didefinisikan anggota masyarakat yang terkecil dalam *level* individu. Namun dalam inisiatif pembentukan kebijakan tersebut harus dirumuskan secara kolektif.
2. Inisiatif anggota masyarakat tersebut dapat diusulkan ke dalam lembaga terkecil di dalam masyarakat yaitu RT (Rumah Tangga) dan dirapatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat terkecil tersebut.
3. Inisiatif yang diterima oleh lembaga tersebut dapat diteruskan kepada lembaga yang lebih besar untuk meminta bantuan dana atau sumber daya lainnya maupun tidak diteruskan kepada lembaga yang lebih besar karena dirasa sumber daya yang dimiliki sudah mencukupi
4. Kebijakan yang dilakukan tersebut apabila didesain dan dibiayai sepenuhnya oleh sebuah lembaga terkecil tersebut maka tanggungjawab sepenuhnya adalah oleh lembaga terkecil tersebut mulai dari pengawasan sampai hal-hal yang sifatnya evaluatif.
5. Kebijakan yang dirasa sukses berdasarkan penilaian masyarakat tersebut dapat diinisiatifkan kepada lembaga yang lebih besar untuk diimplementasikan secara skala yang lebih besar maupun dengan sumber daya yang lebih besar.
6. Pemerintah dapat mengambil inisiatif tersebut dan mengimplementasikannya dengan skala yang lebih besar namun harus berkonsultasi dengan pembuat inisiatif kebijakan dan pembuat desain kebijakan maupun dengan pengevaluasi kebijakan agar tidak ada kesalahan fatal dalam pembentukan kebijakan.

Tentunya skema ini akan berjalan beriringan dengan kebijakan semi top-down yang akan dilaksanakan oleh pemerintah secara deliberatif dalam bentuk skema lain.

b. Pemerintah mampu untuk membentuk sebuah kebijakan yang inisiatifnya berasal dari masyarakat maupun inisiatifnya berasal dari pemerintah sendiri namun harus melakukan konsultasi kepada masyarakat. Hal ini disebabkan agar kebijakan yang akan dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat serta mengurangi kemungkinan-kemungkinan koruptif dari pemerintah.

Mekanisme ini akan meneruskan skema yang pertama dimana ketika kebijakan sudah selesai pada skema yang pertama apabila kebijakan tersebut akan diinisiasikan kepada pemerintah oleh masyarakat yang telah menjalankan kebijakan tersebut agar dilaksanakan dalam skala dan dengan sumber daya yang lebih besar.

Pemerintah akan mendapatkan inisiasi kebijakan dari masyarakat yang telah melaksanakan tersebut lengkap dari segala desain, mekanisme pengawasan, naskah akademik, arsip dan kronologis pembuatannya. Setelah itu pemerintah harus melakukan konsultasi dengan masyarakat yang mengirimkan inisiasi tersebut dan menjalankannya bersama-sama dengan mereka dan ditambah dengan masyarakat dimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Sehingga pemerintah tidak hanya berkonsultasi dengan masyarakat yang telah mengimplementasikannya saja maupun dengan ahli-ahli di bidang tersebut, namun dengan masyarakat yang tempatnya akan diimplementasikan kebijakan tersebut untuk memahami bahwa kondisi setiap masyarakat berbeda dan perlu adanya adaptasi dari kebijakan-kebijakan tersebut agar mampu dilaksanakan di masyarakat lainnya.

Selain itu perlu dibuat beberapa klausula dalam produk hukum yang mampu melegalkan cara pembentukan kebijakan yang demikian ini :

1. Ketika masyarakat menginisiasikan sebuah kebijakan kepada pemerintah untuk dilaksanakan maka masyarakat harus menyediakan semua data yang relevan mulai dari cetak biru kebijakan yang akan diinisiasikan, data-data berkaitan dengan kebijakan yang akan diinisiasikan, segala pengeluaran maupun pemasukan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut secara

transparan, maupun siapa saja yang pernah ikut berpartisipasi dalam kebijakan yang akan diinisiasikan tersebut.

2. Setelah itu masyarakat yang menginisiasikan juga harus bersedia memberikan ide, gagasan maupun partisipasinya dalam pembentukan desain, implementasi maupun pengawasan dari kebijakan yang akan diinisiasikan dalam tingkat yang lebih besar.

3. Pemerintah harus membahas desain serta data-data yang digunakan untuk inisiasi tersebut serta menyebarkannya secara transparan kepada publik. Publik yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia. Namun dititikberatkan bahwa pemerintah harus berperan aktif untuk menyebarkan data ini kepada masyarakat yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut serta ahli-ahli yang berdomisili di sekitar tempat kebijakan ini akan diimplementasikan.

4. Pemerintah harus mengundang ahli-ahli yang kompeten dalam bidang yang akan diinisiasikan tersebut. Diutamakan ahli-ahli yang berdomisili di sekitar daerah kebijakan ini akan diimplementasikan. Ahli-ahli yang diundang harus berbasiskan multi-disiplin yang berkaitan dengan pembuatan desain kebijakan tersebut. Tentunya tidak pas jika pemerintah mengundang ahli Teknik Komputer untuk mendesain sebuah taman kota.

5. Pemerintah juga harus mengundang masyarakat yang akan terdampak implementasi dari kebijakan tersebut karena merekalah yang akan mengelola, mengawasi dan ikut berpartisipasi aktif atas pembuatan kebijakan tersebut dan pengawasannya.

6. Pemerintah harus mengadakan mediasi bersama antara pemerintah, ahli-ahli yang diundang, masyarakat yang menginisiasi dan masyarakat yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut. Mediasi tersebut harus berimbang dan tidak boleh menitikberatkan kepada suatu bagian tertentu. Mediasi inipun sifatnya bukan untuk harus memberhasilkan sebuah kebijakan terlaksana, namun apabila masyarakat yang akan terdampak menolak secara penuh karena merasa kebijakan tersebut tidak bisa diimplementasikan di daerahnya maka pemerintah harus mengikuti saran tersebut atau menanyakan apa inisiasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut untuk dibangun untuk mendukung kebijakan ini di daerah lainnya.

7. Ketika semua sudah menyepakati kebijakan ini dibentuk maka setiap pihak menyatakan ketersediaannya atas partisipasi aktif di dalam kebijakan ini

mulai dari pembuatan desain, implementasi, pembangunan, pembiayaan, pengawasan sampai dengan pengelolaan secara aktif. Dengan adanya ketersediaan tersebut maka semua pihak dapat diharapkan dalam partisipasinya atas kebijakan yang akan diimplementasikan ini secara penuh. Selain itu beban untuk pemerintah akan berkurang dalam membentuk kebijakan di masyarakat dan mengurangi dampak negatif kebijakan pemerintah di masyarakat serta mengurangi penolakan-penolakan yang ada atas sebuah kebijakan akibat perbedaan persepsi dan keinginan dari masyarakat yang benar-benar memahami kenyataan di daerah tersebut dengan pemerintah yang memiliki kepentingan untuk daerah tersebut.

Yang kedua adalah dengan cara pemerintah menginisiasi kebijakan tersebut namun berkonsultasi dengan masyarakat yang akan diimplementasikan kebijakan tersebut di tempatnya. Ini perlu dilakukan karena pemerintah harus mengetahui keadaan obyektif dari masyarakat serta tempat tinggal masyarakat tersebut. Pemerintah juga harus memahami kebutuhan mereka secara hakiki dimana terkadang pemerintah membuat sebuah kebijakan yang mereka tidak butuhkan sama sekali dan terkesan dipaksakan.

Sebagaimana di Kota Malang ada kebijakan mengenai Fly Over Arjosari yang cukup kontroversial di masa lalu. Kebijakan ini ditolak oleh masyarakat sekitar Arjosari dimana kebijakan ini dianggap akan merusak perekonomian di sekitar daerah tersebut. Bahkan beberapa intelektual Kota Malang yang menjadi warga di daerah Arjosari pun mengusulkan underpass dengan perhitungan biaya yang lebih murah dan tidak mengganggu perekonomian masyarakat daerah sana. Namun pemerintah Kota Malang tetap menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut karena alasan-alasan tertentu yang hanya pemerintah Kota Malang sendiri yang memahaminya. Ini merupakan residu dari kewenangan yang timpang antara masyarakat yang memiliki tempat tersebut atas daerahnya dengan pemerintah yang belum tentu yang mengusulkan adalah orang-orang yang berdomisili di daerah tersebut sehingga kebijakannya tidak cocok dengan masyarakat dan daerah tersebut.

Sehingga konsultasi pemerintah kepada masyarakat yang akan menjadi stakeholder dari kebijakan yang akan dilakukan sangatlah diperlukan agar semua stakeholder baik pemerintah, pemangku dana dan masyarakat yang akan menikmati atau terdampak dari kebijakan tersebut dapat menentukan desain,

mengimplementasikannya dan mengawasi implementasinya serta mengelolanya bersama-sama.

Dalam produk hukum yang akan menunjang mekanisme yang demikian ini perlu dibentuk klausula sebagai berikut :

1. Kebijakan diinisiasi oleh pemerintah, namun tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah secara holistik. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang akan diimplementasikan kebijakan tersebut dan harus mendengarkan segala keluhan maupun pertimbangan dan saran yang akan diberikan oleh masyarakat yang akan diimplementasikan kebijakan tersebut.
2. Pemerintah harus melakukan penelitian bersama dengan masyarakat yang akan diimplementasikan tersebut secara holistik dan tidak berat sebelah mengenai keadaan obyektif dari masyarakat tersebut maupun keadaan daerah yang akan diberlakukan kebijakan tersebut. Jika tidak akan memberikan efek yang besar yaitu kebijakan ini akan menjadi kebijakan yang tidak efektif dan hanya membuang sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan hanya akan mengalami penolakan oleh masyarakat yang mendapatkan implementasi dari kebijakan tersebut.
3. Ketika data dan fakta di lapangan sudah didapatkan oleh pemerintah bersama masyarakat yang akan diimplementasikan kebijakan tersebut maka pemerintah harus melakukan transparansi terhadap data dan fakta lapangan tersebut dengan membaginya kepada publik. Pemerintah membagi kepada publik dengan sebuah link dimana publik bebas untuk mendapatkan data dan fakta tersebut tanpa perlu menggunakan surat ataupun syarat apapun untuk mendapatkannya. Selain itu pemerintah harus berperan aktif untuk membagi data dan fakta tersebut kepada para akademisi yang berada di sekitar tempat kebijakan akan diimplementasikan untuk melakukan penelitian yang lebih holistik dan sesuai dengan bidang yang mereka pelajari masing-masing tanpa melupakan partisipasi masyarakat umum atas penelitian tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli di bidang tersebut harus menyertakan masyarakat yang akan diimplementasikan kebijakan tersebut secara aktif. Masyarakat tidak boleh hanya digunakan sebagai obyek survei atau obyek penelitian. Masyarakat harus menjadi subyek penelitian dengan mempelajari metode dari penelitian tersebut dan berpraktis dalam meneliti keadaan obyektif mereka sendiri bersama-sama dengan para ahli. Keadaan

obyektif yang bisa diteliti oleh masyarakat bersama para ahli akan lebih obyektif dibandingkan jika hanya para ahli yang berjarak dibandingkan masyarakat berusaha untuk meneliti masyarakat yang tidak ia kenal. Selain itu masyarakat akan memahami metode-metode penelitian yang kompleks untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi dan mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan kepada mereka di masa depan.

5. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli bersama dengan masyarakat tersebut akan dipresentasikan bersama-sama di dalam sebuah mediasi yang terbuka untuk umum. Publik berhak untuk mengkritik, membuat desain bersama maupun menolak sepenuhnya kebijakan yang akan diimplementasikan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Data dan fakta yang disajikan dapat dilakukan komparasi maupun falsifikasi terhadap data badan pusat statistik ataupun data-data yang dihasilkan dari penelitian badan-badan lainnya.

6. Desain harus dirumuskan bersama-sama mulai dari bagian teoritis, filosofis maupun teknis dari desain tersebut oleh pemerintah dan para stakeholder yang ada. Pemerintah tidak boleh memaksakan desain yang pemerintah buat kepada masyarakat dan tidak boleh merendahkan masyarakat dengan alasan masyarakat tidak memiliki daya pikir maupun tingkat pendidikan yang cukup untuk membuat desain. Tingkat pendidikan tersebut akan dikalahkan dengan fakta empiris di lapangan yang hanya diketahui oleh masyarakat yang sudah lama tinggal di daerah tersebut.

7. Ketika desain sudah dirumuskan bersama-sama maka perlu ada pembuatan mekanisme partisipatif oleh para stakeholder yang ada mengenai kebijakan tersebut. Mulai dari pembiayaan, implementasi, pembangunan dan pengawasan. Setiap pihak yang berpartisipasi bertanggungjawab penuh untuk melakukan pengelolaan terhadap hasil dari kebijakan tersebut agar baik dan bertanggungjawab penuh untuk mengevaluasi kebijakan tersebut sebaik mungkin.

8. Kebijakan yang telah diimplementasikan dapat diusulkan untuk diimplementasikan kepada masyarakat lainnya, namun harus mengundang segala stakeholder dalam kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut maupun dengan para ahli di bidangnya yang berada di daerah sekitar kebijakan

tersebut akan diimplementasikan maupun masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan akan mendapatkan dampak dari kebijakan tersebut.

Selain pembuatan kebijakan, pembuatan hukum juga memerlukan mekanisme deliberatif yang sifatnya bottom-up dimana masyarakat dapat membuat hukum sendiri yang sesuai dengan keadaan masyarakatnya dan tidak bertabrakan dengan hukum nasional yang berlaku. Di satu sisi hukum nasional juga harusnya terpengaruh oleh hukum-hukum komunal yang dibuat oleh masyarakat dari titik terbawah.

Selama ini kita mengetahui bahwa hukum dibuat dari atas ke bawah dimana masyarakat politis yang berada di atas belum tentu memahami keadaan nyata dari masyarakat sipil yang berada di bawah dan keadaan yang paling bawah. Ketika masyarakat politis yang berada di *level* terataslah yang membentuk hukum bagi masyarakat yang terbawah tentu realitasnya akan berbeda.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat politis yang berada di *level* teratas memiliki fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat sipil di *level* terbawah semisal *voorigder* yang akan membuat mereka tidak mengalami kemacetan apapun sama sekali. Tentunya *voorigder* yang membuat mereka tidak mengalami kemacetan apapun membuat mereka impoten dalam membuat hukum yang seharusnya mampu untuk mengatasi permasalahan kemacetan karena mereka sendiripun tidak memiliki pengetahuan empirikal mengenai kemacetan yang ada.

Mungkin akan ada argumentasi dimana seorang masyarakat politis juga pernah menjadi seorang anggota masyarakat sipil yang pernah mengalami kemacetan dan memiliki kapabilitas untuk menguraikan kemacetan berdasarkan memorinya. Namun dalam penelitian ini akan disajikan argumentasi Hume mengenai memori.

Menurut Hume, persepsi inderawi hanya akan mempresepsikan sebuah eksistensi dan tidak mungkin mempresepsikan dual eksistensi (*double existence*)²³ kecuali dengan adanya intervensi rasio atau imajinasi. Indera bisa memberikan kita bukti akan eksistensi yang kontinu (*continued existence*)

²³Hume, David. 2000. *Op.Cit. Treatise...*, hlm.102

walaupun ketika ia tidak digunakan lagi²⁴. Sensasi menurut Hume akan dirasakan oleh akal kita²⁵, tetapi ada sebuah masalah bagaimana indera bisa membedakan kita (ourselves) dengan obyek lain (external objects).

Hume menjelaskan bahwa badannya sendiri sudah terbukti miliknya karena sudah jelas, lalu di tangannya ada kertas, didepan kertas ada meja, didekatnya ada dinding dan seterusnya, sehingga tidak perlu memerlukan alat lain selain indera untuk membuktikan adanya yang eksternal dari diri kita sendiri²⁶. Mengenai skeptisisme akan indera adalah indera tidak bisa membuktikan adanya eksistensi yang kontinu karena indera tidak bisa beroperasi diluar batas ia mampu beroperasi²⁷. Menurutny untuk menimbulkan sebuah eksistensi yang kontinu adalah dengan cara menggunakan memori²⁸. Memori mampu memberikan kita persepsi-persepsi yang berhubungan satu sama lainnya dan dapat muncul sewaktu-waktu sesuai keinginan kita, dengan ini kita bisa memalsukan (feign) kekontinuitasan eksistensi obyek yang diindera²⁹.

Ketika kita sudah memahami bahwa memori hanya bisa memalsukan kekontinuitasan eksistensi obyek yang diindera maka kita dapat menyatakan bahwa eksistensi dari kemacetan yang berada di memori berbeda dengan eksistensi dari kemacetan yang berada di realitas sekarang. Akhirnya para anggota masyarakat politis yang berada di atas dan tidak memahami tentang eksistensi obyektif dari kemacetan ini akan melakukan proyeksi hiperealitas dari memorinya tentang kemacetan yang pernah ia alami sebelumnya.

Menurut Baudrillard hiperealitas adalah realitas yang tidak nyata dimana ia bisa diciptakan melalui simulasi ataupun simulacrum³⁰. Ketika seorang anggota masyarakat politis membuat sebuah peraturan perundangan tertentu tentang individu mengenai suatu hal yang pernah berada di memorinya namun eksistensinya tidak kontinu akibat adanya alienasi dirinya atas realitas tersebut maka peraturan perundangan yang ia ciptakan akan menghasilkan simulacrum baru atas simulasi realitas yang ada di pikirannya.

²⁴ Ibid p.102

²⁵ Ibid p.103

²⁶ Ibid p.103

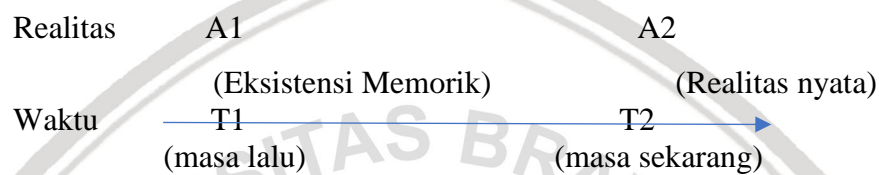
²⁷ Ibid p.104

²⁸ Ibid p.112

²⁹ Ibid p.112

³⁰ Baudrillard, Jean. 1988. Selected Writings, California : Stanford University Press. hlm.170

Sederhananya adalah ketika seorang anggota masyarakat politis membuat sebuah peraturan perundangan untuk menguraikan kemacetan walaupun ia sendiri tidak pernah mengalami kemacetan ketika ia sedang menjabat menjadi seorang anggota masyarakat politis. Tentunya ia akan menyatakan bahwa alasan dari kemacetan adalah A, padahal belum tentu pada masa sekarang alasan dari kemacetan adalah A. hal ini bisa di skemakan sebagai berikut.



A1 & T1 = Alasan seorang anggota masyarakat politis membentuk sebuah peraturan perundangan, dimana ketika ia mengalami kemacetan dan memahami alasan kemacetan tersebut adalah akibat A1 di waktu T1 tersebut.

A2 & T2 = Penyebab permasalahan kemacetan di dalam realitas yang ada sekarang

Kita telah membuktikan bahwa realitas pada masa lalu milik anggota masyarakat politis tersebut yang dimana ia memahami alasan kemacetan yang ada pada masa lalu berbeda dengan realitas masa sekarang yang dimana alasan kemacetan yang ada pada masa sekarangpun berbeda dengan masa lalu. Akhirnya di dalam rasionya ia melakukan simulasi hiperealitas yang didasarkan pada masa lalu disimulasikan pada masa sekarang seakan-akan realitas pada masa lalu dan masa sekarang tidak pernah berubah sedikitpun.

Hal ini menyebabkan peraturan perundangan yang tidak tepat guna, tidak menghasilkan efek yang diinginkan maupun ditolak oleh masyarakat karena keadaan obyektif riil yang ada berbeda dengan keadaan hiperealitas memori yang dimiliki oleh seorang anggota masyarakat politis ketika ia dulu berada di dalam realitas yang tidak teralienasi akibat fasilitas dan kewenangannya yang senjang dengan masyarakat yang akan terdampak oleh peraturan perundangan yang akan dibuatnya.

Namun masyarakat politis yang sudah teralienasi ini akan memaksakan peraturan perundangan yang dibuatnya akibat adanya kewenangan yang timpang yang membolehkan mereka untuk membuatnya dan mengharuskan

masyarakat untuk menaatinya tanpa tedeng aling-aling apapun atas nama kepatuhan terhadap hukum. Di satu sisi masyarakat sipil tidak diberikan ruang untuk membuat hukumnya sendiri atas realitas yang mereka alami sehari-hari dan persentuhan mereka terhadap permasalahan yang perlu dibuat peraturan perundang-undangan atasnya.

Makadari itu perlu dibentuk sebuah mekanisme partisipatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan bersama dengan masyarakat politis yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan tersebut mulai dari inisiasinya sampai dengan pengawasan dan pengelolaannya. Mekanisme partisipatif ini dapat berlaku untuk masyarakat sipil atas masyarakat sipil itu sendiri dalam tingkat terkecil sampai tingkat menengah.

Namun untuk hukum nasional tentunya diperlukan adanya mekanisme partisipatif yang berimbang antara masyarakat sipil dengan masyarakat politis karena tidak mungkin menyertakan sepenuhnya masyarakat sipil untuk membentuk sebuah peraturan perundangan yang sifatnya nasional. Tetapi partisipasi masyarakat sipil di dalam pembentukan peraturan perundangan yang sifatnya nasional akan mencegah hiperealitas terjadi selama keadaan masyarakat sipil dan keadaan masyarakat politis dalam pembentukan peraturan perundangan tersebut berimbang satu sama lainnya.

Selain itu juga perlu ada sebuah bentuk lembaga yang mewakili masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara partisipatif. Masyarakat sipil per profesi ataupun per daerah akan mewakili dirinya disana dan memberikan pertimbangan maupun hak suara dan hak bicara mengenai peraturan perundang-undangan tersebut dan mampu untuk menolak maupun menerima peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan tentang profesi atau masyarakat tertentu yang ditolak secara mutlak oleh profesi dan masyarakat tersebut.

Klausula yang harus diperhatikan dalam hukum positif yang akan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk membentuk hukum adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat berhak membuat hukum secara komunal yang inisiasinya, pengelolaannya, pengawasan serta penegakannya diserahkan kepada masyarakat yang memberlakukan hukum itu sendiri.

2. Masyarakat juga berhak membuat hukum secara komunal menurut kepentingan wilayahnya masing-masing dan tidak boleh bertabrakan dengan hukum positif yang ada.

3. Jika ada pertentangan hukum antara hukum komunal dengan hukum positif maka selama mungkin kedua hukum tersebut diberlakukan dalam sebuah peristiwa. Jika tidak mungkin diberlakukan kedua-duanya maka hukum positiflah yang berlaku.

4. Hukum komunal dibentuk atas sesuatu yang dirasa penegakannya kurang mungkin oleh aparaturnya keamanan negara secara konsisten semisal peristiwa kumpul kebo tersembunyi yang dilakukan di daerah kos-kosan ataupun kriminalitas kecil untuk membantu penegakan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Skema yang kedua adalah ketika masyarakat berusaha untuk menginisiasikan sebuah hukum yang telah diinisiasikan dalam tingkat yang terendah menuju tingkat yang lebih tinggi.

Ada klausula-klausula yang harus dibentuk untuk membuat sistem hukum komunal seperti ini dapat diberlakukan pada masyarakat yang lebih tinggi yaitu :

1. Masyarakat mampu menginisiasikan sebuah hukum yang akan berlaku di daerah yang lebih luas melalui lembaga masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan lembaga masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.
2. Lembaga yang lebih tinggi tersebut wajib untuk menerima inisiasi tersebut selama telah memenuhi syarat administratif tertentu seperti kelengkapan dokumen mulai dari desain, inisiator, data dan fakta pra pemberlakuan hukum tersebut dan pasca pemberlakuan hukum tersebut.
3. Lembaga yang lebih tinggi tersebut mengundang lembaga-lembaga yang lebih rendah yang berada pada yurisdiksinya untuk melakukan rapat mengenai pembahasan inisiasi yang dilakukan oleh lembaga yang lebih rendah tersebut.
4. Lembaga-lembaga yang lebih rendah bersama dengan lembaga yang lebih tinggi yang mengundangnya melakukan rapat mengenai pembahasan inisiasi yang dilakukan oleh lembaga yang lebih rendah tersebut
5. Lembaga-lembaga yang lebih rendah bersama dengan lembaga yang lebih tinggi tersebut melaksanakan penelitian secara kolektif di setiap daerah

yang berada di yurisdiksinya untuk memahami kondisi obyektif dari daerah-daerah tersebut mengenai hukum yang akan diterapkan di daerah tersebut.

6. Setelah dilakukan penelitian yang komprehensif maka dilaksanakan rapat untuk pembahasan mengenai data dan fakta yang ada di lapangan mengenai implementasi serta desain hukum yang akan diterapkan di daerah tersebut. Pembentukan desain hukum yang akan diterapkan dapat bervariasi berdasarkan kondisi obyektif tempat hukum tersebut akan diberlakukan.

7. Jika ada sebuah atau sebagian daerah yang menolak menerapkan hukum tersebut maka hak mereka untuk menolak harus dihormati sehingga hukum tersebut tidak diberlakukan di daerah tersebut. Namun jika warga daerah tersebut melanggar hukum tersebut di daerah dimana hukum tersebut diberlakukan maka warga daerah tersebut adalah obyek dari hukum yang diberlakukan di daerah tempat ia melanggarnya dan harus menerima sanksi yang berkaitan dengan hukum tersebut.

8. Hukum ini dapat diinisiasikan kembali kepada lembaga yang lebih tinggi dan mendapatkan proses yang sama dengan ini.

Skema yang ketiga adalah mengenai hukum-hukum yang akan diaplikasikan kepada sebuah profesi tertentu.

Klausula yang harus dipertimbangkan dalam payung hukum dewan profesi tersebut adalah :

1. Dewan profesi beranggotakan orang-orang yang bekerja di profesi tertentu. Nama dewan tersebut harus sesuai dengan profesi yang diwakilinya. Semisal Dewan Petani adalah dewan yang menghimpun kaum petani, Dewan Buruh adalah dewan yang menghimpun kaum buruh, Dewan Akuntan adalah dewan yang menghimpun para akuntan dan sebagainya.

2. Dewan profesi dibentuk dari *level* terkecil sampai *level* terbesar yaitu *level* pabrik/kantor sampai *level* pusat. Dewan pabrik/kantor akan mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh pengusaha di dalam pabrik tersebut dan mampu untuk merapatkan kebijakan tersebut bersama pengusaha maupun rapat umum pemegang saham. Setelah dewan pabrik/kantor maka dewan yang ada adalah dewan kelurahan dimana dewan-dewan pabrik/kantor yang terhimpun dalam satu kelurahan dihimpun dalam dewan kelurahan dan seterusnya. Sementara dalam dewan pengusaha tidak ada dewan pabrik/kantor karena telah diwakili oleh pihak rups atau manajemen perusahaan. Namun

dewan pengusaha tetap menghimpun perusahaan-perusahaan yang berada di satu kelurahan dalam dewan pengusaha di *level* kelurahan.

3. Dewan profesi dalam menginisiasi hukum harus mendapatkan suara mayoritas dari dewan profesi di bawahnya atau dari anggota langsung di dewan profesi tersebut apabila di *level* terkecil.
4. Dewan profesi bersama dengan eksekutif dan legislatif daerah membahas mengenai hukum yang diinisiasinya dan memiliki hak bicara dan hak suara yang sebanding dengan jumlah legislatif yang ada di daerah tersebut. Hukum yang telah disetujui oleh daerah tersebut diaplikasikan dalam setiap anggota keprofesian yang berada di daerah tersebut dan wajib ditegakkan oleh anggota keprofesian yang berada di daerah tersebut maupun oleh pemerintah.
5. Dalam hal inisiatif hukum dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah wajib mengundang dewan profesi untuk membahas bersama pemerintah mengenai hukum tentang profesi tersebut. Dewan profesi juga harus memiliki hak suara dan hak bicara serta jumlahnya harus proporsional dengan legislatif yang bersidang.
6. Hukum yang telah disetujui dapat diinisiasikan ke *level* yang lebih tinggi melalui inisiatif pemerintah ataupun dewan profesi melalui mekanisme-mekanisme terkait.

Dasar filosofis dan teoritis mengapa deliberasi harus dilakukan adalah masyarakat kita sendiri tidak menjadi seorang subyek dari hukum yang akan diberlakukan. Masyarakat hanya menjadi obyek yang dimana hukum tersebut diberlakukan oleh orang-orang yang belum tentu menjadi masyarakat di tempat maupun realitas mana yang hukum tersebut akan diberlakukan. Masyarakat juga tidak memiliki kebebasan apapun untuk bertindak apapun dalam menentukan klausula apa maupun desain seperti apa yang akan diberlakukan kepada masyarakat itu sendiri mengenai hukum yang akan dibentuk.

Sebagaimana kita telah bahas dalam epistemologi fenomenologis yaitu pemikiran Sartrean, seorang subyek seharusnya memiliki kebebasan dalam bentuk apapun. Seorang subyek atas sebuah realitas memiliki kebebasan untuk bertindak apapun atas realitasnya selama tidak bertabrakan dengan subyektifitas manusia lainnya yang berada di dalam realitas maupun faktisitas yang sama tersebut. Selain itu seorang subyek juga harus mampu untuk melakukan tindakan-tindakan secara sadar dan akibat ia memahami sendiri atas

kebebasannya bertindak dan memahami mengapa ia melakukan tindakan tersebut.

Seorang manusia adalah seorang keberadaan-untuk-dirinya dimana ia mampu untuk mengubah bentuk keberadaannya dan cara mengadanya menjadi apapun yang ia mau selama faktisitasnya memungkinkan. Selama manusia ini memiliki cara mengada yang mampu untuk mengubah keberadaan dan cara mengadanya sesuai dengan faktisitasnya tentunya ia akan menjadi sebuah subyek atas dirinya. Jika ia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut maka manusia tersebut akan mengalami sebuah keadaan yang disebut dengan “keyakinan yang buruk” (*bad faith/mauvaise foi*) .

Seseorang yang mengalami keyakinan yang buruk akan melakukan negasi atas dirinya bahwa dia adalah orang yang merasa dirinya bebas namun sebenarnya ia juga memahami bahwa dirinya merupakan sebuah obyek dari dunia, bukan subyek dari dunia yang bebas untuk melakukan apapun karena ia sudah diberi pengertian sebagai obyek yang diobyeksifikasi oleh manusia lainnya yang mengobyekannya. Penjelasan nya adalah ketika seseorang atau sebuah masyarakat diyakinkan bahwa ia menjadi seorang subyek hukum namun tidak memiliki kapabilitas apapun untuk menjadi subyek yaitu menentukan hukumnya sendiri dan menentukan apakah hukum itu berlaku atau tidak atas dirinya maka ia telah dibohongi dan menelan bulat-bulat kebohongan tersebut sebagai bentuk kepercayaan yang buruk.

Sebagaimana yang ditulis di bagian epistemologi fenomenologis, Heidegger pernah menyatakan bahwa manusia mampu untuk membarangkan orang lain, itu dapat terjadi ketika orang lain yang akan dibarangkan tidak berusaha untuk memahami secara ontologis-eidetik mengenai fenomena yang diaplikasikan kepada dirinya oleh orang lain. Akhirnya orang-orang yang telah dibarangkan tersebut tidak sadar dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa atau bahkan hal yang benar karena sudah umum dilakukan. Fenomena ini, seperti telah disebutkan di bagian epistemologi fenomenologis, disebut oleh Heidegger sebagai “kemerekaan” (*theyness*).

Di dalam fenomena kemerekaan ini manusia-manusia tersebut tentunya tidak akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah hal yang janggal. Bahkan mereka akan merasa lebih baik bahwa mereka akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sebagai masyarakat politis baru

dibandingkan melawan sistem yang dirasa salah ini karena akan lebih mudah untuk mendapatkan hal tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Nietzsche bahwa setiap orang memiliki hasrat kuasa yang disembunyikan dan selalu ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dimana kalimat ini harus ditambahkan oleh kalimat Freud mengenai prinsip kesenangan manusia bahwa manusia lebih suka menggunakan cara yang lebih menyenangkan atau menjauhkan mereka dari rasa sakit yang lebih besar. Sehingga mendapatkan kekuasaan untuk pribadi sehingga bisa menghukum orang lain dan memiliki kewenangan yang jauh lebih besar adalah jalan yang lebih menghasilkan serta mendapatkan rasa sakit lebih sedikit daripada berusaha untuk merubah sistem ke arah yang lebih baik.

Ketika kita sudah menyadari bahwa sebagian manusia-manusia ini tidak menyadari kenyataan yang ada bahwa mereka telah diobyeksifikasi oleh masyarakat politis dan dijadikan sebuah obyek dari rotasi kekuasaan yang sebenarnya sifatnya siklikal ini maka kita harus melakukan sebuah perubahan drastis dimana masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kewenangan yang sama dengan masyarakat politis yang omnipoten dan transenden harus diberikan kewenangan yang sama atau setidaknya hampir sama dalam ranah kehidupan mereka sendiri agar mereka mampu untuk menentukan kebebasan maupun apa yang harus dilakukan mereka sendiri untuk meningkatkan hajat hidup mereka secara kolektif tanpa perlu menunggu tekanan moril dari orang-orang kuat yang mendiktekan apa yang harus mereka lakukan.

Setelah itu mereka akan mampu untuk bebas di dalam faktisitas imanennya sendiri tanpa perlu adanya pengobyekan dari orang-orang yang tidak mengalami realitas yang mereka alami dan hanya mengandalkan imaji-imaji maupun memori-memori yang tidak mewakili eksistensi keberadaan realitas yang sebenarnya mereka alami. Sehingga produk-produk hukum maupun produk-produk politik yang akan diberlakukan tidak akan menyalahi kebutuhan dan realitas yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan terdampak oleh produk-produk tersebut.

Pada saat itu maka masyarakat sudah menjadi subyek secara sebagian atas daerah mereka sendiri maupun atas daerah tempat mereka menginisiasikan peraturan maupun kebijakan yang mereka buat. walaupun mereka belum menjadi subyek secara penuh karena masih harus berpangku tangan dengan

hukum positif yang dibentuk oleh masyarakat politis sebagai representasi mereka yang sebenarnya tidak mewakili presentasi mereka maka ini adalah kemenangan besar bagi masyarakat yang sudah menjadi pseudo-subyek dari daerah mereka sendiri dibandingkan keadaan sebelumnya yang hanya menjadi obyek pemerintahan yang berkuasa seraya dibohongi bahwa mereka adalah subyek dari hukum yang dibuat oleh pemerintahan yang berkuasa tersebut.

Argumentasi mengapa subyektifitas manusia yang masih bersubordinasi pada hukum positif buatan orang-orang yang berwenang masih semu adalah karena ketika mereka berusaha untuk mengganti atau membatalkan hukum positif tersebut mereka masih menjadi subordinat dari hukum formil positif yang mengharuskan mereka menggunakan metode-metode tertentu yang ditentukan oleh masyarakat politis untuk sebatas mengganti atau membatalkannya dan menyerahkan kembali kepada masyarakat politis untuk melakukan rekonstruksi atas hukum positif tersebut. Ini merupakan sebuah lelucon yang diaplikasikan pada istilah subyektifitas.

Makadari itu demokrasi deliberatif milik Jurgen Habermas dan politik komunitariannya perlu diaplikasikan dalam bentuk yang konkrit di negara Indonesia ini untuk menyeimbangkan demokrasi prosedural yang diberlakukan di negara ini atas dasar sila keempat yang diplintir definisinya oleh masyarakat politis yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

1. Contoh Kasuistik

Ada beberapa contoh kasuistik politik elektoral yang dapat dipakai sebagai acuan penyelesaian dilema moralitas dalam kasus riil yaitu :

a. Pilkada Malang

Kasus Pilkada Malang merupakan kasus yang terjadi pada 2017-2018 dimana dua orang dari tiga calon walikota Malang terkena kasus korupsi yakni Yaqud Ananda Gudban dan Mochammad Anton. Mereka menjadi tersangka kasus penyuapan APBD-P tahun 2015 dimana mereka melakukan penyuapan untuk mengubah penganggaran APBD-P sesuai dengan keinginan mereka. dilema etis yang ada pada kasus ini ada pada dua hal, yakni penyuapan dan pencalonan mereka. maka situasi ini akan dipecah menjadi 2 aspek yaitu :

I. Aspek Penyuapan

Mengenai aspek penyuapan, sudah jelas bahwa tindakan penyuapan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun apakah secara etika politik eksistensialis merupakan tindakan yang etis? Sepanjang berita yang ditemukan oleh penulis mengenai kasus korupsi ini diawali oleh Jarot Edy yang menjadi Kepala Dinas PUPPB melakukan penyuapan sebesar Rp. 700 Juta terhadap Arief Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang. Lalu uang tersebut dibagi-bagikan kepada Mochammad Anton dan para tersangka lain. Namun penulis tidak menemukan informasi mengenai alasan mengapa penyuapan tersebut dilakukan dalam berita-berita yang ada.

Secara eksistensialis, tanpa memahami alasan mengapa suap itu dilakukan, sudah jelas bahwa ini merupakan tindakan yang tidak etis karena melanggar intersubjektifitas yang ada pada masyarakat. Sekalipun semu, hukum dianggap sebagai hasil dari intersubjektifitas yang ada pada masyarakat, serta masyarakat menganggap bahwa hukum harus ditaati dan memiliki supremasi. Sehingga pelanggaran terhadap hukum merupakan pelanggaran terhadap intersubjektifitas masyarakat dan tentu bukan merupakan tindakan yang etis.

II. Aspek Pencalonan

Mengenai pencalonan mereka atas jabatan walikota Malang, merupakan sebuah tindakan *bad faith* (keyakinan yang buruk) karena mereka sudah melanggar intersubjektifitas namun masih melakukan pencalonan sebagai walikota dan merasa masih bisa mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat. Mereka melakukan pelanggaran dan kebohongan terhadap otentisitasnya sendiri, secara eksistensial mereka telah tercoreng dalam keberadaannya sebagai orang yang telah melanggar intersubjektifitas masyarakat dan mengganggu kebebasan orang lain secara jangka panjangnya.

Secara keberadaan (*being*) mereka telah melakukan tindakan yang telah tertempel pada eksistensinya, yakni pelanggaran hukum dan masih melakukan pencalonan seakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap intersubjektifitas masyarakat. Mereka juga pada seharusnya memiliki kemuliaan yakni dengan berkomitmen pada

sumpah dan janji untuk menaati hukum yang ada, namun justru malah melanggarnya dan melakukan sebuah tindakan politik yang seakan bahwa mereka tidak pernah melanggar intersubjektifitas masyarakat. Kecuali jika memang komitmen mereka pada dirinya sendiri adalah menggapai kekuasaan sebesar-besarnya, maka pelanggaran atas kemuliaan tidak dilakukan. Namun mereka tetap melanggar intersubjektifitas masyarakat serta melakukan kebohongan publik dan inotentisitas.

b. Pilpres 2019

Kasus Pemilu Presiden 2019 merupakan sebuah proses dimana penyebaran informasi serta branding politik terjadi selama beberapa tahun (terutama pada 2017-2018) menjelang momen pemilu 2019. Dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa aspek kampanye gelap maupun kampanye baik dari para calon kontestan yang ada pada Pilpres 2019. Tentu calon kontestan yang dianggap mumpuni adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dan mereka memiliki kekuatan politik di belakangnya yang mendukung mereka.

Berbicara mengenai Pilpres 2019 tentu ada beberapa aspek yang tidak etis dalam ranah ini, yakni mengenai beberapa hal yaitu :

I. Koalisi nir-ideologis

Koalisi nir-ideologis memang terjadi di Indonesia dikarenakan problematika penyatuan seluruh ideologi di Indonesia sebagai Pancasila. Sekalipun partai tersebut berlaku tidak Pancasila dalam ranah realitas, ia tetap menyatakan dirinya Pancasila dikarenakan hukum meminta demikian. Problem demikian muncul dan relevan untuk dikaji karena bisa jadi hampir seluruh partai di Indonesia tidak otentik karena mengatakan dirinya demikian tetapi berlaku tidak demikian. Antara bentuk dengan keberadaannya berbeda. Sehingga, muncul sebuah fluiditas koalisi di Indonesia karena tidak adanya front ideologis seperti di negara-negara Eropa yang menyatukan koalisi beberapa partai yang ideologinya mirip. Seperti Front kiri atau koalisi partai-partai liberal.

Secara etis, koalisi nir-ideologis ini bukanlah tindakan yang etis karena tidak berkomitmen atas ideologi politik yang dijalankan. Partai yang

berbentuk partai Pancasila namun berlaku Islamis terkadang berkoalisi dengan partai yang condong liberal-demokratik secara tindakan, atau partai Nasionalis tertentu. Ini merupakan tindakan yang tidak etis secara otentisitas, sekalipun etis secara intersubyektifitas karena masing-masing anggota partai menginginkan hal tersebut dan diperbolehkan secara hukum yang mewakili intersubyektifitas masyarakat.

II. Black Campaign

Black campaign di Indonesia merupakan aspek yang dominan muncul, terutama mengenai isu-isu rasial dan relijiusitas. Aspek demikian tidak bisa dibilang etis kecuali jika memang partai tersebut secara keberadaan dan bentuknya merupakan partai yang mewakili rasialitas atau relijiusitas tertentu, atau partai yang mengakui dirinya nasional-sosialistik a la Hitler dan Mussolini. Namun di Indonesia tidak ada partai demikian, sehingga mereka tidak berkomitmen dan tidak memiliki kemuliaan atas komitmen mereka pada peraturan perundangan.

Dikarenakan belum ada kampanye para calon presiden, tentu tidak ada data kuat yang bisa digunakan sebagai argumentasi penyelesaian dilemma moralitas dalam realitas kontemporer atas pemilu 2019.

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Kajian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Eksistensialisme merupakan sebuah filsafat yang mumpuni untuk dijadikan sebuah landasan etika politik. Bahwasanya etika politik eksistensialisme mendasarkan diri pada pandangan atas ontologi manusia dan ontologi faktisitasnya.
- b. Ada beberapa nilai aksiologis yang mampu untuk dijadikan etika politik di ranah eksistensial yakni : otentisitas, netralitas, identitas, kebebasan, konsekuensialisme serta intersubjektifitas
- c. Beberapa nilai tersebut telah diaplikasikan di ranah realpolitik serta pembacaannya atas beberapa situasi kontemporer yakni terorisme, hukum dan sistem demokrasi deliberatif yang penulis yakni memberikan skema perumusan kebijakan yang lebih etis secara eksistensialis.

2. Dampak

Ada beberapa dampak positif yang dapat muncul akibat skripsi ini yakni :

- I. Bagi Akademisi : ada beberapa dampak bagi akademisi yang muncul dari skripsi ini yaitu :
 - a. Sebagai karya tulis yang dapat dijadikan referensi untuk kajian etika politik pada umumnya dan etika politik Eksistensialis pada khususnya
 - b. Penulis dapat menjadi rekan diskusi atau kerjasama kepenulisan karya ilmiah mengenai filsafat etika politik dan etika politik Eksistensialis
- II. Bagi Pemerintah dan Masyarakat : ada beberapa dampak bagi pemerintah yang muncul dari skripsi ini yaitu :
 - a. Pemerintah dan masyarakat dapat menggunakan nilai-nilai aksiologis yang ada pada skripsi ini sebagai acuan tindakan politik

- b. Pemerintah dapat mencoba menginterpretasikan sistem pengambilan keputusan deliberatif yang ada pada skripsi ini untuk diaplikasikan pada keadaan riil
 - c. Masyarakat dapat mengusulkan sistem pengambilan keputusan deliberatif yang ada pada skripsi ini untuk diaplikasikan
- III. Bagi ilmu Politik : ada beberapa dampak bagi ilmu politik yang muncul dari skripsi ini yaitu :
- a. Memajukan bidang ilmu politik dengan memberikan sebuah kajian etika politik Eksistensialis yang jarang dikaji di Indonesia pada umumnya
 - b. Karya ini menjadi sebuah referensi yang dapat digunakan untuk proses memajukan ilmu politik di bidang Etika Politik



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Blattner, William. 2007. *Temporality*. Malden, MA : Blackwell
- David Wodruff, Smith. 1982. *Husserl And Intentionality: A Study Of Mind, Meaning And Language*. Dordrecht : Reidel Publishing
- Gardner, Sebastian. 2009. *Sartre's Being and Nothingness*. London : Continuum
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1977. *Phenomenology of Spirit*. Oxford : Oxford University Press
- Heidegger, Martin. 1962. *Being and Time*. Malden, MA: Blackwell
- Huemer, Michael. 2013. *The Problem of Political Authority*. New York : Macmillan
- Hume, David. 2000. *Treatise on Human Nature*. Oxford, Oxford University Press
- Husserl, Edmund. 1982 *Cartesian Meditations*. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers
- Husserl, Edmund. 1982. *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology*. Berlin : Springer
- Ibn Tufail. 1999. *The History of Hayy Ibn Yaqzan*. New York : Frederick A. Stokes Company Publishers
- Kant, Immanuel. 1949. *Fundamental Principles for Metaphysics of Morals*. New York: Liberal Arts Press.
- Kant, Immanuel. 1998. *Groundwork for Metaphysics of Morals*. Cambridge : Cambridge University Press
- Kierkegaard, Soren. 1944. *The Concept of Dread/Anxiety*. Princeton : Princeton University Press
- Kierkegaard, Soren. 1962. *The Present Age*. New York : Harperperennial Modern Thought
- Kierkegaard, Soren. 1983. *The Sickness Unto Death*. Princeton : Princeton University Press.
- Kierkegaard, Soren. 1992. *Concluding Unscientific Postscript*. Princeton : Princeton University Press
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1968. *The Will To Power*. New York: Vintage Books.
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1974. *The Gay Science*. New York :Vintage Books
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1989. *Beyond Good and Evil*. New York: Vintage Books
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1989. *Genealogy of Morals*. New York: Vintage Books
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 1995. *The Birth Of Tragedy*. New York :Dover Publications

- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. 2006. *Thus Spoke Zarathustra*. Cambridge :Cambridge University Press,
- Proios. 2016. *The Influence of Religiosity on Moral Judgment in Sport*. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki
- Sartre, Jean-Paul. 1992. *Notebook for an Ethics*. Chicago : Chicago University Press
- Sartre, Jean-Paul. 2007. *Existentialism is a Humanism*. New Haven : Yale University Press
- Satre, Jean-Paul. 2003. *Being and Nothingness*. Abingdon : Routledge
- Schalow et. al. 2011. *Heidegger, Translation, and the Task of Thinking*. Berlin : Springer
- Simmel, Georg. 2011. *Philosophy of Money*. Oxon: Routledge
- Smith, Adam. 2003. *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York : Bantam Classics
- Suseno, Franz-Magnis. 2003. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia
- Foucault, Michel. 2003. *Society Must be Defended*. New York : Picador
- Foucault, Michel. 1995. *Discipline and Punish*. New York :Vintage Books
- Hobbes, Thomas. 1999. *Leviathan*, Oregon : University of Oregon
- Baudrillard, Jean. 1988. *Selected Writings*, California : Stanford University Press

Jurnal

- Busch, Thomas W. 2011. *Sartre's Hyperbolic Ontology : Being and Nothingness Revisited*. Philadelphia : Villanova University
- Cameron, Ed. 2007. *The Ethical Paradox in Kierkegaard's Concept of Anxiety*. Clayton : Monash University
- Cristi, Renato. 2010. *Nietzsche on Authority and The State*. Ontario : Wilfrid Laurier University
- Halvor, Moxnes. 1993. *Honor and Shame*. Oslo : University of Oslo
- Harries, Karsten. 2014. *Heidegger's Being and Time*. New Haven : Yale University
- Janko, Lozar. 2014. *Kierkegaard, Heidegger And Us Moderns*. Ljubljana : University of Ljubljana
- Kai, Nielsen. 1964. *Ethics Without Religion*. Ohio : Ohio University Review
- Lacewing, Michael. *Nietzsche's Perspectivism*. Abingdon : Routledge
- Langford, Carol. 'God is Dead', *The Philosophy of Friedrich Nietzsche*.
<https://rsmatters.files.wordpress.com/2012/06/god-is-dead-nietzsche-dialogue-16.pdf>
- Marc, Hauser & Peter, Singer. 2005. *Morality Without Religion*. Project Syndicate

- Pojman, Louis. 1990. *Kierkegaard On Faith and Freedom*. International Journal for Philosophy of Religion
- Satre, Jean-Paul. 1946. *Man Makes Himself*. Public Lecture
- Spade, Paul-Vincent. 1995. *Sartre's Being And Nothingness*. Bloomington : Indiana University
- Tietz. 2001. *An Outline and Study Guide to Martin Heidegger's Being and Time*. Frankfurt am Main : Humanities Online
- Turkmen, Gulsah Namsali. 2013. *Heidegger on the Claim of the Phenomenon: Logos and Being*. Ankara : Middle East Technical University
- Tuusvori, Jarkko. 2000. *Nietzsche and Nihilism*. Helsinki : University of Helsinki
- Wrisley, George. 2016. *Nietzsche and The Value of Suffering*. Dahlonga : University of North Georgia
- Zhok, Andrea. 2012. *The Ontological Status of Essences in Husserl's Thought, New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy*. Milan : University of Milan
- Schmid, Alex. 2004. *Terrorism - The Definitional Problem*. 36 Case W. Res. J. Int'l L, 2004
- Patterson, Edwin W. 1952. *Hans Kelsen and His Pure Theory of Law*, California : California Law Review, 1952
- Fishkin, James. 2010. *Making Deliberative Democracy Practical : Public Consultation and Dispute Resolution*. Ohio : Ohio State University
- Habermas, Jurgen. 1994. *Three Normative Models of Democracy*, Oxford : Blackwell Publishers
- Cooper, Terry L. 2010., *Building Ethical Community*. SAGE